

p-ISSN 2089-0338
e-ISSN 2502-7921

Vol. 10 No. 01 (2020)

SOSIO KONSEPSIA

Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial



Nomor : 21/E/KPT/2018



Diterbitkan oleh :
Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial
Kementerian Sosial RI

Vol 10, No 1 (2020)

SOSIO KONSEPSIA

Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial

Sebuah Jurnal yang menyajikan Karya Tulis Ilmiah dalam bentuk hasil penelitian bidang kesejahteraan sosial yang meliputi Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial, Penanganan Fakir Miskin, Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial. Terbit setahun tiga kali periode April, Agustus, dan Desember. SOSIO KONSEPSIA: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial mulai terbit Vol 1 No. 1 September - Desember 2011, merupakan kelanjutan dari "Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial" yang terbit pertama kali Vol 1 No. 1 Januari 1995 sampai dengan Vol 16 No. 2 Mei - Agustus 2011. Terhitung mulai edisi Vol 5 No.2 Januari - April 2016 menggunakan Open Journal System (OJS). Penulis yang akan mengajukan naskahnya untuk dimuat di jurnal ini harus melakukan pengiriman naskah melalui Open Journal System (OJS). Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Penguanan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 21/E/KPT/2018 Tanggal 9 Juli 2018 Tentang Hasil Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode I tahun 2018 ditetapkan sebagai Jurnal Ilmiah **Terakreditasi Peringkat 2** (Volume 6 Nomor 1 tahun 2016 sampai Volume 10 Nomor 1 tahun 2020).

Alamat :

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial
Gd. Cawang Kencana Lt. 2 Gd. Jl. Mayjen Sutoyo Kav. 22, Rt.07 Rw. 07 Kec. Kramat Jati, Kota Jakarta Timur 13630

Surat elektronik: puslitbangkesos@kemsos.go.id

Laman: <http://puslit.kemsos.go.id>

e-mail : sosiokonsepsia@gmail.com

e-journal: <http://ejurnal.kemsos.go.id/index.php/sosiokonsepsia>

Editorial Team

Pembina

Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI

Penanggungjawab

Kepala Bidang Penelitian Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial

Manajer Jurnal

Nyi R Irmayani, SH, M.Si, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Indonesia.

Pimpinan Editor

Dr. Hari Harjanto Setiawan, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Indonesia

Editor Bagian

Drs. Setyo Sumarno, M.Si, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Indonesia

Badrus Susantyo, Ph.D, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Indonesia

Drs. B. Mujiyadi, M.SW, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Indonesia

Lasarus Jehamat, S.Sos, MA, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana Kupang, Indonesia

Drs. Muhtar, M.Si, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Indonesia

Sugiyanto, S.Pd, M.Si, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Indonesia

Habibullah, S.Sos. M.Kesos, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Indonesia

Nyi R Irmayani, SH, M.Si, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Indonesia

Mitra Bebestari

Prof. Adi Fahrudin, Ph.D, (Scopus ID; 35261484600), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhamadiyah Jakarta, Indonesia.

Prof. Isbandi Rukminto Adi, Ph.D, (Scopus ID; 57210976685), Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Indonesia.

Prof. Irwanto, Ph.D, (Scopus ID; 7409586829), Fakultas Psikologi, Universitas Katolik Atmajaya, Jakarta, Indonesia.

Prof. Dr. Bambang Shergi Laksmono, M.Sc, (Scopus ID; 25823852000), Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Indonesia.

Agus Fanar Syukri, Ph.D, (Scopus ID; 56516912500), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Jakarta, Indonesia.

Binayahati Rusyidi, Ph.D, (Scopus ID; 55778489900), Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Univesitas Padjajaran, Bandung, Indonesia.

Dr. Bambang Rudito, (Scopus ID; 36632972600), Sekolah Bisnis dan Manajemen, Institut Teknologi Bandung, Indonesia.

Dr. Chazali Situmorang, Kebijakan Publik, Universitas Nasional, Jakarta, Indonesia

Dr. Santoso Tri Raharjo, Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Univesitas Padjajaran, Bandung, Indonesia

Dr. Makmur Sunusi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhamadiyah Jakarta, Indonesia.

Dra. Eva Rahmi Kasim, MDS, Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Kementerian Sosial RI, Jakarta, Indonesia.

Daftar isi

Keberhasilan PKH Ditinjau Dalam Kaitannya Dengan Keterampilan Pendamping Dan Partisipasi KPM: Studi Di Sijunjung Sumatera Barat <i>Tryas Wardani Nurwan dan Helmi Hasan</i>	1 - 13
Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Provinsi Jawa Tengah <i>Arif Sofianto</i>	14 - 31
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Peningkatan Kemandirian Penerima Manfaat Program Kotaku dan Dompet Dhuafa <i>Muhtadi, Aida Vitayala S Hubeis, Pudji Muljono dan Ninuk Purnaningsih</i>	31 -44
Peran Pendamping Program Keluarga Harapan Dalam Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Di Kabupaten Magetan <i>Muhtar</i>	45 -54
Fenomena Rentenir: Studi Eksploratori di Kabupaten Bekasi dan Sekitarnya <i>Anwar Sitepu</i>	55 - 73
Komunikasi Dalam Keluarga dan Asertifitas Remaja Penyalahguna Narkoba <i>Uswatun Hasanah, Irfani Arista dan Mirdat Silitonga</i>	74 - 83
Konformitas Pada Pelaku Agresi Geng Motor Dalam Perspektif Psikologi Kelompok : Studi Kasus Di Kota Cirebon <i>Togiaratua Nainggolan</i>	84 -96

Pengantar Redaksi

Jurnal Sosio Konsepsia adalah forum untuk publikasi, desiminasi dan perdebatan ide-ide dari hasil penelitian kesejahteraan sosial. Jurnal ini bertujuan untuk memajukan pemahaman teori, membentuk kebijakan, dan menginformasikan praktik penanganan permasalahan kesejahteraan. Jurnal ini diterbitkan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial tiga kali dalam setahun yaitu bulan April, Agustus dan Desember. Jurnal Sosio Konsepsia terakreditasi Peringkat 2 oleh Kemenristek Dikti No 21/E/KPT/2018. Pada Volume 10, No. 01, September – Desember 2020 menyoroti tentang Program Keluarga Harapan(PKH).

Tulisan Tryas Wardani Nurwan dan Helmi Hasan tentang “Keberhasilan PKH Ditinjau Dalam Kaitannya Dengan Keterampilan Pendamping Dan Partisipasi KPM: Studi Di Sijunjung Sumatera Barat”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui keberhasilan Program Keluarga Harapan (PKH) di Nagari Pematang Panjang, Kecamatan Sijunjung, Sumatera Barat dengan melihat bagaimana keberhasilan PKH ini dipengaruhi oleh keterampilan pendamping dalam P2K2 dan partisipasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Temuan dari penelitian ini adalah semakin tinggi keterampilan pendamping dan tingkat partisipasi peserta, maka akan semakin maksimal pencapaian tujuan PKH.

Arif Sofianto meneliti tentang “Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Provinsi Jawa Tengah”. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mendeskripsikan implementasi PKH di Jawa Tengah; 2) Menganalisis sikap masyarakat terhadap pelaksanaan PKH di Jawa Tengah; 3) Merumuskan konsep pembaharuan PKH yang diinginkan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program PKH di Jawa Tengah dari aspek prosedur dan manajerial secara umum mendapat tanggapan positif, dimana 74,65 persen responden menyatakan adanya kemudahan program, 81,30 persen menyatakan pengelolaan sudah baik, dan 71,72 persen menyatakan adanya manfaat nyata dari PKH.

Muhtadi, Aida Vitayala S Hubeis, Pudji Muljono dan Ninuk Purnaningsih melakukan penelitian tentang “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Peningkatan Kemandirian Penerima Manfaat Program Kotaku dan Dompet Dhuafa”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh faktor eksternal dan mekanisme program terhadap efektivitas pemberdayaan ekonomi produktif dan tingkat kemandirian penerima manfaat program yang ada di wilayah Provinsi Jawa Barat.

Muhtar meneliti tentang “Peran Pendamping Program Keluarga Harapan Dalam Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Di Kabupaten Magetan”. Hasil kajian menunjukkan bahwa , pendamping Program Keluarga Harapan di Kabupaten magetan berperan aktif dalam proses pelaksanaan perbaikan rumah tidak layak huni, sejak pengusulan hingga selesainya pelaksanaan perbaikan rumah. Hasil kajian merekomendasikan, pendamping perbaikan rumah tidak layak huni di Kabupaten Magetan oleh pendamping Program Keluarga Harapan merupakan sebuah terobosan, dan sekaligus sebagai implementasi kebijakan pemerintah komplementaritas program penerima bantuan sosial.

Anwar Sitepu meneliti tentang “Fenomena Rentenir: Studi Eksploratori di Kabupaten Bekasi dan Sekitarnya”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rentenir eksis di wilayah desa dimaksud, dan sekitarnya, bahkan di wilayah yang lebih luas. Rentenir juga sudah beroperasi secara on line, sering disebut fintech (*financial technology*). Rentenir on line tampak jauh lebih merugikan pengguna, tidak hanya secara finansial tetapi juga secara sosial dan psikologis. Pemerintah pusat maupun daerah menyadari bahaya rentenir dan sudah melakukan upaya pencegahan, meskipun belum cukup signifikan. Secara keseluruhan temuan ini menunjukkan bahwa diperlukan kehadiran lembaga pinjaman yang dapat melayani dengan mudah dan cepat.

Uswatun Hasanah, Irfani Arista dan Mirdat Silitonga meneliti tentang "Komunikasi Dalam Keluarga dan Asertifitas Remaja Penyalahguna Narkoba" Penyalahgunaan narkoba merupakan permasalahan yang cukup serius dan dalam penanganannya melibatkan berbagai pihak, khususnya keluarga. Berdasarkan temuan pada penelitian ini orangtua harus menjaga relasi dan komunikasi yang baik dengan anggota keluarga, khususnya anak, dengan cara memiliki waktu yang berkualitas bersama anak, menyediakan waktu mendengarkan cerita dan atau keluhan anak, khususnya remaja penyalahguna narkoba.

Togiaratua Nainggolan meneliti tentang Konformitas Pada Pelaku Agresi Geng Motor Dalam Perspektif Psikologi Kelompok: Studi Kasus Di Kota Cirebon. Hasil penelitian menunjukkan konformitas pada pelaku agresi geng motor di Cirebon terjadi dalam bentuk *compliance* dan *obedience*. Konformitas bentuk *compliance* dilakukan secara terbuka sehingga terlihat oleh umum di internal geng (*accept*) walaupun hatinya tidak setuju, agar ia diterima dalam geng. Sedangkan konformitas dalam bentuk *obedience* dilakukan terhadap perintah pimpinan geng sebagai figur otoritas. Dinamika konformitas diawali dengan munculnya tekanan sosial menjadi variabel input yang memicu munculnya agresi yang berinteraksi dengan variabel input lainnya. Untuk itu, anggota geng motor harus disadarkan atas pengaruh tekanan sosial (*social pressure*) sehingga mampu menolak untuk *conform*.

Semoga artikel tersebut dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat, baik bagi praktisi maupun akademisi yang mengkaji permasalahan ini. Kami menyadari bahwa terbitan kali ini masih jauh dari sempurna, sesuai dengan pepatah "tidak ada gading yang tidak retak". Oleh karena itu, kami berharap masukan yang bersifat konstruktif dari pembaca guna perbaikan selanjutnya. Kepada semua pihak yang terlibat dalam terwujudnya terbitan jurnal ini, kami menyampaikan terima kasih.

Jakarta, Desember 2020
Redaksi



Keberhasilan PKH Ditinjau Dalam Kaitannya Dengan Keterampilan Pendamping Dan Partisipasi KPM: Studi Di Sijunjung Sumatera Barat

Tryas Wardani Nurwan ^{1*} dan Helmi Hasan ¹

¹ Magister Administrasi Publik, Universitas Negeri Padang, Jln. Prof Dr. Hamka, Air Tawar Barat, Kota Padang, Sumatera Barat

* Korespondensi: tryaswardani@gmail.com; Telp: +62-8137-49631-85

Diterima: 29 Juni 2020; Disetujui: 23 Nopember 2020; Diterbitkan: 28 Desember 2020

Abstrak: Tujuan penelitian ini untuk mengetahui keberhasilan Program Keluarga Harapan (PKH) di Nagari Pematang Panjang, Kecamatan Sijunjung, Sumatera Barat dengan melihat bagaimana keberhasilan PKH ini dipengaruhi oleh keterampilan pendamping dalam P2K2 dan partisipasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Metode yang digunakan menggunakan metode kuantitatif dengan angket berskala Likert. Berdasarkan rumus Slovin, responden dalam penelitian ini adalah sebanyak 131 dari total 194 KPM (Keluarga Penerima Manfaat) PKH di Nagari Pematang Panjang. Indikator variabel keberhasilan PKH sebagai variabel terikat adalah tercukupinya kebutuhan pangan, mampu memenuhi kebutuhan pokok, meningkatnya pendapatan, turunnya beban pengeluaran, kemudahan akses pendidikan dan akses kesehatan, sadar pendidikan dan sadar kesehatan. Indikator variabel keterampilan pendamping sebagai variabel bebas (X1) adalah keterampilan membangkitkan kesadaran masyarakat, menyampaikan informasi, membagi pengetahuan dan pengalaman, melakukan presentasi verbal. Indikator partisipasi KPM (X2) adalah partisipasi dalam tahap pelaksanaan dan partisipasi dalam tahap pengambilan manfaat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterampilan pendamping berpengaruh positif terhadap keberhasilan PKH yakni sebesar 23.8%. Partisipasi KPM berpengaruh sebesar 24.6% dengan taraf signifikansi sebesar 0.00 sehingga dapat disimpulkan partisipasi KPM berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan PKH. Terakhir, keterampilan pendamping berpengaruh sebesar 18.7 % terhadap partisipasi KPM dengan taraf signifikansi yakni 0.00. Kesimpulan bahwa semakin tinggi keterampilan pendamping dan tingkat partisipasi peserta, maka akan semakin maksimal pencapaian tujuan PKH. Saran penelitian ini perlu adanya upaya peningkatan keterampilan pendamping terutama dalam pemberdayaan ekonomi dan meningkatkan motivasi KPM untuk berpartisipasi sehingga pada akhirnya berpengaruh positif terhadap keberhasilan PKH.

Kata kunci: Keberhasilan PKH, Keterampilan Pendamping, Partisipasi

Abstract: The purpose of this study was to determine the success of the Program Keluarga Harapan (PKH) in Nagari Pematang Panjang, Sijunjung District, West Sumatra by seeing how the success of PKH was influenced by the facilitator's skill and the participation of Beneficiary Families (KPM). This study uses quantitative method with a questionnaire. Based on Slovin's theory, responden in this study were 131 of the 194 KPM PKH in Nagari Pematang Panjang. The indicator of succesfull of PKH variable as a dependet variable (Y) are fulfillment of food needs,able to meet basic needs, increasing income, decreasing of expenditure, easy acces to education and health acces, aducation and health awareness. While the indicator of facilitator's skill consists of raising public awareness, sharing knowledge and experience, verbal presentation. KPM indicator as second independent variabel (X2) are participation in the implementation phase and participation in the taking benefit. The results showed that facilitator's skills had a positive effect on the success of PKH, are 23.8%. KPM participation has an effect of 24.6% with a significance level of 0.00, so it can be concluded that KPM participation has a significant effect on the success of PKH. Last, facilitator's skill has an effect of 18.7% on KPM participation with a significance level of 0.00. It can be concluded that the higher the facilitator's skills and the level of KPM participation, the more maximum PKH goals will be achieved. Recommendation is necessary to improve the skills of assistants, especially in economic empowerment and increase the motivation of KPM to participate so that and ultimately have a positive effect on the success of PKH.

Keywords: Succesfull PKH, Facilitator's sikll, participation KPM

<https://ejournal.kemsos.go.id/index.php/SosioKonsepsia/article/view/2035>

DOI : 10.33007/ska.v10i1.2035

1. Pendahuluan

Pembangunan manusia merupakan suatu upaya yang harus dilakukan dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat karena manusia yang berkualitas merupakan salah satu indikator kemajuan bangsa. Di Indonesia, pembangunan manusia merupakan usaha yang sudah digagas sejak lama dalam bentuk berbagai program pembangunan manusia.

Pembangunan merupakan proses multidimensi yang menyangkut perubahan-perubahan penting dalam suatu struktur, sistem sosial ekonomi, sikap masyarakat dan lembaga-lembaga nasional dan akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kesenjangan (*inequality*) dan pemberantasan kemiskinan absolut. Pengertian tersebut mengisyaratkan bahwa pembangunan berarti proses menuju perubahan-perubahan yang dimaksud untuk memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat yang mencakup kualitas masyarakat itu sendiri. Konsep ini memberikan implikasi bahwa a) pembangunan bukan hanya diarahkan untuk peningkatan *income*, tetapi juga pemerataan, b) pembangunan juga harus memperhatikan aspek kemanusaan seperti peningkatan (*life sustenance*: kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, *self esteem*: kemampuan untuk menjadi orang yang utuh yang memiliki harga diri, bernilai, dan tidak diisap orang lain dan *freedom from servitude*: kemampuan untuk melakukan berbagai pilihan dalam hidup yang selanjutnya tidak merugikan orang lain) (Todaro dalam Hajar S, 2018).

Salah satu masalah terbesar yang dihadapi Indonesia terkait dengan pembangunan manusia adalah kemiskinan. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk miskin hingga September 2018 sebesar 25,67 juta orang atau jika dipresentasekan adalah sebesar 9,66 persen. Angka ini mengalami penurunan sebesar 0,16 persen jika dibanding dengan data pada bulan Maret 2018. Menurut data dari BPS, pada tahun 2018 angka kemiskinan di daerah pedesaan relatif lebih tinggi dibandingkan kemiskinan yang terjadi di wilayah perkotaan.

Ditinjau dari segi *poverty profile* (bentuk-bentuk persoalan kemiskinan masyarakat), kemiskinan bukan hanya tentang persoalan kesejahteraan (*welfare*) semata; tetapi kemiskinan juga menyangkut persoalan kerentanan (*vulnerability*), ketidakberdayaan (*powerless*), tertutupnya akses terhadap pasar, dan kemiskinan yang terefleksi dalam budaya kemiskinan yang diwarisi dari satu generasi ke generasi berikutnya. (Tjokorowinoto dalam Sulistiyan, 2004).

Pemerintah mempunyai peranan dan kewajiban dalam penanggulangan dan pengurangan angka kemiskinan di Indonesia. Pembangunan semestinya memperkuat fungsi keluarga sebagai lembaga masyarakat demi menjadi keluarga yang berketahanan sosial, salah satunya dengan program perlindungan sosial terhadap kelompok rentan dan penyandang masalah sosial. Karenanya beberapa program kesejahteraan yang dicanangkan pemerintah berfungsi untuk memperkuat ketahanan keluarga (Tumanggor, 2017).

Sebagai langkah untuk mempercepat penanggulangan dan pengurangan kemiskinan di Indoensia, Pemerintah Indonesia telah melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH) sejak tahun 2007. Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH. PKH diadopsi dari Program CCT (*Conditional Cash Tranfer*) yang terlebih dahulu dijalankan pada negara Amerika Latin seperti Kolombia, Argentina, Ekuador, Meksiko, Brasil, Honduras dan Nikaragua dan terbukti dapat meningkatkan status kesehatan, meningkatkan angka partisipasi sekolah dan mengurangi kemiskinan (Zavakou, 2011).

Dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018, PKH bertujuan untuk: 1) meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial, 2) mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan, 3) menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian KPM (Keluarga Penerima Manfaat) dalam mengakses layanan dan fasilitas kesehatan dan fasilitas pendidikan serta layanan kesejahteraan sosial, 4) mengurangi kesenjangan serta kemiskinan.

Tryas Wardani Nurwan dan Helmi Hasan

*Keberhasilan PKH Ditinjau Dalam Kaitannya Dengan Keterampilan Pendamping Dan Partisipasi KPM:
Studi Di Sijunjung Sumatera Barat*

Ada tujuh kriteria komponen Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang menjadi target KPM PKH. Tujuh komponen tersebut adalah ibu hamil, anak usia dini, anak yang bersekolah di tingkat SD dan sederajat, anak yang bersekolah di tingkat SMP dan sederajat, anak yang bersekolah di tingkat SMA dan sederajat, disabilitas berat, dan lanjut usia. Dari tujuh komponen tersebut, bantuan maksimal diberikan untuk 4 jiwa dalam satu keluarga dan diberikan secara bertahap sekali dalam tiga bulan (<https://pkh.kemsos.go.id>). Berikut adalah jumlah bantuan menurut komponen:

Tabel 1. Besar Bantuan Berdasarkan Jenis Komponen Dalam PKH

Jenis Komponen	Besar Bantuan (dalam Rp)
Ibu hamil	2.400.000
Anak usia dini	2.400.000
SD	900.000
SMP	1.500.000
SMA	2.000.000
Disabilitas Berat	2.400.000
Lanjut Usia	2.400.000

Sumber (<https://kemsos.go.id>, 2020)

Sumatera Barat menjadi salah satu provinsi yang diputuskan sebagai daerah penerima manfaat PKH pada tahun 2007, dimana merupakan tahun awal dimulainya program ini. Sampai dengan tahun 2018, tercatat KPM PKH mencapai 195.623 KK dengan anggaran 369.727 miliar rupiah (www.sumbarprov.go.id). Pada September 2018, jumlah penduduk miskin di Sumatera Barat mencapai 353,24 ribu orang (6.55%). Angka ini berkang sebesar 3,89 ribu orang dibandingkan dengan kondisi Maret 2018 yang sebesar 357,13 ribu orang (6.65%) (BPS, 2018). Adanya penurunan angka ini berarti secara tidak langsung menunjukkan bahwa PKH mampu menurunkan angka kemiskinan di Sumatera Barat.

Kecamatan Sijunjung adalah kecamatan yang terletak di Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, dimana angka penduduk miskin mencapai angka 16.55 ribu orang pada tahun 2018 (<https://sijunjungkab.bps.go.id/>). Untuk KPM PKH, menurut data dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sijunjung, pada tahun 2019 mencapai angka 1256 KK. Khusus untuk di Nagari Pematang Panjang, KPM PKH mencapai 193 KK dan terbagi dalam 3 angkatan penerima yakni KPM pada kohor 2012, 2016, dan tahun 2018.

Dalam memaksimalkan tujuan PKH di lapangan, terdapat pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) atau *Family Development Session* (FDS). KPM secara berkelompok melakukan pertemuan secara berkala bersama pendamping PKH yang ditunjuk langsung oleh Dinas Sosial di Kabupaten terkait. Pendamping PKH dapat dikategorikan sebagai pendamping sosial karena berperan sebagai fasilitator.

Dilaksanakannya P2K2 sebagai FDS bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan Peserta PKH tentang pentingnya kesehatan dan pendidikan dalam rangka memperbaiki kualitas hidup anggota keluarga di masa depan. Dengan demikian, pemenuhan kewajiban P2K2 oleh Peserta PKH tidak semata pemenuhan kewajiban sebagai penerima PKH, namun juga karena adanya kesadaran penerimaan manfaat yang diterima baik manfaat dalam bidang pendidikan dan manfaat dalam bidang kesehatan bagi anak dalam keluarga Peserta PKH (Modul 8 P2K2 PKH).

Menurut data yang diperoleh dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Sijunjung, Graduasi terbesar berada di Kecamatan Sijunjung dengan angka 186 KPM dan graduasi mandiri sebanyak 12 KPM selama tahun 2019. Angka graduasi yang lebih tinggi dibanding kecamatan lain yang ada di Kabupaten Sijunjung ini merupakan indikasi bahwa KPM di Kecamatan Sijunjung telah mandiri. Artinya ditinjau dari segi kemandirian secara ekonomi, Kecamatan Sijunjung dapat dikatakan berhasil dibanding Kecamatan lainnya di Kabupaten Sijunjung.

Tryas Wardani Nurwan dan Helmi Hasan

*Keberhasilan PKH Ditinjau Dalam Kaitannya Dengan Keterampilan Pendamping Dan Partisipasi KPM:
Studi Di Sijunjung Sumatera Barat*

Graduasi secara mandiri tentu menjadi harapan bagi pendamping dan Dinas Sosial karena angka graduasi yang tinggi menjadi tolak ukur keberhasilan PKH. Namun keberhasilan PKH juga dapat dinilai dari ketepatan sasaran belanja dana PKH oleh KPM. Dari penelitian di lapangan, beberapa KPM mengatakan bahwa dana pendidikan digunakan untuk membayar iuran sekolah, membeli buku paket pelajaran sekolah dan membeli perlengkapan sekolah lainnya seperti tas, sepatu dan buku tulis. Seorang ibu mengatakan bahwa ketika siangnya menerima dana PKH, agar tidak dibelanjakan untuk kebutuhan lainnya, besoknya langsung dibelanjakan untuk kebutuhan sekolah dan membayar iuran SPP.

Hal yang berbeda terjadi pada salah seorang KPM lainnya. Karena menerima dana KPM dalam jumlah yang lumayan banyak, KPM tersebut mengalokasikan dana untuk hal di luar peruntukan PKH seperti membeli peralatan elektronik dan memperbaiki rumah sehingga dana yang seharusnya disimpan untuk keperluan pendidikan tidak dapat dialokasikan secara tepat. Permasalahannya muncul di akhir semester ketika anak tidak bisa menerima raport hasil belajar karena masih terdapat utang di sekolah yang harus segera dilunasi.

Pendampingan sosial merupakan suatu strategi yang sangat menentukan dalam pencapaian keberhasilan program pemberdayaan masyarakat sesuai dengan prinsip pekerjaan sosial yang seringkali diwujudkan dalam kapasitasnya sebagai pendamping, bukan sebagai penyempuh atau pemecah masalah (*problem solver*) secara langsung (Suharto, 2006). Sejalan dengan hal ini tentu aktor dalam pendampingan yakni pendamping mempunyai peran yang penting dan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan PKH. Dalam penelitian yang dilakukan pada Januari 2020, ditemukan kehadiran satu orang pendamping yang masih rendah. Hal ini berdampak pada kualitas P2K2 dimana KPM datang sekadar menandatangani daftar absen dan kemudian pulang. Selain dikarenakan kesibukan pendamping di tempat lain, alasan lainnya karena kelompok ini telah lama mendapatkan pendampingan sehingga materi P2K2 telah tuntas disampaikan.

Kendala pendampingan lainnya adalah banyaknya jumlah kelompok KPM yang menjadi tanggung jawab pendamping sehingga membuat proses pendampingan kurang maksimal. Pada survey yang dilakukan penulis, pendamping terburu-buru menyelesaikan pendampingan karena mengejar pertemuan berikutnya yang jaraknya berjauhan. Karena jarak yang jauh, pendamping mengatakan bahwa beberapa kali proses pendampingan tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal. Kendala jarak dan waktu ini tentu berpengaruh terhadap kualitas P2K2.

Keberhasilan PKH dapat ditinjau dari tercapainya tujuan PKH. salah satu cara mengukur keberhasilan program pemberdayaan dapat dilihat dari tercapainya tujuan (Subhan, 2003). Dengan adanya dana bantuan secara berkala, maka PKH dapat meningkatkan taraf hidup KPM, mengurangi beban pengeluaran keluarga dan meningkatkan pendapatan KPM, terciptanya kemandirian KPM dalam mengakses layanan kesehatan dan layanan pendidikan.

Program Keluarga Harapan hendaknya mendapatkan suatu analisis sehingga dapat menjadi tolak ukur bagaimana keberhasilan dalam implementasi PKH. Terkait dengan penelitian ini, analisis yang diperlukan adalah analisis tentang pengaruh keterampilan pendamping dan partisipasi peserta terhadap keberhasilan PKH. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka didapatkan rumusan masalah yakni: 1) Bagaimana pengaruh keterampilan pendamping terhadap keberhasilan PKH di Nagari Pematang Panjang? 2) Bagaimana pengaruh peranan peserta terhadap keberhasilan PKH di Nagari Pematang Panjang? 3) Bagaimana pengaruh keterampilan pendamping terhadap partisipasi peserta PKH di Nagari Pematang Panjang?.

Hasil penelitian terdahulu dalam penelitian ini merujuk kepada: ditemukan pengaruh positif dan signifikan peranan pendamping terhadap keberhasilan program Simantri di Kabupaten Badung (Aryana, 2016). Peranan pendamping bidan desa yang berpengaruh positif terhadap pengembangan Desa Siaga di Kabupaten Blitar (Subagyo, 2008). Sementara semakin tinggi persepsi masyarakat akan kebutuhannya dengan tingkat kemampuan pendamping maka semakin tinggi pula partisipasi masyarakat (Krisdayanti, 2016). Kompetensi pendamping berpengaruh positif terhadap partisipasi KPM (Umri, 2017). Pada variabel partisipasi dan pengaruhnya terhadap keberhasilan program

Tryas Wardani Nurwan dan Helmi Hasan

Keberhasilan PKH Ditinjau Dalam Kaitannya Dengan Keterampilan Pendamping Dan Partisipasi KPM:
Studi Di Sijunjung Sumatera Barat

pemberdayaan, hasil penelitian menemukan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap tingkat keberhasilan proyek Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Kecamatan Gerokgak, Buleleng, Bali (Wulandari, 2014).

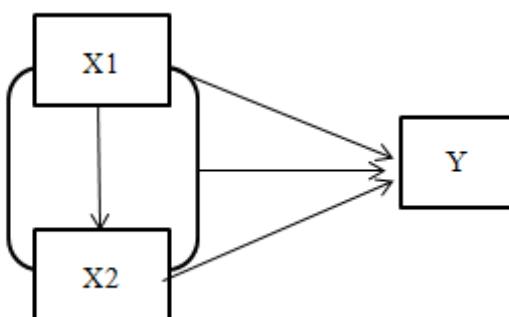
Manfaat penelitian ini secara teoritis adalah diharapkan bermanfaat untuk pengembangan keilmuan administrasi publik khususnya mengenai program pemberdayaan masyarakat. Sedangkan manfaat secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi Dinas Sosial, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sijunjung dalam menjalankan Program Keluarga Harapan di Nagari Pematang Panjang dan bagi pendamping, penelitian ini dapat memberi masukan serta informasi dalam melakukan kegiatan pendampingan P2K2 terhadap KPM.

2. Metode

Jenis penelitian ini termasuk ke dalam kategori penelitian kuantitatif dimana penelitian ini merupakan penelitian terhadap masalah-masalah yang berupa fakta-fakta saat ini dari suatu populasi yang diteliti (Sugiyono, 2016). Dalam penelitian yang menjadi indikator keberhasilan PKH mengacu kepada tujuan PKH yang tercantum dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018. Dengan demikian indikator keberhasilan PKH meliputi: Meningkatnya pendapatan, turunnya beban pengeluaran, kemudahan akses pendidikan dan akses kesehatan, sadar pendidikan dan sadar kesehatan.

Sedangkan indikator keterampilan pendamping adalah seperti yang dikemukakan oleh Ife (dalam Habibullah, 2011) dan menyesuaikan dengan tupoksi pendamping di lapangan yakni: keterampilan Pemberi dukungan, keterampilan fasilitasi kelompok, keterampilan membangkitkan kesadaran masyarakat, keterampilan menyampaikan informasi, keterampilan membagi pengetahuan dan pengalaman, keterampilan melakukan presentasi verbal.

Sedangkan indikator variabel partisipasi KPM adalah partisipasi dalam pase pelaksanaan dan partisipasi dalam pase pengambilan manfaat (Cohen dan Uphoff, 1977). Berikut adalah gambaran analisis dalam penelitian ini:



Gambar 1. Kerangka Berpikir Penelitian.

Berdasarkan gambar diatas, keterampilan pendamping sebagai variabel independent (X1) dan variabel partisipasi KPM sebagai variabel intervening (X2). Sedangkan variabel dependent adalah keberhasilan PKH (Y).

Berdasarkan rumus Slovin, penelitian ini melibatkan 131 dari 194 KPM dari di Nagari Pematang Panjang dimana semuanya diwakili oleh perempuan. KPM yang terdiri dari 3 angkatan tahun penerimaan (kohor). Berikut adalah populasi dan sampel dalam penelitian ini:

Tabel 1. Populasi dan Sampel Penelitian

Kohor	Populasi	Sampel
2012	51	35
2016	52	35
2018	91	61
Jumlah	194	131

Sumber : (Sekretariat PKH Kecamatan Sijunjung, 2019)

Pengumpulan data survey menggunakan angket untuk mengukur dukungan Keberhasilan PKH sebagai variabel dependent (Y) dan keterampilan pendamping dan partisipasi KPM sebagai variabel independent (X1) dan (X2). Angket disusun oleh peneliti dalam bentuk pertanyaan positif dan pertanyaan negatif berdasarkan teori dan konsep terkait. Penilaian variabel keberhasilan PKH, keterampilan pendamping, dan partisipasi KPM menggunakan 4 poin skala Likert menggunakan respon yakni tidak setuju (TS), kurang setuju (KS), setuju (S), sangat setuju (SS) dengan skala (1) sampai skala (4) (Imam Ghazali, 2013). Untuk mengukur tingkat kebaikan instrument yakni validitas dan reliabilitas, selanjutnya dilakukan uji coba instrumen. Validitas menunjukkan derajat ketepatan antara data yang sebenarnya terjadi pada objek dengan data yang dikumpulkan oleh peneliti melalui instrumen penelitian. Untuk mendapatkan validitas sebuah item pernyataan, peneliti mengkorelasikan skor item dengan total item-item tersebut dalam kuesioner penelitian. Syarat minimum sebuah pernyataan dianggap valid adalah nilai indeks validitasnya $\geq 0,3$ (Sugiyono, 2016).

Sedangkan Uji reliabilitas adalah sejauh mana hasil pengukuran dengan menggunakan objek yang sama akan menghasilkan data yang sama. Kuesioner yang *reliable* menyatakan bahwa suatu konstruk atau variabel dikatakan *reliable* jika nilai *Alpha Cronbach* nya lebih dari 0,7 (Sugiyono, 2016). Untuk pengujian validitas dan reliabilitas, maka peneliti menyebarkan angket kepada 30 sampel KPM PKH dan dianalisis dengan perhitungan komputasi program SPSS (*Statistical Program for Social Science*) versi 21. Dalam penelitian ini, pengujian hipotesis dilakukan dengan uji parsial (uji t) dan uji simultan (uji f) dengan SPSS 21. Uji t digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh antara variabel X dan Y secara terpisah, apakah variabel keterampilan pendamping sebagai variabel bebas X₁ dan variabel partisipasi peserta sebagai variabel bebas X₂ benar-benar berpengaruh terhadap variabel Keberhasilan PKH sebagai variabel Y secara individual dan apakah variabel X₁ berpengaruh terhadap variabel X₂. Sedangkan uji simultan (uji f) dilakukan untuk menguji apakah secara bersama variabel independen (variabel keterampilan pendamping dan variabel partisipasi peserta) mampu menjelaskan variabel dependen secara baik dan untuk menguji apakah model yang digunakan telah baik atau tidak. Hipotesis dalam penelitian ada 4 yakni:

H1 : terdapat pengaruh antara keterampilan pendamping terhadap keberhasilan PKH

H2 : terdapat pengaruh partisipasi KPM terhadap keberhasilan PKH

H3 : terdapat pengaruh keterampilan pendamping terhadap partisipasi KPM

H4 : terdapat pengaruh keterampilan pendamping dan partisipasi KPM terhadap keberhasilan PKH.

3. Hasil

Penelitian dilakukan di Nagari Pematang Panjang, Kecamatan Sijunjung, Sumatera Barat pada Desember 2019 sampai dengan Januari 2020. Responden terdiri dari 131 KPM dari total 194 KPM yang terdiri dari KPM kohor 2012, 2016, dan 2018. Penentuan jumlah sampel perkohor berdasarkan *stratified random sampling*. Berikut adalah tabel karakteristik responden berdasarkan usia, pendidikan dan jumlah tanggungan keluarga:

Tryas Wardani Nurwan dan Helmi Hasan

*Keberhasilan PKH Ditinjau Dalam Kaitannya Dengan Keterampilan Pendamping Dan Partisipasi KPM:
Studi Di Sijunjung Sumatera Barat*

Tabel 3. Karakteristik Responden

No	Karakteristik Responden	n	%
1	Usia		
	<30 thn	10	7.6
	30-39 thn	27	20.6
	40-49 thn	74	56.5
	≥ 50 thn	20	15.3
2	Pendidikan		
	Tidak tamat/Tamat SD	73	55.7
	SMP	38	29
	SMA	17	13
	PT	3	2.3
3	Tanggungan Keluarga		
	2-3 org	27	20.6
	3-6 org	95	72.6
	7-9 org	9	6.9

Dari 131 responden, responden berusia dibawah 30 tahun sebanyak 10 orang (7.6%). Sebanyak 27 responden (20.6%) berusia 30-39 tahun dan 74 responden (56.5%) berusia 39-49 tahun. Tingkat pendidikan formal responden sebagian besar (55.7%) tidak tamat SD/tamat SD. Kemudian sebanyak 38 responden (29%) responden tamat SMP/sederajat dan 17 responden (13%) tamat SMA/sederajat. Sisanya sebanyak 3 orang (2.3%) responden tamat perguruan tinggi yang umumnya berada pada level diploma I. Jumlah tanggungan keluarga responden sebagian besar berjumlah 4-6 orang sebanyak 95 responden (72.6%). Sisanya masing-masing sebanyak 27 responden (20.6%) dan 9 responden (6.9%) mempunyai tanggungan keluarga sebanyak 2-3 orang dan 7-9 orang. Variabel dalam penelitian adalah keterampilan pendamping, partisipasi peserta, dan keberhasilan PKH yang dinilai dengan skala 1 = tidak setuju, 2 = kurang setuju, 3 = setuju, dan 4 = sangat setuju. Berikut adalah rata-rata nilai pada masing-masing variabel:

3.1. Keterampilan Pendamping

Indikator yang dikur dalam variabel keterampilan pendamping adalah keterampilan melakukan presentasi verbal, keterampilan membagi pengetahuan dan pengalaman, keterampilan menyampaikan infomasi, keterampilan membangkitkan kesadaran dan keterampilan pemberi dukungan.

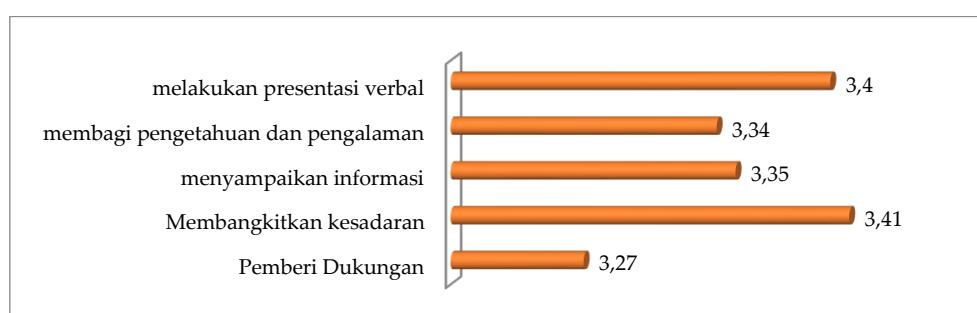
**Gambar 1.** Keterampilan pendamping.

Diagram diatas menunjukkan bahwa pendamping mempunyai keterampilan membangkitkan kesadaran dan melakukan presentasi verbal. Dalam P2K2, fasilitator diwajibkan menyampaikan materi yang ada dalam silabus disertai dengan alat peraga yang tersedia. Bagi KPM kohor 2012 dan 2016, materi yang ada dalam silabus telah selesai disampaikan fasilitator sehingga P2K2 kadang diisi dengan arisan dan belajar kerajinan serta kegiatan administrasi. Menurut wawancara dengan KPM, terkadang

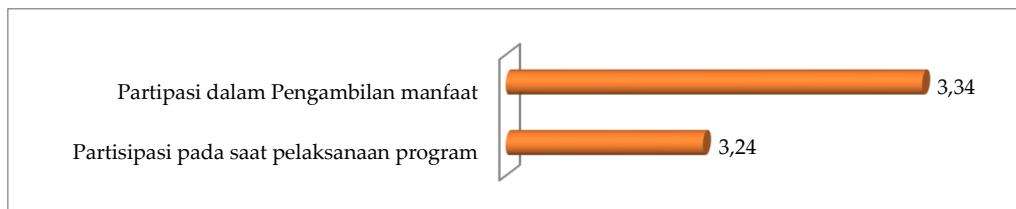
Tryas Wardani Nurwan dan Helmi Hasan

*Keberhasilan PKH Ditinjau Dalam Kaitannya Dengan Keterampilan Pendamping Dan Partisipasi KPM:
Studi Di Sijunjung Sumatera Barat*

karena materi yang telah selesai dan kesibukan, pendamping kadang tidak datang dalam P2K2. Namun penting yang perlu disampaikan kepada KPM, disampaikan oleh ketua kelompok.

3.2. Partisipasi Peserta

Partisipasi peserta diukur dengan dua indikator yakni partisipasi peserta pada saat pengambilan manfaat dan partisipasi pada saat pelaksanaan program atau pada saat P2K2.

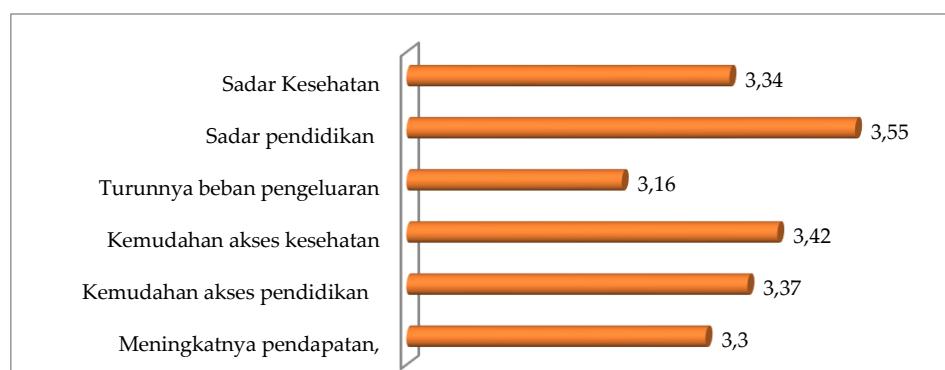


Gambar 1. Partisipasi Peserta.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa partisipasi dalam pengambilan manfaat lebih besar dibanding partisipasi pada saat pelaksanaan program. Partisipasi KPM pada saat pengambilan manfaat diukur dengan memanfaatkan fasilitas kesehatan bagi ibu hamil, fasilitas posyandu bagi balita dan fasilitas pendidikan bagi anggota keluarga yang sekolah. KPM yang hamil dan berkunjung ke posyandu didata oleh bidan dan berkoordinasi dengan fasilitator. Begitu juga dengan absensi siswa yang mendapat dana PKH. Dengan adanya aturan minimal kehadiran 85%, KPM harus memastikan anaknya berada di sekolah. Untuk partisipasi peserta pada saat pelaksanaan program atau pada saat P2K2, beberapa KPM mengaku terkadang belum dapat hadir karena jadwal pertemuan yang bertabrakan dengan kegiatan rutin di sawah dan di kebun atau lupa dan tidak tahu informasi dan tempat pertemuan. Untuk mengatasi rendahnya partisipasi KPM pada saat P2K2, peraturan PKH mewajibkan bahwa peserta yang tidak datang dalam pertemuan P2K2 maka wajib hadir ke pertemuan kelompok lain. Peraturan ini masih belum begitu ketat dilakukan.

3.3. Keberhasilan PKH

Indikator dalam pengukuran variabel keberhasilan PKH adalah sadar kesehatan, sadar pendidikan, turunnya beban pengeluaran, kemudahan akses kesehatan, kemudahan akses pendidikan, dan meningkatnya pendapatan. Indikator ini dikembangkan dari tujuan PKH menurut Permenses RI Nomor 1 Tahun 2018.



Gambar 1. Keberhasilan PKH.

Berdasarkan hasil penelitian, KPM sudah sadar pendidikan dan sadar kesehatan. Hal ini karena didukung dengan kemudahan akses pendidikan dan akses kesehatan yang diakses bagi KPM. Karena dana yang diterima terbatas untuk balita, ibu hamil dan dana sekolah, sebagian KPM masih kesulitan

memenuhi kebutuhan pokok karena alokasi dana yang tidak diperuntukkan untuk kebutuhan pokok. Namun sebagian KPM lainnya mengaku bahwa penghasilan yang semestinya digunakan untuk dana pendidikan anak, dapat dialihkan untuk memenuhi kebutuhan pokok selain kebutuhan yang didapat dari Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) berupa beras dan telur yang didapat secara berkala.

Secara operasional, PKH bukanlah program pemberdayaan ekonomi keluarga dalam rangka menanggulangi kemiskinan seutuhnya. Sebagai strategi penanggulangan kemiskinan, PKH tidak seutuhnya melakukan intervensi pada aspek makanan dan non makanan yang menjadi tolok ukur kemiskinan itu (Nainggolan & Susantyo, 2018). Namun dengan adanya P2K2 dapat mengubah pola pikir KPM kearah yang lebih baik dan lebih produktif sehingga terdapat usaha-usaha KPM dalam meningkatkan perekonomian rumah tangga mereka. Untuk meningkatkan pendapatan dan kemandirian ekonomi KPM, pendamping PKH di Pematang Panjang sebaiknya berinisiatif untuk mengajak KPM menambah penghasilan seperti pengolahan produk makanan yang diolah bersama dan dapat dijual. Selama ini kegiatan KPM yang bertujuan menambah pendapatan adalah berkebun sayur, namun pengolahannya belum maksimal sehingga banyak yang terbengkalai.

Penelitian ini membuktikan empat hipotesis dimana tiga hipotesis diuji melalui uji parsial dan satu hipotesis diuji dengan uji simultan. Tabel 4 dibawah ini merupakan hasil uji t dan uji f pada empat hipotesis dalam penelitian ini:

Tabel 4. Hasil Analisis Uji T Dan Uji F

Variabel yang diubungkan	Sig	R	RSquare	Adjusted R Square
X1 -> Y	.000	.488	.238	.232
X2 -> Y	.000	.496	.246	.240
X1 -> X2	.000	.443	.196	.190
X1,X2-> Y	.000	.579	.336	.325

Keterangan: X1 adalah keterampilan pendamping, X2 adalah Partisipasi Peserta dan Y adalah Keberhasilan PKH. Tanah panah menyatakan pengaruh antar variabel yang diuji.

4. Pembahasan

4.1. Pengaruh Keterampilan Pendamping Terhadap Keberhasilan PKH

Hipotesis pertama dalam penelitian ini yakni terdapat pengaruh positif dan signifikan variabel keterampilan pendamping terhadap keberhasilan PKH di Kenagarian Pematang Panjang. Berdasarkan hasil pengukuran hubungan antara variabel keterampilan pendamping terhadap keberhasilan PKH dengan SPSS dapat disimpulkan bahwa: Hubungan variabel keterampilan pendamping terhadap keberhasilan PKH diperoleh hasil positif dan signifikan. Hal ini ditunjukkan dengan tabel correlation dengan angka sig sebesar 0.000 persen dimana angka ini lebih kecil dari 0.05 (alpha 5%). Adanya pengaruh positif dan signifikan ini berarti bahwa semakin tinggi keterampilan pendamping PKH maka tingkat keberhasilan PKH juga akan semakin tinggi. Dan sebaliknya, jika keterampilan pendamping rendah, maka keberhasilan PKH juga akan rendah

Sedangkan nilai *standardized coefficient* didapat sebesar 0,488 yang berarti besarnya hubungan keterampilan pendamping terhadap keberhasilan PKH sebesar 0.488. Nilai R Square adalah nilai R yang dikuadratkan sehingga didapatkan hasil persentase kekuatan pengaruh keterampilan pendamping terhadap keberhasilan PKH adalah sebesar 23.8%. Ini berarti besarnya nilai variasi variabel Y yakni Keberhasilan PKH dapat dijelaskan oleh variabel X1 yakni keterampilan pendamping adalah sebesar 23.8%.

Nilai koefisien B adalah gambaran persamaan garis $Y=a+bX$. Nilai B pada variabel constant didapatkan sebesar 20.485 dan nilai B untuk variabel Keterampilan pendamping adalah sebesar 0.556 sehingga persamaan garis lurus yang didapat adalah: $Y= 20.485 + 0.556$.

4.2. Pengaruh Partisipasi Peserta Terhadap Keberhasilan PKH

Hipotesis selanjutnya dalam penelitian ini adalah terdapat pengaruh partisipasi peserta terhadap keberhasilan PKH. yang diukur adalah partisipasi dalam pengambilan manfaat dan partisipasi pada saat pelaksanaan program P2K2.

Berdasarkan hasil pengukuran hubungan antara variabel partisipasi positif variabel peserta dan keberhasilan PKH didapatkan nilai pada tabel *correlation* dengan nilai sig yakni 0.000. dimana angka ini lebih kecil dari 0.05 (alpha 5%) sehingga didapatkan kesimpulan bahwa hubungan kedua variabel yakni variabel partisipasi dan variabel keberhasilan PKH signifikan. Selain itu, nilai F hitung sebesar 42.110 dengan $p < 0,05$.

Berdasarkan tabel 3, nilai *standardized coefficient* atau nilai R adalah sebesar 0.496. Nilai ini menyatakan bahwa besarnya hubungan partisipasi peserta terhadap keberhasilan PKH sebesar 0.496. R Square menunjukkan besarnya variasi pada variabel keberhasilan PKH yang dijelaskan oleh partisipasi peserta sebesar 24.6% dan sisanya yakni 75.4% dijelaskan oleh variabel lainnya. Nilai B pada variabel constant sebesar 24.352 dan nilai B untuk variabel partisipasi peserta sebesar 0.749 sehingga persamaan garis lurusnya adalah $Y = 24.352 + 0.749$.

4.3. Pengaruh Keterampilan Pendamping Terhadap Partisipasi Peserta

Hipotesis ketiga adalah terdapat pengaruh keterampilan pendamping terhadap partisipasi peserta PKH. Berdasarkan hasil pengukuran dengan SPSS didapatkan nilai sig sebesar 0.000 sehingga didapatkan kesimpulan bahwa keterampilan pendamping berpengaruh positif terhadap partisipasi peserta dimana nilai sig pada tabel lebih kecil dari alpha 5% (0.05).

Nilai *standardized coefficient* atau nilai R adalah 0.443. Angka ini menunjukkan besarnya hubungan keterampilan pendamping terhadap partisipasi peserta sebesar 0.443. R Square menunjukkan besarnya variasi pada variabel Partisipasi Peserta yang dijelaskan oleh keterampilan pendamping sebesar 19.6% yang berarti pengaruh ini lemah.

Nilai B pada variabel constant sebesar 14.060 dan nilai B untuk variabel partisipasi peserta sebesar 0.334 sehingga persamaan garis lurusnya adalah $Y = 14.060 + 0.334$.

4.4. Pengaruh Keterampilan Pendamping dan Partisipasi Peserta Terhadap Keberhasilan PKH

Uji simultan (uji f) dilakukan bertujuan untuk menguji secara serentak (bersama) variabel keterampilan pendamping dan partisipasi sebagai variabel independen (eksogen) mampu menjelaskan variabel keberhasilan PKH sebagai variabel dependen (eksogen) secara baik untuk menguji apakah model yang digunakan telah baik atau belum. Uji simultan dilakukan bertujuan agar membuktikan apakah variabel independen yakni variabel keterampilan pendamping dan partisipasi peserta berpengaruh terhadap variabel dependen yakni variabel keberhasilan PKH secara bersama-sama (simultan). Uji F dilaksanakan dengan uji regresi berganda.

Hipotesis terakhir dalam penelitian ini adalah ada pengaruh secara simultan antara keterampilan pendamping dan partisipasi peserta terhadap keberhasilan PKH. Berdasarkan hasil uji, didapatkan nilai sig sebesar 0.000 dimana lebih kecil dari alpha 5% (0.05) sehingga didapatkan kesimpulan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara keterampilan pendamping dan partisipasi peserta secara bersama terhadap keberhasilan PKH.

Sedangkan angka *standardized coefficient* didapat sebesar 0,579. Ini berarti besarnya hubungan keterampilan pendamping dan partisipasi terhadap keberhasilan PKH sebesar 0.759. Nilai R Square adalah nilai R yang dikuadratkan sehingga didapatkan hasil persentase kekuatan pengaruh keterampilan pendamping terhadap keberhasilan PKH adalah sebesar 33.6%. Ini berarti besarnya nilai variasi variabel Y yakni Keberhasilan PKH dijelaskan oleh variabel Keterampilan Pendamping (X1) dan partisipasi peserta (X2) yakni sebesar 33.6%.

Nilai B pada variabel constant didapatkan sebesar 13.067. Sementara nilai B pada X1 sebesar 0.381 dan nilai B untuk X2 adalah 0.526 sehingga persamaan garis lurusnya adalah $Y = 13.067 + 0.381 + 0.526$. Berdasarkan hasil penelitian secara keseluruhan, yang paling berpengaruh terhadap keberhasilan PKH

Tryas Wardani Nurwan dan Helmi Hasan

*Keberhasilan PKH Ditinjau Dalam Kaitannya Dengan Keterampilan Pendamping Dan Partisipasi KPM:
Studi Di Sijunjung Sumatera Barat*

adalah partisipasi KPM dan kemudian diikuti oleh keterampilan pendamping walaupun perbedaan angka kedua variabel ini sangat kecil. Adanya kewajiban yang mengikat KPM untuk turut berpartisipasi dalam pelaksanaan membuat partisipasi secara langsung berpengaruh terhadap keberhasilan PKH. Temuan ini diperkuat dengan penelitian Apriliani (2017), dimana hasil penelitiannya mengatakan bahwa tingkat partisipasi masyarakat Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor berhubungan positif dengan efektivitas program *ecovillage*. Selain itu walaupun berada pada kategori lemah, namun keterampilan pendamping berpengaruh positif dalam mempengaruhi partisipasi KPM sehingga ketika keterampilan pendamping meningkat, maka partisipasi KPM akan berbanding lurus sehingga keberhasilan PKH dapat meningkat.

Merujuk pada hasil penelitian, semakin tinggi keterampilan pendamping, maka partisipasi juga akan berbanding lurus. Untuk itu diperlukan pendamping yang komunikatif, mampu menggerakkan serta mampu mengubah pola pikir KPM. Hal ini diperkuat dengan penelitian (Nainggolan & Susantyo, 2018) yang menyatakan bahwa yang harus ditekankan dan juga merupakan hal yang sangat penting yang dimiliki pendamping sejak awal program adalah kegigihan, keaktifan dan ketulusan melakukan dialog dengan RTSM. KPM perlu dipahami dan dihargai bahasanya, pengetahuan/pengertiannya, efektivitasnya, kebebasannya, historisitasnya dan sosialitasnya dalam raga KPM yang lebih partisipatif.

Hal yang sama juga dikemukakan dalam penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan program pemberdayaan perempuan desa Joho di Lereng Gunung Wilis yang mengemukakan bahwa jika pendampingan yang dilakukan pendamping akan menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam mencapai tujuan program pemberdayaan. Agar program pemberdayaan berhasil, maka faktor utama dalam pemberdayaan yakni pendampingan perlu dibenahi (Pratama, 2013).

Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan akan dapat terwujud sebagai suatu kejadian konkret apabila terpenuhinya faktor-faktor yang mendukungnya, yakni *pertama*, adanya kesempatan yang sama, dan *kedua*, adanya kemauan yakni adanya sesuatu yang mendorong dan menumbuhkan minat serta sikap masyarakat dalam program pemberdayaan untuk termotivasi dalam berpartisipasi, misalnya berupa manfaat yang dapat dirasakan langsung atas partisipasi yang diberikan tersebut. Faktor yang *ketiga*, adanya kemampuan yakni, adanya keyakinan dan kesadaran pada dirinya bahwa dia mempunyai kemampuan untuk berpartisipasi, baik berupa partisipasi dalam bentuk materi maupun dalam bentuk non materi seperti pikiran, tenaga, waktu, atau sarana dan material lainnya. Kesempatan lebih dipengaruhi oleh situasi atau lingkungan di luar diri pelaku. Sedangkan kemampuan atau kemauan merupakan potensi yang dimiliki oleh pelaku secara individu maupun kelompok. (Slamet dalam Girsang, 2003).

Terkait PKH, kesempatan untuk berpartisipasi tentu dimiliki oleh hampir semua KPM. Akan halnya kemauan dan kemampuan KPM terkait P2K2, kegiatan ini perlu memotivasi KPM untuk hadir sehingga KPM hadir bukan hanya memenuhi kewajiban yang mengikat namun pada keterikatan nilai yang didapat. Kemampuan dan kemauan dapat ditingkatkan melalui keterampilan pendamping karena fasilitator atau pendamping sosial disebut juga sebagai "agen perubahan" (*Agent of Change*) yakni individu yang bertugas atas nama pemerintah atau lembaga pemberdayaan masyarakat mempunyai kewajiban dalam mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh calon penerima manfaat dalam mengadopsi inovasi program yang telah diprogramkan. Karena itu pendamping masyarakat atau fasilitator harus profesional, yang berarti mempunyai kualifikasi yang baik dalam hal kepribadian, pengetahuan, sikap, dan keterampilan dalam memfasilitasi masyarakat program pemberdayaan masyarakat (Lippt dan Roger dalam Mardikanto dan Poerwoko, 2012).

Karena keterlibatan dan partisipasi KPM sangat penting dalam menentukan keberhasilan PKH, maka salah satu cara untuk menumbuhkan keterlibatan dan partisipasi KPM adalah dengan memperkuat peran dan keterampilan fasilitator. Pendamping program dalam suatu masyarakat dan komunitas sebaiknya menggunakan cara sebagai berikut :a) Tinggal dan hidup dalam lingkungan masyarakat yang hendak dikembangkan dimana program dijalankan. b) Menggunakan bahasa yang

biasa digunakan oleh masyarakat sehingga mudah dipahami masyarakat c) Tidak bersifat menggurui dalam kegiatan pendampingan d) Tidak menyampaikan janji-janji yang berlebihan kepada penerima manfaat program dan masyarakat. e) Senantiasa menyertakan diri dalam kegiatan sosial yang ada dimasyarakat seperti arisan, pengajian, bhakti sosial, gotong royong, kegiatan posyandu dan lain-lain (Djamal dkk, 1994).

5. Kesimpulan

Keterampilan pendamping yang meliputi keterampilan pemberi dukungan, keterampilan fasilitasi kelompok, keterampilan membangkitkan kesadaran masyarakat, keterampilan menyampaikan informasi, keterampilan membagi pengetahuan dan pengalaman, keterampilan melakukan presentasi verbal berpengaruh secara signifikan terhadap keberhasilan PKH. Meningkatnya keterampilan pendamping dapat pula meningkatkan keberhasilan PKH. Keterampilan pendamping juga dapat meningkatkan partisipasi KPM baik dalam proses penambilan manfaat maupun dalam proses keterlibatan dalam P2K2. Adanya pengaruh ini disebabkan pendamping berinteraksi dan berhubungan langsung dengan KPM sehingga lebih mengetahui dan mengerti kondisi KPM.

6. Saran

Dengan adanya pengaruh positif dan signifikan antara keterampilan pendamping dengan partisipasi dan keberhasilan PKH perlu adanya upaya peningkatan keterampilan pendamping yang difokuskan pada beberapa hal yakni meningkatkan keterampilan pemberi dukungan, meningkatkan keterampilan fasilitasi kelompok, meningkatkan keterampilan membangkitkan kesadaran masyarakat, meningkatkan keterampilan menyampaikan informasi, meningkatkan keterampilan membagi pengetahuan dan pengalaman, meningkatkan keterampilan presentasi verbal.

Upaya tersebut dapat berupa, 1) Mengadakan pelatihan untuk para pendamping secara rutin dan berkala sehingga kemampuan pendamping dapat bertambah, 2) memberikan keterampilan *life skill* untuk para pendamping sehingga apabila semua materi yang wajib telah disampaikan dalam P2K2, pendamping dapat membagi ilmu praktis ini kepada KPM sehingga berpengaruh terhadap peningkatan ekonomi peserta dan menurunkan beban pengeluaran yang pada akhirnya berpengaruh terhadap pencapaian tujuan PKH.

Ucapan terimakasih: Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sijunjung atas bantuan non materi. Terimakasih juga diucapkan kepada Pendamping PKH nagari Pematang Panjang. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu KPM PKH Nagari Pematang Panjang Kecamatan Sijunjung

Daftar Pustaka

- Apriliani, T. (2017). Partisipasi Masyarakat dan Modal Sosial dalam Ecovillage. *Studi Pustaka*.
- Aryana, A. A. N. B., Budhi, M. K. S., & Yuliarmi, N. N. (2016). Pengaruh karakteristik petani dan peran pendamping terhadap keberhasilan simantri di Kabupaten Badung. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*. Volume 5 (4). 689-720. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/EEB/article/view/15659>
- Badan Pusat Statistik Sumatera Barat, (2018). Profil Kemiskinan di Sumatera Barat September 2018. <https://sumbar.bps.go.id/>. Diakses tanggal 1 November 2019
- Cohen, J, M dan Uphoff, N.T. (1979). *Feasibility and Application of Rural Development Participation: A State of the Art Paper*.
- Djamal, C. (1994). *Panduan Tenaga Pendamping Lapangan (TPL) Perempuan*. Pusat Pengembangan Perempuan. Jakarta
- Ghozali, I., Karlina. (2016). *Teknik Penyusunan Skala Likert dalam Penelitian Akuntansi dan Bisnis*. 2016.
- Girsang, L. J., (2011). Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Perbaikan Prasarana Jalan (Kasus: Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Desa Megamendung, Bogor, Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor. Tersedia di <https://repository.ipb.ac.id>

Tryas Wardani Nurwan dan Helmi Hasan

Keberhasilan PKH Ditinjau Dalam Kaitannya Dengan Keterampilan Pendamping Dan Partisipasi KPM:
Studi Di Sijunjung Sumatera Barat

- Habibullah. (2011) Peran Pendamping Pada Program Keluarga Harapan Kabupaten Karawang. *Jurnal Informasi (Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial)*. Vol. 16 (2) 101-116.
- Hajar, S., Irwan, S., Yurisna, T., Zulfahmi. (2018). *Pemberdayaan dan partisipasi masyarakat Pesisir*. Medan: Lembaga Penelitian dan Penulisan Aqli
- Kementerian Sosial RI. (2018). Peraturan Menteri Sosial Tentang Program Keluarga Harapan. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Kementerian Sosial RI. Petunjuk Pelaksanaan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) Program Keluarga Harapan (Buku 8), Jakarta: Direktorat Jaminan Sosial Keluarga.
- Krisdayanti, F, F. (2016). Hubungan Peran Pendamping Dengan Partisipasi Peserta Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat. *studi pustaka*, 3(1).
- Mardikanto, T., & Soebiato, P. (2012). *Pemberdayaan masyarakat dalam perspektif kebijakan publik*. Alfabeta.
- Nainggolan, T, dkk, (2012). *Program Keluarga Miskin di Indonesia, Dampak Pada Rumah Tangga Sangat Miskin di Tujuh Provinsi*. P3KS: Jakarta.
- Nainggolan, T., & Susantyo, B. (2018). Upaya Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Keluarga Harapan: Studi di Empat Daerah di Indonesia. *Sosio Konsepsia*, 31–46. <https://doi.org/10.33007/ska.v7i1.1104>
- Pratama, C., (2013). Faktor-faktor yang mempengaruhi Keberhasilan Pemberdayaan Perempuan Desa Joho di Lereng Gunung Wilis, *Kebijakan dan Manajemen Publik*.Volume 1 (1). 12-19.
- Subagyo, H. (2008). Pengaruh Peran Pendampingan Bidan Desa Terhadap Pengembangan Desa Siaga di Kabupaten Blitar (Doctoral dissertation, Tesis. Surakarta: Program Pasca SarjanaUniversitas Sebelas Maret).
- Subhan, M., (2003).*Kriteria Keberhasilan Proyek*. Komunitas E Learning Ilmu Komputer,com Universitas Bina Nusantara.
- Sugiyono, (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, E., (2016). *Membangun Masyarakat Membangun Rakyat. Kajian strategis Pembangunan Sosial dan Pekerja Sosial*, Bandung: Rafika Aditama
- Tumanggor, R., Ridlo R., M.M. H Nurohim. (2017) . *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*. Kencana
- Umri, A. (2017). Pengaruh Kompetensi Pelayanan dan Profesional Pendamping Sosial terhadap Partisipasi Peserta Program KeluargaHarapan Kelurahan Kuningan Kecamatan Semarang Utara (Doctoral Dissertation, Universitas Negeri Semarang).
- Wulandari, P. R., Bendesa, I. K. G., & Saskara, I. A. N. (2013). Analisis Partisipasi Masyarakat Dan Kepemimpinan Terhadap Tingkat Keberhasilan Proyek Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (Pnpm) Mandiri Perdesaan Di Kecamatan Gerokgak, Buleleng-Bali. *Buletin Studi Ekonomi*.
- Yulistiyani, A, T. (2004). *Kemitraan dan model-model pemberdayaan*, Yogyakarta: Gava Media
- Zavakou, A. (2011, July). An evaluation of the CCT Program Familias en Acción on grade failure and school drop-out rates. In *nd*: n, pag. Web.http://www. vsfs. cz/prilohy/konference/3_sc_f_1_zavakou. Pdf.
- Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat (Ribu Orang), 2014-2018. <https://sijunjungkab.bps.go.id> Diakses 15 November 2019.
- Program Keluarga Harapan, (2019) <https://www.kemsos.go.id/program-keluarga-harapan>.. Diakses Tanggal 16 Mei 2019.



© 2020 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).



Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Provinsi Jawa Tengah

Arif Sofianto ^{1*}

¹ Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Jl. Pemuda 127 – 133 Semarang, Provinsi Jawa Tengah ;Email: 01arifsofianto@gmail.com

* Korespondensi: 01arifsofianto@gmail.com ; Tel: +62-8522-700-1825

Diterima: 4 Mei 2020; Disetujui: 1 Juli 2020; Diterbitkan: 28 Desember 2020

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mendeskripsikan implementasi PKH di Jawa Tengah; 2) Menganalisis sikap masyarakat terhadap pelaksanaan PKH di Jawa Tengah; 3) Merumuskan konsep pembaharuan PKH yang diinginkan masyarakat. Pendekatan yang digunakan adalah mixed method (kuantitatif dan kualitatif). Lokasi penelitian di 15 Kabupaten dengan angka kemiskinan tertinggi di Jawa Tengah. Informan adalah penerima program, pendamping PKH, aparat desa, dan aparat pemerintah daerah. Instrumen pengambilan data berupa kuesioner, *Focus Group Discussion* (FGD), dan panduan wawancara. Analisis data meliputi reduksi data, display data, dan verifikasi data. Kesimpulan : 1) Implementasi PKH di Jawa Tengah dari aspek prosedur dan manajerial sudah dianggap baik, namun sasaran program kurang tepat karena data tidak valid, sebesar 21,54 persen penerima PKH bukan orang miskin, dan hanya 13,99 persen penerima PKH yang miskin, dan 26,21 persen sangat miskin. Akurasi data sangat diperlukan jika dihadapkan pada situasi tertentu seperti pandemi covid 19, dimana data yang akurat menjadi penentu ketepatan sasaran program. 2) Masyarakat merasakan manfaat PKH untuk meringankan pengeluaran biaya hidup mereka dan jika dimungkinkan jumlahnya ditambah, di sisi lain masih banyak keluarga miskin yang belum menerima bantuan sehingga menimbulkan konflik dan kecurigaan. 3) Pembaharuan PKH yang dibutuhkan adalah memiliki dimensi keberlanjutan, melibatkan masyarakat dalam perencanaan program, sekaligus mengedukasi masyarakat miskin agar berdaya dan produktif.

Kata kunci: PKH, Kemiskinan, Jawa Tengah

Abstract: This study aims to: 1) Describe the implementation of PKH in Central Java; 2) Analyze community attitudes towards the implementation of PKH in Central Java; 3) Formulating the concept of PKH renewal desired by the community. This study used mixed method approach (qualitative and quantitative). This research conducted in 15 districts with the highest poverty rate in Central Java. Informants were the beneficiaries of the handler, PKH assistant, village officials, and local government officials. Data collection instruments are questionnaires, FGDs, and interview guides. Data analysis includes data reduction, data display, and data verification. The conclusions are: 1) The implementation of PKH in Central Java in terms of procedures and managerial aspects is considered good, but the program targets are not appropriate because of invalid data, amounting to 21.54 percent of PKH beneficiaries are not poor, and only 13.99 percent of PKH beneficiaries are poor and 26,21 percent very poor. Data accuracy is very necessary, especially if faced with certain situations such as the COVID-19 pandemic, where an accurate database determines the accuracy of program targets. 2) The community feels the benefits of PKH to ease their living expenses and may increase the amount, on the other hand there are still many poor families who have not received assistance to cause conflict and suspicion. 3) The renewal of PKH needed is to have a dimension of sustainability, involving the community in program planning, as well as educating the poor to be empowered and productive.

Keywords: PKH, Poverty, Central Java

1. Pendahuluan

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) sejak tahun 2007. Program ini diberikan melalui bantuan tunai kepada keluarga sangat miskin berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Program Perlindungan Sosial ini diberikan melalui konsep Conditional Cash Transfers (CCT) dan dianggap cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi berbagai negara, terutama masalah kemiskinan kronis (<https://pkh.kemsos.go.id>, 2019)

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan, dalam pasal 6 ketentuan dimaksud, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH berhak mendapatkan: a) Bantuan Sosial PKH; b) pendampingan PKH; c) pelayanan di fasilitas kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial; dan d) program Bantuan Komplementer di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya. Keluarga penerima PKH harus memenuhi kriteria komponen yang terdiri dari komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Komponen kesehatan meliputi ibu hamil/menyusui dan anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun. Komponen pendidikan meliputi: a) anak sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah atau sederajat; b) sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah atau sederajat; c) anak sekolah menengah atas/madrasah aliyah atau sederajat; dan anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun. Komponen kesejahteraan meliputi: a) lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun; dan b) penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat. Bantuan diberikan dalam bentuk uang melalui rekening berupa bantuan tetap dan bantuan sesuai komponen dalam keluarga. Ketentuan pemberian bantuan komponen tersebut maksimal untuk 4 (empat) orang dalam satu keluarga.

PKH memiliki tujuan untuk membuka akses keluarga miskin mendapatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan dan layanan pendidikan, serta akses terhadap upaya peningkatan kesejahteraan bagi kelompok rentan. Program ini memiliki harapan agar di masa mendatang keluarga miskin bisa lepas dari kemiskinan melalui perbaikan generasi kedepan dalam hal kesehatan dan pendidikan, sekaligus memberikan jaminan akses layanan kepada kelompok non produktif yaitu lansia dan disabilitas berat.

Telah banyak studi dilakukan terkait PKH, baik dari aspek konsep program, implementasi, dampaknya bagi penerima, maupun kontribusinya di dalam penanggulangan kemiskinan. Dari aspek konsepnya, Nainggolan (2019) menyebutkan bahwa basis intervensi PKH belum menyentuh anggota keluarga secara keseluruhan, dimana peserta program hanya kaum ibu sebagai pengurus justru bias gender karena tidak melibatkan suami. PKH belum menjawab ketimpangan gender keluarga penerima manfaat dimana tidak mengubah relasi perempuan penerima PKH dengan suaminya. Dari aspek implementasi beberapa penelitian menunjukkan faktor kelemahan dan keunggulan PKH. Salahsatu masalah yang sering terjadi terkait bantuan PKH (Umaroh & Sutjiatmi, 2019) adalah datangnya bantuan sering tidak tepat waktu karena berbagai hal misalnya masalah verifikasi. Hal tersebut terjadi karena prosedur pencairan bantuan ditentukan oleh pemerintah pusat (Kemensos). Selain itu, ditemukan bahwa pemahaman masyarakat tentang PKH masih kurang, sehingga proses sosialisasi dan edukasi perlu ditingkatkan. Hasil penelitian Tirani (2017) tentang implementasi PKH di Kabupaten Poso menunjukkan bahwa pemanfaatan PKH belum dipahami dengan baik, sehingga masih banyak penggunaan yang belum tepat sasaran.

Pelaksanaan program, sebagaimana hasil penelitian Rahmawati & Kiswantoro (2017) di Kecamatan Semarang Timur, terdapat faktor penghambat internal meliputi sulitnya peran serta penerima PKH dalam mengumpulkan berkas pemeriksaan data, serta disiplin peserta dalam pertemuan. Adapun penghambat eksternal meliputi informasi program yang sifatnya mendadak, jarak tempuh pendamping yang jauh, dan akses jalan yang sulit terjangkau, direkomendasikan agar jumlah pendamping bisa ditambah (Rahmawati & Kiswantoro, 2017). Kendala yang dihadapi dalam

pelaksanaan PKH adalah kurang aktifnya sebagian penerima PKH dalam kegiatan seperti hadir pertemuan, serta kurangnya sosialisasi dan koordinasi dari stakeholder (Hidayat, 2018).

Aspek pendampingan, belum berjalan dengan baik karena tidak mendapatkan uang jalan atau uang operasional dan hanya mengandalkan gaji dalam melakukan kegiatan, sehingga agak tidak adil bagi para pendamping (Tirani, 2017). Di sisi lain penelitian Rahmawati & Kisworo (2017) antara lain menunjukkan peran penting pendamping PKH yaitu fasilitator, pendidik, representasi/perwakilan masyarakat, serta pendampingan teknis, meskipun ada sedikit kendala dimana pendamping memerlukan untuk beradaptasi. Adapun faktor pendukung PKH (Rahmawati & Kiswantoro, 2017) meliputi partisipasi ibu-ibu penerima bantuan yang rajin hadir. Keberadaan buku panduan pendampingan juga efektif sebagai alat bantu materi Family Development Session (FDS).

Beberapa penelitian juga menganalisis tentang sasaran dan dampak PKH, dimana sebagian menyatakan sudah baik, dan sebagian sebaliknya. PKH juga dinilai tepat sasaran sebagaimana hasil penelitian Utomo, dkk (2014) tentang pelaksanaan PKH di Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri menyimpulkan bahwa PKH membantu masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup untuk pendidikan anaknya serta kesehatan ibu hamil dan balita. Penerima PKH juga bersedia memenuhi komitmen karena takut sanksi yang diberikan. Hal senada diungkapkan Hidayat (2018) tentang optimalisasi PKH di Kecamatan Pulau Panggung bahwa bantuan PKH membantu mengurangi beban ekonomi terutama pemenuhan kebutuhan sehari-hari, kebutuhan sekolah seperti uang bulanan, buku, seragam serta alat tulis. Bantuan dengan demikian PKH dipandang meningkatkan pendidikan anak, sehingga mengurangi pekerja anak, anak jalanan, serta putus sekolah.

Isdijoso, dkk (SMERU, 2018) juga menunjukkan bahwa PKH membantu pemenuhan biaya pendidikan dan kesehatan, konsumsi, serta kehidupan yang lebih layak. Dalam penggunaan PKH selain untuk pendidikan dan kesehatan juga untuk membayar sewa rumah, listrik, dan air bersih. Secara umum penerima PKH dianggap cukup tepat sasaran, namun jumlahnya lebih kecil dari kebutuhan. Beberapa yang perlu ditingkatkan adalah transparansi jumlah dana, larangan pemotongan dana, atau memberikan dana kepada pendamping maupun aparat. Sosialisasi kewajiban penerima PKH masih perlu ditingkatkan, khususnya terkait kesehatan, untuk pencairan dana sebaiknya juga disesuaikan dengan kalender pendidikan. Keterpaduan dengan program lain juga perlu ditingkatkan.

Hasil penelitian Saraswati (2018) tentang PKH di Pekon Pandansurat menunjukkan adanya pengaruh PKH terhadap pengentasan kemiskinan, dengan terpenuhinya biaya pendidikan dan kesehatan. PKH mampu mengurangi angka sebesar 8.3%. Namun demikian, masih ada beberapa kendala antara lain penyaluran PKH belum tepat sasaran dimana sebagian penerima bantuan mereka yang sejahtera. Hal tersebut dikarenakan data yang tidak valid, ditemukan adanya peserta yang sudah beralih status menjadi sejahtera namun masih menerima bantuan, serta ditemukan pula penerima bukan keluarga miskin, sebagian adalah kerabat dekat aparat desa.

Pada dasarnya, PKH secara umum memberikan manfaat langsung bagi penerima terutama membantu biaya pendidikan dan kesehatan, namun belum berpengaruh kepada aspek lainnya. Sebagaimana dikemukakan Nainggolan, dkk (2012) secara umum PKH berdampak positif terhadap rumah tangga sangat miskin dalam kesehatan dan pendidikan (aksesibilitas), namun belum terhadap status sosial ekonomi. Suleman & Resnawati (2017) menunjukkan bahwa PKH terbilang tepat dari sudut pandang perlindungan sosial, namun belum terukur efektifitas pelaksanaannya. PKH juga belum tepat dipandang sebagai program pengentasan kemiskinan jika dipandang dari sudut pandang kesejahteraan sosial. Belum ada indikator untuk mengukur perubahan dan peningkatan penerima program, sehingga dikhawatirkan jumlahnya terus bertambah dan tingkat ketergantungan terhadap bantuan menjadi sangat tinggi.

Penerima PKH memiliki perilaku ekonomi subsisten yaitu bantuan hanya digunakan memenuhi kebutuhan hidup minimal baik bahan makanan maupun non makanan (Habibullah, dkk, 2017). Penelitian Habibullah, dkk (2017) menunjukkan penggunaan bantuan PKH untuk membeli bahan makanan terdiri dari yaitu beras (60,7 %), telur dan susu (37 %), ikan (35%) dan rokok (2%).

Penggunaan non makanan untuk biaya pendidikan (76 %), kesehatan (23%), serta perumahan, bahan bakar, penerangan, air (21%).

Hal yang hampir sama ditemukan dari penelitian Isnani (2018) bahwa implementasi PKH di Desa Karang Rejo, ada beberapa perubahan yang terjadi pada keluarga penerima dalam bidang pendidikan dan kesehatan meskipun bersifat sementara, pendamping memotivasi penerima bantuan untuk meningkatkan kualitas hidup. Namun demikian masih banyak juga keluarga yang belum memiliki kesadaran untuk benar-benar memperbaiki kualitas kehidupannya. Dari aspek ketercukupan, alokasi PKH masih dibawah separuh jumlah keluarga miskin sehingga banyak keluarga miskin belum terbantu, serta besaran penerimaan program yang dipandang belum mencukupi kebutuhan mereka.

Selain dampak positif di atas, beberapa dampak negatif juga muncul dari PKH. Penelitian Syahriani (2016) menunjukkan PKH tidak tepat sasaran, penggunaannya tidak sesuai peruntukan, dimana lebih digunakan untuk kebutuhan pokok selain pendidikan dan kesehatan. PKH juga menjadikan penerima bergantung pada bantuan dan malas bekerja. Hal serupa ditemukan dari hasil penelitian Umaroh dan Sutjiatmi (2019) di Desa Kupu Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal menunjukkan penggunaan yang agak kurang tepat. Sebagian menggunakan bantuan PKH untuk kepentingan selain sekolah anak dan kesehatan.

Kholif, dkk (2014) menunjukkan bahwa implementasi PKH di Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto belum berhasil, karena tidak semua kebijakan PKH dilaksanakan dengan benar. Contohnya pendamping memiliki pekerjaan lain (double job), protes masyarakat juga kerap terjadi terkait pelaksanaan PKH. PKH juga dinilai tidak menjadikan masyarakat mandiri tanpa ketergantungan pada pemerintah, serta rendahnya upaya masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Begitu juga hasil penelitian Ardianti, dkk (2018) tentang implementasi PKH di Kecamatan Bukit Bestari, Tanjungpinang, dimana PKH belum mampu mengurangi kemiskinan dan mensejahterakan masyarakat. Masyarakat masih memerlukan program-program lainnya yang bisa meningkatkan pendapatan. Meskipun demikian, PKH mampu membantu keluarga miskin memenuhi kebutuhan sekolah dan kesehatan anak, sehingga berdampak menurunnya angka putus sekolah, gizi buruk dan kematian pada bayi.

Ditinjau dari aspek sosial khususnya relasi gender, menurut hasil penelitian Hanif dkk (2015) tentang dampak PKH bagi proses sosial di Kabupaten Sidoarjo, ada beberapa dampak yang diperkirakan dan tidak diperkirakan. Dampak yang diperkirakan pertama peran sosial yang stagnan, dimana perempuan penerima manfaat PKH rata-rata mampu mandiri secara finansial, mampu mencari nafkah, sekaligus menanggung beban domestik. PKH tidak merubah struktur relasi gender yang sudah ada di dalam masyarakat Sidoarjo. Kedua, PKH membuka akses pendidikan dasar, namun tidak meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pendidikan baik dari orangtua maupun anak penerima manfaat PKH. Ketiga, PKH tidak mengubah relasi gender dimana perempuan tidak mendapatkan otoritas membuat keputusan, serta relatif tidak memiliki otonomi atas tubuhnya. Adapun dampak yang tidak diperkirakan adalah munculnya ketegangan sosial di masyarakat akar rumput yang disebabkan karena data dan informasi yang tidak akurat. Fenomena yang terjadi adalah sebagian penerima PKH seharusnya tidak berhak, begitu sebaliknya sebagian yang berhak tidak mendapatkannya.

Beberapa penjelasan di atas menunjukkan bahwa PKH di satu sisi memberikan sumbangan bagi keluarga miskin penerima manfaat, di sisi lain ada beberapa hal yang perlu diperbaiki agar tepat sasaran dan sesuai target. Diantara masalah yang dikemukakan di atas adalah kurang tepatnya sasaran karena data yang kurang valid, mentalitas masyarakat baik penerima program yang termasuk sejahtera namun enggan mengundurkan diri atau keluarga miskin penerima manfaat yang justru semakin tergantung dan tidak memiliki upaya untuk mengentaskan diri. Selain itu konflik sosial juga kerap terjadi akibat implementasi PKH ini.

Pemerintah pusat dan daerah telah melakukan berbagai hal dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi PKH ini. Untuk ketepatan sasaran, verifikasi dan validasi data terus dilakukan, bahkan sampai 4 kali setahun dengan harapan sasaran penerima PKH lebih tepat. Dari sisi efektifitas,

maka dilakukan berbagai pola edukasi agar terjadi perubahan kondisi kesejahteraan keluarga penerima manfaat. Di Provinsi Jawa Tengah dilakukan beberapa upaya seperti penempelan stiker penerima PKH (keluarga mampu penerima PKH akan merasa malu), sampai dengan dilakukannya prosesi wisuda bagi keluarga yang telah sejahtera agar memotivasi lainnya. Sebagaimana informasi Biro Humas Sekertariat Daerah Provinsi Jawa Tengah bahwa sampai tahun 2019 terdapat lebih dari 256 ribu keluarga penerima PKH di Jawa Tengah yang mengundurkan diri. Mereka yang mengundurkan diri disebabkan karena merasa sudah mampu, dan sebagian lagi karena sudah tidak memiliki komponen sebagai syarat penerima PKH (<https://regional.kompas.com>, 19 Nopember 2019)

Namun demikian, bukan berarti bahwa capaian tersebut sudah bisa dianggap PKH berkontribusi optimal bagi penurunan kemiskinan di Jawa Tengah, mengingat masih banyak faktor lain, dan angka kemiskinan Jawa Tengah masih lebih tinggi dibanding angka nasional. Jika dilihat dari angka absolut berdasarkan jumlah penduduk, maka Jawa Tengah berada di posisi kedua setelah Jawa Timur. Berdasarkan data BPS, tercatat bahwa jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah sebanyak 3.897.200 jiwa, dan yang tertinggi Jawa Timur sebesar 4.332.590 jiwa. Pada bulan Maret 2019 jumlah penduduk miskin diperkirakan mencapai 3.743.230 orang dan menjadi 3.679.400 orang pada September 2019.

Data tersebut di atas, menunjukkan ada penurunan kemiskinan, namun apakah penurunan tersebut berdasarkan PKH atau bukan masih menjadi pertanyaan. Berdasarkan laporan Susenas 2018, terdapat inclusion error maupun exclusion error dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan. Banyak penduduk yang seharusnya sudah tidak menerima, namun masih menerima, dan sebaliknya, yang seharusnya menerima tetapi tidak menerima. Penduduk yang menerima bantuan sebagaimana yang tercantum dalam Basis Data Terpadu seharusnya 40 persen berpenghasilan terbawah, atau desil 1 – 4. Namun bedasarkan kondisi lapangan, penerima bantuan pangan non tunai (BPNT) bahkan sampai desil 10. Rumah tangga tidak miskin yang menerima BPNT sebesar 46,69 persen padahal mereka seharusnya tidak berhak menerima. Di sisi lain penduduk miskin yang menerima BPNT sebesar 70,61 persen dan sisanya 29,39 persen tidak menerima BPNT padahal mereka berhak menerima. Kasus sasaran program yang kurang tepat tersebut dapat ditelusuri dari sumberdata yang kurang tepat. Selain ketepatan sasaran, program penanggulangan kemiskinan juga perlu dikaji masalah substansi dan implementasinya.

Beberapa penjelasan hasil penelitian di atas menunjukkan perlunya melakukan kajian terus menerus terhadap konsep dan implementasi PKH di Indonesia. Sebagai sebuah program perlindungan sosial berbasis keluarga, tentunya memiliki target agar penerima bantuan memiliki daya tahan terhadap kerentanan, sekaligus memberikan harapan perbaikan di masa mendatang sesuai dengan namanya. Hasil kajian Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan RI (2015), menemukan bahwa PKH secara umum kurang efektif. Berdasarkan data lapangan di Jakarta ditemukan bahwa 68% penerima PKH hanya menggunakan sebagian saja untuk pendidikan dan kesehatan. Oleh sebab itu diusulkan kajian lanjutan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan penggunaan bantuan PKH kurang efektif. Berdasarkan rekomendasi tersebut, diperlukan kajian lanjutan tentang konsep dan implementasi PKH untuk menemukan formula yang tepat.

Dalam rangka menemukan formula tersebut, selain memperhatikan hasil penelitian tentang PKH terdahulu, tentunya memperhatikan kajian program lain. Seperti halnya penelitian Ariyani, dkk (2015) bahwa status keberlanjutan program penanggulangan kemiskinan dari program pemerintah, program zakat, dan program CSR memiliki tingkat yang bervariasi namun cukup konsisten. Ditemukan bahwa program berbasis zakat mempunyai status keberlanjutan paling baik dibandingkan program pemerintah maupun program CSR. Faktor-faktor yang menentukan keberlanjutan program pengentasan kemiskinan untuk dimensi input, adalah perbedaan antarprogram, keakuratan data, dan ketersediaan data. Adapun pada dimensi proses, adalah biaya pengelolaan, ketidaktepatan waktu penyaluran, dan sinkronisasi program antarlembaga. Pada dimensi output adalah keberadaan lembaga masyarakat dan peningkatan jumlah penerima program.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas maka perlu dilakukan penelitian atau kajian mengenai bagaimana upaya yang perlu dilakukan untuk optimalisasi PKH. Apakah program tersebut

memberikan dampak kepada rumah tangga miskin, apakah sudah sesuai dan memberikan perbaikan, atau apakah yang sesungguhnya diperlukan dalam upaya pengentasan kemiskinan sesuai kondisi lapangan. Hal ini perlu dilakukan karena selama ini pemerintah telah berupaya mengeluarkan dana yang cukup besar untuk program tersebut, sehingga harus bisa dipastikan kemanfaatannya.

Sesuai dengan pemaparan kondisi aktual dan berbagai studi di atas, PKH merupakan program yang cukup penting, dianggap membantu banyak masyarakat, tetapi juga berpotensi menimbulkan konflik karena dinilai banyak salah sasaran. Temuan penting lainnya adalah dampak PKH masih terbatas pada pemenuhan kebutuhan pokok, atau yang disebut sebagai perilaku ekonomi subsisten (Habibullah, dkk, 2017). Bantuan digunakan untuk kebutuhan makanan pokok serta kebutuhan rumah tangga lainnya. Oleh sebab itu diperlukan panduan pemanfaatan bantuan PKH yang jelas sebagai pembeda dengan program lain (Habibullah, dkk, 2017).

Hasil-hasil penelitian tersebut di atas, belum banyak penelitian tentang PKH yang menganalisis dari sudut pandang persepsi dan harapan penerima/masyarakat. Oleh sebab itu diperlukan penelitian yang menggambarkan implementasi, sikap dan pandangan masyarakat, serta perbaikan program yang diperlukan menurut pandangan penerima PKH. Penelitian ini menelaah implementasi di Provinsi Jawa Tengah serta memberikan masukan untuk perbaikannya dari sudut pandang penerima PKH. Tujuan penelitian ini adalah menelaah implementasi program PKH di Jawa Tengah, menggali sikap dan pandangan masyarakat terhadap pelaksanaan PKH, serta konsep pembaharuan PKH yang diinginkan masyarakat.

2. Metode

Metode penelitian ini deskriptif, sebagaimana diungkapkan Arikunto (2002), bahwa penelitian deskriptif dilakukan untuk mengetahui keadaan subjek penelitian terkait segala sesuatu tentang subjek tersebut. Pendekatan penelitian ini campuran (mixed method) dengan tipe sekuensial kuantitatif dilanjutkan kualitatif. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk menggali data tanggapan para pihak terkait implementasi PKH. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa sesuai perspektif peneliti (Husaini dan Purnomo, 2008). Fokus penelitian ini ialah melakukan kajian terhadap implemetasi kebijakan dan pengelolaan PKH.

Penelitian ini mengambil lokasi 15 Kabupaten di Jawa Tengah dengan angka kemiskinan tertinggi yaitu Kabupaten Wonosobo, Kebumen, Brebes, Pemalang, Purbalingga, Banjarnegara, Rembang, Banyumas, Sragen, Klaten, Demak, Grobogan, Blora, Purworejo, dan Cilacap. Lokasi pengambilan data di tingkat desa dipilih dengan teknik purposif yang memiliki angka kemiskinan tinggi, memiliki kekhasan sosial dan pelaksanaan program, serta mewakili karakter wilayah (pesisir, pegunungan, dataran rendah). Dalam satu kabupaten ditentukan 2 desa di kecamatan yang berbeda sehingga secara keseluruhan didapatkan 30 desa.

Penelitian ini melibatkan 777 orang responden sebagai sumber data kuantitatif, yang terdiri dari 647 orang penerima program, 72 aparat pemerintah daerah dan pemerintah desa, serta 58 orang pendamping program di 15 kabupaten lokasi penelitian. Informan sebagai sumber data kualitatif berasal dari unsur pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten. Penentuan informan dilakukan secara berjenjang, dari tingkat kabupaten hingga desa/dukuh.

Data dalam penelitian mengambil sumber data primer dan sekunder. Data primer berupa sikap dan pendapat informan serta informasi terkait pelaksanaan program yang diperoleh dari wawancara, FGD dan pengisian kuesioner. Kuesioner bersifat semi terbuka, dimana terdapat pilihan jawaban, namun responden juga dapat menuangkan pendapatnya secara bebas. Data atau informasi yang bersifat kuantitatif terkait dengan pendapat responden mengenai prosedur pelaksanaan program, manfaat/penggunaan program, harapan dan ususlan. Data atau informasi kualitatif berupa dinamika manajerial program, sinergi dan koordinasi antar pihak, kendala dan kesulitan implementasi, fenomena konflik di masyarakat, serta pemahaman masyarakat terhadap tujuan program. Adapun data sekunder diambil dari berbagai dokumen berupa hasil survei atau pendataan pihak lain, dokumen perencanaan

pembangunan daerah, dan laporan pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan penanggulangan kemiskinan.

Instrumen penelitian berupa kuesioner, FGD/diskusi, dan kolom pencatatan pada saat observasi, serta tambahan berupa alat dokumentasi visual. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi untuk mengambil data yang tercatat, pada kelompok masyarakat maupun instansi pemerintah dan non pemerintah yang terkait. Teknik wawancara secara mendalam dilakukan terhadap infoman terpilih terhadap individu kunci dalam pengelolaan program penanggulangan kemiskinan. Observasi dilakukan dengan pengamatan langsung baik di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten yang berkaitan dengan fokus penelitian. Dokumentasi dilakukan dengan pengambilan gambar dan perekaman wawancara. Teknik lainnya adalah dengan kuesioner terhadap responden masyarakat miskin, perangkat daerah, kepala desa, dan pendamping program dengan menggunakan kuesioner semi terbuka. Teknik Focussed Group Discussion (FGD) juga digunakan dalam rangka melengkapi, verifikasi, dan pendalaman data dari berbagai sumber yang dilakukan setelah wawancara dan pengisian kuesioner. Studi dokumen dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, peraturan pemerintah daerah, dan data-data yang relevan dengan obyek penelitian.

Analisis data kuantitatif dilakukan dengan teknik analisis deskriptif berupa rerata, dan persentase. Analisis ini diberlakukan terhadap data-data yang diambil dari kuesioner responden, yaitu terhadap jawaban-jawaban tertutup. Analisis data kualitatif dilakukan dengan model interaktif sebagaimana dikembangkan oleh Miles dan Huberman, dimana proses pengumpulan, pengolahan dan penyajian data untuk menghasilkan kesimpulan yang saling terkait (Husaini dan Purnomo, 2008) meliputi reduksi data, display data, dan verifikasi data.

Penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu 9 (sembilan) bulan dimulai dari bulan April 2019 dan berakhir Desember 2019. Berdasarkan waktu pelaksanaan tersebut, maka penelitian ini belum dapat mengantisipasi fenomena yang terjadi akibat pandemi Covid 19 yang mulai berlangsung di awal tahun 2020.

3. Hasil

3.1. Profil Penerima PKH

Informan dari masyarakat penerima program didominasi usia produktif dari rentang usia antara 31 – 40 tahun sebesar 37,87 persen dan usia 41 – 50 tahun sebesar 26,12 persen. Persentase usia produktif yang besar tersebut merupakan potensi bagi upaya peningkatan produktifitas masyarakat yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan. Berdasarkan jenjang pendidikan penerima program terbanyak adalah sekolah dasar (SD) yaitu 56,41 persen, kemudian jenjang SMP sebesar 22,26 persen, sisanya SLTA.

Berdasarkan kondisi kesejahteraan keluarga penerima program, relatif beragam. Sesuai konsep BPS terkait status kesejahteraan berdasarkan garis kemiskinan terdapat 5 kategori yaitu: 1) Sangat Miskin dengan pengeluaran perkапita/bulan < 0,8 Garis Kemiskinan; 2) Miskin dengan pengeluaran perkапita/bulan 0,8 sampai dengan < 1 Garis Kemiskinan; 3) Hampir Miskin dengan pengeluaran perkапita/bulan 1 ≤ sampai dengan < 1,2 Garis Kemiskinan; 4) Rentan Miskin dengan pengeluaran perkапita/bulan 1,2 ≤ sampai dengan < 1,6 Garis Kemiskinan; dan 5) Tidak Miskin dengan pengeluaran perkапita/bulan ≥ 1,6 Garis Kemiskinan (BPS, 2019).

Berdasarkan konsep perhitungan tersebut, dengan Garis Kemiskinan rata-rata di Jawa Tengah pada September 2019 sebesar Rp. 381.992,- maka ditemukan komposisi sebagai berikut. Sebanyak 26,21 persen tergolong ke dalam keluarga sangat miskin, 13,99 persen tergolong miskin, sebesar 19,45 persen adalah hampir miskin, dan sebanyak 21,86 persen rentan miskin, serta 21,54 persen tergolong tidak miskin.

Sebagian besar informan berada di kelompok hampir miskin, rentan miskin dan tidak miskin. Responden dengan status tidak miskin bahkan mencapai 21,54 persen, menempati urutan ketiga,

sementara responden dengan status miskin hanya sebesar 13,99 persen dan sangat miskin 26,21 persen. Dengan demikian, perlu ada evaluasi lebih lanjut mengenai indikator sasaran penerima program agar lebih tepat sasaran. Dengan demikian, perlu adanya verifikasi dan validasi penerima PKH dengan lebih cermat, agar penerima program benar-benar mereka yang termiskin.

Berdasarkan status pekerjaan rumah tangga penerima program, tercatat 40,48 persen anggota rumah tangga yang bekerja tetap, dan 11,28 persen kadang-kadang bekerja, dan sisanya tidak/belum bekerja. Pekerjaan terbesar rumah tangga penerima program adalah buruh tani sebesar 44,98 persen, kemudian jenis pekerjaan informal lainnya sebesar 14,68 persen, buruh konstruksi dan industri sebesar 10,36 persen, dan pedagang sebesar 8,50 persen. Data ini memberikan gambaran perlunya perluasan skema PKH terhadap perbaikan perekonomian, terutama penciptaan lapangan kerja yang layak.

3.2. Pelaksanaan PKH di Jawa Tengah

Terkait dengan pelaksanaan PKH di Jawa Tengah, terdapat beberapa pertanyaan kunci yang diajukan kepada para penerima, yaitu tentang pemahaman terhadap implementasi PKH itu sendiri, dampak program, dan harapan ke depan. Pertanyaan pokok tersebut diuraikan ke dalam beberapa butir pertanyaan yang tertuang dalam kuesioner.

Informan yang terlibat sebagian besar memiliki unsur penerima PKH yang berasal dari komponen pelajar (81,30%), kemudian disusul lansia (11,75%), serta balita dan ibu hamil. Komponen disabilitas tergolong sangat kecil yaitu hanya 1,24 persen. Jumlah penerima PKH mayoritas didominasi oleh anak sekolah yaitu 82 persen. Adapun jumlah lansia di keluarga penerima PKH relatif lebih sedikit dibanding potensi komponen yang ada, ini berarti ada lansia yang belum terdaftar sebagai penerima PKH. Fenomena di lapangan ditemukan ada lansia, apalagi yang hidup terpisah dan miskin belum menerima PKH. Sebagaimana disampaikan salahsatu warga Desa Sumbermulyo bahwa orang tuanya yang hidup terpisah tidak menerima PKH. Proses penentuan sasaran program PKH bersifat topdown, dimana sebagian besar (44,51%) menyatakan tahu-tahu dapat. Sebagian lain juga menyatakan bahwa prosesnya melalui pendataan yang dilakukan oleh petugas perangkat desa sebesar 37,55 persen.

Terkait dengan prosedur pencairan dana PKH, sebagian besar menyatakan bahwa prosedurnya mudah. Mereka membawa ATM ke bank, lalu dicairkan. Namun demikian sebagian merasa kesulitan karena belum terbiasa dengan pencairan melalui ATM, atau kendala lain seperti saldo yang tidak ada atau belum terisi. Mereka yang menjawab tidak ada kesulitan mencairkan PKH, karena ada tenaga pendamping yang memberikan penjelasan bagaimana mengambil PKH, dan merasa tidak sulit, ketika warga punya ATM dan Bank juga tidak terlalu jauh dengan lokasi warga. Sebaliknya yang merasa kesulitan karena lokasi ATM jauh, kemudian sebagian juga rawan kehilangan kartu ATM karena tidak terbiasa dengan ATM dan penyimpanan kurang teliti.

Pengelolaan program PKH menurut sebagian besar responden sudah berjalan dengan baik. Hal ini didukung oleh keberadaan pendamping PKH di setiap kecamatan. Hanya sebagian kecil yang menyatakan belum baik, dan sisanya tidak berpendapat. Penerima yang menyatakan bahwa pengelolaan sudah baik karena selama ini PKH sudah diberikan kepada orang yang tidak mampu. Di dalam penyaluran juga selama ini tidak ada kekurangan. Sebaliknya bagi mereka yang berpendapat belum baik karena PKH belum merata, masih banyak orang yang membutuhkan namun belum mendapatkan fasilitasi program PKH. Responden menilai program PKH ini masih belum tepat sasaran, banyak yang sudah mampu tetapi mendapat dan yang belum mampu tidak mendapat.

Program PKH secara umum dipandang memberikan manfaat oleh penerimanya. Sebesar 71,72 persen responden menyatakan PKH memberikan manfaat langsung, namun sebagian lagi menyatakan tidak ada manfaat. Sebagian lain tidak mengemukakan pendapatnya. Mereka yang menyatakan ada manfaat PKH antara lain bisa meningkatkan pendidikan anak sekolah, meningkatkan derajat kesehatan keluarga, meringankan biaya hidup, membeli ternak dan umumnya membantu perekonomian warga. PKH melalui kelompoknya juga melatih pengelolaan uang sehingga bisa melatih ibu-ibu untuk berhemat.

Tabel 1. Pendapat Responden Tentang Prosedur Penerimaan Program PKH

Keterangan	Ya (%)	Tidak (%)	NA (%)
Kemudahan program	74,65	10,97	14,37
Pengelolaan sudah baik	81,30	2,47	16,23
Manfaat program	71,72	10,51	17,77

Pada aspek ketepatan sasaran, sejalan dengan penelitian sebelumnya bahwa masih terdapat salah sasaran dalam pemberian bantuan. Ditemukan bahwa masih ada penerima atau sasaran program teridentifikasi sebagai orang yang sudah mampu. Sebaliknya si miskin yang semestinya mendapatkan bantuan tidak memperoleh kartu dan tidak mendapatkan PKH, masih banyak masyarakat miskin yang terlewatkan tidak mendapatkan bantuan. Fenomena ini disebutkan oleh banyak responden di semua lokasi penelitian, termasuk aparat pemerintah daerah setempat. PKH menimbulkan kecemburuhan diantara masyarakat, banyak yang sudah mampu mampu tidak mau mundur, di sisi lain banyak yang tidak mampu belum mendapatkan bantuan. Akibatnya sering konflik sosial antara penerima dan yang belum penerima. Mereka yang belum mendapatkan merasa sakit hati dengan yang mendapatkan. Hal ini misalnya dinyatakan oleh seorang koordinator kelompok PKH di Desa Sumberejo bahwa:

Sebagai koordinator PKH saya sering dikatakan buta tuli sama tetangga yang tidak mendapatkan PKH meskipun mereka mampu, dianggap saya tidak memasukkan nama mereka, padahal saya tidak tahu.

Sebagian kecil yang memiliki kesadaran untuk mengundurkan diri dari PKH. Sebagaimana dikemukakan oleh Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Demak, bahwa ada acara "wisuda" atau pengunduran diri dari PKH bagi mereka yang sudah mampu. Sistem program PKH yang top down tersebut menimbulkan konflik antar masyarakat, dan antara masyarakat dengan perangkat desa. Masyarakat menganggap desa atau ketua kelompok PKH tidak memasukkan nama mereka, namun kades juga tidak memiliki otoritas untuk menentukan penerima bantuan. Selain itu juga terdapat konflik kepentingan ketika kepala desa tidak mau mencoret nama-nama dalam data Basis Data Terpadu (BDT) untuk kepentingan pendukungnya. Kades terutama yang baru juga tidak berani mencoret daftar nama-nama dalam BDT yang dianggap sudah mampu. Hal ini seperti diungkapkan oleh Kades Sumbermulyo Rembang:

Sebenarnya kesalahan dimulai dari awal memasukkan data warga di awal pendataan BDT, tetapi saya tidak berani mencoret nama-nama penerima PKH yang sudah terdaftar sejak saya belum jadi kades, karena nanti akan terjadi keributan, mereka protes keras kepada saya selaku kepala desa.

Maka perlu didorong agar kades harus mempunyai keberanian untuk mencoret mereka yang sudah mampu. Diperlukan juga peran kepala desa dalam perbaikan data, termasuk verifikasi dan validasi ketika sudah ada yang naik kelas tidak miskin lagi. Dengan demikian sasaran penerima PKH menjadi lebih tepat. Kondisi yang saat ini terjadi sebagaimana data di atas, bahwa informan penerima program 21,54 persennya memiliki pengeluaran per kapita lebih dari 1,6 garis kemiskinan, atau termasuk kalangan tidak miskin. Dari total responden, hanya 26,21 persen yang sangat miskin dan 13,99 persen miskin. Hal ini menunjukkan prioritas penerima program belum sesuai ketentuan. Misalnya ditetapkan bahwa penerima PKH adalah penduduk termiskin (desil 1), namun penerimanya yang lebih banyak justru bukan yang paling miskin. Terkait dengan penggunaan bantuan PKH, yang digunakan untuk pendidikan saja sebesar 56,57 persen, sisanya digunakan untuk kepentingan lain, seperti konsumsi, kesehatan, dan kebutuhan konsumtif lainnya. Ada sekitar 0,15 persen yang menyatakan menggunakan untuk kepentingan produktif.

Tabel 2. Penggunaan Uang Program PKH Oleh Penerima

Penggunaan	Jumlah	%
Pendidikan	366	56,57
Pendidikan dan konsumsi	60	9,27
Pendidikan dan kesehatan	53	8,19
Pendidikan, kesehatan, konsumsi &lainnya	88	13,60
Konsumsi	7	1,08
Produksi	1	0,15
NA	72	11,13

Data tersebut di atas, mengkonfirmasi temuan penelitian terdahulu bahwa penggunaan dana bantuan PKH sebagian tidak tepat sasaran. Dari aspek dampak, bantuan PKH memberi sumbangan pada perbaikan di bidang pendidikan dan kesehatan, namun belum berkontribusi di bidang ekonomi/kesejahteraan. Manfaat program PKH adalah dana bantuan bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok setelah kewajiban penggunaan untuk pendidikan atau kesehatan terpenuhi, sehingga mampu meningkatkan daya beli masyarakat. Dengan kata lain, bantuan pada umumnya bermanfaat untuk sesaat tidak terjadi pengembangan terutama untuk keberlanjutan (produktif) yang sesuai potensi masalah dan kebutuhan kelompok masyarakat miskin.

Di beberapa wilayah, seperti Kabupaten Cilacap terdapat mekanisme lokal untuk mengatasi kecemburuhan masyarakat. Setiap penerima bantuan akan menyisihkan sebagian uangnya untuk kemudian dialokasikan kepada tetangga yang belum mendapatkan bantuan. Hal contohnya berlaku bagi program Bantuan Pangan Non Tunai, dimana sebagian bantuan (beras dan telur) disisihkan untuk mereka yang tidak mendapatkan bantuan. Temuan lapangan yang lainnya adalah pemanfaatan e-warong yang bagus di Kabupaten Banjarnegara. Sebagaimana dinyatakan oleh Kades Gumelem, Banjarnegara bahwa

Sebagian uang PKH sebesar 100 ribu rupiah diarahkan untuk membeli sembako di e-warung yang dikelola kelompok PKH, sehingga keuntungan bisa dibagi kepada anggota dan membuat e warong berkembang.

Dari sisi manajerial, tidak ditemukan adanya kontribusi pemerintah kabupaten/kota dan provinsi yang mengalokasikan dana untuk program pendamping PKH atau mendanai masyarakat miskin yang tidak tercover PKH dari pemerintah pusat, padahal PKH merupakan inti dari program penanggulangan kemiskinan. Selain itu juga belum ditemukan adanya kontribusi pemerintah kabupaten dan provinsi untuk penyediaan personel tenaga pendamping program PKH yang sesuai kebutuhan masyarakat ini menyebabkan tugas pendamping PKH di tingkat kecamatan cukup berat, serta kurang memahami kondisi lapangan di setiap desa.

Terkait dengan masalah teknis pelaksanaan program, yang sering ditemui adalah penerima belum mendapatkan kartu ATM/Himbara, dana yang belum keluar atau terlambat keluar, kartu ATM/Himbara yang kosong saldonya, dan kesulitan penggunaan kartu itu sendiri. Sebagaimana disampaikan Kades Sumbermulyo, Sarang Rembang, ada 80 peserta program PKH yang belum mendapatkan kartu ATM (Himbara), sementara ada juga yang kartu ATM (Himbara) belum memiliki saldo.

3.3. Pendapat Masyarakat Terhadap Pelaksanaan PKH

PKH merupakan program penanggulangan kemiskinan yang cukup populer di masyarakat. Berdasarkan tanggapan yang diberikan responden melalui formulir pendapat di kuesioner, pemberian bantuan dalam bentuk uang tunai tersebut sangat berguna untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kepada informan disampaikan pertanyaan apakah mereka mengetahui PKH. Mayoritas (80,68%) menyatakan bahwa mereka mengetahui PKH, dan sebagian kecil lainnya (7,73%) menyatakan tidak tahu, sisanya tidak menjawab. Responden yang menyatakan tahu tentang PKH menyampaikan bahwa program tersebut merupakan bantuan keuangan untuk orang miskin untuk membiayai sekolah, balita,

dan lansia. Tujuan pemberian bantuan tersebut adalah untuk menyejahterakan keluarga miskin, menyehatkan dan mencerdaskan masyarakat, mengurangi pengangguran yang pada akhirnya mengentaskan atau mengurangi kemiskinan. Sebagian lagi menjawab bahwa PKH merupakan bantuan uang negara untuk orang yang tidak mampu, yang diambil dari bank. Sebagian lagi menjawab PKH merupakan bantuan untuk kebutuhan makan. Sebagian menjawab tidak tahu karena mengeluhkan bahwa mereka tidak menerima program ini/ mendapatkan ATM.

Terkait dengan alasan mengapa mereka menerima PKH, sebanyak 73,57 persen menyatakan mengetahui alasannya, dan sebagian kecil (8,50%) menyatakan tidak tahu, sebanyak 17,93 persennya tidak memberikan tanggapan tentang hal ini. Penerima PKH sebagian besar mengetahui mengapa menerima PKH, karena mereka orang tidak mampu yang masih mempunyai balita, anak sekolah, lansia yang membutuhkan biaya untuk peningkatan gizi balita, biaya sekolah, biaya hidup keluarga, untuk mencari dan menciptakan pekerjaan, membayai lansia, sesuai dengan komponen PKH. Jawaban lainnya adalah mereka menerima PKH karena termasuk orang miskin dan memiliki komponen penerima program, serta mereka merasa PKH seperti uang kaget karena tanpa mereka ketahui, mendapatkan bantuan tersebut.

Masalah kepantasan menerima program, sebagai besar responden mereka merasa pantas menerimanya (86,09 %). Hanya sebagian kecil saja yang mengaku bahwa mereka merasa tidak pantas menerimanya dibanding tetangga mereka (1,55 %), dan sisanya tidak memberikan tanggapan. Menurut responden yang merasa pantas, mereka memperoleh PKH, adalah warga yang masuk kategori miskin dan layak mendapatkan PKH bila dibandingkan dengan tetangga yang dipandang lebih mampu dari mereka dan mereka sangat membutuhkan program tersebut. Komponen program ini sangat menunjang dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari hari mengingat warga yang mendapatkan mempunyai pekerjaan yang tidak tetap, penghasilanya masih dibawah garis kemiskinan, serta mempunyai beban yang dianggap masih tinggi.

Terkait dengan ketepatan sasaran penerima program PKH, hanya sebagian kecil (1,24%) yang menyatakan tidak tepat, dan sebanyak 14,84 persen tidak menyatakan pendapatnya. Mayoritas (83,93%) menyatakan bahwa sasaran penerima program sudah. Menurut mereka, sasaran bantuan ini tepat karena sebagian ditujukan kepada orang tidak mampu bagi warga yang memiliki komponen PKH agar meringankan biaya hidup sehari hari. Namun masih ada juga yang menyatakan tidak tepat karena sebenarnya warga tersebut masuk kategori tetapi belum memperoleh dan sebaliknya warga yang memperoleh PKH seharusnya tidak memperoleh karena warga tersebut adalah warga yang mampu.

Mayoritas penerima menyatakan bahwa jenis dan jumlah bantuan PKH sudah sesuai dengan kebutuhan mereka (73,57%). Adapun 10,66 persennya menyatakan bahwa jenis dan jumlah tersebut belum sesuai dengan kebutuhan mereka, dan sisanya 15,77 persen tidak memberikan tanggapan. Menurut responden yang menjawab sesuai, bahwa PKH sampai saat ini masih sangat dibutuhkan warga, karena membantu biaya sekolah anak, membantu pemenuhan gizi ibu hamil, dan membantu pembiayaan sesuai dengan komponen PKH. Sedangkan besaran PKH relatif ada yang menganggap cukup tetapi ada juga yang mengatakan kurang sehingga perlu ditambah untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Program ini perlu diteruskan karena masih banyak dibutuhkan masyarakat, dan dijadikan ketika warga miskin sudah mampu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sesuai komponen PKH.

Berdasarkan dampaknya, sebagian besar menyatakan bahwa PKH sudah membantu atau berdampak pada kehidupan mereka (80,53%). Sebagian lagi menyatakan dana program PKH tersebut belum sepenuhnya membantu mereka mencukupi kebutuhan hidup (4,48%) sisanya sebesar 14,99 persen tidak memberikan tanggapan. Mereka menyatakan bahwa dengan adanya PKH pemenuhan kebutuhan hidup yang tadinya kurang menjadi cukup atau terpenuhi. PKH cukup meringankan beban keluarga, dan sebagian besar mengaku tidak bingung lagi jika harus membayar biaya sekolah. Sebagian besar responden merasa biaya kebutuhan sekolah terbantu dengan adanya PKH, namun tidak terlepas kebutuhan lain juga dipenuhi dari PKH.

Ketika ditanyakan tentang periode program, sampai kapan ingin menerima PKH, jawaban mereka cukup beragam. Jawaban terbesar adalah sampai anak lulus sekolah, dalam hal ini sampai komponen program tidak ada lagi. Jawaban mayoritas kedua adalah sampai programnya habis, dalam arti sampai pemerintah tidak mengeluarkan program PKH lagi atau sampai komponen dalam keluarga tidak ada lagi. Sebagian lagi (13,60%) menginginkan pemberian program ini selamanya.

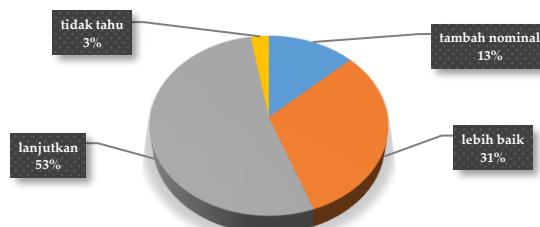
Tabel 3. Harapan Terhadap Penerimaan Program PKH

Lama membutuhkan PKH	Jumlah	%
Selamanya	88	13,60
Sampai habis programnya	147	22,72
1-3 tahun	5	0,77
Sampai anak lulus sekolah	263	40,65
Sampai saya mampu	1	0,15
Sampai tdk ada penerima program	56	8,66
NA	87	13,45

Kepada responden juga ditanyakan apakah ketika merasa sudah mampu mereka bersedia berhenti atau mengundurkan diri (exit) dari penerima program PKH. Sebanyak 68,93 persen mengatakan mereka mau mengundurkan diri jika merasa sudah mampu, namun 14,37 persen mengatakan tidak bersedia, dan sisanya 16,69 persen tidak berpendapat. Mereka yang bersedia berhenti menyatakan bahwa mau mundur karena harapannya bisa bergantian dengan keluarga lain yang belum mendapatkan. Sebagian mereka juga merasa memiliki kesadaran diri bahwa jika sudah mampu sebaiknya tidak menerima, dan lebih baik orang lain yang tidak mampu yang menerima. Mereka juga merasa kasihan dengan keluarga tidak mampu lainnya yang belum menerima PKH. Bagi yang belum mundur bersedia karena merasa tetap tidak mampu dan masih membutuhkan bantuan, masih banyak kebutuhan terutama sekolah. Sebagian lain menyatakan bahwa karena sebagai pekerja buruh, tidak menerima penghasilan dari suami/anak mereka. Sebagian kecil lainnya menyatakan bahwa mendapat atau tidak terserah pemerintah saja.

Ketika ditanyakan mengenai kekurangan program PKH, sebagian besar menjawab kekurangan program PKH adalah belum meratanya program ini, masih banyak yang belum menerima, sasaran penerima PKH perlu ditinjau kembali agar penerima PKH sesuai dengan komponen PKH. Sebagian lagi berpendapat agar kedepan perlu ditingkatkan nominalnya. Responden juga menganggap uang yang keluar tiap 3 bulan sekali belum sesuai harapan mereka, karena harapannya adalah 1 bulan sekali. Namun demikian sebagian yang lain menyatakan bahwa PKH ini sudah baik dan tidak ada kekurangan. Mereka merasa PKH sudah sangat membantu kehidupan sehari-hari, dan mampu mensejahterakan keluarga.

Beberapa usulan ke depan untuk perbaikan dilontarkan responden. Sebagian besar mereka berharap agar PKH terus dilanjutkan. Responden juga berharap agar pengelolaan lebih baik. Lebih tepat waktu pencairan. Sebagian lagi menginginkan agar nominal ditambahkan, serta pencairan dipercepat sebulan sekali. Namun demikian sebagian informan lain menyatakan bahwa PKH ini sudah baik dan tidak ada kekurangan. Mereka merasa PKH sudah sangat membantu kehidupan sehari-hari, dan mampu mensejahterakan keluarga. Beberapa usulan kedepan untuk perbaikan dilontarkan responden.



Gambar 1. Usulan Untuk PKH Kedepan

3.4. Pembaharuan PKH yang Diharapkan

PKH merupakan program yang memiliki persyaratan tertentu dan membutuhkan komitmen dari penerima. Penerima program ini ditentukan oleh pemerintah pusat (Kemensos) berdasarkan data yang tersedia, kemudian dilakukan verifikasi di lapangan. Isu pertama adalah menyangkut komitmen penerima program. Verifikasi komitmen memastikan penerima dilakukan melalui dua hal yaitu terdaftar (enrollment) pada data terpadu kesejahteraan sosial, serta kehadiran (attendance) pada fasilitas layanan yang dipersyaratkan.

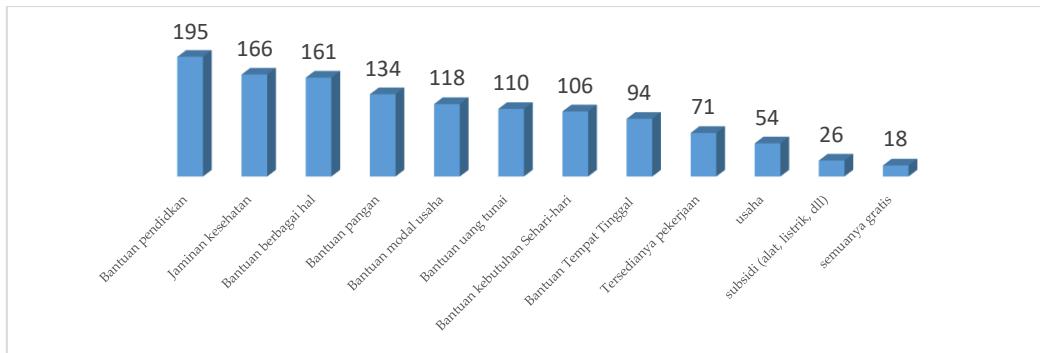
Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, penetapan yang sifatnya topdown ini masih menyisakan masalah sasaran yang kurang tepat karena adanya kesalahan data, sebaliknya di tingkat bawah menimbulkan konflik horizontal. Penerima PKH juga wajib mengakses layanan fasilitas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial yang berlaku untuk semua komponen penerima program. Keluarga penerima juga wajib tergabung dalam kelompok, dimana mereka harus menghadiri pertemuan kelompok atau pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2), akan tetapi akses masyarakat miskin terhadap kelembagaan atau kelompok terbilang cukup rendah. Ditemui di lapangan bahwa kebanyakan penerima program seperti PKH adalah mereka yang memiliki akses berkelompok, dan sebagian besar yang berkelompok adalah mereka yang secara sosial mendapatkan tempat di lingkungan. Masyarakat miskin yang kebanyakan adalah terpinggir secara sosial kadang kurang memiliki akses yang memadai, akibatnya akses mereka untuk mendapatkan bantuan cukup rendah.

Sebuah fenomena yang lazim ditemui di masyarakat, apalagi terkait dengan bantuan yang diberikan secara berkelompok adalah dibentuknya kelompok dari orang-orang tertentu. Banyak kelompok dibentuk untuk mengakses bantuan, dan yang terlibat adalah orang yang sama, itu-itu saja. Orang yang secara sosial derajatnya lebih tinggi lebih sering terlibat dalam kelompok, sehingga orang-orang inilah yang lebih sering menikmati bantuan. Sebaliknya masyarakat miskin yang cenderung terpinggir, kesempatan berkelompok kurang. Dengan demikian kesempatan mereka mendapatkan bantuan juga tidak terbuka lebar. Dari fenomena ini, masyarakat miskin yang semestinya memiliki hak untuk mendapatkan bantuan menjadi terpinggir karena ada sistem sosial yang meminggirkan mereka.

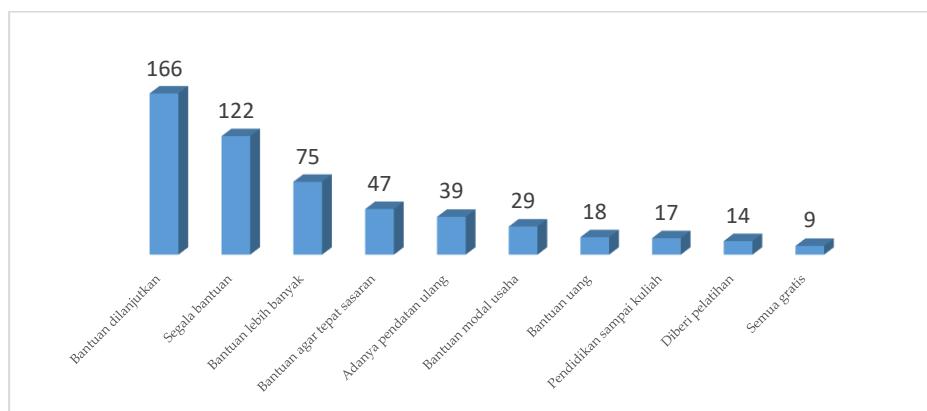
Dengan demikian, konsep kelompok yang selama ini ada, belum cukup optimal mengelola bantuan yang benar-benar mengarah ke orang miskin. Sebagaimana dikemukakan di atas, berbagai lembaga telah menjalankan program, tetapi sasarannya perlu dikoreksi. Fenomena orang miskin adalah kurang memiliki akses melalui lembaga yang ada untuk menerima bantuan. Oleh sebab itu perlu adanya kelembagaan sosial yang bisa difungsikan untuk melakukan advokasi terhadap kelompok miskin. Perlunya kelembagaan yang bisa menjadi sarana penyaluran hak orang miskin mendapatkan program dan bantuan.

Isu strategis lainnya adalah terkait dengan dampak PKH itu sendiri. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan, bahwa program ini memiliki tujuan menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian, mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan, serta mengurangi kemiskinan. Jika berkaca kepada hasil penelitian terdahulu sebagaimana dikemukakan sebelumnya, serta penggalian data lapangan, maka manfaat program PKH baru sebatas membantu meringankan beban pengeluaran pendidikan dan kesehatan, serta konsumsi sehari-hari. Manfaat PKH perlu didorong agar mewujudkan kemandirian keluarga miskin.

Penelitian ini juga telah menggali pendapat mengenai apa yang mereka butuhkan. Sebagian besar menyatakan bahwa orang miskin membutuhkan bantuan, terutama pendidikan, kesehatan, pangan, uang tunai dan berbagai bantuan lainnya. Sebagian juga menyatakan mereka membutuhkan bantuan modal, bantuan tempat tinggal, lapangan pekerjaan, pendampingan berusaha, dan subsidi.

**Gambar 2.** Hal-hal yang Dibutuhkan Orang Miskin Menurut Responden/Informan

Harapan penerima program terhadap pemerintah terkait dengan penanggulangan kemiskinan adalah agar program-program bantuan yang sudah berjalan tetap dilanjutkan, bahkan ditambah jumlah dan jenisnya. Sebagian responden juga menginginkan adanya evaluasi dan pendataan ulang agar bantuan tepat sasaran, pemberian bantuan modal, bantuan uang tunai, bantuan pendidikan, pelatihan dan meringankan beban dengan menggratiskan semua biaya untuk masyarakat miskin.

**Gambar 3.** Harapan Terhadap Penanggulangan Kemiskinan

Berdasarkan penjelasan di atas, pembaharuan terhadap PKH dapat dilihat dari berbagai aspek. Pertama adalah kebijakan berisi tentang konsep dan desain, kedua adalah aspek pengelolaan data, dan ketiga adalah manajerial kelembagaannya. Dari aspek kebijakan, perlunya kolaborasi dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten, bahkan desa memiliki komitmen mengawal PKH. Komitmen kebijakan ini tidak saja diwujudkan dalam regulasi berupa aturan, tetapi juga adanya alokasi sumberdaya yang memadai. Sinergi juga bukan berarti semua harus sama dan tulus, akan tetapi justru kebijakan tersebut harus mampu melihat realitas lapangan yang berbeda-beda. Maka, kebijakan baru yang diusulkan adalah bagaimana menerapkan prinsip bottom up, harus didahului dari usulan di tingkat bawah yang lebih memahami realitas lapangan.

4. Pembahasan

Desain program PKH harus mampu menghindari kesan charity atau pemberian hadiah semata. Selama ini penerima merasakan manfaat berupa terbantunya beban kebutuhan hidup mereka. Ketika dilihat lebih mendalam, penerima bantuan tersebut tidak sedikit yang sebenarnya tergolong keluarga produktif, berpotensi untuk mampu. Sebagian besar menyatakan ingin tetap mendapatkan bantuan sampai pemerintah menghentikannya, dan ditemukan bahwa bantuan yang diterima masyarakat relatif tidak berkelanjutan dan lebih bersifat konsumtif, bukan ke arah produktif. Oleh karena bantuan yang disampaikan sifatnya sesaat, belum ada bantuan yang berorientasi pada produktifitas kelompok masyarakat miskin agar mereka menjadi lebih produktif. Terdapat juga kecenderungan bantuan PKH

tidak dimanfaatkan sebagaimana peruntukannya. Misalnya bantuan sekolah digunakan untuk kebutuhan konsumtif. Dengan demikian orientasi program yang berharap bisa meringankan beban, dan jatuh ke tangan orang yang tidak miskin justru akan meningkatkan konsumerisme mereka. Perlunya PKH lebih mengarah peningkatan kapasitas dan pendapatan masyarakat miskin dalam rangka mencapai kemandirian masyarakat miskin.

Maka diusulkan suatu konsep terpadu program penanggulangan kemiskinan menjadi 5 area yang harus disentuh, yaitu: 1) penguatan organisasi masyarakat miskin; 2) pemberdayaan masyarakat; 3) perlindungan sosial; 4) peningkatan kapasitas masyarakat miskin; dan 5) perluasan kesempatan kerja. Prinsip tersebut bersifat keberlanjutan, bukan pemenuhan kebutuhan sesaat sebagaimana yang dominan saat ini.

Dalam kerangka penguatan organisasi masyarakat miskin, kondisinya adalah akses masyarakat miskin ke organisasi masih rendah, oleh sebab itu perlu adanya upaya penguatan akses, dan pelibatan masyarakat miskin di dalam setiap pengambilan kebijakan. Maka perlu memastikan bahwa masyarakat miskin memiliki akses yang terbuka terhadap lembaga pemberdayaan masyarakat. Dalam kerangka pemberdayaan masyarakat, program penanggulangan kemiskinan seyogyanya diarahkan yang bersifat produktif, melalui pelatihan, fasilitasi usaha, akses peralatan, modal, dan pasar. Dalam kerangka perlindungan sosial, program yang selama ini sebenarnya sudah memiliki orientasi yang kuat untuk perlindungan. Hanya saja perlu ada evaluasi terhadap data dan kriteria orang miskin sehingga sasarannya lebih tepat, serta penggunaanya. Dalam kerangka peningkatan kapasitas masyarakat miskin, maka fokus program adalah peningkatan kapasitas dan daya saing orang miskin melalui perbaikan kesehatan, pendidikan, dan keterampilan sehingga bisa menjadi kelompok masyarakat produktif. Dalam kerangka Perluasan kesempatan kerja tersebut disamping pada lapangan kerja yang bersifat padat karya, juga yang berkelanjutan. Peluang lapangan kerja di sektor lainnya agar diperluas yang dapat sehingga memberikan/ membuka lapangan kerja baru terutama di sektor ekonomi kreatif. Hal ini sesuai dengan kecenderungan masyarakat miskin dimana sebagian besar memiliki keterbatasan akses terhadap sektor pekerjaan formal. Oleh sebab itu sektor informal dan industri kreatif perlu didorong sebagai salahsatu alternatif utama menciptakan lapangan kerja.

Konteks pengolahan dan pemutakhiran data, merupakan hal yang esensial karena semua keberhasilan program bergantung dari baik atau buruknya data. Sebagaimana dikemukakan di atas, bahwa sumber masalah utama program penanggulangan kemiskinan adalah banyak data salah sehingga sasaran program menjadi kurang tepat bahkan menimbulkan konflik di masyarakat. Updating data di tingkat desa terbentur pada permasalahan politik (pendukung, kerabat, atau orang dekat), dan tidak tersedianya dana. Oleh karena itu, data dimulai di tingkat bawah (desa) diterapkan sistem pemutakhiran yang sensitif dengan kondisi riil di lapangan. Untuk masalah updating data, maka sinergi antara pemerintah daerah (sampai tingkat desa) dengan Kementerian Sosial dengan mengoptimalkan sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial menjadi kunci utamanya. Updating data dilakukan setiap bulan untuk menjamin akurasi guna menghindari salah sasaran penerima bantuan.

Menyikapi masalah sistem, maka sebaiknya otoritas verifikasi dan validasi data sebaiknya diserahkan kepada daerah, kabupaten maupun provinsi, meskipun indikator kemiskinan masih tetap menjadi kewenangan pusat. Dengan demikian, perbaikan database kemiskinan adalah mendelegaikan kewenangan sampai tingkat bawah, serta memadukan berbagai sumberdaya. Selanjutnya dibentuk tim independen di tingkat desa, dan kewenangan terhadap perubahan data ada di tingkat provinsi. Pemerintah pusat memberikan arahan kebijakan kriteria kemiskinan yang sensitif terhadap isu lokal sebagai instrumen pendataan keputusan terhadap data yang telah ditetapkan di tingkat provinsi. Sistem database kemiskinan bisa disinkronkan dengan sistem informasi data kependudukan, sistem informasi desa. Kewenangan pemetaan dan pendataan masyarakat miskin diserahkan pada daerah yaitu provinsi, sedangkan pemerintah pusat cukup menentukan kriteria miskin yang disusun bersama antara pemerintah pusat dengan daerah.

Konteks lembaga manajerial pelaksanaan terlebih dahulu harus membuka akses kepada kelompok termiskin. Akses masyarakat miskin terhadap kelembagaan atau kelompok terbilang cukup rendah

perlu ditingkatkan. Kelembagaan yang selama ini ada, belum cukup optimal mengelola bantuan yang benar-benar mengarah ke orang miskin. Sebagaimana dikemukakan di atas, berbagai lembaga telah menjalankan program, tetapi sasarannya perlu dikoreksi. Fenomena orang miskin adalah kurang memiliki akses melalui lembaga yang ada untuk menerima bantuan. Oleh sebab itu perlu adanya kelembagaan sosial yang bisa difungsikan untuk melakukan advokasi terhadap kelompok miskin. Perlunya kelembagaan yang bisa menjadi sarana penyaluran hak orang miskin mendapatkan program dan bantuan. Stakeholder PKH semestinya lebih aktif menjaring masyarakat termiskin agar tergabung dalam kelompok. Melalui kelompok ini keluarga termiskin memiliki akses untuk mendapatkan layanan sosial, peningkatan kapasitas dan memiliki kesempatan terlibat dalam memutuskan kebijakan. Peran kelompok PKH, Kelompok Usaha Bersama (KUBe), dan e-warong memfasilitasi pemberdayaan masyarakat seperti pelatihan, fasilitas usaha, fasilitasi sarana produksi dan pasar, serta jejaring telah dilaksanakan oleh kelompok tersebut.

Perbaikan program yang dibutuhkan sesuai penjelasan di atas adalah memiliki dimensi keberlanjutan, menjadikan masyarakat sebagai subjek dimana mereka ikut menentukan program yang akan dijalankan. Desain PKH akan lebih baik jika mampu melibatkan masyarakat dalam perencanaan program dan kegiatan, meningkatkan ketahanan keluarga dalam menghadapi berbagai situasi atau kesulitan, serta mengedukasi masyarakat miskin agar berdaya, dan meningkatkan kualitas hidupnya.

5. Kesimpulan

Implementasi program PKH di Jawa Tengah dari aspek prosedur dan manajerial secara umum mendapat tanggapan positif, dimana 74,65 persen responden menyatakan adanya kemudahan program, 81,30 persen menyatakan pengelolaan sudah baik, dan 71,72 persen menyatakan adanya manfaat nyata dari PKH. Dampak langsung dari PKH adalah membantu masyarakat memenuhi kebutuhan hidup dari segi pendidikan dan kesehatan. Di sisi lain masih ditemukan beberapa kendala, yaitu sasaran program yang masih kurang tepat dimana masih ditemukan orang yang tidak miskin mendapatkan bantuan dan sebaliknya yang miskin belum mendapat bantuan. Hal ini diakibatkan oleh data yang masih belum valid, proses yang *topdown*, serta pemutakhiran data di tingkat desa menghadapi masalah politik, sosial, dan pendanaan. Akibatnya di sebagian wilayah terjadi konflik horizontal di masyarakat. Penggunaan bantuan PKH juga belum optimal sesuai ketentuan (pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial) masih banyak digunakan untuk kebutuhan konsumtif lainnya. Hal ini memperkuat hasil pendapat bahwa bantuan PKH memberi sumbangan pada perbaikan di bidang pendidikan dan kesehatan, namun belum berkontribusi di bidang ekonomi/kesejahteraan secara langsung. Dari sisi manajerial, pemerintah kabupaten/kota dan provinsi belum berkontribusi untuk mengalokasikan dana dan SDM sebagi pendamping PKH atau mendanai masyarakat miskin yang tidak *tercover* PKH dari pemerintah.

PKH merupakan program penanggulangan kemiskinan yang paling populer di masyarakat. Bagi penerima PKH, program ini sangat membantu kehidupan mereka, namun bagi yang tidak menerima merasa bahwa sasaran program PKH belum tepat dan kurang adil. Masih warga miskin banyak yang belum menerima, sebaliknya yang denggap tidak miskin justru memperoleh PKH. Sebagian besar masyarakat menginginkan PKH tetap berlanjut namun dengan perbaikan terutama data dan sasaran pogram sehingga tidak menimbulkan konflik dan kecurigaan. Dari aspek nominal bantuan diharapkan diperbesar serta pencairan sebulan sekali.

Konsep pembaharuan program PKH dapat dilihat dari berbagai aspek yaitu kebijakan, pengelolaan data, dan manajerial kelembagaannya. Kebijakan adalah bagaimana menerapkan prinsip *bottom up*, harus didahului dari usulan di tingkat bawah yang lebih memahami realitas lapangan, dan desain program PKH harus mampu menghindari kesan *charity* atau pemberian hadiah semata, namun mendorong produktifitas. Pengolahan dan pemutakhiran data dimulai tingkat desa dengan sistem pemutakhiran yang sensitif dengan kondisi riil di lapangan. Dari aspek kelembagaan, kelompok PKH aktif menjaring kelompok-kelompok termiskin agar memiliki akses untuk mendapatkan layanan sosial, peningkatan kapasitas dan kesempatan teribat dalam memutuskan kebijakan. Perbaikan

program yang dibutuhkan adalah memiliki dimensi keberlanjutan, menjadikan masyarakat sebagai subjek dimana mereka ikut menentukan program yang akan dijalankan.

6. Saran

Beberapa saran yang dapat disampaikan dari temuan di atas adalah: 1) untuk menyikapi banyaknya salah sasaran dalam pendataan, perlu diterapkan sistem pemutakhrian data yang terintegrasi dengan sistem informasi data kependudukan, serta dilakukan oleh tim independen yang bebas kepentingan politik. Kolaborasi dalam pendanaan dan SDM antara pemerintah desa, kabupaten/kota, dan provinsi, dan otoritas penetapan sasaran sebaiknya diserahkan ke pemerintah daerah yang lebih memahami kondisinya. 2) Perlunya pendidikan atau edukasi secara berkelanjutan melalui berbagai media kepada masyarakat terkait untuk lepas dari kemiskinan dan kesadaran untuk menyampaikan data yang benar. 3) Sifat program selain perlindungan sosial juga diarahkan kepada peningkatan kapasitas miskin melalui pelatihan, meningkatkan daya saing dan produktif. 4) Perlunya peranserta pemerintah daerah dalam pendampingan PKH baik dengan penambahan kuota atau SDM pendamping

Ucapan terimakasih: Artikel ini merupakan bagian dari penelitian Penyusunan Desain Penanggulangan Kemiskinan Di Jawa Tengah. Penulis menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah, pejabat pelaksana kegiatan, serta seluruh anggota tim yang terlibat. Ucapan terimakasih juga kami sampaikan kepada perangkat daerah, perangkat desa, serta tokoh masyarakat di lokasi penelitian yang telah memfasilitasi dan membantu terlaksananya penelitian dan penyusunan naskah laporan ini.

Daftar Pustaka

- Ardianti, E., Rumzi, S & Edison. (2018). Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Di Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang. <http://repository.umrah.ac.id/260/1/JURNAL.pdf>, 2018
- Arikunto, S. (2007). Manajemen Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ariyani, N., Fauzi, A., Juanda, B & Beik, I, S. (2015). Evaluasi Pogram Pengentasan Kemiskinan Menggunakan Metode Rappoverty (Evaluation of Poverty Alleviation Programs Using The Rappoverty Method). Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik, Vol. 6, No. 2, Desember 2015. Hal. 181–197. <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/ekp>
- Biro Humas Setda Pemprov Jateng. 2019. 'Luluskan' 256 Ribu Lebih PKM PKH, Jateng Terima Penghargaan. (27 November 2019). https://humas.jatengprov.go.id/detail_agenda?id_aktor=2&tanggal=2019-11-27, diakses tanggal 10 Februari 2020
- Badan Pusat Statistik. (2019). Penghitungan dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia.<https://www.bps.go.id/publication>. Diakses 10 Februari 2020
- Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. (2015). Kajian Program Keluarga Harapan,<http://www.anggaran.depkeu.go.id/content/Publikasi/Kajian%20dan%20artikel/Kajian%20PKH.pdf>, diakses tanggal 10 februari 2020
- Habibullah, Sugiyanto, Sitepu, A., Irmayani, N, R., Susantyo, B., Mujiyadi, B., Nainggolan, T. (2017). Pemanfaatan Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan. Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI - Jakarta
- Hanif., Hasrul., Fatimah, D., Zubaedah, A., Juhriati, Suvianita, K., Adhi, W & Maci, Z. (2015). Mewujudkan Program Keluarga Harapan (PKH) yang Lebih Bermakna: Analisa Gender Terhadap Implementasi PKH di Kabupaten Sidoarjo (Jawa Timur) dan Kabupaten Bima (NTB). Friedrich-Ebert-Stiftung Kantor Perwakilan Indonesia, bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Perhimpunan Aksara, Jakarta, <https://library.fes.de/pdf-files/bueros/indonesien/12590.pdf>, diakses tanggal 15 Februari 2020
- Hidayat, S. (2018). Seminar Nasional Teknologi dan Bisnis 2018. IIB Darmajaya, Bandar Lampung, Hal 194 -202
- Isdijoso, Widjajanti., Hastuti, M., Mawardi, Sri Budiyati, S., Rosfadhila, M., Febriany, V & Sodo, R, J. (2018). Persepsi Penerima Manfaat Program Penanggulangan Kemiskinan: Studi Kasus Tiga Kelurahan di

- Provinsi DKI Jakarta. Laporan Penelitian SMERU Tahun 2018. <http://smeru.or.id/id/content/monitoring-rumah-tangga-sasaran-rts-penerima-program-bantuan-pemberdayaan>
- Isnani, R. (2018). Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Karang Rejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung Bandar Lampung. <http://digilib.unila.ac.id/31597/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>
- Kementerian Sosial RI. 2019. Apa Itu Program Keluarga Harapan. <https://pkh.kemsos.go.id/?pg=tentangpkh-1>
- Kholif, K., I., Noor, I & Siswidiyanto. (2014). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Kecamatan Dawarbandong Kabupaten Mojokerto, *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 2, No. 4, Hal. 709-714, 2014.
- Kompas, (19 Nopember 2019), Sebagian-Besar-Penerima-Bantuan-Pkh-Di-Jateng-Mundur-Merasa-Sudah-Mampu. https://regional.kompas.com/read/2019/11/19/19054591/_sebagian-besar-penerima-bantuan-pkh-di-jateng-mundur-merasa-sudah-mampu, diakses tanggal 10 Februari 2020
- Nainggolan, T., Sutaat, Sitepu,A., Padmi, T. A., Muchtar, Irmayani, N, R & Hutapea, B. (2012). Program Keluarga Harapan Di Indonesia: Dampak Pada Rumah Tangga Sangat Miskin di Tujuh Provinsi. Jakarta: P3KS Press.
- Nainggolan, T. (2019). Aspek Gender Dalam Program Keluarga Harapan Gender Aspects In The Hope Family Program. *Sosio Informa* Vol. 5, No. 01, Januari - April, Tahun 2019
- Rahmawati, E., Kisworo, B. (2017). Peran Pendamping dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin melalui Program Keluarga Harapan. *Journal of Nonformal Education and Community Empowerment*. Volume 1 (2): 161-169, Desember 2017. <http://jurnal.unnes.ac.id/sju/index.php/jnfc>
- Saraswati, A. (2018). Analisis Pengaruh Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Pengentasan Kemiskinan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Pekon Pandansurat Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu). Skripsi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan. Lampung. <http://repository.radenintan.ac.id/4302/1/skripsi%20April.pdf>
- Suleman, S, A & Resnawaty, R. (2017). Program Keluarga Harapan (Pkh): Antara Perlindungan Sosial Dan Pengentasan Kemiskinan. PROSIDING KS Peneltian dan Pengabdian Kepada Masyarakat; Departemen Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjajaran, 2017. : riset & PKM volume: 4 nomor: 1 HAL: 1 –140.<http://jurnal.unpad.ac.id/prosiding/article/view/14213/6876>
- Syahriani. (2016). Kontribusi Program Keluarga Harapan Dalam Menunjang Pendidikan Siswa Kurang Mampu di Desa Marioriaja Kecamatan Marioriwato Kabupaten Soppeng. Skripsi. Program Studi Pendidikan Sosiologi. Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar <http://eprints.unm.ac.id/4423/1/syahriani.pdf>
- Tirani, O. (2017). Implementasi Program Keluarga Harapan Di Dinas Sosial Kabupaten Poso. *Jurnal Katalogis*, Volume 5 Nomor 6, Juni 2017 hlm 1-9
- Umaroh, F., Sutjiatmi, S. (2019). Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Kupu Kecamatan Dukuhputri Kabupaten Tegal. *Pancasakti Government Journal*. Vol 2 No 2 (2019), <http://e-journal.upstegal.ac.id/index.php/pgj>,
- Usman, H & Akbar, P. S. (2008). Metodologi Penelitian Sosial. Jakarta: Bumi Akasara.
- Utomo, D., Hakim, A & Ribawanto, H. (2014). Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Rumah Tangga Miskin (Studi pada Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 2, No. 1, Hal. 29-34 2014



© 2020 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).



Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Peningkatan Kemandirian Penerima Manfaat Program Kotaku dan Dompet Dhuafa

Muhtadi^{1*}, Aida Vitayala S Hubeis², Pudji Muljono² dan Ninuk Purnaningsih²

¹ Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta;

² Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor;

* Korespondensi: muhtadi@uinjkt.ac.id; Tel: +6285716251155

Diterima: 13 Nopember 2019; Disetujui: 26 Oktober 2020; Diterbitkan: 28 Desember 2020

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh faktor eksternal dan mekanisme program terhadap efektivitas pemberdayaan ekonomi produktif dan tingkat kemandirian penerima manfaat program yang ada di wilayah Provinsi Jawa Barat. Metode penelitian yang digunakan survei melalui kuesioner serta diolah dengan program SPSS. Hasil penelitian menunjukkan pada variabel faktor eksternal, indikator peran nilai-nilai agama, peran nilai-nilai sosial dan potensi pasar berkategori tinggi. Sedangkan dari indikator dukungan komunitas, kepemimpinan formal dan non formal berkategori sedang. Pada variabel mekanisme program yang memiliki indikator diantaranya; sosialisasi program, penyaluran dana, kesepakatan pengembalian, pemberian sanksi dan penghargaan menunjukkan kategori tinggi. Sedangkan indikator pemilihan kegiatan usaha masuk pada kategori sedang. Selanjutnya variabel efektivitas pemberdayaan ekonomi produktif di dalamnya ada indikator yaitu efektivitas pemberian bantuan teknis dan efektivitas penguatan kapasitas sama-sama mempunyai kategori tinggi. Variabel tingkat kemandirian penerima manfaat program terdapat beberapa indikator yakni tingkat pendapatan, tingkat investasi usaha, dan tingkat kemitraan usaha berada pada kategori tinggi. Adapun bila dilihat dari pengaruh secara parsial variabel kondisi lingkungan eksternal terhadap efektivitas pemberdayaan ekonomi produktif sebesar 28,6 %, pengaruh secara parsial variabel mekanisme program terhadap efektivitas pemberdayaan ekonomi produktif sebesar 32,7%, melihat dari pengaruh secara simultan dari kondisi lingkungan eksternal dan mekanisme program terhadap efektivitas pemberdayaan ekonomi produktif sebesar 37,9% dan pengaruh secara simultan dari efektivitas pemberdayaan ekonomi produktif terhadap tingkat kemandirian penerima manfaat program sebesar 87,1%.

Kata kunci: Pemberdayaan, Ekonomi Produktif, Kemandirian

Abstract: The objectives of this research was to analyze the influence of external factors and program mechanisms on the effectiveness of productive economic empowerment and the level of self-reliance of program beneficiaries in the province of West Java. The research method used a survey through a questionnaire and was processed by the SPSS program. The results showed that the external factors, indicators of the role of religious values, the role of social values and market potential are categorized as high. While from the indicators of community support, formal and informal leadership are in the medium category. In the program mechanism variables that have indicators including; program socialization, distribution of funds, repayment agreements, sanctions and awards showed a high category. While the indicators for selecting business activities are in the medium category. Furthermore, there is an indicator of the effectiveness of productive economic empowerment in which there are indicators, namely the effectiveness of providing technical assistance and the effectiveness of capacity building are equally high. The variable level of self-reliance of the beneficiaries of the program there are several indicators namely the level of income, the level of business investment, and the level of business partnership are in the high category. Meanwhile, when viewed from the partial influence of external environmental conditions variables on the effectiveness of productive economic empowerment by 28.6%, the partial effect of program mechanism variables on the effectiveness of productive economic empowerment is 32.7%, seeing from the simultaneous influence of external environmental conditions and mechanisms. program on the effectiveness of productive economic empowerment was 37.9% and the simultaneous effect of the effectiveness of productive economic empowerment on the level of independence of program beneficiaries was 87.1%.

Keywords: Empowerment, Productive Economy, Self-Reliance

1. Pendahuluan

Salah satu masalah sosial yang dihadapi oleh negara maupun warga masyarakat adalah kemiskinan. Secara ekonomi, kemiskinan dapat didefinisikan sebagai kekurangan sumber daya yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan individu, kelompok, masyarakat. Sumber daya yang dimaksudkan di sini tidak hanya aspek finansial, melainkan semua jenis kekayaan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam arti luas. Menurut Saad dan Ahmad (2006), kemiskinan selalu dihubungkan dengan tingkat pendapatan yang bisa dibedakan menjadi kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut adalah jika seorang individu atau warga dengan penghasilan tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar, baik berupa makanan maupun non makanan. Kemiskinan relatif menunjukkan tingkat ketimpangan dalam distribusi atau pembagian pendapatan diantara berbagai golongan warga masyarakat, antar daerah maupun antar sektor kegiatan ekonomi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan) di Indonesia per Maret 2017 mencapai 27,77 juta orang (10,70 persen).

Kenyataan kemiskinan tersebut menyebabkan berbagai pihak yakni pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan perusahaan swasta ikut berpartisipasi dan berkontribusi untuk menurunkan angka kemiskinan tersebut. Salah satu upaya dari pemerintah, lembaga swadaya masyarakat dan perusahaan swasta untuk mengentaskan kemiskinan adalah menciptakan dan mengembangkan program pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi produktif untuk peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya program tersebut diharapkan dapat menumbuhkan kemandirian ekonomi.

Beberapa program pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi produktif yang dilaksanakan pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, maupun perusahaan swasta, antara lain: Pertama, Karya Masyarakat Mandiri Dompet Dhuafa yang telah melakukan program-program sebagai berikut: a) Program Pemberdayaan pertanian dengan jumlah 2.846 penerima manfaat program di 21 Lembaga Koperasi di 21 Kabupaten/kota; b) Program pemberdayaan Peternakan dengan jumlah 4.818 penerima manfaat program di 26 lembaga lokal di 32 Kabupaten; dan c) Program Pemberdayaan UMKM dan Pesisir dengan jumlah penerima manfaat program yakni 10.082 di 32 lembaga lokal/ koperasi di 32 Kabupaten/Kota. Kedua, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) melalui program Zakat Community Development dengan jumlah penerima manfaat program sebanyak 6.913 kepala keluarga atau 25.004 jiwa di 10 propinsi. Program ini dalam rangka meningkatkan kesejahteraan para mustahik yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Ketiga, Rumah Zakat yang telah melakukan program-program pemberdayaan antara lain; a) bantuan wirausaha dengan jumlah 95.612 penerima manfaat program b) Pembinaan masyarakat dengan jumlah 416.862 penerima manfaat program c) program bantuan ekonomi lainnya dengan jumlah 39.255 penerima manfaat programnya, dan d) program gaduh sapi dan domba dengan jumlah 17.587 penerima manfaat program di 16 kabupaten/kota. Keempat, PNPM Pinjaman dana bergulir antara lain; pada Bulan Desember tahun 2016 wilayah I dengan jumlah anggota KSM penerima pinjaman yakni 1.123.147 jumlah anggota perempuan KSM penerima pinjaman yakni 773.089 dan jumlah anggota miskin KSM penerima pinjaman yakni 1.088.691 di 13 Provinsi. PNPM Pinjaman dana bergulir Desember tahun 2016 wilayah II dengan jumlah anggota KSM penerima pinjaman yakni 2.749.659 jumlah anggota perempuan KSM penerima pinjaman yakni 1.897.949 dan jumlah anggota miskin KSM penerima pinjaman yakni 2.620.757 di 13 Provinsi. Kelima, Astra untuk Indonesia kreatif dengan program-program antara lain; a). program UMKM Binaan Astra dengan jumlah yakni 10.847 penerima manfaat; b). program masyarakat penerima program dengan jumlah 97.641 penerima manfaat; c). program lembaga pengembangan bisnis dengan jumlah 16 lembaga; d). program lembaga keuangan mikro dengan jumlah 10 lembaga; e). Program diffal binaan dengan jumlah 200 individu.

Pada kenyataannya bahwa pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi produktif dengan pendanaan yang bersumber dari zakat, APBN maupun tanggung jawab sosial perusahaan belum menumbuhkan kemandirian usaha pada penerima manfaatnya. Hal ini berimplikasi bahwa penerima manfaat program masih bergantung pada bantuan yang ada, mereka belum mampu memandirikan

dirinya dalam kegiatan usahanya. Pada kaitan ini, program dan kegiatan pemberdayaan lebih menekankan pada bantuan teknis sementara perubahan-perubahan perilaku yang memandirikan belum dapat diwujudkan.

Keberlanjutan dan kemandirian usaha belum tumbuh pada penerima manfaat program pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi produktif karena faktor-faktor antara lain; belum adanya sistem distribusi yang baik (Toro *et al.* 2013), nilai dan frekuensi zakat yang rendah (Saptia 2013), kurangnya pengetahuan tentang pasar dan potensi profitabilitas (Saha 2014), perlunya prosedur mekanisme pengawasan terhadap para penerima manfaat dana (Ibrahim *et al.* 2014), kekurangan modal usaha (Ismail 2015), program pemberdayaan ekonomi masih bersifat preventif (Heryani *et al.* 2017), karena buruknya kinerja fasilitator dan kesalahan stakeholders memahami tujuan PNPM (Muslim 2017) dan sarana prasarana pendukung yang kurang.

Sedangkan faktor-faktor yang berpengaruh pada keberlanjutan dan kemandirian usaha antara lain; berdasarkan riset Yanti *et.al* (2018) persepsi pelaku UMKM dan pemanfaatan TIK secara langsung dalam kegiatan usaha. Ritonga *et. al* (2020) tingkat literasi keuangan syariah berpengaruh signifikan terhadap meningkatnya pendapatan usaha. Hasil riset Faizal (2014) bahwa strategi untuk mengembangkan kemandirian pelaku UMK dilakukan melalui peningkatan keberdayaan, meningkatkan kualitas lingkungan pendukung UMK, dan meningkatkan intensitas pemberdayaan pelaku UMK baik berupa kegiatan edukasi, fasilitasi maupun representasi.

Berdasarkan riset-riset terdahulu di atas, penelitian ini ingin melihat faktor-faktor yang menpengaruhi kemandirian usaha penerima manfaat program pada faktor lingkungan eksternal, mekanisme program dan efektivitas program pemberdayaan ekonomi produktif. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis pengaruh faktor lingkungan eksternal dan mekanisme program terhadap efektivitas program pemberdayaan ekonomi produktif dan tingkat kemandirian penerima manfaat pada Program Kotaku dan Dompet Dhuafa di Provinsi Jawa Barat.

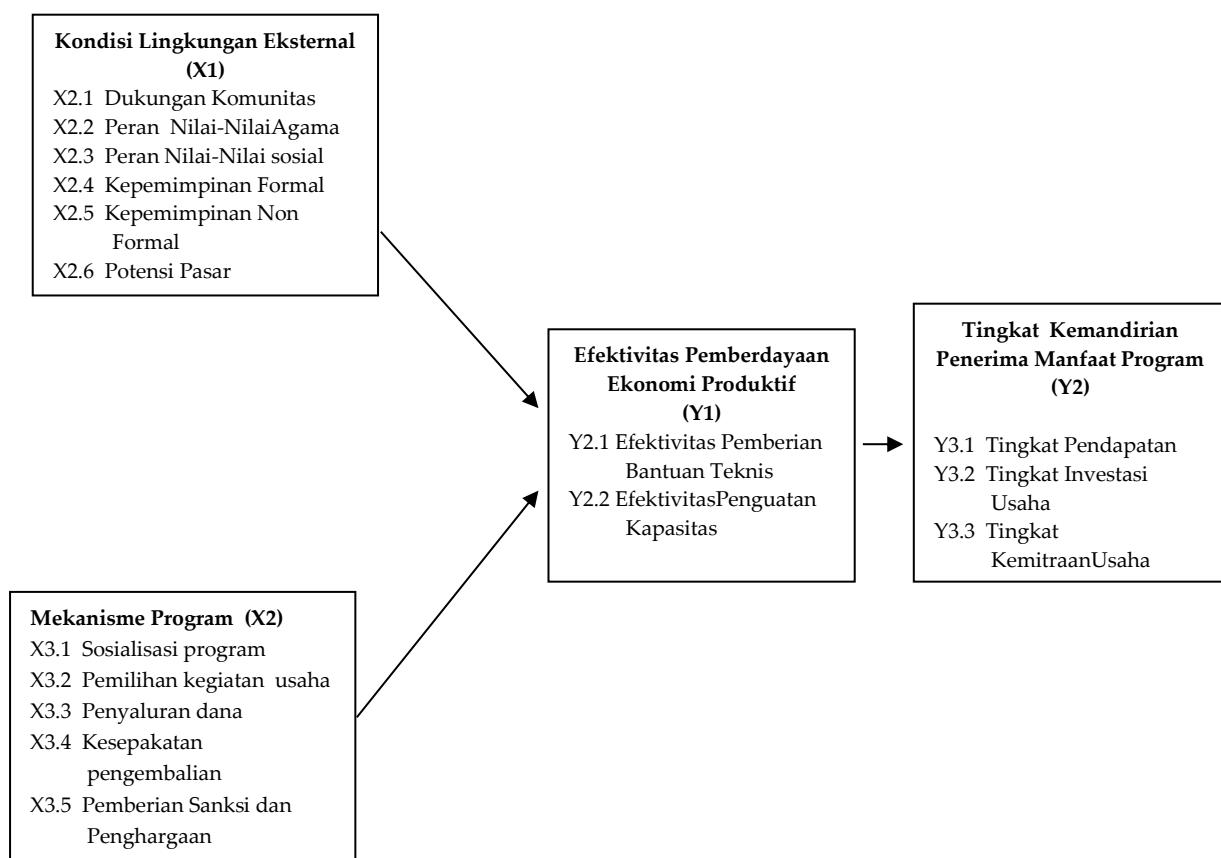
2. Metode

Penelitian ini dirancang sebagai penelitian survei yang bersifat deskriptif. Penelitian dilakukan pada tiga kabupaten dan satu kota di Provinsi Jawa Barat, yaitu Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Sukabumi, pada bulan Mei-September 2019. Pemilihan Kabupaten Bogor dan Kota Bogor didasarkan bahwa kedua wilayah ini memiliki penerima manfaat terbanyak Program Kotaku di Provinsi Jawa Barat. Sedangkan Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Sukabumi merupakan lokasi program pemberdayaan ekonomi produktif yang dikelola Karya Masyarakat Mandiri Dompet Dhuafa yang memiliki tingkat keberhasilan yang cukup baik. Populasi penelitian ini adalah penerima manfaat Program Kotaku dan Program Dompet Dhuafa yang berjumlah 1515 orang. Penentuan sampel dilakukan melalui rumus slovin. Total sampel penelitian adalah 316 yang ditentukan secara proporsional. Sebagaimana terlihat pada tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1.Jumlah populasi dan jumlah sampel penelitian

Lokasi	Lembaga/Program	Populasi Penerima Manfaat	Sampel
Cianjur	Lumbung Desa KMM	200	41
	Dompet Dhuafa		
Cianjur	Hortikultura KMM Dompet Dhuafa	30	7
Sukabumi	Program Peternakan KMM	35	10
	Dompet Dhuafa		
Bogor	Program Kotaku	925	192
Kota Bogor	Program Kotaku	325	66
Total		1515	316

Peubah penelitian terdiri dari peubah bebas dan peubah terikat. Efektivitas pemberdayaan ekonomi produktif (Y_1) dan tingkat kemandirian penerima manfaat program (Y_2) sebagai peubah terikat (*dependent variable*). Sedangkan sebagai peubah bebas (*independen variable*), kondisi lingkungan eksternal (X_1) dan mekanisme program pemberdayaan (X_2). Adapun definisi operasional dari Efektivitas Program Pemberdayaan Ekonomi Produktif (Y_1) adalah ketepatan tujuan dan implementasi program pemberdayaan dalam pemberian bantuan teknis dan penguatan kapasitas penerima manfaat program, Tingkat Kemandirian Penerima Manfaat Program (Y_2), adalah kondisi perilaku penerima manfaat yang menunjukkan tingkat Pendapatan, tingkat keuntungan dan tingkat kemitraan usaha, Kondisi lingkungan eksternal (X_1), adalah kondisi lingkungan eksternal untuk merubah perilaku penerima manfaat program yang menunjukkan dukungan keluarga, dukungan komunitas, peran nilai-nilai agama dan sosial, kepemimpinan formal dan non formal serta dukungan konsumen dan dukungan pasar, Mekanisme Program Pemberdayaan Masyarakat (X_2) adalah proses program pemberdayaan masyarakat yang diimplementasikan di lapangan yang berkaitan dengan sosialisasi program, penyaluran dana, kesepakatan pengembalian, pemberian sanksi dan penghargaan. Kemudian dalam penelitian ini dikumpulkan data dengan cara mengkonfirmasi data yang sudah ada kepada responden dengan menggunakan daftar pertanyaan (*questionnaire*) yang telah dipersiapkan. Berikut ini kerangka konseptual penelitian ini.



Gambar 1. Kerangka Konseptual Penelitian

3. Hasil

Kondisi Lingkungan Eskternal meliputi dukungan komunitas, peran nilai-nilai agama, peran nilai-nilai sosial, kepemimpinan formal, kepemimpinan non formal, dan potensi pasar. Secara lebih rinci dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Analisis deskriptif kondisi lingkungan eksternal

Kondisi Lingkungan Eksternal	Kategori	Program Total
		Orang
Dukungan Komunitas Rataan Skor 16	Rendah (skor 1– 15)	162
	Sedang (skor 16 – 30)	167
	Tinggi (skor 31-46)	1
Peran Nilai-Nilai Agama Rataan Skor 14	Rendah (skor 1-5)	0
	Sedang (skor 6-10)	2
	Tinggi (skor 11-16)	328
Peran Nilai-Nilai Sosial Rataan Skor 13	Rendah (skor 1 – 5)	5
	Sedang (skor 6 – 10)	24
	Tinggi (skor 11-16)	301
Kepemimpinan Formal Rataan Skor 10	Rendah (skor 1 – 5)	4
	Sedang (skor 6 – 10)	218
	Tinggi (skor 11-16)	108
Kepemimpinan non Formal Rataan Skor 10	Rendah (skor 1-5)	49
	Sedang (skor 6 – 10)	93
	Tinggi (skor 11-16)	188
Potensi Pasar Rataan Skor 13	Rendah (skor 1 – 5)	6
	Sedang (skor 6 – 10)	28
	Tinggi (skor 11- 16)	296

Mekanisme program meliputi sosialisasi program, pemilihan kegiatan usaha, penyaluran dana, kesepakatan pengembalian, pemberian sanksi dan penghargaan. Secara lebih rinci dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Analisis deskriptif mekanisme program

Mekanisme Program	Kategori	Total
		Orang
Sosialisasi Program Rataan Skor 16	Rendah (1-7)	17
	Sedang (skor 8 – 14)	28
	Tinggi (skor 15-20)	285
Pemilihan Kegiatan Usaha Rataan Skor 11	Rendah (1-8)	107
	Sedang (skor 9 – 16)	220
	Tinggi (17-23)	3
Penyaluran dana Rataan Skor 17	Rendah (skor 1-7)	1
	Sedang (skor 8 – 14)	16
	Tinggi (skor 15-20)	313
Kesepakatan Pengembalian Rataan Skor 13	Rendah (skor 1-5)	8
	Sedang (skor 6 – 10)	11
	Tinggi (skor 11-16)	311
Pemberian Sanksi dan Penghargaan Rataan Skor 13	Rendah (skor 1-5)	11
	Sedang (skor 6 – 10)	37
	Tinggi (skor 11 – 16)	282

Efektivitas pemberdayaan ekonomi produktif meliputi efektivitas pemberian bantuan teknis dan efektivitas penguatan kapasitas, tersaji pada Tabel 4.

Tabel 4. Efektivitas pemberdayaan ekonomi produktif

Y1 Efektivitas Pemberdayaan	Kategori	Program Total
		Orang
Efektivitas Pemberian Bantuan Teknis Rataan Skor 15	Rendah (skor 1 - 7)	4
	Sedang (skor 8 - 14)	112
	Tinggi (skor 15 - 20)	214
Efektivitas Penguatan Kapasitas Rataan Skor 20	Rendah (skor 1 - 9)	21
	Sedang (skor 10 - 18)	76
	Tinggi (skor 19 - 28)	233

Tingkat kemandirian penerima manfaat program meliputi tingkat pendapatan, tingkat investasi usaha, dan tingkat kemitraan usaha. Secara lebih rinci dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Tingkat kemandirian penerima manfaat program

Y2 Tingkat Kemandirian	Kategori	Program Total
		Orang
Tingkat Pendapatan Rataan Skor 12	Rendah (skor 1 - 5)	2
	Sedang (skor 6 - 10)	68
	Tinggi (skor 11 - 16)	260
Tingkat Investasi Usaha Rataan Skor 17	Rendah (skor 1 - 8)	11
	Sedang (skor 9 - 16)	100
	Tinggi (skor 17 - 24)	219
Tingkat Kemitraan Usaha Rataan Skor 17	Rendah (skor 1 - 8)	12
	Sedang (skor 9 - 16)	94
	Tinggi (skor 17 - 24)	224

4. Pembahasan

4.1. Analisis Deskriptif kondisi lingkungan eskternal

4.1.1 Dukungan Komunitas

Melihat dari rata-rata keseluruhan dukungan komunitas responden yaitu pada kategori rendah dan sedang. Sedangkan yang mendapat nilai tinggi hanya satu orang saja. Masyarakat sekitar kurang mendukung karena sebenarnya masyarakat tidak tahu mengenai pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi produktif. Karena proses di awal pelaksanaan sosialisasinya belum menyentuh keseluruhan warga masyarakat. Sosialisasi program yang dilakukan hanya pada kelompok sasaran saja. Ini sejalan dengan penelitian Sarens, 1997, bahwa kurangnya interaksi dan komunikasi turut memengaruhi kurangnya pengadopsian inovasi. Pada akhirnya akan mengurangi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi.

4.1.2 Peran Nilai-Nilai Agama

Sebagian besar rata-rata dukungan komunitas responden masuk dalam kategori tinggi yaitu 328 orang. Pada peran nilai-nilai agama, tidak ada responden yang berada di posisi rendah, dan sedikit yang masuk pada kategori sedang, mayoritas ada di urutan tinggi. Agama secara substansi seperti etos kerja, pantang menyerah untuk berwirausaha sudah diketahui dan dimengerti. Nilai-nilai mengalami

proses internalisasi pada diri penerima manfaat yang memiliki peran untuk mendukung keberhasilan pengelolaan dana bergulir tersebut.

4.1.3 *Peran Nilai-Nilai Sosial*

Ditinjau dari rata-rata keseluruhan peran nilai-nilai sosial responden yaitu dalam posisi yang tinggi. Pada responden ini, kategori yang berada di zona rendah hanya sedikit, sedangkan di kategori sedang pun tidak terlalu banyak. Hal ini sejalan dengan penelitian Suminah (2017) bahwa tingginya nilai-nilai sosial dapat menjadi motivasi dan inspirasi dalam kegiatan usaha. Nilai atau norma kelompok menjadi motivasi atau pendukung untuk melakukan kegiatan wirausaha yang lebih rajin dan tekun. Nilai-nilai sosial memberikan penguatan kepada diri mereka untuk melakukan wirausaha yang terbaik demi menyejahterakan dirinya dan keluarganya.

4.1.4 *Kepemimpinan Formal*

Sebagian besar rata-rata keseluruhan kepemimpinan formal responden yaitu masuk dalam kategori sedang. Responden yang menjawab rendah ialah sedikit, dan kebanyakan menjawab pada kategori sedang. Sedangkan pada kategori tinggi yang hampir sama dengan posisi sedang. Hal ini mengkonfirmasi bahwa kepemimpinan formal yakni Rukun Tetangga, Rukun Warga bahkan Kelurahan telah memberikan dukungan kepada para penerima manfaat program untuk rajin, tekun dan pantang menyerah dalam mengelola kegiatan usahanya. Bentuk dukungan antara lain memberikan motivasi untuk wirausaha yang sukses, memberikan informasi pemasaran produk serta bahan baku produksi. Kepemimpinan formal ikut berkontribusi dalam memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi para penerima manfaat program dalam mengelola usahanya.

4.1.5 *Kepemimpinan Non Formal*

Sebagian besar rata-rata keseluruhan kepemimpinan non formal responden yaitu dalam kategori tinggi. Selanjut responden dalam kategori sedang. Sedangkan responden dalam kategori rendah sedikit yakni 49 orang. Kepemimpinan non formal seperti ustaz dan kyai itu memiliki interaksi yang lebih baik dan memberikan dorongan kepada para penerima manfaat program pemberdayaan ekonomi produktif untuk melaksanakan pemanfaatan dana bergulir dengan amanah, tekun, rajin dan pantang menyerah. Motivasi dan pesan ini selalu disampaikan berulang-ulang kepada penerima manfaat program. Kepemimpinan formal memfasilitasi untuk pemasaran dan promosi serta kemitraan dengan pihak lainnya sebagai upaya mendukung usaha para penerima manfaat program.

4.1.6 *Potensi Pasar*

Sebagian besar rata-rata keseluruhan potensi pasar responden yaitu 290 dan ini termasuk dalam kategori tinggi. Adapun responden yang menjawab di kategori rendah dan sedang pun sedikit. Artinya bahwa produk dan jasa yang ditawarkan memang rata-rata kebutuhan pokok dari masyarakat sehingga mereka tidak memiliki kesulitan untuk memasarkan produknya. Rata-rata mereka penjual kebutuhan pokok seperti jual nasi uduk, sayuran-sayuran, makanan ringan, minuman, kain atau pakaian, dan lain sebagainya.

4.2. *Analisis Deskriptif mekanisme program*

4.2.1 *Sosialisasi Program*

Sebagian besar rata-rata keseluruhan sosialisasi program responden yaitu masuk dalam posisi tinggi. Sedikit responden yang menjawab rendah dan sedang. Sementara kategori tinggi banyak responden yang menjawab yaitu sekitar 280 orang. Sesuai apa yang diutarakan oleh Sutrisno (2007) sosialisasi program memiliki peran penting bagi keberhasilan proses pelaksanaan pemberdayaan ekonomi produktif di masyarakat. Pada penelitian ini, sosialisasi program berhasil cukup tinggi karena materi dan saluran komunikasi serta alat bantunya cukup memadai untuk dipahami oleh penerima manfaat program. Di samping itu sosialisasi dilakukan juga baik secara formal maupun informal. Hal

ini dilakukan dalam rangka meningkatkan pemahaman dari stakeholder terhadap implementasi program pemberdayaan ekonomi produktif tersebut.

4.2.2 Pemilihan Kegiatan Usaha

Mayoritas dari rata-rata keseluruhan pemilihan kegiatan usaha responden yaitu masuk dalam kategori sedang yakni 220 orang. Hal ini yang menjawab kategori sedang sangat tinggi. Responden yang menjawab nilai rendah ialah cukup tinggi yakni 107 orang. Sedangkan responden yang menjawab pada kategori tinggi sangat rendah yakni 3 orang. Dari hasil penelitian Andriyani (2017) bahwa pengkapasitasan pemilihan kegiatan usaha masih ditentukan oleh pengelola program. Karena penerima manfaat masih memerlukan fasilitasi dan supervisi dalam melaksanakan kegiatan pemilihan usahanya, misalnya pembuatan proposal, mengidentifikasi akses permodalan, mekanisme pembayaran, cara berproduksi, potensi pasar, pemasaran dan lain sebagainya. Sehingga mereka dalam pemilihan kegiatan usaha memerlukan untuk konsultasi dengan pihak pengelola program atau yang lainnya. Mereka memerlukan panduan dalam menjalankan kegiatan usahanya dari pihak pengelola.

4.2.3 Penyaluran Dana

Sebagian besar rata-rata keseluruhan responden yaitu masuk dalam posisi tinggi dalam menjawab mengenai proses penyaluran dana. Pada responden di indikator penyaluran dana ini, terdapat dua kategori yang menjawab sedikit, diantaranya kategori rendah dan sedang. Mekanisme penyaluran dana telah dipahami dan dimengerti oleh penerima manfaat program dengan baik, hal ini dikarenakan kegiatan sosialisasi dan fasilitasi dari pengelola program yang dilakukan secara intensif. Pengelola program memberikan bimbingan secara teknis mulai dari model pembiayaan dan kesepakatan pengembalian serta pemanfaatan dana. Pengelola program memberikan informasi yang detail dan terperinci serta mudah dipahami oleh para penerima manfaat program. Mekanisme dan persyaratan penyaluran dana pun tidak rumit.

4.2.4 Kesepakatan Pengembalian

Sebagian besar rata-rata keseluruhan kesepakatan pengembalian responden yaitu masuk dalam posisi tinggi. Kategori tinggi yang paling banyak jawabannya daripada kategori lain bahwa sekitar 300 responden menyetujui untuk berada diklasifikasi tinggi. Mereka telah membaca dengan seksama isi perjanjian dalam kesepakatan peminjaman dana bergulir. Mereka memahami bahwa dana bergulir itu harus dikembalikan agar penerima manfaat yang lain dapat giliran untuk meminjamnya. Sehingga hal ini akan terwujud proses keberlanjutan dari pengelolaan dana bergulir ini. Mereka menyadari akan adanya sanksi jika mereka terlambat, salah satu sanksinya mereka tidak bisa meminjam dana bergulir pada tahap selanjutnya.

4.2.5 Pemberian Sanksi dan Penghargaan

Rata-rata keseluruhan pemberian sanksi dan penghargaan responden yaitu masuk dalam posisi tinggi. Pada responden ini sedikit yang menjawab dalam kategori rendah maupun sedang, akan tetapi mayoritas banyak responden untuk mengiyakan atau setuju pada kategori tinggi. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Triyono (2014) bahwa tingginya pemberian sanksi bagi peserta dana bergulir yang terlambat dalam pengembalian dana dan memberikan apresiasi terhadap peserta yang taat dan patuh dalam pengembalian dana tersebut. Pemberian sanksi yang tegas menjadi faktor untuk meningkatkan keberhasilan program pemberdayaan tersebut. Mereka menyadari dari kesepakatan perjanjian itu harus mematuhi sebagai bentuk keberhasilan pelaksanaan program ekonomi produktif tersebut, dan mereka juga menganggap bahwa sanksi dan penghargaan menjadi penting bagi keberlanjutan program. Dan mereka setuju bagi yang terlambat mengembalikan dana bergulir diberikan sanksi dan begitu pula sebaliknya. Bagi mereka yang pengembalian berjalan dengan lancar diberikan penghargaan dengan cara meningkatkan jumlah angka peminjaman pada tahap berikutnya. Peminjam

yang tingkat pengembalian lancar dan tidak menunggak akan mendapatkan prioritas untuk pinjaman berikutnya.

4.3. Analisis Deskriptif efektivitas pemberdayaan ekonomi produktif

4.3.1 Efektivitas Pemberian Bantuan Teknis

Sebagian besar rata-rata keseluruhan efektivitas pemberian bantuan teknis responden yaitu masuk dalam posisi tinggi. Responden yang menjawab rendah hanya sedikit, sedangkan yang masuk dalam kategori sedang cukup banyak. Kenyataan ini menegaskan bahwa pemberian bantuan teknis sudah sesuai dengan kondisi penerima manfaat program. Bantuan teknis pendanaan usaha, dana dimanfaatkan untuk kegiatan usaha, pemberian pengetahuan cara berproduksi, pemberian pengetahuan dan ketrampilan pemasaran dan promosi, kesemuanya sudah sesuai dengan kebutuhan usaha yang ditekuni oleh para penerima manfaat program pemberdayaan di bidang ekonomi produktif tersebut. Di sisi lain bahwa pemberian bantuan teknis dalam program pemberdayaan ekonomi produktif efektif dikarenakan sebagian besar memang sudah memulainya dalam kegiatan usaha mereka sebelum adanya intervensi program tersebut.

4.3.2 Efektivitas Penguatan Kapasitas

Nilai besar rata-rata keseluruhan efektivitas penguatan kapasitas responden yaitu berada di zona kategori tinggi. Sedangkan kategori rendah maupun sedang tidak terlalu banyak. Responden kebanyakan menyetujui bahwa indikator pada efektivitas penguatan kapasitas masuk klasifikasi tinggi.

Menurut hasil penelitian Haryendi (2013) bahwa tingginya efektivitas penguatan kreativitas dan inovasi pembuatan produk, promosi dan pemasaran, menjalin mitra usaha, mengakses sumber permodalan dan peningkatan kualitas produk merupakan hal penting untuk kesuksesan program pemberdayaan. Mereka meyakini bahwa pelatihan-pelatihan yang diberikan misalnya peningkatan produksi, promosi, dan peluang pasar itu sesuai dengan persoalan yang dihadapi mereka dalam kegiatan usahanya.

4.4. Analisis Deskriptif tingkat kemandirian penerima manfaat program

4.4.1 Tingkat Pendapatan

Sebagian besar rata-rata keseluruhan tingkat pendapatan responden yaitu masuk dalam posisi tinggi. Amat sedikit responden yang menyetujui rendah, begitupun di kategori sedang tidak terlalu banyak, dan mayoritas menjawab bahwa indikator tersebut berada pada klasifikasi tinggi. Bahwa kegiatan usaha yang mereka lakukan rata-rata memberikan penghasilan yang cukup. Setiap bulan mereka memiliki pendapatan dari keuntungan usahanya selalu meningkat. Walaupun peningkatan usaha itu jumlahnya atau angkanya tidak terlalu signifikan, tapi yang terpenting keuntungan atau laba selalu mereka dapatkan dari kegiatan usahanya.

4.4.2 Tingkat Investasi Usaha

Rata-rata keseluruhan tingkat investasi usaha responden yaitu sebagian besar masuk dalam urutan tinggi. Responden sedikit yang menjawab pada kategori rendah, sementara cukup banyak yang menjawab sedang, dan kebanyakan responden yang menyetujui bahwa berada di posisi tinggi. Berdasarkan hasil penelitian Sayedul (2011) bahwa meningkatnya keuntungan usaha serta belanja barang yang meningkat dan dapat memperbaiki mata pencarian penerima manfaat program. Mereka selalu mengalokasikan sebagian dari keuntungannya untuk meningkatkan omset produksinya. Mereka berinvestasi baik pada bahan-bahan produksi maupun peralatan produksi, karena peluang pasarnya cukup menjanjikan.

4.4.3 Tingkat Kemandirian Usaha

Indikator tingkat kemandirian usaha responden sebagian besar rata-rata masuk dalam posisi tinggi. Kategori responden sedikit mengakui bahwa indikator ini berada di zona rendah, sedangkan cukup banyak responden mengiyakan untuk masuk pada urutan sedang, dan lebih mendominasi menyetujui untuk berada di klasifikasi tinggi. Sesuai dengan risetnya Yusi (2014), bahwa tingginya kemitraan pemasaran, pembeli dan pelanggan dapat memperluas wilayah dan pemasaran. Mereka cukup memiliki rasa percaya diri untuk memutuskan barang atau jasa yang dapat meningkatkan usahanya. Mereka melakukan proses kerjasama bahan-bahan produksi. Mereka juga memutuskan untuk memberikan harga yang kompetitif pada konsumen.

4.5. Analisis Pengaruh kondisi lingkungan eksternal dan mekanisme program terhadap efektivitas pemberdayaan ekonomi produktif dengan tingkat kemandirian penerima manfaat program

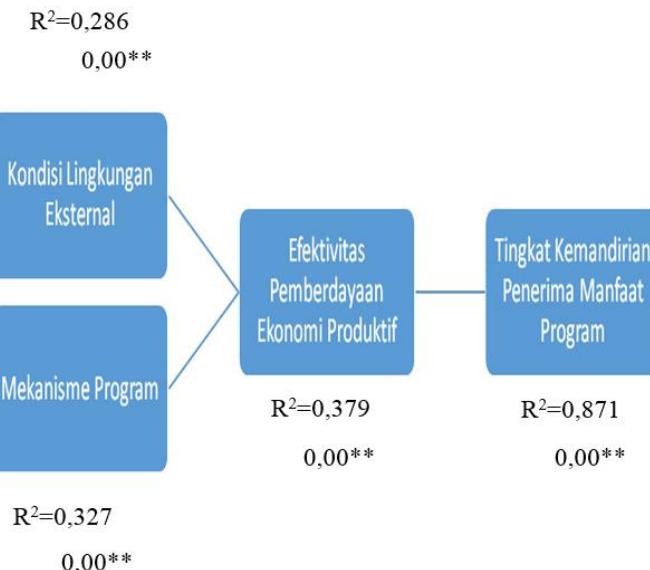
Pengaruh Parsial kondisi lingkungan eksternal terhadap efektivitas pemberdayaan ekonomi produktif hampir mendekati 30%. Hal ini ditunjukkan dengan hasil SPSS koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,286. Pengaruh parsial ini sangat nyata (signifikan) yang ditunjukkan dengan probabilitas 0,00**. Dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi produktif baik program Kotaku maupun program yang diinisiasi Dompet Dhuafa yakni dukungan kelompok, nilai agama, nilai sosial, kepemimpinan formal dan non formal memiliki pengaruh dalam mewujudkan efektivitas dan ketercapaian tujuan program. Penerima manfaat program mendapatkan dukungan mengenai peluang dan pemilahan usaha, promosi dan pemasaran, serta bahan baku produksi. Pengaruh kondisi lingkungan eksternal menyebabkan ketepatan dan ketercapaian tujuan program dapat terwujud dalam pengelolaan kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh penerima manfaat program tersebut.

Pengaruh parsial mekanisme program terhadap efektivitas pemberdayaan ekonomi produktif sebesar 32,7%. Hal ini ditunjukkan dengan hasil SPSS koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,327. Pengaruh parsial ini sangat nyata (signifikan) yang ditunjukkan dengan probabilitas 0,00**. Mekanisme program yang lebih mudah tertkait persyaratan peminjaman dana bergulir, ketepatan waktu penyaluran dana bergulir, pemahaman yang utuh mengenai kesepakatan pengembalian serta sanksi dan penghargaan. Hal ini dikarenakan karena sosialisasi formal maupun non formal sehingga penerima manfaat program menjadi lebih tahu dan mengerti tentang hak dan kewajibannya terkait peminjaman dana bergulir tersebut. Dengan demikian hal ini ikut berkontribusi pada ketercapaian tujuan dan keberhasilan program pemberdayaan ekonomi produktif..

Pengaruh secara simultan kondisi lingkungan eksternal dan mekanisme program terhadap efektivitas pemberdayaan ekonomi produktif kurang dari 50 %. Hal ini ditunjukkan dengan hasil SPSS koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,379. Pengaruh dengan simultan ini sangat nyata (signifikan) yang ditunjukkan dengan probabilitas 0,00**. Dukungan lingkungan eksternal yang memberikan ruang berbagi tentang faktor-faktor hambatan dan pendorong kegiatan usaha, bantuan moril dan mekanisme program yang mudah serta dipahami secara baik oleh penerima manfaat program, dimana hal ini menjadikan pengelolaan kegiatan usaha mereka lebih efektif dan berhasil. Artinya, program pemberdayaan ekonomi produktif berjalan sesuai tujuannya dan memiliki implikasi kesejahteraan kepada penerima manfaat program tersebut.

Kemudian pengaruh secara simultan efektivitas pemberdayaan ekonomi produktif terhadap tingkat kemandirian penerima manfaat program lebih dari 80%. Hal ini melihat hasil dari SPSS dengan koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,871. Pengaruh dengan simultan ini sangat nyata (signifikan) yang ditunjukkan dengan probabilitas 0,00**. Pemberdayaan ekonomi produktif yang dengan ketepatan dan ketercapaian tujuannya yakni kesejahteraan penerima manfaat program, tingkat keuntungan dan pendapatan yang ikut meningkat. Hal ini mendorong para penerima manfaat untuk mengembangkan usahanya secara berkelanjutan melalui menyisihkan sebagian keuntungan untuk berinvestasi pada belanja barang dan modal untuk peningkatan omset usaha. Mereka pun memutuskan untuk bekerjasama dengan pihak lain untuk pemasaran dan bahan baku produksi yang memiliki harga lebih murah.

Secara lebih rinci dapat dilihat pada gambar 2. Yang menunjukkan pengaruh secara parsial dan simultan dari variabel kondisi lingkungan eksternal dan mekanisme program terhadap efektivitas pemberdayaan ekonomi produktif serta pengaruh efektivitas pemberdayaan ekonomi produktif terhadap tingkat kemandirian penerima manfaat program



Gambar 2. Analisis Pengaruh Kondisi Lingkungan Eksternal dan Mekanisme Program Terhadap Efektivitas Pemberdayaan Ekonomi Produktif dan Tingkat kemandirian Penerima Manfaat Program.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pengaruh parsial mekanisme program terhadap efektivitas pemberdayaan ekonomi produktif sebesar 32,7%, dengan hasil SPSS koefisien determinasi (R²) sebesar 0,327 serta pengaruh sangat nyata (signifikan) yang ditunjukkan dengan probabilitas 0,00**. Sedangkan bahwa pengaruh secara simultan kondisi lingkungan eksternal dan mekanisme program terhadap efektivitas pemberdayaan ekonomi produktif kurang dari 50 % dengan hasil SPSS koefisien determinasi (R²) sebesar 0,379 serta pengaruh sangat nyata (signifikan) yang ditunjukkan dengan probabilitas 0,00**. Begitupula bahwa pengaruh secara simultan efektivitas pemberdayaan ekonomi produktif terhadap tingkat kemandirian penerima manfaat program lebih dari 80%. dengan hasil dari SPSS dengan koefisien determinasi (R²) sebesar 0,871 serta pengaruh sangat nyata (signifikan) yang ditunjukkan dengan probabilitas 0,00**.

6. Saran

Untuk meningkatkan kemandirian penerima manfaat program Kotaku maupun Program Dompet Dhuafa perlu adanya peran pemerintah pusat maupun daerah serta lembaga swadaya masyarakat untuk memfasilitasi pada aspek kemitraan terutama permodalan, promosi dan pemasaran.

Ucapan terimakasih: Kepada para enumerator selama penelitian berlangsung di Provinsi Jawa Barat, atas segala pertolongan dan perjuangan dalam pengumpulan data. Secara khusus kepada Ustadz Maman sebagai pendamping Program Green Horti di Cipanas, Bapak Ayi Rahmat Pemdamming Lumbung Desa di Cibeber Cianjur, Bapak Amin sebagai pendamping Program Peternakan Sapi Perah di Cisitu Jampang Tengah Sukabumi, Bapak Irin sebagai Koordinator Program Kotaku Kabupaten Bogor, dan Bapak Indra sebagai Koordinator Program Kotaku Kota Bogor.

Daftar Pustaka

- Andayani, A. A. I., Martono, E., & Muhamad, M. (2017). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Sosial Budaya Wilayah (Studi Di Desa Wisata Penglipuran Bali). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 23(1), 1. <https://doi.org/10.22146/jkn.18006>
- Faisal, A., & Yuliani, I. (2018). Productive Zakat of Baznas Yogyakarta on the Growth of Micro Business. *Shirkah: Journal of Economics and Business*, 2(3). <https://doi.org/10.22515/shirkah.v2i3.169>
- Faizal, M. (2014). *Pengembangan Kemandirian Pelaku Usaha Mikro dan Kecil dalam Implementasi Tanggungjawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Bogor Jawa Barat*. Bogor: Sekolah Pascasarja IPB.
- Fatmi, D. R., Suryaningsih, S. A. (2019). Pengaruh Program Sentra Ternak Mandiri (STM) Terhadap Kesejahteraan Mustahiq Pada LAZ Ummul Quro Jombang. *Jurnal Ekonomi Islam*, 2(1), 25–35.
- Heryani, D., Hari, M. F. (2017). Pemberdayaan Ekonomi Produktif Dalam Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan di Kabupaten Rembang. *Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Kota*, 13(1), 14–26.
- Heryendi, W. T., & Marhaeni, A. A. I. N. (2013). Efektivitas Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga sejahtera (UPPKs) di Kecamatan Denpasar Barat. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 6(2), 78–85.
- Ibrahim, P., & R. G. (2014). Zakah as an Islamic Micro-Financing Mechanism to Productive Zakah Recipients. *Asian Economic and Financial Review*, 4(1), 117–125. [http://www.pakinsight.com/pdf-files/aefr 4\(1\), 117-125.pdf](http://www.pakinsight.com/pdf-files/aefr 4(1), 117-125.pdf)
- Ilyas, S., Irdham, A. (2006). Kemiskinan di Indonesia: pengertian, dimensi dan dinamika. Yogyakarta: BPFE.
- Ismail, M. (2015). Strategi Pengembangan Ekonomi Rakyat di Provinsi Papua. *Jurnal Bina Praja*, 07(03), 251–259. <https://doi.org/10.21787/jbp.07.2015.251-259>
- Muhammad, S. H., Rexona, A., & Khaled, L. (2011). Effectiveness of community based organization (CBO) microcredit programme of concern worldwide: A case study of Bangladesh. *African Journal of Business Management*, 5(24), 10101–10107. <https://doi.org/10.5897/ajbm10.1351>
- Muslim, A. (2017). Analisis Kegagalan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat dalam Membangun Kemandirian Masyarakat Miskin (Studi Kasus di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur). *Jurnal Penyuluhan*, 13(1), 79-87. <https://doi.org/10.25015/penyuluhan.v13i1.14524>
- Nasution, M. I., & Prayogi, M. A. (2019). The Utilization of Zakah Productive towards Micro-Business Growth and Mustahik Welfare. *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi Dan Pembangunan*, 20(1), 1–11. <https://doi.org/10.23917/jep.v20i1.6576>
- Nonoy, Anggita, Eyverson Ruauw, R. M. K. (2017). Dampak Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan terhadap Pendapatan Petani Desa Paslaten, Kecamatan Tatapaan, Kabupaten Minahasa Selatan. *Agri-Sosio Ekonomi Unsrat*, 13 (1), 41–54.
- Ristianasari. (2013). Efektivitas pemberdayaan masyarakat di Taman Nasional Bukit Barisan (TNBBS) kasus model desa. (Tesis). Sekolah Pascasarjana IPB. Bogor.
- Ritonga, A., Romus, M., & Nofianti, L. (2020). Analisis Tingkat Literasi Keuangan Syariah Dan Dampaknya Terhadap Pendapatan Usaha Mikro Di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 1-39.
- Saha, G. K. (2014). Micro Finance and Women Empowerment in Rural Assam. *Asian Journal of Multidisciplinary Studies*, 2 (7), 151–157.
- Saptia, Y. (2013). Faktor-Faktor Peningkatan Usaha Perempuan Mustahik Dalam Berwirausaha. *Ekonomi dan Pembangunan*, 21(2), 191–203.
- Sintha, D. W., & Setiawan, A.H. (2014). Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Penerima Zakat). *Diponegoro Journal of Economics*, 3(1), 1–15.
- Suminah, S., Hariadi, S. S., Sundari, M. T., & Wijianto, A. (2017). Kemandirian Wanita Tani dalam Usaha Industri Pangan di Solo Raya Jawa Tengah. *Jurnal Penyuluhan*, 13 (1), 97–109. <https://doi.org/10.25015/penyuluhan.v13i1.14795>
- Sayeedul HM, Akter R, Laoubi K. 2011. Effectiveness of community based organization (CBO) microcredit programme of concern worldwide: A case study of Bangladesh. *African Journal of Business Management*. 5(24), pp. 10101-10107. DOI: 10.5897/AJBM10.1351
- Triyono, A. (2014). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Community Development Program Posdaya (Pos Pemberdayaan Keluarga) PT. Holcim Indonesia Tbk Pabrik Cilacap. *KomuniTi*, VI(2), 111–121.

- Toro, M. J. S., Hasim, H., Gunadi, M. A., & Piliyanti, I. (2013). Zakat Untuk Sektor Produktif: Studi Pada Organisasi Pengelola Zakat Di Surakarta. *Inferensi, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 7(2), 431-450. <https://doi.org/10.18326/infl3.v7i2.431-450>
- Yasin, H. (2015). Upaya Strategis Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE). *Jurnal Administrasi Publik*, 5(1), 38–42.
- Yanti, V. A., Amanah, S., Muldjono, P., & Asngari, P. (2018). Faktor Yang Mempengaruhi Keberlanjutan Usaha Mikro Kecil Menengah di Bandung dan Bogor. *Jurnal Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian*, 137-148.
- Yusi, M. S. (2014). Model Stratejik Pengembangan Usaha Kecil Perkotaan (Kasus pada Usaha Mikro dan Kecil Pangan di Kota Palembang). *Jurnal Orasi Bisnis*, XI, 46–53.



© 2020 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).



Peran Pendamping Program Keluarga Harapan Dalam Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Di Kabupaten Magetan

Muhtar^{1*}

¹ Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial; Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial; Kementerian Sosial Republik Indonesia, Jakarta

* Korespondensi: much.ngano17@gmail.com ; Telp (+62) 85281800262

Diterima: 2 Mei 2020; Disetujui: 25 Nopember 2020; Diterbitkan: 28 Desember 2020

Abstrak: Kajian ini bertujuan mendeskripsikan peran pendamping Program Keluarga Harapan dalam proses pelaksanaan perbaikan rumah tidak layak huni di Kabupaten Magetan. Jenis dan pendekatan kajian deskriptif-kualitatif. Kajian dilakukan bulan November 2019 di tujuh desa, dua wilayah kecamatan Kabupaten Magetan. Lokasi kajian ditentukan secara *purposive* —terbanyak penerima manfaat bantuan sosial perbaikan rumah tidak layak huni (tahun 2016/2017). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dokumentasi, dan diskusi kelompok terarah. Data dianalisis secara kualitatif —reduksi data, penyajian data, dan pengambilan simpulan. Hasil kajian menunjukkan, pendamping Program Keluarga Harapan di Kabupaten magetan berperan aktif dalam proses pelaksanaan perbaikan rumah tidak layak huni, sejak pengusulan hingga selesainya pelaksanaan perbaikan rumah. Ditunjuknya pendamping Program Keluarga Harapan sebagai pendamping perbaikan rumah tidak layak huni karena penerima manfaat adalah penerima Program Keluarga Harapan. Disamping itu juga penerima Bantuan Pangan Non-Tunai, yang sebelumnya dikenal dengan sebutan Raskin/Rastra yaitu bantuan sosial beras bagi keluarga Pra-Sejahtera. Hal tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah komplementaritas penerima program bantuan sosial. Sesungguhnya, pendamping pelaksanaan perbaikan rumah tidak layak huni adalah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan. Hasil kajian merekomendasikan, pendamping perbaikan rumah tidak layak huni di Kabupaten Magetan oleh pendamping Program Keluarga Harapan merupakan sebuah terobosan, dan sekaligus sebagai implementasi kebijakan pemerintah komplementaritas program penerima bantuan sosial. Hal ini dimungkinkan dikembangkan di daerah lain.

Kata Kunci: Peran, Pendamping, Program Keluarga Harapan, Rumah Tidak Layak Huni.

Abstract: The aims of this study is describing the role of the Family Hope Program companion in the implementation of social assistance for social rehabilitation of uninhabitable houses in Magetan Regency. The type and approach of the study is descriptive-qualitative. The study carried out on November 2019, at seven villages, two sub-districts in Magetan Regency. Location of the study determined purposively —the most beneficiaries of social assistance for social rehabilitation of uninhabitable houses (2016/2017 year). Data collection technique carried out by interviews, observation, documentation, and focus group discussions. Data analyzed qualitatively —data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study showed that the Family Hope Program assistants in Magetan Regency an actively role in the process of implementing renovation of rehabilitation uninhabitable houses, from proposal until finished the houses repairs. The assistance of the Family Hope Program appointed as a companion for repairing of uninhabitable houses because the beneficiaries are recipients of the Family Hope Program. Beside that, the recipients of Non-Cash Food Assistance, previously known as "Raskin/Rastra" —rice social assistance for pre-prosperous families. This, in line with the complementarity government policy of recipients of social assistance. Actually, the assistant for repairing unfit for habitation is the Sub-district Social Welfare Worker. The results of the study recommend, that a companion for repairing unfit for habitation in Magetan Regency by a companion of the Family Hope Program is a breakthrough, and at the same time as an implementation of complementary government policies for recipients of social assistance programs. This, could be developed in other areas.

Keywords: Role, Hope Family Program Assistance, Social Rehabilitation of Uninhabitable Homes.

1. Pendahuluan

Konstitusi, Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen, mengamanatkan bahwa rumah adalah salah satu hak dasar rakyat. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang fakir miskin juga ditegaskan, fakir miskin berhak memperoleh kecukupan perumahan yang layak dan lingkungan hidup yang sehat. Lebih lanjut, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dijelaskan bahwa dalam upaya mewujudkan visi nasional Indonesia yang maju, mandiri, adil, dan makmur, ditempuh melalui beberapa jalur misi, diantaranya adalah peningkatan dan perluasan pelayanan dasar bagi masyarakat kurang mampu. Perumahan adalah kebutuhan dasar yang sangat penting bagi setiap manusia seperti halnya makanan dan pakaian (Ajibola, 2015).

Data BPS (2017) menunjukkan, terdapat 79,6 persen rumah di Indonesia dibangun oleh masyarakat secara swadaya. Meskipun hal tersebut memiliki nilai positif, namun bila pemerintah tidak melakukan pembinaan, perumahan swadaya masyarakat tersebut, terutama masyarakat yang berpenghasilan rendah (di bawah upah minimum), rumah menjadi tidak layak huni. Kelayakan rumah layak huni meliputi: keselamatan bangunan rumah yang mencakup struktur dan bahan bangunan untuk lantai, dinding, atap, kecukupan minimum luas bangunan/rasio luas lantai perpenghuni, kesehatan penghuni yang mencakup ketersediaan sarana mandi cuci kakus (MCK), air bersih dan minum, kecukupan pencahayaan dan penghawaan, serta keamanan bermukim (Sibuea, UGM).

Masyarakat berpenghasilan di bawah upah minimum, memerlukan bantuan (intervensi) pihak lain. Menurut Fahrudin (2020), dalam wacana akademik, dijumpai istilah yang berbeda-beda, tetapi mempunyai arti yang kurang lebih sama, bahkan sama. Misalnya, Siporin (1975); Morales dan Sheafor (1999) menyebut secara jelas intervention, Whittaker (1985) menyebut treatment, Siporin (1975), Brill (1978), Friedlander dan Apte (1982) menyebut helping, Pincus dan Minahan (1974), Heraud (1970) menyebutnya Change, Klenk dan Ryan (1974), Barttlet (1970), menyebutnya problem solving, DuBois dan Milley (1999) menyebutnya empowerment.

Menurut Adi (2013), tahapan intervensi sosial pada dasarnya sejalan dengan tahapan pengembangan masyarakat, yaitu: penyiapan petugas dan penyiapan lapangan, identifikasi kebutuhan dan sumberdaya, memikirkan program/kegiatan yang akan dilakukan, merumuskan rencana kegiatan yang akan dilakukan, pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan, pengawasan terhadap program/ kegiatan yang sedang dana telah dikerjakan, serta terminasi, yaitu pemutusan hubungan secara formal dengan penerima manfaat, karena dinilai telah maampu mandiri.

Dalam intervensi permasalahan rumah tidak layak huni, sesungguhnya berbagai pihak baik Pemerintah (Pusat, Daerah), Dunia Usaha (*Corporate Social Responsibility/CSR*), dan Lembaga Masyarakat (*Non-Goverment Organizations/NGO*) telah melakukannya. Diantaranya adalah Kementerian Sosial RI. melalui program bantuan sosial rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni. Rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni adalah sebagai proses mengembalikan keberfungsian sosial fakir miskin melalui upaya memperbaiki kondisi rumah tidak layak huni, baik sebagian maupun seluruhnya yang dilakukan secara gotong royong agar tercipta kondisi rumah yang layak sebagai tempat tinggal (Permensos. No. 20/2017). Dalam pelaksanaannya di lapangan, peran pendamping sangat penting.

Peran adalah sebagai perangkat yang diharapkan dimiliki oleh orang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa (Depdiknas, 2007). Menurut Livinson dalam Soekanto (2012) peranan meliputi norma-norma yang diungkapkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat; suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi; sebagai prilaku individu yang penting sebagai struktur sosial masyarakat.

Berdasarkan pengertian tersebut, yang dimaksud peran dalam konteks ini adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pendamping sosial dalam pelaksanaan perbaikan rumah tidak layak huni bagi keluarga tidak mampu, sejak pengusulan hingga selesai pelaksanaan perbaikan rumah. Sesuai Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 tahun 2017, peran pendamping sosial meliputi: verifikasi calon penerima manfaat; menyiapkan calon penerima manfaat; membantu menyiapkan rencana biaya;

Muhtar

Peran Pendamping Program Keluarga Harapan Dalam Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Di Kabupaten Magetan

membantu memberikan bimbingan teknis kepada penerima manfaat dalam pembelian bahan bangunan dan pelaksanaan pembangunan; memberikan motivasi sosial; mendampingi dalam pelaksanaan, dan melakukan pemantauan; serta membantu penyusunan laporannya. Peran tersebut biasanya dilakukan oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) sebagai salah satu pendamping sosial.

Hal itu sekurangnya terlihat dari kajian (Studi kasus) Mary dan Ahmad (2018) di Kelurahan Cilowong, Kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang, bahwa dalam proses rehabilitasi rumah tidak layak huni, sejak pendataan, pengajuan proposal, melengkapi persyaratan, verifikasi, dan pendampingan, dilakukan oleh TKSK. Namun, di Kabupaten Magetan peran pendampingan tersebut dilakukan oleh pendamping PKH. Penunjukkan tersebut didasari atas kenyataan bahwa penerima manfaat perbaikan rumah tidak layak huni di wilayah Kabupaten Magetan adalah penerima manfaat PKH. Disamping itu, juga penerima manfaat Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), yang sebelumnya di kenal dengan sebutan Raskin/Rastrra (bantuan beras bagi keluarga miskin/prasejahtera). Sesungguhnya, hal tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah tentang komplementaritas penerima program bantuan sosial, dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan.

Kajian tentang rumah tidak layak huni telah banyak dilakukan oleh berbagai pihak, baik secara perorangan maupun kelembagaan. Zaria (2017) misalnya, dalam studi kuantitatif yang dilakukan di Kabupaten Tegal, hasilnya menunjukkan, efektivitas pelaksanaan perbaikan rumah tidak layak huni. Kemudian, Winarno (2018), evaluasi program penyediaan rumah tidak layak huni di Kabupaten Belitung, yang hasilnya juga menunjukkan positif, sesuai sasaran. Ayudiah dkk. (2019), dalam kajian kuantitatif yang dilakukannya, hasilnya menunjukkan bahwa bantuan stimulan perbaikan rumah tidak layak huni telah mencapai tujuan program. Pencapaian *outcomes* rumah tidak layak huni cukup baik yaitu sebesar 71,20 persen, yang meliputi penilaian "Baik" pada aspek: Memenuhi persyaratan keselamatan bangunan –atap, lantai dan dinding (Aladin), lingkungan fisik, dan hubungan sosial terhadap keluarga. Penilaian "Cukup Baik" pada aspek: menjamin kesehatan, gotong royong dan patisipasi warga, empati dan simpati warga sekitar terhadap penerima bantuan. Penelitian tersebut juga menjelaskan, secara kualitatif bahwa pada aspek fisik bangunan rumah yang diperbaiki, Kementerian Sosial telah mewujudkan rumah menjadi lebih layak huni, dari aspek kesehatan, terwujud sarana MCK. Kemudian, terwujudnya hubungan sosial yang lebih baik bagi keluarga penerima manfaat. Sebagai contoh, anak-anak yang dulu (pernah) di *bully* temannya karena rumahnya tidak layak, setelah mendapat bantuan, menjadi layak. Selain itu, anak menjadi lebih betah dirumah, dan kerabat lebih "berkenan" atau nyaman jika berkunjung rumah penerima manfaat. Beberapa hasil studi tersebut menunjukkan efektifitas pelaksanaan dan capaian program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni.

Kajian ini fokus pada peran pendamping PKH dalam pelaksanaan perbaikan rumah tidak layak huni. Pertanyaannya adalah "bagaimana peran pendamping PKH dalam pelaksanaan perbaikan rumah tidak layak huni di Kabupaten Magetan?". Dengan demikian, kajian ini bermaksud ingin mendeskripsikan peran pendamping PKH dalam pelaksanaan perbaikan rumah tidak layak huni di Kabupaten Magetan.

2. Metode

Pendekatan kajian ini kualitatif, yaitu sebagai prosedur penilaian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Bogdan dan Taylor, 1975). Kajian dilakukan di tujuh desa (dari 235 desa/ kelurahan), dua wilayah kecamatan dari 18 kecamatan di Kabupaten Magetan. Lokasi kajian ditentukan secara *p purposive* —terbanyak penerima bantuan sosial rumah tidak layak huni (tahun 2016/2017). Tujuh desa/kelurahan lokasi terpilih tersebut berada di wilayah Kecamatan Parang dan Kecamatan Panekan.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, terhadap penerima manfaat, *focus group discussion (FGD)* dengan pemangku kepentingan daerah, observasi, dan dokumentasi. Kemudian, analisis data dilakukan secara kualitatif, yakni: "... proses mencari dan menyusun secara sistimatis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara

Muhtar

Peran Pendamping Program Keluarga Harapan Dalam Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Di Kabupaten Magetan

mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan, sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain" (Sugiyono, 2013).

3. Hasil

3.1. *Gambaran umum Kabupaten Magetan dan kemiskinannya.*

Secara geografis, Kabupaten Magetan berada di kaki Gunung Lawu bagian timur, membentang dari selatan ke utara. Luasnya 688,85 km², dan secara administratif terbagi dalam 18 wilayah kecamatan, 147 desa dan 88 kelurahan (235 desa/kelurahan) (BPS Kab. Magetan, 2018). Batas Kabupaten Magetan dengan daerah sekitarnya: di sebelah barat Gunung Lawu, menuju kebarat daya merupakan deretan gunung: Gunung Sidoramping, Gunung Jobolarangan dan Gunung Kukusan, dan berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah. Bagian Utara, dataran bergelombang naik, mengarah dari arah timur ke barat sampai ke kaki Gunung Lawu, berbatasan dengan Kabupaten Ngawi. Bagian selatan, dataran rendah, berbatasan dengan Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah. Bagian sebelah Timur, dataran rendah melandai berbatasan dengan Kabupaten Madiun.

Secara topografis, Kabupaten Magetan terbagi dalam beberapa jenis kesuburan tanahnya: (a) wilayah pegunungan dengan kondisi tanah subur, yaitu Kecamatan Plaosan; (b) wilayah pegunungan dengan tanah sedang, yaitu Kecamatan Panekan, dan Kecamatan Poncol Bagian Barat; (c) wilayah pegunungan dengan tanah kurang subur (kritis), yaitu Kecamatan Parang, Kecamatan Lembeyan, Kecamatan Poncol bagian Timur, dan Kecamatan Kawedanan bagian selatan; (d) wilayah dataran rendah dengan tanah pertanian subur, yaitu Kecamatan Barat dan Kecamatan Takeran; (e) wilayah dataran rendah dengan tanah pertanian sedang, yaitu Kecamatan Maospati, Kecamatan Magetan, sebagian Kecamatan Bendo, sebagian Kecamatan Kawedanan dan sebagian Kecamatan Sukomoro; dan (f) wilayah dataran rendah dengan tanah pertanian kurang subur, yaitu sebagian Kecamatan Bendo dan sebagian Kecamatan Sukomoro.

Jumlah penduduk Kabupaten Magetan berdasarkan data BPS tahun 2018, dan diperbarui November 2019, sebanyak 628.924 jiwa. Mereka tersebar di 18 wilayah kecamatan (88 kelurahan 147 desa). Berdasarkan data tersebut, yang termasuk kategori penduduk miskin sebanyak 64.860 ribu jiwa atau 10,31 persen dari total penduduk di Kabupaten Magetan.

3.2. *Penerima Manfaat Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni.*

Berdasarkan data Dinas Sosial Kabupaten Magetan, tahun 2016 terdapat 80 kepala keluarga (10 kelompok) penerima manfaat bantuan rumah tidak layak huni, yang tersebar di 12 desa, empat kecamatan, yaitu: Kecamatan Panekan, Kecamatan Parang, Kecamatan Sidorejo, dan Kecamatan Karangrejo. Tahun 2017, terdapat 30 kepala keluarga (5 kelompok) penerima manfaat di enam desa tiga kecamatan, yaitu: Kecamatan Sidorejo, Kecamatan Kawedanan, dan Kecamatan Parang.

Kajian ini dilakukan di tujuh desa dua wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan Parang dan Kecamatan Panekan, sebagai wilayah kecamatan terbanyak penerima manfaat bantuan sosial perbaikan rumah tidak layak huni. Hasil wawancara dengan penerima manfaat (melalui kunjungan ke rumah) diperoleh informasi, penerima manfaat adalah penerima program bantuan sosial PKH dan BPNT. Hal itu terlihat dari penuturan penerima manfaat di Desa Krajan Kecamatan Parang sebagai berikut:

... gih alhamdulillah to, sak lintune angsal bantuan griyo niku, kulo angsal bantuan PKH, ugi beras, sing dek riyin mendet teng Pak RT, tapi sak niki mendhete gesek kartu teng warung sembako sing ditunjuk pemerintah (ya alhamdulillah pak, selain dapat bantuan rumah, saya dapat bantuan PKH dan bantuan beras, yang dulu ambilnya di rumah Pak RT, sekarang ambilnya dengan gesek kartu di warung sembako/kelontong yang ditunjuk) (KYT, 7 Nov. 2019).

Muhtar

Peran Pendamping Program Keluarga Harapan Dalam Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Di Kabupaten Magetan

Keterangan serupa disampaikan penerima manfaat di Desa Terung Kecamatan Panekan, sebagai berikut:

Kulo angsal PKH, terus niku pak nek dhek riyin beras sing diterke Pak RT, sak niki, gesek kartu teng warung sing sadean sembako sing ditunjuk kalian pemerintah (Saya dapat bantuan PKH terus itu pak kalau dulu beras yang diantar Pak RT, sekarang dengan gesek kartu di warung yang jualan sembako yang ditunjuk (NRN, 8 Nov. 2019).

Informasi yang sama juga disampaikan penerima manfaat di Desa Ngaglik Kecamatan Parang, sebagai berikut:

Matur suwun sanget pak, sak lintune bantuan rehab griyo niku, kulo enthuk bantuan PKH lan bantuan sembako kanthi gesek kartu teng warung sing sadean kebutuhan pokok (beras, ndok, gulo, minyak, lan sanes-sanesipun) sing ditunjuk pemerintah (Terima kasih sekali pak, selain dapat bantuan rehab rumah itu, saya dapat bantuan PKH dan sembako dengan cara gesek kartu di warung yang jualan kebutuhan pokok (beras, telur, gula, minyak dan lain-lainnya) yang ditunjuk pemerintah (SMN, 7 Nov. 2019).

Informasi dari para penerima manfaat program bantuan sosial tersebut menggambarkan bahwa karena kondisinya (keluarga tidak/kurang mampu), yang terlihat dari keadaan rumahnya (Gambar 1), mereka mendapat bantuan secara komplementer, yaitu: PKH, BPNT, dan RSRTLH (Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni).



(a)

(b)

Gambar 1. Rumah penerima manfaat (a) sebelum dibantu (Sumber: Dok. Dinas Sosial Magetan); (b) setelah dibantu (Sumber : Dok Peneliti).

Keterangan tersebut diperkuat penjelasan peserta FGD sebagai berikut:

Penerima bantuan sosial rehab rumah yang bersumber dari APBN melalui Kementerian Sosial R.I. di Magetan adalah penerima bantuan sosial PKH dan BPNT, yang sebelumnya dikenal dengan sebutan Raskin/Rastrra, di mana penerima manfaat berdasarkan basis data terpadu (BDT). Setelah di kelola Kementerian Sosial, BDT berubah menjadi data fakir miskin (DTPPFM), dan kemudian berubah lagi menjadi data kesejahteraan sosial (DTKS). Perlu saya informasikan, di sini juga hadir dari Dinas PUPR, mungkin nanti bisa menambahkan lebih jelas, bahwa di Magetan, bantuan perbaikan rumah bagi keluarga tidak mampu, selain dari Kementerian social, juga dari Kementerian PUPR (LLK, 9 Nov. 2019).

Selanjutnya, penjelasan peserta FGD Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Magetan terlihat dari yang disampaikannya sebagai berikut:

Baik, ibu dan bapak sekalian, kami dari Dinas PUPR, juga melakukan bantuan perbaikan rumah bagi keluarga tidak/kurang mampu. Kalau saya perhatikan, bantuan rehab rumah dari Kementerian Sosial lebih diarahkan ke bagian atap, lantai, dan dinding (Aladin) rumah. Kami, dari PUPR, bantuan perbaikan rumah, lebih diarahkan ke MCK. Besarnya nilai bantuan rehab

Muhtar

Peran Pendamping Program Keluarga Harapan Dalam Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Di Kabupaten Magetan

rumah sekitar 17 jutaan rupiah. Data penerima bantuan belum/tidak berasal dari BDT. Ini, yang mungkin ke depan perlu perbaikan (kesepakatan antar dinas terkait di Magetan). Menurut saya, akan lebih baik kalau data penerima manfaat berasal dari sumber data yang sama. Dengan demikian tumpang tindih penerima bantuan dapat diminimalisasi/ dihindari (APB, 9 Nov., 2019).

Keterangan peserta FGD tersebut memperkuat informasi sebelumnya yang diperoleh dari para penerima manfaat, bahwa penerima program bantuan sosial rumah tidak layak huni di Kabupaten Magetan, khususnya melalui Kementerian Sosial adalah penerima manfaat bantuan sosial PKH. Disamping itu juga penerima BPNT, yang sumber datanya berasal dari DTKS. Pendek kata, bantuan sosial perbaikan rumah tidak layak huni di wilayah Kabupaten Magetan, memperhatikan dimensi komplementaritas, sebagai kebijakan pemerintah dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan. Selain Kementerian Sosial, sesungguhnya kementerian/lembaga lain (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) juga melakukan bantuan perbaikan rumah tidak layak huni bagi keluarga kurang/tidak mampu.

Melalui FGD diperoleh informasi, penyelenggaraan bantuan sosial perbaikan rumah di Magetan masih bertumpu/bersumber dari dana APBN melalui Kementerian Sosial dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang dalam pelaksanaannya melalui dinas terkait di daerah. Dampaknya adalah bahwa bantuan sosial perbaikan rumah bagi keluarga miskin tersebut masih terbatas jangkauannya, di mana sesungguhnya di Kabupaten Magetan masih banyak keluarga kategori miskin, yang dari sisi rumahnya, tidak layak huni dan memerlukan bantuan. Melalui FGD juga diperoleh informasi, belum ada kontribusi daerah dalam penyelenggaraan perbaikan rumah tidak layak huni, melalui APBD, baik dari Provinsi Jawa Timur maupun dari Pemerintah Kabupaten Magetan. Demikian halnya dari pihak Dunia Usaha melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan pihak dermawan setempat. Sesungguhnya Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) setempat melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Daerah dapat berperan aktif menggali, mengoordinasikan, dan menyinergikan terkait penanganan permasalahan rumah tidak layak huni. Selain itu, ditemui di lapangan, penerima bantuan sosial perbaikan rumah tidak layak huni di Kabupaten Magetan menerima secara *double*. Artinya, di samping penerima manfaat menerima bantuan sosial rumah tidak layak huni melalui Kementerian Sosial juga menerimanya dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Hal itu terjadi karena kurang koordinasi dan sinergi antar dinas terkait dalam penanganan permasalahan rumah tidak layak huni.

3.3. Peran Pendamping PKH dalam pelaksanaan perbaikan rumah tidak layak huni.

PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin yang ditetapkan sebagai penerima manfaat PKH. Sebagai sebuah program bantuan sosial bersyarat, PKH membuka akses keluarga miskin, terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (Faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (Fasdik) yang tersedia di sekitar mereka. Dalam perkembangannya manfaat PKH juga didorong untuk menjangkau penyandang disabilitas dan lanjut usia dalam upaya menjaga, mempertahankan, dan meningkatkan kesejahteraannya (Pedoman pelaksanaan PKH, 2019). Melalui PKH, keluarga miskin di dorong dapat mengakses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan. PKH diarahkan untuk menjadi episentrum dan *center of excellence* penanggulangan kemiskinan yang menyinergikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial.

Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan pendamping yang terampil, guna memastikan berjalannya fungsi fasilitasi, mediasi, dan advokasi bagi penerima manfaat PKH dalam mengakses layanan fasilitas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial termasuk akses bantuan sosial rumah tidak layak huni. Dengan demikian, pendamping sosial PKH menjadi tumpuan dalam pelaksanaan rangkaian tahapan/kegiatan PKH, yang meliputi: pertemuan awal, validasi, pemutakhiran data, verifikasi komitmen kehadiran di layanan pendidikan dan kesehatan, mengawasi dan melaporkan

Muhtar

Peran Pendamping Program Keluarga Harapan Dalam Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Di Kabupaten Magetan

penyaluran bantuan sosial sebagai bahan untuk rekonsiliasi di tingkat Kabupaten/Kota, melaksanakan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga, melaksanakan penanganan pengaduan, membuat laporan dan menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan PKH di lapangan (Juknis. Penyaluran Bantuan Non Tunai, 2018).

Peran penting juga dilakukan oleh pendamping PKH dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni. Wawancara dengan penerima manfaat dan FGD dengan para pemangku kepentingan, menunjukkan bahwa pendamping PKH menjadi pilar utama dalam pelaksanaan perbaikan rumah tidak layak huni. Pendamping PKH mengikuti perkembangan sosial ekonomi penerima manfaat PKH dari waktu ke waktu, jauh sebelum menerima bantuan sosial rumah tidak layak huni. Hal itu dikemukakan oleh pendamping PKH Desa Krajan Kecamatan Parang melalui keteraannya sebagai berikut:

... kami menjadi pendamping PKH itu sejak adanya PKH di Magetan. Sebagai pendamping, kami aktif melakukan pendampingan bagi KPM-PKH. Karena bukan hanya sebulan, dua bulan, tetapi sudah bertahun-tahun. Dengan demikian kami mengetahui perkembangan sosial ekonomi KPM-PKH dampingan kami (UMI, 8 Nov. 2019).

Peran yang dilakukan sebagaimana dikemukakannya, meliputi: (1) verifikasi, menyiapkan calon penerima manfaat sebagai tahap persiapan; (2) membantu menyiapkan rencana biaya dan membantu bimbingan teknis (umum) dalam pembelian bahan bangunan sebagai tahap perencanaan; (3) pelaksanaan perbaikan rumah, memberikan motivasi, mendampingi dalam pelaksanaan, dan melakukan pemantauan seba-gai tahapan implementasi; (4) membantu penyusunan laporan pelaksanaan perbaikan rumah. Pelaksanaan peran tersebut disampaikan oleh pendamping PKH sebagai berikut:

Kami mendapat informasi dari Dinas Sosial Magetan bantuan sosial rehab rumah bagi keluarga miskin, kemudian kami diperintahkan untuk mengusulkan mana-mana KPM-PKH dampingan kami yang sangat membutuhkannya. Karena quotanya terbatas, kami lakukan verifikasi data dulu. Setelah sesuai ketentuan (masuk daftar DTKS, sangat layak menerimanya), kami melapor ke desa (P. Kades/Lurah), kami jelaskan aturannya. Setelah ada persetujuan secara resmi, kami usulkan (lapor) ke dinas sosial. Berikutnya, kami membantu menyiapkan proposal termasuk rencana biaya kebutuhan sesuai pagu bantuan. Setelah melalui proses, dan mendapat persetujuan pusat (Kementerian Sosial), turunlah bantuan rehab rumah. Dalam pelaksanaannya, secara berkala kami datang, kasih semangat, dan sekalian memantau berjalannya perbaikan rumah. Setelah selesai, kami bantu KPM-PKH laporannya (MYN, 8 Nov. 2019).

Informasi tersebut diperkuat keterangan peserta FGD sebagai berikut:

Ketika ada pemberitahuan/surat resmi dari pusat, Kementerian Sosial RI. tentang adanya bantuan sosial Rutilahu untuk Kabupaten Magetan, tentu kami mencermatinya. Karena pegawai dinas sosial di sini terbatas jumlahnya, kami sampaikanlah informasi tersebut kepada pendamping PKH. Mereka kami nilai intens di lapangan, kami meyakini mereka mengetahui dengan baik khususnya perkembangan sosial ekonomi KPM-PKH dampingannya. Untuk itu, mereka saya minta mengusulkan KPM-PKH dampingannya, yang paling pas/cocok menerimanya. Mereka, pendamping PKH aktif berkomunikasi dengan kami, baik langsung maupun tidak langsung, lewat telpon dan *watsapp*. Mereka juga harus melapor dan menjelaskan bantuan sosial rumah tidak layak huni kepada perangkat desa dan KPM-PKH yang diusulkannya. Setelah mendapat persetujuan, pendamping PKH lapor kepada kami. Setelah melalui proses panjang, seperti ketentuan pusat (Kementerian Sosial), turunlah bantuan sosial perbaikan rumah bagi keluarga tidak mampu tersebut di Magetan. Perlu saya tambahkan bahwa penerima bantuan sosial perbaikan rumah di Magetan adalah berdasarkan (BDT), yang berubah kemudian menjadi data terpadu program penanganan fakir miskin (DTPPFM), dan berubah lagi menjadi data kesejahteraan sosial (DTKS). Peran pendamping PKH, sejak usulan hingga selesai rehab rumah KPM, mereka aktif sekali. Saya sangat berterima kasih kepada mereka (LLK, 9 Nov. 2019).

Muhtar

Peran Pendamping Program Keluarga Harapan Dalam Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Di Kabupaten Magetan

4. Pembahasan

Pada dasarnya tugas pokok pendamping PKH adalah memfasilitasi dan memediasi bahwa penerima manfaat (keluarga tidak mampu/miskin) dapat menjangkau pelayanan dasar, khususnya bidang kesehatan dan bidang pendidikan, dalam upaya pemerintah secara berkelanjutan memutus mata rantai kemiskinan (Pedoman pelaksanaan PKH, 2019). Namun, di Kabupaten Magetan, pendamping PKH menjadi pilar utama dalam rangkaian kegiatan pelaksanaan perbaikan rumah tidak layak huni (Periksa penuturan pendamping PKH, MYN 8 Nov. 2019). Penerima manfaat PKH termasuk kluster terbawah keluarga tidak mampu, yang oleh karenanya mereka berhak menerima program bantuan sosial lainnya, seperti BPNT dan bantuan sosial perbaikan rumah tidak layak huni. Hal tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah tentang komplementaritas program penerima bantuan sosial, dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan. Atas dasar itu, Dinas Sosial Kabupaten Magetan menunjuk pendamping PKH menjadi pilar utama dalam pelaksanaan perbaikan rumah tidak layak huni. Mereka dinilai mengetahui dengan baik perkembangan sosial ekonomi penerima manfaat PKH dari waktu ke waktu (Periksa penuturan pendamping PKH, UMI 8 Nov. 2019).

Secara empirik, peran pendamping PKH dalam pelaksanaan perbaikan rumah tidak layak huni di Kabupaten Magetan adalah mengajukan usulan calon penerima manfaat bantuan sosial perbaikan rumah tidak layak huni bagi keluarga yang dinilai tidak/kurang mampu, dalam hal ini adalah penerima PKH, sejak awal hingga selesai perbaikan rumah. Secara rinci, tugas pendamping PKH dalam perbaikan rumah tidak layak huni tersebut adalah: melakukan verifikasi terhadap calon penerima bantuan sosial; menyiapkan calon penerima bantuan sosial; membantu menyiapkan rencana biaya perbaikan rumah yang akan dilakukan perbaikan; membantu memberikan bimbingan bagi penerima bantuan sosial dalam pembelian bahan (bangunan) dan pelaksanaan perbaikan rumah; memberikan motivasi; mendampingi dalam proses pelaksanaan perbaikan rumah, melakukan pemantauan dalam proses dan selesaiannya perbaikan rumah; dan membantu penyusunan laporan atas terselesaiannya perbaikan rumah tidak layak huni tersebut.

Dengan demikian, secara praktis, pendamping PKH di Kabupaten Magetan menjadi pilar utama dalam proses pelaksanaan perbaikan rumah tidak layak huni sejak awal hingga selesaiannya perbaikan rumah. Secara konsep, pendamping PKH melakukan intervensi sosial, sesuai perannya sebagai pendamping sosial perbaikan rumah tidak layak huni, yang meliputi: penyiapan, melakukan identifikasi kebutuhan dan sumberdaya (lokal yang tersedia), membantu memikirkan kegiatan yang akan dilakukan terkait pelaksanaan perbaikan rumah, merumuskan rencana kegiatan yang akan dilakukan terkait perbaikan rumah, pelaksanaan kegiatan perbaikan rumah, pengawasan kegiatan perbaikan rumah, hingga terminasi, yakni selesaiannya perbaikan rumah (Adi, 2013).

5. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pendamping PKH di Kabupaten Magetan berperan penting dalam proses pelaksanaan perbaikan rumah tidak layak huni karena menjadi tumpuan utama di lapangan. Peran tersebut terlihat sejak pengusulan hingga selesaiannya perbaikan rumah. Hal tersebut sangat positif, di mana pendamping PKH aktif dan intensif dalam melakukan pendampingan. Ketika muncul kebijakan pemerintah tentang komplementaritas program bantuan sosial, sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, hal tersebut sangat sesuai, karena pendamping PKH mengetahui secara baik perkembangan sosial ekonomi penerima manfaat yang didampinginya, dan menjadikannya sebagai penerima manfaat bantuan sosial perbaikan rumah tidak layak huni.

6. Saran

Dari hasil kajian, diarankan, pendampingan pelaksanaan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni di Kabupaten Magetan oleh pendamping PKH merupakan terobosan —melakukan kegiatan di luar kebiasaan/*out of the box*— yang berorientasi pada sasaran/tujuan fungsional, yaitu ketepatan

Muhtar

Peran Pendamping Program Keluarga Harapan Dalam Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Di Kabupaten Magetan

sasaran dan sejalan dengan kebijakan pemerintah tentang komplementaritas program penerima bantuan sosial. Untuk itu, dimungkinkan dapat dikembangkan di daerah lain.

Ucapan terimakasih: Banyak pihak terlibat dalam pelaksanaan kajian ini, khususnya Dinas Sosial Kabupaten Magetan melalui Ibu Lilik selaku Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial, merangkap Plt. Sekretaris, dan juga Plh. Kepala Dinas Sosial Magetan, beserta jajarannya. Atas perhatian yang baik, sehingga terlaksana kajian perbaikan rumah tidak layak huni di Kabupaten Magetan, baik kunjungan ke rumah penerima manfaat maupun FGD dengan para pemangku kepentingan daerah. Untuk itu, penulis sampaikan ucapan terima kasih yang tak teringga. Ucapan serupa penulis sampaikan kepada Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial atas terselenggaranya kajian ini, juga tidak lupa kepada ketua tim kajian dan kolega diskusi, baik internal tim maupun *peer group* di lingkungan Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial.

Daftar Pustaka

- Adi, I.R. (2013). Intervensi Komunitas, Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ajibola G.M., Adeoti S. (2015). *Housing Rehabilitation Strategy as Enabling Approach for Development of Rural Housing Poverty in Nigeria*, *World Journal of Social Sciences and Humanities*, 2015, Vol. 1, No. 1, 11-17. Sumber: <http://pubs.sciepub.com/wjssh/1/1/3>. Diakses 5 Pebr. 2020.
- Amalia, A., Jayaputra, A., Muhtar, Arifin, J., Rodli, A., Syafrudin, F., Zayyan, P.F., Butar, L.S. (2019). *Evaluasi Pencapaian Outcomes Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni*. Jakarta: Puslitbangkesos.
- Bogdan & Taylor. (1975). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remadja Karya.
- BPS. (2019). *Kabupaten Magetan Dalam Angka*.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2007). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. Ed. Ke-3, Cet. Ke-4.
- Fahrudin, A. (2020). *Psychosocial Intervention For Older People With Sociomotial and Cognitive Problems. International Webinar Multi Perspective on Aging and Wellbeing in Old Age*, 26 September 2020.
- Kemen. PPN/Bappenas. (2014). *RPJMN 2015-2019 Buku I Agenda Pembangunan Nasional*.
- Kementerian Sosial R.I. (2019). Ditjen. Perlindungan dan Jaminan Sosial, Dit. Jamsos Keluarga. *Pedoman Pelaksanaan PKH 2019*.
- (2018). *Juknis Penyaluran Bansos Non Tunai*. Kep. Dirjen. Linjamsos. No. 04/LJS/08/ 2018 Tentang Perubahan I Atas Kep. Dirjen. Linjamsos. No. 01/LJS/02/ 2018 Tentang Juknis Penyaluran Bansos Non Tunai.
- Permense R.I. No. 20/2017 Tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar 1945 dan Amandemennya*. Bandung: Fokus Media.
- (2007). Undang-Undang R.I. No. 17/2007 Tentang RPJPN 2005–2025.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin.
- Mary I., Ahmad S. (2018). *Implementasi Program Pemberdayaan Sosial Kegiatan RS RTLH Bagi Masyarakat Miskin di Pandeglang*. Jurnal Transparansi 194 Vol. 1, No. 2, Desember 2018, pp. 194-205.
- Sibuea, P. Jutaan Rumah Di Indonesia Tidak Layak Huni. Sumber: <https://ugm.ac.id/id/berita/18381-jutaan-rumah-di-indonesia-tidak-layak-huni> (Diakses 30 Okt 2020).
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Soekanto, S. (2012). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Winarno, B. (2018). *Evaluasi program Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Belitung*. Jurnal Pengembangan Kota, Vol. 6 No. 1 (66-74).
- Zania, R. (2017). *Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Tegal*. Semarang: Fisip-Undip.



© 2020 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).

Muhtar

Peran Pendamping Program Keluarga Harapan Dalam Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Di Kabupaten Magetan



Fenomena Rentenir: Studi Eksploratori di Kabupaten Bekasi dan Sekitarnya

Anwar Sitepu^{1*}

¹ Badan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial

Gedung Cawang Kencana, Jl. Letjen. Sutoyo, Cawang, DKI Jakarta, Indonesia

* Korespondensi : anwarsitepu@gmail.com; Telp (+62) 81316017972

Diterima: 1 April 2020; Disetujui: 19 OKtober 2020; Diterbitkan: 28 Desember 2020

Abstrak: Rentenir dapat menjerumuskan orang atau keluarga ke dalam perangkap kemiskinan. Oleh sebab itu penting untuk dilakukan pencegahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fenomena rentenir di wilayah Desa Pahlawan Setia, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi dan sekitarnya. Hasil penelitian dimaksud sebagai masukan dalam upaya mencegah orang atau keluarga jatuh menjadi korban. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dan studi dokumen. Informan dipilih secara acak dari orang-orang yang dikenal oleh peneliti karena hubungan transaksional, ketetanggaan dan kekerabatan. Dokumen yang dimaksud adalah media berita on line, yang dicari di internet dengan mesin pencari google. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rentenir eksis di wilayah desa dimaksud, dan sekitarnya, bahkan di wilayah yang lebih luas. Rentenir juga sudah beroperasi secara on line, sering disebut fintech (*financial technology*). Rentenir dapat dikategorikan berdasar geografis dan pemanfaatan teknologi. Secara geografis, terdiri dari: 1) rentenir setempat (lokal) dan 2) rentenir luar komunitas. Menurut pemanfaatan teknologi terdiri dari: 1) rentenir konvensional dan 2) rentenir on line. Secara substansi seluruhnya serupa, membungakan uang dengan bunga tinggi, perbedaannya pada: 1) organisasi, 2) sistem marketing, dan 3) sistem angsuran dan 4) sistem bunga. Rentenir on line tampak jauh lebih merugikan pengguna, tidak hanya secara finansial tetapi juga secara sosial dan psikologis. Pemerintah pusat maupun daerah menyadari bahaya rentenir dan sudah melakukan upaya pencegahan, meskipun belum cukup signifikan. Secara keseluruhan temuan ini menunjukkan bahwa diperlukan kehadiran lembaga pinjaman yang dapat melayani dengan mudah dan cepat.

Kata Kunci: Fenomena, Rentenir, Korban, Keluarga dan Pinjaman

Abstract: This research aims to describe the existence of the phenomenon of the moneylenders in the village of Pahlawan Setia area. Tarumajaya, Kabupaten Bekasi and surrounding areas. Research has conducted with a qualitative approach. Data collection has done by interview techniques and document studies. The interview was conducted for 30 randomly selected informants scattered in several places. Document study was done on news that loaded on line, that using Google search engine. The results showed that private creditor as a social phenomenon that can be found its existence in the area of Bekasi regency, as well as in other areas around it. Almost all informers know the existence of the kind of creditor in this territory. They are even involved as borrowers or perpetrators. The system is slightly varied but in essence it is similar to lending money to people in need with high or even very high interest fees. Document study on news on the media on line reinforces the findings of the primary data. Based on the data secondary is known that the phenomenon of this private credit is not only found in the district of Bekasi but also in other areas that are wider, to the regency of Karawang, city of Bandung and Central Java. Social media skunders also revealed that the loan is also operating on line in a form commonly called fintech (*financial technology*). The moneylenders on line is essentially similar to a conventional bank, namely lending money to people with high or even very high interest rates. Rentenir on line even rated very cruel because it gives a loan with relatively very easy, no need any collateral, liquid direct lending. But if it pays late, the billing is done without being familiar with the language that tends to be very pleated, insulting, until the borrower feels as terror. Overall the findings of this study revealed that society requires easy and quick loan means despite having to bear high interest loads.

Keywords: Phenomenon, Moneylenders, Victims, Family and Loans

1. Pendahuluan

Berangkat dari pengalaman melakukan action research di Desa Pasir Karag, Kecamatan Korongcong, Kabupaten Pandeglang, Banten pada tahun 2010 (Sitepu, 2010), disadari bahwa rentenir sangat berbahaya bagi keluarga. Keluarga yang meminjam dari rentenir akan menanggung beban ekonomi yang berat, yang berpotensi merusak ekonomi rumah tangga secara berkepanjangan (memiskinkan). Hal ini terjadi karena sesuai namanya rentenir mengenakan beban biaya (bunga) pinjaman sangat mahal. Berdasarkan pegalaman peserta diskusi dapat diketahui bahwa beban biaya (administrasi dan bunga) pinjaman pada rentenir mencapai sebesar 30 persen dalam tempo 40 hari.

Dalam diskusi pada penelitian tersebut diketahui bahwa setiap peminjam dikenakan biaya administrasi sebesar 10 persen dari nilai pinjaman. Misalnya seseorang mengajukan pinjaman sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), maka ketika dicairkan si peminjam hanya menerima sebesar Rp.900.000 (sembilan ratus ribu rupiah). Kemudian si peminjam membayar angsuran atas pokok berikut bunga pinjaman sebesar Rp.30.000 setiap hari, selama 40 hari berturut-turut, terhitung mulai besok harinya. Rentenir atau oleh masyarakat setempat disebut bank keliling atau kosipa tidak perduli pinjaman jam berapa dicairkan, yang pasti besok hari setelah transaksi pinjaman, langsung ditagih angsuran pertama. Demikian seterusnya setiap hari selama 40 hari. Apabila dihitung maka jumlah uang yang harus dibayarkan peminjam dalam tempo 40 hari adalah sebesar Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Jika dihitung dengan cermat maka beban bunga yang harus ditanggung peminjam adalah rata-rata sebesar 0.75 persen per hari. Artinya, secara keseluruhan peminjam menanggung beban bunga jauh lebih tinggi dari bunga bank pada umumnya.

Dampak dari pinjaman demikian, bagi peminjam yang pada umumnya adalah orang miskin akan terlilit utang secara berkepanjangan. Penghasilan mereka pada umumnya sangat kecil sehingga ketika mereka membayar angsuran, dapat dikatakan mereka menyerahkan seluruh penghasilan yang diperoleh pada hari itu. Atau bahkan dalam banyak kasus angsuran tidak dapat ditutup dengan penghasilan yang diperoleh. Implikasinya, keluarga peminjam akan membayar pinjaman dengan pinjaman baru atau dengan menjual asset.

Peserta diskusi pada waktu itu menunjuk beberapa kasus dimana pada akhirnya merusak ekonomi keluarga dan dampaknya dirasakan secara berkelanjutan. Satu kasus yang diangkat pada waktu itu adalah X, pemilik sebuah warung di desa tersebut. Menurut penuturan peserta, sebelum menerima pinjaman warung X relatif berjalan cukup baik. Akan tetapi setelah mengambil pinjaman dari rentenir secara perlahan barang dagangan semakin habis. Hasil penjualan digunakan membayar cicilan setiap hari sehingga lama ke lamaan tidak bisa belanja kembali, sampai pada akhirnya warung tersebut tutup samasekali. Peserta diskusi mengungkapkan sejumlah kasus dimana pada akhirnya peminjam harus merelakan menjual tanah miliknya. Hal yang hendak ditekankan disini adalah betapa rentenir sangat berbahaya bagi kehidupan keluarga. Keluarga dapat kehilangan asset produktif yang paling berharga, seperti tanah, yang berfungsi sebagai sumber nafkah (Sitepu, 2010).

Patut dicatat pada saat penelitian dilakukan (2010) aparat desa memperkirakan hanya 30 persen keluarga yang memiliki lahan pertanian, 70 persen lainnya sudah tidak memiliki lahan. Bahkan rumah yang ditempati sejumlah besar penduduk (keluarga) pun dibangun menumpang di atas lahan milik orang lain. Peserta diskusi memperkirakan 60 persen keluarga setempat pernah terjerat rentenir (Sitepu, 2010)

Penelitian di Pandeglang tersebut mengingatkan penulis atas pengalaman sebagai pekerja sosial pada Yayasan Pelita Kasih (PK) di Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Kota (adm) Jakarta Utara, sekitar 36 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 1982 hingga 1986. Dalam wawancara terhadap penerima pelayanan pada waktu itu, banyak klien mengungkapkan sebagian bantuan digunakan untuk membayar pinjaman. Mereka mengatakan ada pinjaman pada tante B. Pola pinjaman pada tante B serupa seperti yang ditemukan di Pandeglang.

Kemudian pada berbagai kegiatan pengumpulan data di sejumlah daerah dalam rangka berbagai topik penelitian ketika penulis bekerja sebagai peneliti pada Puslitbang Kesejahteraan Sosial, 1999 - 2018, (Kementerian Sosial), fenomena yang serupa kerap terungkap. Demikian juga ketika membantu

ujicoba pembentukan Family Care Unit (FCU) di beberapa daerah, yang diselenggarakan oleh Direktorat Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Sosial pada Direktorat Jendral Pemberdayaan Sosial, Kementerian Sosial, tahun 2013 hingga 2015, kerap terungkap fenomena yang serupa.

Menyikapi fenomena tersebut yang berlangsung dalam kurun waktu demikian panjang dan di temukan di banyak daerah, penulis bermaksud menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat yang pada intinya bertujuan untuk mencegah agar orang tidak terjebak pada rentenir atau bank keliling. Sesuai dengan ketersediaan sumberdaya, kegiatan dimaksud direncanakan akan dipusatkan di Desa Pahlawan Setia, Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, namun operasionalnya dapat saja menjangkau wilayah lain di sekitarnya, seperti Kota Bekasi dan DKI Jakarta.

Sebelum kegiatan pemberdayaan dimulai, terlebih dahulu dilakukan asesmen. Studi eksploratori ini merupakan bagian dari asesmen dimaksud. Tujuannya adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan eksistensi fenomena rentenir di wilayah Desa Pahlawan Setia, Tarumajaya, Kabupaten Bekasi dan sekitarnya.

Rtentenir menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi on line / daring (KBBI,2019) merupakan kata dasar, yang artinya orang yang mencari nafkah dengan membungkarn uang; tukang riba; pelepas uang; lintah darat. Berdasarkan pengertian ini, maka rentenir disebut juga dengan istilah lain yaitu: tukang riba atau pelepas uang atau lintah darat.

Lintah darat, menurut KBBI (2019) merupakan kiasan orang yang meminjamkan uang dengan bunga yang sangat tinggi. Pengertian lintah darat yang lebih komprehensif dimuat dalam situs Kamus Bisnis (2019), yang menyatakan bahwa lintah darat adalah loan shark yaitu orang atau badan yang usahanya memberikan pinjaman dana kepada orang atau badan lain dengan mengenakan bunga yang sangat tinggi. Diuraikan, pemberian pinjaman ini biasanya dilakukan dengan cara memanfaatkan kelemahan atau kesulitan hidup dari peminjamnya. Seorang lintah darat tidak jarang mengancam bahkan tak segan-segan mengambil barang-barang milik peminjam apabila terjadi keterlambatan pembayaran.

Sedangkan di situs Wikipedia (2019), dikemukakan bahwa rentenir atau sering juga disebut tengkulak (terutama di perdesaan) adalah orang yang memberi pinjaman uang tidak resmi atau resmi dengan bunga tinggi. Diuraikan lebih lanjut, pinjaman ini tidak diberikan melalui badan resmi, misalnya bank, dan bila tidak dibayar akan dipermalukan atau dipukuli. Kemudian diuraikan, tengkulak biasanya beroperasi di saat panen gagal, ketika para petani sangat membutuhkan uang namun tidak dapat memberi jaminan kepada bank.

Dijelaskan juga bahwa sasaran rentenir lainnya adalah konsumen produk perbankan yang telah dimasukkan ke daftar hitam karena bermasalah dengan bank (kredit macet, dsb.). Atau pengusaha-pengusaha kecil menengah yang kesulitan akses permodalan dari bank serta rumah tangga-rumah tangga yang memerlukan dana cepat. Pinjaman dari tengkulak tidak memerlukan jaminan sertifikat rumah atau barang berharga lainnya (kebanyakan hanya memerlukan KTP atau identitas lainnya), namun memiliki risiko tinggi (Wikipedia,2019).

Unsur penting dari pengertian rentenir atau lintah darat, seperti dikutip dari beberapa sumber di atas adalah: 1) membungkarn uang atau memberi pinjaman atau meminjamkan uang; dan 2) mencari keuntungan. Persoalan rentenir muncul pada unsur kedua ini, yaitu mencari keuntungan dengan bunga yang dinilai terlalu tinggi, jauh diatas bunga pinjaman yang dinilai wajar, seperti yang berlaku pada bank pada umumnya. Dalam KBBI (2019) versi on line seperti dikutip diatas, disebut dengan "mencari nafkah", namun tidak disebutkan berbunga tinggi atau tidak. "Berbunga tinggi" muncul dalam pengertian lintah darat kata kiasan untuk rentenir. Hal yang sama muncul dalam pengertian rentenir yang dikutip dari situs Wikipedia (2019).

Unsur lain dalam defenisi Kamus Bisnis dan Wikipedia adalah segmen masyarakat yang menjadi konsumen atau nasabah rentenir. Dalam defenisi Kamus Bisnis (2019) disebutkan bahwa sasaran rentenir adalah orang yang menghadapi kesulitan atau kelemahan. Sementara menurut Wikipedia (2019) sasaran rentenir adalah petani yang mengalami gagal panen atau pengusaha kecil menengah yang kesulitan akses permodalan atau rumah tangga yang memerlukan dana cepat. Hal tersebut masuk akal, akan tetapi unsur siapa sasaran marketing rentenir bukan menjadi persoalan pokok dalam

praktek rente, tetapi yang menjadi persoalan adalah unsur bunga tinggi. Dalam tulisan ini yang dimaksud dengan rentenir adalah orang atau badan atau entitas tertentu yang memberi pinjaman uang kepada pihak lain dengan bunga jauh lebih tinggi dari standar umum yang diterapkan pada bank pemerintah. Dengan pengertian ini, rentenir dapat meliputi orang per orang atau pinjaman resmi tidak resmi, yang menjadi penekanan adalah besaran bunga yang jauh di atas bunga pinjaman pada bank pemerintah. Saat tulisan ini dibuat, 26 April 2019, Bank Indonesia (Kontan, 2019) menetapkan suku bunga acuan sebesar 6 persen per tahun. Bunga program Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar 9 persen per tahun (Fakhrizal, 2019).

Berdasarkan penelusuran di internet diketahui bahwa fenomena rentenir ternyata juga ditemukan di negara-negara lain, di Asia misalnya di Malaysia (Tribun, 2019), Cina (Lumbantobing, 2016), India (Gunadha, 2017) dan Vietnam (Gunadha, 2018), Hongkong (Muhammin, 2018) dan bahkan juga di Amerika. Di Malaysia dan Singapura, rentenir sering disebut Ah Long (Wikipedia, 2019). Di sana, bila tidak atau terlambat membayar maka rumahnya akan dicat merah. Salah satu contohnya adalah "O\$ P\$", yang berarti "meminjam uang (kami), bayarlah uang (kami)". Atau mempublikasikan identitas debitur di depan umum untuk mempermalukan debitur dan memaksanya untuk membayar sepenuhnya. Sasaran Ah Long terutama orang-orang yang suka berjudi.

Di negara-negara seperti Hong Kong, Jepang, dan Amerika Serikat, tengkulak atau rentenir kerap memiliki hubungan baik dengan sindikat kriminal terorganisir seperti Mafia, Triad, Yakuza, dan sebagainya. Di Amerika Serikat, rentenir (sering disebut dengan istilah payday, title loans, dan sebagainya) juga kerap beroperasi di daerah yang banyak terdapat kaum imigran (enklaf etnik, seperti pecinan, Little India, dsb.), serta lingkungan miskin (Wikipedia, 2019).

2. Metode

Seperti dinyatakan pada judul, penelitian ini merupakan studi eksploratori (eksploratif). Pilihan studi eksploratori dinilai paling sesuai untuk menjawab tujuan seperti tersebut di atas, yaitu mengetahui dan mendeskripsikan eksistensi fenomena rentenir di wilayah Desa Pahlawan Setia, Tarumajaya, Kabupaten Bekasi dan sekitarnya. Yusuf (2017) mengatakan penelitian eksploratif merupakan studi penjajagan, terutama sekali dalam pemantapan konsep, yang akan digunakan dalam ruang lingkup penelitian yang lebih luas, dengan jangkauan konseptual yang lebih besar. Pengertian ini senada dengan pendapat Kotler, seperti dikutip oleh Amrin (2009) yang mengatakan penelitian eksploratori adalah "penelitian yang bertujuan menghimpun informasi awal yang akan membantu upaya menetapkan masalah dan merumuskan hipotesis."

Penelitian/studi eksploratori dipandang sesuai karena menurut Yusuf, penelitian eksploratif ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut: 1) Eksplorasi, secara harafiah berarti menyelidiki atau memeriksa sesuatu. Jadi penelitian eksplorasi ingin menemukan sesuatu apa adanya, sebagai langkah awal untuk mendeskripsikan fenomena tersebut secara lebih jelas dan tuntas; 2) Penelitian ini terbatas sampelnya; 3) Sifat penelitian ini merupakan penjajagan, bukan akan menerangkan fenomena itu, atau dapat juga dinyatakan sebagai studi pendahuluan untuk penelitian yang lebih luas; 4) Instrumen yang digunakan harus mampu mengungkapkan sebanyak mungkin informasi yang dibutuhkan sesuai tujuan penelitian; 5) Bentuk pertanyaan yang digunakan lebih banyak yang bersifat terbuka dari pada yang bersifat terstruktur, sehingga mampu menampung atau mendeteksi sebanyak mungkin informasi yang dibutuhkan; 6) Sumber informasi yaitu primer dan skunder. Kedua sumber sangat diperlukan untuk saling melengkapi.

Sementara Tatang M. Amrin (2009) mengatakan istilah untuk menyebut sifat-kedaan topik/masalah penelitian eksploratori itu bermacam-macam, antara lain: (1) topik belum dipahami benar; (2) yang bersangkutan/peneliti belum tahu benar mengenainya/sesuatu yang akan diteliti; (3) persoalan atau masalah yang sedikit sekali atau bahkan tidak ada sama sekali hasil-hasil penelitian terdahulu yang bisa dijadikan rujukan mengenainya; (4) sejak awal proyek penelitian hampir-hampir tiada sesuatu apapun yang diketahui mengenai masalah yang akan diteliti itu. Maka, menurut Amrin (2009) apabila yang menjadi tujuan utama penelitian adalah memperoleh pengetahuan yang mendalam (misalnya "menemukan sesuatu yang belum diketahui") mengenai sesuatu

masalah/hal/objek penelitian, maka pendekatan penelitian eksploratorilah yang paling tepat digunakan.

Demikian pun penelitian ini bermaksud menyelidiki atau memeriksa sesuatu, yaitu fenomena rentenir. Untuk mengungkap fenomena tersebut dilakukan pengumpulan data primer dan data skunder. Pengumpulan data primer utamanya dilakukan di wilayah Desa Pahlawan Setia, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Wilayah ini dipilih dengan sengaja sehubungan dengan rencana pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat, seperti telah disinggung di atas, akan dipusatkan di wilayah ini. Wilayah ini menjadi pilihan karena pada satu sisi tersedia sumber daya (bangunan) yang dapat digunakan menunjang kegiatan dan pada sisi lain menurut pengamatan secara umum kondisi ekonomi sebagian masyarakat masih relatif kurang baik. Untuk memperkaya informasi, pengumpulan data primer secara terbatas juga dilakukan di wilayah berdekatan, yaitu Kota Bekasi dan DKI Jakarta.

Informan ditentukan secara acak, yaitu orang-orang, baik laki-laki maupun perempuan, yang memiliki hubungan/kontak dengan peneliti, yang diduga memiliki pengetahuan atau informasi tentang topik ini. Jumlah informan seluruhnya meliputi sebanyak 30 orang. Mereka tersebar di Kab. Bekasi 14 orang; Kota Bekasi 8 orang; Kota Jakarta 8 orang (Jakarta Barat 3 orang; Kota Jakarta Pusat 1 orang; Kota Jakarta Timur 4 orang). Mereka terdiri dari kerabat sebanyak 5 orang; hubungan kerja (pembantu rumah tangga, supir, tukang) 8 orang; hubungan transaksi jual beli sebanyak 5 orang; hubungan ketetanggaan di Kabupaten Bekasi sebanyak 12 orang Menurut jenis klamin, terdiri dari laki-laki sebanyak 18 orang dan perempuan sebanyak 12 orang. Berdasarkan status perkawinan, informan terdiri dari: menikah 26, janda 1, belum nikah 3. Rentang usia mulai dari 20 hingga 63 tahun. Sedangkan menurut pekerjaannya, informan dapat dibagi dalam 4 kategori, yaitu: 1) wiraswasta 10 orang (terdiri dari usaha warung sembako 4 orang; warung mie ayam 2 orang; pedagang sayur 1 orang, dan dagang kue 1 orang); 2) Buruh sebanyak 16 orang (buruh bangunan 4 orang; karyawan mall 3 orang; ojek/taxi on line 3 orang; supir 2 orang; pembantu rumah tangga (PRT) 2; montir 1 orang; dan parkir 1 orang); 3) guru (PNS/swasta) 2 orang; 4) Ibu rumah tangga 2 orang. Meniliki karakteristik informan di atas dapat dikatakan mereka relatif cukup bervariasi, dari segi usia rentangnya cukup jauh, dari muda hingga relatif lanjut usia. Berdasarkan pekerjaan cukup variatif, dari ibu rumah tangga, pedagang, buruh hingga karyawan dan PNS. Kemudian dari segi tempat tinggal hampir setengahnya berada di Desa Pahlwan Setia, yang menjadi lokus utama. Selebihnya tersebar di Kota Bekasi dan Kota Jakarta. Keragaman informan demikian sedikit banyak diyakini mencerminkan pengetahuan masyarakat luas atas fenomena rentenir di tengah masyarakat.

Pengumpulan data primer sudah dilakukan oleh penulis mulai 14 Januari sampai 30 April 2019. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara terbuka. Hasil wawancara setiap informan dituangkan dalam bentuk narasi. Kemudian diolah dengan membersihkan data, dalam arti membuang informasi yang tidak relevan atau tidak berkaitan dengan topik penelitian. Selanjutnya dilakukan kategorisasi berdasarkan tema tertentu. Tema yang dimaksud adalah: 1) pengetahuan informan atas eksistensi rentenir di wilayahnya; 2) Kedudukan atau partisipasi informan dalam praktik rente; 3) Tipe rentenir. Kemudian, untuk memperdalam informasi dilakukan studi dokumentasi. Dokumen yang dimaksud adalah berita yang dimuat dalam internet. Pencarian dokumen dilakukan dengan mensin pencari google dengan kata kunci: 1) rentenir; 2) lintah darat dan 3) bank keliling.

Informasi/data skunder yang diperoleh dari internet digunakan untuk mendalami fenomena. Analisis dilakukan dengan: 1) Mengidentifikasi eksistensi fenomena rentenir; 2) Mengidentifikasi bentuk-bentuk rentenir; 3) Mendeskripsikan dampak rentenir; 3) Mendeskripsikan reaksi korban; 4) Mendeskripsikan pengetahuan pemerintah atas fenomena; 4) Respon pemerintah atas fenomena tersebut.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Eksistensi Rentenir

Berdasarkan informasi yang berhasil digali dari para informan, dapat dinyatakan bahwa rentenir sebagai suatu fenomena sosial dapat dideteksi eksistensinya di wilayah Kabupaten Bekasi, maupun di wilayah lain di sekitarnya yaitu di Kota Bekasi dan Kota Jakarta. Informan di tiga lokasi tersebut memang tidak menyebut para pelepas uang tersebut secara langsung dengan istilah rentenir, tetapi seperti halnya di Kabupaten Pandeglang (Sitepu, 2010) informan menyebut para pelaku dengan istilah *bank keliling* atau *koperasi* atau nama panggilan para pelaku secara langsung. Di Desa Pahlawan Setia, Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, beberapa nama yang disebut adalah Pak H, Tante B, dan Tante R. Di Rawa Lembu, Kota Bekasi, informan menunjuk Tante G. Di Kamal, Jakarta Barat, informan menyebut Tante S, langganan tetangga saya.

Dari 30 orang informan, yang tersebar di wilayah Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi dan Kota DKI Jakarta hampir seluruhnya, yaitu 29 dari 30 orang, menyatakan mengetahui adanya praktik rente atau rentenir di wilayahnya. Hanya satu orang dari 30 orang informan yang tidak mengetahui adanya rentenir di wilayahnya. Informan tersebut berinisial D, seorang laki-laki, 32 tahun, yang bekerja sebagai penyelanjut barang-barang perabotan yang sudah terjual dari sebuah toko. Dia bertempat tinggal di Matraman, Jakarta Timur. Ketika ditanya apakah mengetahui adanya rentenir di wilayahnya, dia mengatakan:

Sehari-hari, saya sibuk bekerja kurang memperhatikan hal-hal seperti itu.

Sedangkan 29 orang informan lainnya seluruhnya mengaku mengetahui bahwa di wilayahnya terdapat praktik rentenir. Di Kabupaten Bekasi, tepatnya Desa Pahlawan Setia, Tarumajaya, dari 14 orang informan seluruhnya mengetahui adanya praktik rentenir. Masing-masing informan mengungkapkan dengan caranya sendiri. Sebagai contoh RW, seorang laki-laki, 39 tahun, asli penduduk setempat, mengatakan:

iya saya sendiri sering minjam sama pak H. Kalau musim panen, biasanya saya pinjam modal sama pak H. Saya pinjam sepuluh juta nanti kalau musim panen sudah selesai saya kembalikan. Biasanya saya kembalikan dua belas juta.

RW adalah pedagang gabah musiman. Ketika musim panen dia membeli gabah hasil petani di sekitar desanya, untuk dijual kembali setelah diolah.

W, perempuan, 33 tahun, pembantu rumah tangga, yang tinggal di rumah kontrakan, mengatakan:

Disini yang (rentenir) saya tahu Tante R, di Pomahan (nama sebuah lokasi). Orang sini biasanya kalau perlu pinjaman, sama dia.

Informan lain di Kabupaten Bekasi, L, perempuan 53 tahun, yang bekerja bersama suaminya di Jalan Pahlawan Setia Tarumajaya, sebagai pedagang mie ayam, mengatakan:

Disini ada (rentenir). Kemarin juga nawarin. Saya dibujuk, ambil bu ambil bu, lima ratus saja. Katanya ‘buat laporan saya di kantor’ Setengah maksi. Sepertinya dia pegawai baru.

Di Kota Bekasi, A, seorang laki-laki, 35 tahun, kuli bangunan, yang tinggal di daerah Pondok Ungu, dalam wawancara mengatakan:

Banyak pak (rentenir). Saya salah satu korbananya. Saya baru saja setahun inilah kerja jadi kuli bangunan. Sebelumnya saya dagang kelapa di Pasar. Saya bangkrut gara-gara pinjam uang. Saya minta pinjam sepuluh juta. Katanya ‘Kecil. Ini saya kasih seratus juta’. Saya gak mau. Saya ambil lima puluh juta. Saya menyesal, saya bangkrut, tiap hari ditagih. Lama-lama uang saya habis. Padahal dulu saya jualan enak sekali. Saya telepon saja barang (kelapa) datang, bukan sedikit, satu truk sekali datang. Kalau barang datang, tinggal beritahu saja teman-teman. Mereka langsung datang ambil. Saya jual eceran paling sisanya yang kecil-kecil.

Anwar Sitepu

Fenomena Rentenir: Studi Eksploratori di Kabupaten Bekasi dan Sekitarnya

N, perempuan, 29 tahun, karyawan (sales pramugari *girl*) perusahaan kasur terkenal yang ditemui di *mall* tempat kerjanya di Kota Bekasi, mengatakan:

saya korban pinjaman on line pak. Pusing kepala saya. Ditelpon terus. Kalo diangkat, dia marah-marah. Suami saya pun marah, katanya ‘ngpain kamu pinjam disitu?’. Sekarang saya ditinggal.

Di Jakarta, informan berinisial O, seorang perempuan, 52 tahun, guru / PNS, tinggal di Kelurahan Penggilingan, Jakarta Timur, mengatakan:

Iya bang disini juga ada (rentenir). N (informan menyebut nama salah seorang anaknya) pernah kerja disitu. Katanya ‘Mak bikin min koperasi saya’. Rupanya dia tertarik.

O menjelaskan bahwa salah seorang anaknya pernah bekerja pada seseorang yang menyebut usahanya sebagai koperasi. Anaknya tersebut tertarik dengan usaha tersebut dan minta kepada O, ibunya, agar dibuatkan usaha sejenis untuknya.

Informan berikutnya, masih di Jakarta Timur, berinisial B, laki-laki, 20 tahun, bekerja sebagai karyawan perusahaan pengelola parkir di sebuah apartemen di wilayah Jakarta Timur, mengatakan:

Kalau teman-teman saya butuh uang biasanya pinjam sama orang dalam (maksudnya oknum manajemen perusahaan). Biasanya pas gajian langsung dikembalikan. Kalau satu juta biasanya teman-teman kembalikan satu juta dua ratus.

Berikutnya, informan di Jakarta Barat, E, perempuan, 41 tahun, ibu rumah tangga, tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Kamal, Kota Jakarta Barat, mengaku pinjam di Tante C. Informan berinisial E ini adalah isteri dari F yang bekerja sebagai *driver taxi on line*. Katanya:

Saya pinjam di Tante C, langganan tetangga saya.

E mengaku pinjam beberapa tahap untuk keperluan mengurus pekerjaan dan biaya hidup selama suaminya tidak bekerja. Saat diwawancara E mengaku total pinjamannya saat ini sebesar Rp.5.000.000. Pinjaman itu dicicil angsuran pokok dan bunganya sebesar Rp.250.000 per hari selama 24 hari. Ketika ditanya mengapa meminjam, E mengatakan:

habis bagaimana pak. Saya perlu buat ngurus pekerjaan suami, buat sehari-hari juga kalau suami gak kerja mau dari mana. Saya pusing, tiap hari juga perlu, buat makan, anak 4 orang, semuanya sekolah.

Secara keseluruhan informasi di atas mengandung makna bahwa rentenir hingga saat ini eksis di tengah masyarakat luas. Serupa seperti yang ditemukan di Pandeglang tahun 2010 dan di Tanjung Priok tahun 1982-1986, di wilayah Desa Pahlawan Setia, Tarumajaya, Kabupaten Bekasi dan daerah atau wilayah lain yang berdekatan, yaitu Kota Bekasi dan Kota Jakarta, ternyata praktik rentenir masih berlangsung. Berdasarkan ungkapan dari para informan ternyata tidak sulit mencari rentenir, baik di wilayah Kabupaten Bekasi, maupun di kota lain di sekitarnya, yaitu Kota Bekasi dan Jakarta. Lebih jauh hal tersebut mengandung makna bahwa fenomena rentenir eksis di tengah kehidupan sehari-hari masyarakat. Dari sisi lain, fakta eksisnya rentenir di tengah kehidupan sehari-hari masyarakat mengandung makna bahwa masyarakat memang memiliki kebutuhan atas sarana pinjaman yang mudah diakses. Oleh karena mendesak, mereka (para peminjam) sepertinya tidak memperdulikan besarnya biaya bunga pinjaman tersebut. Atau sekurangnya mereka terpaksa rela menanggung biaya yang sangat tinggi.

Selanjutnya dari data skunder yang ditelusuri di internet, terungkap hal yang serupa. fenomena rentenir ditemukan baik di Kabupaten Bekasi, maupun di wilayah lain, termasuk di Kota Bekasi dan Kota Jakarta. Bahkan berdasarkan informasi yang ditemukan di internet diketahui bahwa fenomena rentenir terdapat di banyak daerah lain di Indonesia. Beberapa daerah lain di sekitar Kabupaten Bekasi dimana ditemukan rentenir adalah Kabupaten Karawang, Kabupaten Bogor dan Kota Bandung.

Di Kabupaten Bekasi, dalam acara peringatan Hari Koperasi 2019, Sekretaris Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bekasi, Andung Adi Purwanto, mengatakan, jumlah koperasi di wilayahnya ada

sebanyak 1.120 unit. Dijelaskan dari 1.120 unit tersebut, yang aktif dan masih beroperasi tinggal sebanyak 400 unit. Dari jumlah koperasi yang aktif itu, lebih dari 10 persennya telah menerapkan praktik rentenir (Beritaciakarang, 2017)

Di Kota Bekasi hal senada diungkapkan oleh Ketua Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) setempat, Anim Imamudin. Dia meminta instansi terkait untuk memverifikasi operasional 800 koperasi di wilayahnya yang diduga mulai disusupi kalangan rentenir berkedok koperasi. "Dari 800 koperasi di Kota Bekasi, sebanyak 50 persen di antaranya sudah tidak aktif, bahkan dari sekitar 400 yang aktif ada yang berkedok sebagai rentenir," katanya usai menghadiri upacara Hari Koperasi 2017 di Alun-Alun Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Senin (7/8/2017) (Manggala, 2017).

Ungkapan Sekreraris Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bekasi dan Dekopinda Kabupaten Bekasi ini "luar biasa". Dikatakan luar bisa karena beberapa alasan: 1) Sebanyak 10 persen dari 400 koperasi yang masih aktif. (berarti sebanyak 40 unit) di Kabupaten Bekasi melakukan praktek rentenir. Dan dengan demikian menjadi jelas, mengapa rentenir yang datang menawarkan pinjaman kepada warga menyebut dirinya sebagai koperasi. Demikian juga masyarakat menyebut mereka koperasi; 2) Sekretaris Koperasi dan UKM Kabupaten Bekasi maupun Ketua Dekopenda Kota Bekasi telah dengan jujur dan mengakui secara terbuka bahwa sebagian, lebih dari 10 persen, dari koperasi melakukan praktek rentenir. Hal ini menunjukkan bahwa instansinya belum berhasil membina seluruh koperasi. Pengakuan ini merupakan hal positif. Langkah berikutnya tinggal kebijakan apa yang diambil, memberi kesempatan berubah atau tindakan represif.

Di sejumlah daerah lain yang berdekatan dengan Kabupaten Bekasi, seperti Kabupaten Karawang, Kabupaten Bogor, dan Kota Bandung, fenomena rentenir juga diungkapkan oleh data skunder. Di Kabupaten Karawang dikabarkan Bupati mengeluarkan Surat Edaran No. 660.2/67/Dinkop/I/2018 yang ditujukan kepada semua camat, kepala desa, para pelaku usaha perbankan, dan koperasi yang beroperasi di wilayah Kabupaten Karawang. Pada intinya SE ini melarang praktek rentenir di wilayahnya. Bupati Karawang, Cellica, mengatakan:

Surat edaran ini saya buat setelah kami melakukan kajian bahwa praktik rentenir yang marak hingga masuk ke pelosok perdesaan.

Menurut Cellica, larangan praktik rentenir dikeluarkan lantaran banyak koperasi atau perorangan secara terang-terangan mendatangi masyarakat hingga perdesaan dan mematok bunga tinggi. "Kami prihatin karena yang menjadi nasabahnya warga miskin yang membutuhkan uang," ujar politisi Partai Demokrat itu (Farhan, 2018). Di Kabupaten Karawang ini, rentenir disebut juga bank emok (Nurjaya, 2019).

Di Kabupaten Bogor, Yosep (2018), dalam laporannya yang dimuat dalam radarbogor.id mengatakan emak-emak warga Desa Kemang dibuat resah dengan ulah rentenir. Dijelaskan, setiap hari mereka ditagih para *collector* bank keliling. Jika tidak sanggup membayar atau melunasi sesuai waktu yang telah ditetapkan, bunga pinjamannya semakin membesar. Inilah yang membuat ibu-ibu resah. Mereka kerap dicari, dipaksa, dan ditagih oleh sekelompok orang yang mengaku bank keliling. Seorang ibu berinisial Y yang diwawancara Yosef mengatakan "Wah, sering banget pak. Dia itu nagihnya suka dengan cara yang maksi. Kalau kita tidak bayar, kita ditungguin di depan rumah. Kadang dimarahin dan pengen dilaporkan ke polisi. Sementara kita saat itu bukannya tidak mau bayar, tapi memang sedang tidak pegang uang," kata salah satu warga RW 02 bernama Yati (Yosep, 2018).

Di Kota Bandung dikabarkan pemerintah Kota bahkan sudah membentuk satuan tugas (Satgas) Anti Rentenir sejak tahun 2018 yang lalu. Hal ini berarti pemerintah kota setempat bukan hanya sudah mengetahui eksistensi rentenir di wilayahnya tetapi juga menyadari bahwa rentenir sedemikian berbahaya, menimbulkan korban di masyarakat sehingga perlu diatasi dengan cara khusus, yaitu membentuk Satgas (Ispranoto, 2019).

Gubernur Jawa Barat, diberitakan secara pribadi, mengaku banyak mendapatkan aduan dari masyarakat yang menjadi korban pinjaman dana *online*. Bahkan ada pula yang mau bunuh diri lantaran merasa dipermalukan. Menyikapi hal tersebut Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, dikabarkan minta solusi pusat (Nurdiansya, 2019).

Anwar Sitepu

Fenomena Rentenir: Studi Eksploratori di Kabupaten Bekasi dan Sekitarnya

Gubernur mengatakan: "Maka saya titipkan mudah-mudahan OJK dan Kementerian Perdagangan bisa mencarikan solusi," ujar Ridwan Kamil di Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (20/3/2019).

Di Sragen, Jawa Tengah, Presiden RI, Joko Widodo, dalam sebuah acara penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat warga Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sragen, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Klaten, dan Kabupaten Wonogiri, dalam sambutannya antara lain mengatakan:.

Sudah pegang sertifikat ini hati-hati, apalagi pinjamnya ke rentenir, jangan! Mpun ampun. Jangan! Bunganya bisa 12 kali lipatnya bank, mpun mesti ilange niku pinjemnya ke rentenir niku. Hindari yang namanya rentenir," (Himawan, A & Tanjung, E., 2017).

Ungkapan ini mengandung makna bahwa Presiden Joko Widodo sudah mengetahui fenomena rentenir. Presiden bahkan menyadari betapa rentenir berbahaya karena bunganya demikian tinggi.

Secara keseluruhan kutipan berita di atas menunjukkan bahwa fenomena rentenir seperti ditemukan di Kabupaten Pandeglang tahun 2010 juga ditemukan di banyak daerah. Baik berdasar data primer (wawancara dengan informan) maupun data skunder (berita di media *on line*) menunjukkan bahwa fenomena rentenir eksis di tengah masyarakat Kabupaten Bekasi dan sejumlah daerah di sekitarnya. Hal lain, dari data skunder terungkap bahwa pemerintah daerah hingga Presiden sudah mengetahui eksistensi rentenir dan menyadari bahwa rentenir merupakan ancaman yang sangat berbahaya karena merugikan masyarakat.

Patut dicatat juga sejumlah pemerintah daerah sudah melakukan tindakan tertentu untuk mengatasi masalah ini. Kebijakan yang diambil pada intinya ditujukan untuk melindungi masyarakat dari jeratan rentenir. Bentuk kebijakan yang diambil adalah : 1) membentuk satuan tugas anti rentenir (Kota Bandung); 2) menerbitkan surat edaran melarang kegiatan rentenir di wilayahnya (Kabupaten Karawang); 3) mohon tindakan pemerintah pusat (Gubernur Provinsi Jawa Barat). Sesungguhnya beberapa kebijakan / program pemerintah sudah diselenggarakan untuk melayani kebutuhan pinjaman bagi masyarakat bawah, misalnya Kredit Usaha Rakyat (KUR). Beberapa waktu yang lalu ada Simpan Pinjam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Namun sayang sekali program tersebut kurang membangun kemandirian masyarakat sehingga tidak berkelanjutan.

3.2 Partisipasi Informan dalam Praktek Rente

Berdasarkan partisipasi (keterlibatan) dalam praktek rente, para informan dapat dibagi dalam 3 kategori: 1) Konsumen, yaitu mereka yang mengaku pernah atau sedang meminjam dari rentenir; 2) Pelaku rente (rentenir), yaitu mereka yang bertindak sebagai pemberi pinjaman kepada orang yang membutuhkan; 3) Saksi, yaitu mereka yang mengetahui adanya aktifitas rentenir, tetapi belum pernah meminjam dari rentenir atau pun memberi pinjaman kepada orang lain (sebagai pelaku rentenir).

Tabel 1. Informan Menurut Peranserta Dalam Praktek Rentenir

Wilayah Kab/Kota	Penerima pinjaman	Pemberi pinjaman (Pelaku)	Saksi	Jumlah
Kab. Bekasi	11	3	-	14
Kota Bekasi	3	2	3	8
Kota Jakarta	5	1	2	8
Jumlah	19	6	5	30

Secara keseluruhan dari 30 orang informan di tiga lokasi (Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi dan Kota Jakarta), sebanyak 19 orang merupakan konsumen atau pengguna jasa rentenir; sebanyak 6 orang merupakan pelaku rentenir; dan sisanya sebanyak 5 orang merupakan saksi. Dari 20 orang informan yang pernah meminjam sebanyak 3 orang sedang memiliki pinjaman, belum lunas.

Jika dirinci per daerah, di Kabupaten Bekasi, dari 14 orang informan, sebanyak 11 orang adalah penerima pinjaman dan 3 orang merupakan pelaku. Di Kota Bekasi, dari 8 orang informan, sebanyak 3 orang merupakan konsumen; sebanyak 2 orang pelaku dan 3 orang merupakan saksi. Sedangkan

dari 8 orang informan di Kota Jakarta, sebanyak 5 orang merupakan penerima pinjaman, 1 orang pelaku, dan 2 orang saksi.

3.3 Tipe Pelaku Rente

Mencermati informasi yang dapat digali dari informan, rentenir dapat dikategorikan berdasarkan lokasi pelaku, menjadi: 1) Rentenir setempat (lokal); dan 2) Rentenir luar. Selain itu rentenir juga dapat dikelompokkan berdasarkan teknik transaksi, menjadi: 1) rentenir konvensional; dan 2) rentenir *on line*. Rentenir lokal dan luar berbeda dalam beberapa aspek, yaitu: a) Sebutan; b) organisasi; c) sistem marketing; d) Bunga/Biaya; e) Sistem pembayaran.

3.4 Rentenir Lokal vs Luar

Rntenir lokal (setempat) adalah orang setempat, artinya tinggal di lingkungan peminjam, yang memberi pinjaman dengan biaya tinggi kepada orang yang membutuhkan. Di Kabupaten Bekasi tiga nama yang disebut adalah Pak H, Tante R dan Tante B. Di Kota Bekasi, nama yang disebut oleh informan M dan NS adalah Tante G. Di Kota Jakarta Barat, E menyebut Tante C, langganan tetangga saya.

Rntenir luar adalah orang atau suatu entitas yang datang ke suatu wilayah untuk tujuan meminjamkan uang. Di Kabupaten Bekasi (Desa Pahlawan Setia, Tarumajaya), seorang informan perempuan pedagang mie ayam mengatakan:

Iya ada yang datang menawarkan pinjaman. Saya gak mau tapi dia bujuk terus, malah sampai setengah memaksa. Katanya 'lima ratus saja, biar saya punya laporan di kantor. Sepertinya dia pegawai baru, suruhan koperasi.'

Tabel 2. Perbedaan Rentenir Lokal dan Rentenir Luar

No.	Aspek	Lokal	Luar
1.	Nama	Nama panggilan orang	Nama lembaga bank keliling
2.	Sistem Marketing	Pasif/menunggu	Aktif/menawarkan jasa
3.	Sistem Angsuran	Lebih bebas	Harian / Mingguan (ketat)
4.	Organisasi	Perorangan / keluarga	Terorganisasi / ada atasannya; ada pembagian tugas
5.	Sistem Bunga	Fleksibel	Pasti

- a) Rentenir lokal (setempat) biasanya disebut langsung dengan nama panggilan pelaku, seperti Tante A, Tante B dan seterusnya. Sedangkan rentenir luar disebut atau dikenal orang dengan bank keliling atau koerasi.
- b) Dalam hal marketing, rentenir lokal dapat dikatakan lebih bersifat pasif, menunggu datangnya orang butuh. Sedangkan rentenir luar aktif dalam menawarkan jasa pinjaman. Mereka mencari nasabah, dengan cara berkeliling, sehingga disebut bank keliling atau "koperasi". Seperti diungkapkan oleh 2 orang informan di Kabupaten Bekasi, mereka didatangi dan ditawari pinjaman. Kata L dibujuk hingga setengah memaksa. .
- c) Berdasarkan organisasi, rentenir lokal dapat dikatakan belum berupa organisasi, dijalankan sendiri oleh perorangan di lingkungannya. Rentenir luar cenderung sudah terorganisasi, dalam arti terdapat sejumlah orang yang bekerjasama melakukan kegiatan usaha peminjaman uang. Pada kasus di Kabupaten Bekasi, ada orang yang datang menawarkan kepada pedagang mie ayam. Dia mengatakan seperti diungkapkan kembali oleh informan: '*Lima ratus saja buat laporan saya dikantor*' Kalimat ini mengandung makna bahwa dia bawahan dari seseorang di kantornya. Orang tersebut dapat disebut sesuai pengakuannya adalah tenaga marketing dari suatu entitas usaha.
- d) Bunga pinjaman pada rentenir lokal dapat dikemukakan kurang ketat dibanding bunga pada bank keliling. Pada kasus H seorang pelaku rentenir mengatakan: *saya juga biasa memberi pinjaman*

Anwar Sitepu

Fenomena Rentenir: Studi Eksploratori di Kabupaten Bekasi dan Sekitarnya

- kepada orang butuh. Mereka perlu buat nanam padi. Atau dagang. Tapi saya tidak mematok berapa bunganya. Biasanya mereka kembalikan sekaligus tergantung hasil yang didapat. Biasanya kalau sepuluh dipulangin dua belas. Pada bank keliling atau “koperasi”, persentase bunga sudah pasti, terdapat semacam paket, kalau pinjam sebesar tertentu maka harus dikembalikan sebesar sekian setiap hari atau setiap minggu dalam kurun waktu tertentu. Pada umumnya, besar bunga 30 persen per 40 hari. Namun pada kasus E, informan di Kamal, Jakarta Barat, bunga lebih besar. Dia mengatakan setiap kelipatan satu juta dicicil sebesar Rp.50.000 per hari selama 24 hari. Artinya dalam 24 hari, pinjaman yang riilnya diterima Rp.900.000 dikembalikan / dibayar sebesar Rp.1.200.000. Maka biaya yang ditanggung peminjam adalah sebesar Rp.300.000 atau 30 persen dalam 24 hari. Suatu biaya yang teramat mahal. Saat ini bunga pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) ditetapkan sebesar 9 persen per tahun, artinya 0,75 persen per bulan.*
- e) Sistem pembayaran. Rentenir lokal bervariasi, tergantung kesepakatan pemberi dan penerima pinjaman. Rentenir luar ditetapkan sepihak, biasanya harian, 24 hingga 40 hari.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari informan B, karyawan perusahaan pengelola parkir di sebuah apartemen, seperti telah dikutip di atas, dapat dikatakan juga bahwa rentenir tidak hanya berada di lingkungan permukiman, tetapi juga dapat terjadi di lingkungan kerja. Dalam kasus ini pelaku adalah oknum manajemen perusahaan. Sedangkan peminjam adalah karyawan yang statusnya lebih rendah, bukan karyawan tetap. Rentenir di lingkungan kerja ini dapat dikategorikan sebagai rentenir lokal karena dia sesungguhnya tidak mencari nasabah, namun melayani apabila ada yang meminta.

3.5 Rentenir On line

Berdasarkan studi dokumentasi, yaitu penelusuran di internet, diketahui bahwa kini ternyata telah muncul fenomena baru berkaitan dengan rentenir. Fenomena tersebut adalah apa yang disebut dengan pinjaman *on line* (disingkat pinjol) atau dalam bahasa asing *fintech*. *Fintech* sebutan pendek untuk *financial technology* (*fintech*) *peer to peer (P2P) lending*, yaitu aplikasi teknologi informasi yang berfungsi untuk mempertemukan pemilik dana dan nasabah (Lingga, 2019). Mencermati kedua istilah yang digunakan, pinjol atau *fintech*. sesungguhnya tidak ada masalah. Kedua istilah sesungguhnya bersifat netral, dalam arti tidak mengancam atau merugikan siapa pun. Pinjaman *on line* dapat dipahami sebagai pinjaman yang dilakukan secara *on line*. Namun kedua istilah rupanya sudah diidentikkan dengan rentenir *on line*. Penyebabnya, dalam praktik *fintech* digunakan oleh orang atau entitas atau perusahaan untuk menyelenggarakan pinjaman *on line* dengan bunga sangat tinggi, seperti rentenir pada umumnya. (Sanusi, 2019; Tim Viva, 2019; Dendi, 2019; Kumparan, 2018; Fauzia, 2019).

Fenomena ini kini menjadi sorotan karena nasabahnya merasa diperlakukan tidak adil, dikenakan bunga tinggi dan apabila terlambat melakukan pembayaran biasanya dipermalukan. Salah satu kasus yang sempat ramai diberitakan pada awal tahun 2019 adalah seorang laki-laki, berinisial Z, supir taksi, yang kemudian mengambil jalan pintas dengan bunuh diri. Z dikabarkan gantung diri di rumah kos dengan meninggalkan surat wasiat. Berita ini antara lain dipublikasikan oleh Okenews, selasa 12 Februari 2019, (Wijayanto, 2019); Kumparan NEWS, 11 Februari 2019 (Kumparan, 2019b) dan Vivanewstainment, 13 Februari 2019 (Viva, Tim, 2019); dan sekurang juga disiarkan oleh Metro TV (Redaksi Metro TV, 2019). Dalam surat wasiatnya selain minta maaf kepada anak dan isterinya Z minta OJK dan pihak berwajib agar memberantas pinjaman *on line*. Berikut petikan surat Z:

Maafkan saya telah membuat semua orang susah. Anak-anak jangan lah pernah kalian menjadi orang yang suka berbohong. Ayah telah membuat kalian susah, kelak menjadilah orang-orang yang jujur, istriku maafkan aku yang tak pernah membuat kalian bahagia. Kepada OJK dan pihak berwajib tolong berantas pinjaman online yang telah membuat jebakan setan: wahai para rentenir online kita bertemu nanti di alam sana. Jangan pernah ada yang bayar hutang online saya, karena hanya saya yang terlibat tidak ada orang lain terlibat kecuali saya (Wijayanto, Nanang , 2019).

Sebelum kasus Z, seorang perempuan dengan nama samaran M, juga dikabarkan melakukan percobaan bunuh diri, dengan meminum minyak tanah. Dikabarkan M memiliki pinjaman total sebesar Rp.20.000.000 pada 10 perusahaan *fintech* (Tim Viva, 2019)

Belum ditemukan sejak kapan persisnya fenomena ini berkembang. Jika merujuk pada berdirinya perusahaan yang dikategorikan sebagai pionir *fintech* di Indonesia maka dapat dikatakan fenomena ini sekurangnya mulai muncul tahun 2015. PT IRJ atau disingkat Investree berdiri tahun 2015. (Nindya, 2019).

Berdasarkan telaahan atas sejumlah laporan (berita) yang dapat ditemukan di internet dapat dipahami bahwa pinjaman *on line* yang dimaksud adalah nyaris tidak ada beda dengan rentenir pada umumnya, seperti diuraikan di atas. Transaksinya relatif mudah, dalam arti tanpa jaminan, proses cepat dan bunga tinggi atau sangat tinggi. Perbedaannya pinjol menggunakan aplikasi teknologi informasi atau dikenal dengan *financial technology* (*fintech*) dalam kegiatan bisnisnya

Kalau rentenir konvensional dalam transaksi, mulai dari penawaran jasa pinjaman sampai transaksi pinjaman dan pembayaran kembali oleh nasabah dilakukan melalui / dalam pertemuan tatap muka maka pinjaman *on line* dapat dikatakan tidak lagi melakukan kegiatan tatap muka. Pada seluruh rangkaian transaksi dilakukan melalui perantaraan teknologi informasi khusus yang disebut *financial technology* (Nindya, 2019).

Rentenir *on line* dapat dinyatakan tidak pernah bertemu langsung dengan nasabahnya. Penawaran dan permohonan pinjaman dilakukan melalui media sosial. Apabila transaksi pinjam meminjam disepakati maka pinjaman dari rentenir akan ditransfer langsung ke rekening peminjam demikian sebaliknya pembayaran kembali dari peminjam ke rentenir juga dilakukan melalui transfer bank. Belakangan disebut juga pinjaman *on line*, disingkat *pinjol*.

Berdasarkan status, perusahaan *fintech* dapat dibagi dua, yaitu: legal dan ilegal. Perusahaan *fintech* legal terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sedangkan perusahaan *fintech* ilegal tidak terdaftar pada OJK. OJK adalah lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti Asuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya (Republik Indonesia, 2011). Kecenderungannya, pihak terkait, seperti polisi dan OJK memandang bahwa pinjol bermasalah yang disini disebut sebagai rentenir *online* adalah perusahaan / entitas *fintech* yang ilegal.

Mencermati berita di media sosial. tampak bahwa berbagai pihak terkait seperti polisi, OJK dan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkoinfo) sudah berupaya mengatasi permasalahan rentenir *online*. Salah satu cara yang ditempuh adalah dengan melakukan pemblokiran. Dikabarkan hingga sejauh ini OJK sudah memblokir sebanyak 803 fintech ilegal (Priyono, 2019). Diuraikan dari 803 *fintech* yang sudah diblokir, sebanyak 404 entitas dilakukan sepanjang tahun 2018 dan sebanyak 399 entitas hingga Maret 2019, terdiri dari 231 entitas pada bulan Februari dan 168 pada bulan Maret 2019. Informasi ini mengandung mana bahwa pihak berwenang melakukan pemantauan dan pemblokiran secara terus menerus namun pada sisi lain selalu muncul perusahaan *fintech* ilegal baru.

Menilik informasi yang diperoleh, diduga sebagian pelaku usaha *fintech* (rentenir *online*) di Indonesia adalah orang asing. Seorang informan yang bekerja sebagai *driver grab bike* tinggal di Desa Pahlawan Setia, Kabupaten Bekasi, mengaku mengetahui seorang tetangganya yang bekerja di sebuah perusahaan *fintech*. Dia menjelaskan perusahaan tersebut dimiliki oleh WN China. Dia mengatakan :

Kerja di perusahaan seperti itu enak. Gajinya besar. Bosnya China, gak bisa berbahasa Indonesia. Kantornya ada tiga, satu di sebuah mall di perbatasan Jakarta - Kabupaten Bekasi, dua lainnya di daerah Tangerang.

Mengingat bahwa sebelumnya ditemukan berita bahwa sejumlah besar warga China, pebisnis *fintech* memindahkan usahanya ke Indonesia karena Pemerintah China menetapkan regulasi yang ketat (Rahim, 2019) maka informasi tentang pemilik usaha itu didalami lebih jauh. Apakah yang dimaksud dengan "bosnya China" adalah warga Indonesia keturunan China atau warga negara China. Menurut

infoman tersebut, sesuai dengan informasi yang diperoleh dari tetangganya tersebut, maka dia menegaskan bahwa pemilik bisnis itu adalah warga negara China. Dia mengatakan: *orang sana* (maksudnya warga China), dia gak bisa bahasa Indonesia. Informasi ini penting, jika pemerintah tidak mampu membendung dikhawatirkan negara dirugikan dalam jumlah besar.

Hingga sejauh ini tidak ditemukan data resmi korban pinjaman *on line*, akan tetapi sebagai salah satu gambaran dapat dilihat dari banyaknya permohonan bantuan ke lembaga banatuan hukum. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, menginformasikan bahwa dalam kurun waktu 4 sampai 25 Nopember 2018, telah menerima sebanyak 1.330 aduan. Korban ternyata tersebar diberbagai kota. Dijelaskan "Dari jumlah tersebut, pengadu terbanyak berasal dari Jakarta yakni 36,07 persen, disusul Jawa Barat 27,24 persen, Banten 9,80 persen, Jawa Timur 8,30 persen, Jawa Tengah 7,10 persen," kata Silvia di kantor LBH Jakarta, Jakarta Pusat, Minggu (9/12/2019).

Menurut analisis Pengacara Publik LBH Jakarta Jeanny Silvia Sirait, terdapat 14 pelanggaran yang dilakukan oleh admin pinjaman online (Kumparan, 2018). Beberapa diantaranya adalah: 1) Bunga pinjaman yang terlampaui tinggi serta tanpa batasan (1.330 orang); 2) Penagihan pada kontak darurat (1.100 orang); 3) Ancaman penyebaran foto dan informasi (903 orang); 4) Ancaman pelecehan seksual (781 orang); 5) Pelanggaran lainnya juga berupa penyebaran data pribadi; 6) alamat kantor yang tidak jelas; 7) biaya admin tidak jelas, dan lainnya; 8) data dalam KTP miliknya disalahgunakan oleh penyedia layanan pinjaman online; 9) Bahkan, menurut Silvia, ada korban yang sudah membayarkan pinjamannya namun tidak tercatat dalam sistem dan tetap ditagih. Silvia memaparkan, para korban yang didominasi perempuan ini sebenarnya juga sudah mengadukan kasus ini ke OJK dan Kepolisian. Namun, hingga saat ini belum ada tindak lanjut dari pengaduan tersebut.

3.6 Profil Nasabah Rentenir

Berikut adalah beberapa kasus peminjam (nasabah) rentenir.

3.6.1 Kasus N

N adalah seorang perempuan, 29 tahun, karyawati toko, menikah, tinggal di Bekasi. Dia mengaku sebagai korban pinjaman *on line*. Ketika itu penulis sedang mencari meubel di sebuah toko di Bekasi, dan sempat ngobrol dengan N salah seorang SPG. Dia bertanya: *katanya bapak sudah pensiun, kenapa beli meja kantor*. Dijelaskan rencana mendirikan koperasi. Dijelaskan juga latar belakang kenapa penulis berniat mendirikan koperasi, yaitu menolong orang agar tidak jatuh ke tangan rentenir. *Kasihan banyak orang jatuh ke tangan rentenir. Mereka menjadi korban*. N secara sepontan mengatakan: *saya jadi anggota pak*. Setelah berbincang lebih lanjut diketahui N merupakan korban rentenir, pinjaman *on line*. N mengungkapkan penyesalannya meminjam uang dari *on line*. Katanya:

gara-gara pinjaman *on line* saya sudah pisah sama suami. Suami saya marah, saya gak kasih tahu pinjam di *on line*. Saya ditekan dipermalukan sama pinjaman *on line*. Nyakin hati Pak. Mereka nagih marah-marah. Nagihnya gak hanya ke kita, teman-teman yang ada nomornya di hape kita juga dihubungi. Semua jadi tahu. Pusing menghadapi mereka. Saya korban Pak.

3.6.2 Kasus A

A, laki-laki, 34 tahun, menikah, warga Kabupaten Bekasi. A adalah seorang buruh bangunan. Dia mengaku baru setahun ini bekerja menjadi buruh bangunan. Sebelumnya bekerja sebagai pedagang hasil bumi, kelapa dan cabe di Pasar dekat rumahnya. Menurut penngakuannya selama dia dagang relatif cukup sukses. Dia mendatangkan kelapa satu hingga tiga truk setiap minggu dari Jawa Tengah.

"Saya gak pakai modal. Telepon saja barang datang. Bayar kalau sudah laku. Cabe juga begitu, tggal telepon saja barang datang". A merasa sukses, mudah cari uang. "Begitu barang datang, tinggal beri tahu saja ke pedagang lain, barang masuk nih... langsung dibagi. Kalau kelapa paling yang kecil-kecil saja yang saya jual eceran"

Kenapa kemudian menjadi buruh bangunan? Dia mengaku salah. Katanya:

saya minta pinjaman ke seseorang. Saya minta 10 juta. Katanya kecil, ‘ini saya kasih 100 juta’. Saya gak mau saya ambil 50 juta. Saya nyicil tiap hari sebesar 250 ribu selama 300 hari. Saya bangkut. Uangnya dipakai untuk apa? “Saya main perempuan”.

Sebelum pinjam 50 juta sebelumnya juga sudah pinjam tapi nilainya tidak sebesar itu, sepuluh juta saja. Saat ini A menyesal sekali. Ini juga pingin dagang lagi, cari-cari tempat yang strategis, tapi modal belum ada. Kejadian ini belum lama baru setahun yang lalu. Selain, dagang kelapa dan cabe, A juga mengaku berpengalaman jual hewan kurban setiap musim menjelang hari raya haji. Hewan yang dijual biasanya sapi dan kambing. Kata A:

Misalnya modal 50 juta kita taruh di pemasok hewan. Kita bilang saya perlu 100 kambing. Nanti dia kirim. Harga dari sana 1 juta kita jual 2 juta. Lumayan untungnya. Kita keluar biaya pakan ternak. Kita suruh orang cari rumput. Sewa tempat dan jasa preman/keamanan. Sisa hewan yang tidak terjual, dikembalikan kepada pemasok.

3.6.3 Kasus E

E, ibu rumah tangga, isteri seorang supir taxi *on line*. E harus meminjam ke rentenir karena suami bermasalah dengan pekerjaannya. Aplikasi taxi *on line* yang selama ini digunakan F, suami E di-*suspen* oleh operator. Dia menjelaskan pada waktu itu, seorang calon penumpang membatalkan pesanan setelah E memberitahukan, mobil yang digunakan berbeda dengan yang tertera pada aplikasi. Intinya, F suami E yang menjadi pencari nafkah keluarga tidak bisa bekerja sebagaimana biasanya. Untuk bisa bekerja lagi suami isteri F dan E tidak melihat jalan lain, selain membeli lagi aplikasi *taxis online*. Oleh karena tidak memiliki tabungan maka tidak ada pilihan, selain meminjam pada Tante X. Katanya: *langgan tetangga, pedagang nasi uduk*. Ketika itu E meminjam sebesar Rp.3.000.000. Pinjaman dibayar harian sebesar Rp.150.000 per hari selama 24 hari. Aplikasi sudah dipegang, F bisa mencari uang lagi. Namun ternyata aplikasi tersebut sekali lagi di-*suspen* oleh pihak operator, tanpa penjelasan. Kembali F menganggur, harus mencari aplikasi lagi. Kali ini F dibantu oleh pemilik mobil taxi online yang selama ini disewa. Aplikasi baru dibuat atas nama seseorang. Namun untuk mempercepat keluarnya aplikasi F perlu membayar orang tertentu dan juga membayar tebusan SIM orang yang namanya dipakai bikin aplikasi baru. Untuk biaya-biaya mengurus aplikasi baru dan biaya hidup keluarga selama F tidak bekerja E kembali harus meminjam dari Tante X. Besar pinjaman adalah R.2.000.000. Oleh sebab F dan isterinya harus membayar cicilan dan bunga pinjaman sebesar Rp. 250.000 per hari, maka F tidak bisa membayar sewa mobil.

Mencermati 3 kasus di atas, tampak bahwa nasabah rentenir seperti disebutkan pada definisi yang dikutip pada pendahuluan adalah berasal dari kalangan bawah. Kasus pertama adalah buruh toko, kasus kedua adalah buruh bangunan. Kasus ketiga adalah ibu rumah tangga, isteri dari seorang supir taksi daring. Namun berbeda dari apa yang disebut dalam definisi Wikipedia, bahwa nasabah rentenir adalah para petani. Pada penelitian ini nasabah rentir terdiri dari buruh, pedagang, dan ibu rumah tangga (isteri seorang supir taksi daring). Kasus Z yang dikutip pada bagian 4 (data skunder) adalah supir taksi *online*. Mengapa mereka meminjam? Pada kasus E, jelas bahwa dia dan keluarganya perlu uang karena suaminya tidak bekerja, bermasalah dengan operator taksi daring. Hal ini berarti keluarga E tidak memiliki tabungan yang dapat digunakan untuk keadaan darurat. Pada kasus A, dia meminjam ketika bekerja sebagai pedagang. Menurut pengakuannya, ketika itu sesungguhnya usahanya berjalan lancar. Dia mengaku salah menggunakan uang untuk “main perempuan”. Hal ini mengandung makna bahwa dia sebagai peminjam bukan karena tidak ada penghasilan akan tetapi karena menggunakan uang dengan tidak baik. Pada kasus N, tidak diperoleh informasi pemanfaatan pinjaman. Namun N mengaku dimarahi oleh suaminya, kenapa meminjam pada *fintech*. Hal ini merupakan indikasi bahwa N meminjam bukan untuk keperluan keluarga yang mendesak. Artinya meminjam lebih cenderung untuk keperluan gaya hidup. Kasus N lebih mirip dengan kasus A, untuk “main perempuan”. Kedua kasus mengungkapkan gaya hidup bisa memicu orang terjebak dalam perangkap rentenir. Lebih jauh dari kasus A dan N, ada indikasi kuat mereka kurang mampu mengelola keuangan dengan bijaksana.

Berdasarkan informasi skunder, diketahui bahwa warga Indonesia yang bekerja di luar negeri (pekerja migran indonesia atau disebut juga TKW) ternyata juga rentan dengan rentenir. Hal seperti ini antara lain terungkap di Hongkong, seperti dikutip oleh Muhammin dari laporan *South China Morning Post*, Sabtu (7/7/2018). Dikhabarkan diplomat Indonesia dan Filipina mendesak otoritas Hongkong untuk menindak tegas rentenir yang menjadikan TKW sebagai sasaran mereka. Dikhabarkan seorang pria ditangkap karena telah memaksa sebanyak 878 orang pembantu rumah tangga asal Indonesia dan Filipina menyerahkan paspor mereka dengan imbalan pinjaman uang (Muhammin, 2018). Diberitakan bahwa orang tersebut memberi pinjaman kepada TKW dengan bunga sangat tinggi yaitu 125 persen (Muhammin, 2018). Berita ini tidak mengungkap motivasi para TKW meminjam pada rentenir. Namun melihat jumlah korban sebanyak 878 orang berasal dari Indonesia dan Filipina, kiranya pelaku sudah cukup mahir, "profesional", terlebih menjadikan paspor sebagai jaminan.

Mengingat pola pengiriman TKW, dimana mereka diberangkatkan dengan biaya pijaman dari sponsor, dan dibayar dengan gaji 10 bulan pertama, patut diduga rentenir memanfaatkan celah ini. Dugaan ini beralasan karena selama sekitar 10 bulan pertama bekerja, para TKW belum menerima gaji sepenuhnya. Sementara pada sisi lain mereka memiliki kebutuhan pribadi yang tentu tidak seluruhnya dapat diperoleh dari majikannya. Secara keseluruhan dari 3 kasus diatas dan informasi skunder diatas dapat dikemukakan bahwa kelompok bawah rentan dengan rentenir. Alasannya bukan hanya karena tidak memiliki penghasilan tetapi juga karena gaya hidup melampaui kemampuan ekonomi.

Sementara itu dampak dari peminjaman pada rentenir seperti dirasakan oleh N, A, E adalah beban berat. N terpaksa berpisah dengan suaminya. Dia mengalami depresi, diteror terus oleh *dept collector*. A mengalami kebangkrutan. E dan suaminya gak mampu bayar sewa mobil rental, sumber mata pencahariaannya. Z supir taksi *on line*, yang beritanya dikutip pada poin 4, bahkan mati bunuh diri. Secara keseluruhan rentenir berdampak buruk bahkan sangat buruk bagi kesejahteraan sosial seseorang dan keluarganya. Sampai seorang Presiden was-was sehingga dalam acara penyerahan sertifikat hak milik tanah di Sragen, Jawa Tengah memperingatkan agar jangan sampai jatuh ke tangan rentenir (Himawan, A & Tanjung, E., 2017). Fenomena ini, seyogiyanya sangat perlu direspon lebih intens tidak hanya oleh pemerintah tetapi juga komponen lain, termasuk tokoh masyarakat, karena dapat dipastikan korban sesungguhnya sangat banyak. Oleh sebab itu sangat penting upaya pencegahan agar tidak jatuh ke tangan rentenir. Mengingat bahwa masing-masing orang dan keluarganya memiliki aspirasi dan kebutuhan unik, kiranya solusi yang relatif aman dan berkelanjutan, salah satunya adalah melalui pemberdayaan masyarakat.

4 Kesimpulan

Berdasarkan data primer dapat disimpulkan bahwa, fenomena rentenir terdapat di wilayah Desa Pahlawan Setia, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat maupun di daerah lain di sekitar Kabupaten Bekasi, yaitu Kota Bekasi dan Kota Jakarta. Merujuk informasi dari para informan baik di Desa Pahlawan Setia maupun dari informan dari daerah lain di sekitar Kabupaten Bekasi dapat dinyatakan bahwa tidak sulit mencari informasi tentang eksistensi fenomena rentenir, hampir semua semu informan memiliki pengetahuan/informasi tentang praktik rentenir di wilayahnya. Kecuali satu orang, seluruh informan baik di Desa Pahlawan Setia, Tarumajaya, Kabupaten Bekasi maupun informan di daerah lain yang berdekatan, ternyata memiliki peran langsung dan tidak langsung dalam praktik rentenir di wilayahnya. Hal ini mengandung arti bahwa praktik rentenir sungguh melekat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Data skunder memperkuat kesimpulan yang ditarik dari data primer. Data skunder justeru mengungkap fenomena rentenir ditemukan di banyak daerah lain, yang lebih luas (Kota Bandung, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bogor). Pemerintah baik pusat maupun daerah ternyata sudah menyadari eksistensi rentenir dan bahaya yang ditimbulkannya. Sejumlah upaya sudah dilakukan berbagai pihak untuk mengatasi fenomena ini. Namun fakta masih maraknya rentenir menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan belum cukup berhasil. Oleh sebab itu, diperlukan upaya lebih intensif, termasuk melalui pemberdayaan masyarakat, agar warga tidak semakin banyak menjadi korban.

Anwar Sitepu

Fenomena Rentenir: Studi Eksploratori di Kabupaten Bekasi dan Sekitarnya

Berdasarkan informasi ini juga dapat disimpulkan bahwa masyarakat membutuhkan kehadiran lembaga peminjaman uang yang mudah diakses. Masyarakat yang membutuhkan cenderung menggesampingkan faktor biaya tinggi, demi menutup keperluan yang dirasakan mendesak.

5 Saran

Berdasarkan hasil penelitian seperti diuraikan diatas dan potensi dampak yang ditimbulkan, rekomendasi yang perlu disampaikan kepada beberapa pihak terkait adalah sebagai berikut:

5.2 Kementerian Sosial

Kementerian Sosial sebagai instansi pemerintah pusat yang memiliki tugas dan fungsi dalam urusan kesejahteraan sosial, termasuk penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial, kiranya sangat mendesak untuk menyelenggarakan suatu program yang difokuskan untuk mengatasi (mencegah) masyarakat terjebak menjadi korban rentenir. Kelompok Usaha Bersama Ekonomi (KUBE) yang sudah menjadi trade mark Kemensos sejak lama kiranya memiliki potensi sangat besar untuk diarahkan menjadi wadah masyarakat secara swadaya menyelenggarakan simpan dan pinjam. Berdasarkan pengalaman sebagai peneliti sesungguhnya praktek KUBE simpan pinjam sudah tumbuh di sejumlah daerah namun kurang berkembang karena berbagai kendala. Pada satu masa Kemensos pernah berhasil menumbuhkan KUBE menjadi usaha simpan pinjam relatif cukup besar akan tetapi belakangan tidak dilanjutkan karena tidak dapat memperoleh restu dari otoritas keuangan dengan pertimbangan bukan core bisnis. Mengingat fenomena rentenir demikian luas dan berbahaya kiranya sinergi antara Kemensos dan Kemenkop dan UKM dapat dijadikan solusi. Kesepahaman (MoU) antar kedua instansi, seperti pernah disepakati tahun 1999 dan 2013 kiranya perlu dilanjutkan, KUBE diposisikan sebagai cikal bakal koperasi. Artinya Kemensos dan Dinas Sosial di daerah sungguh bersinergi dengan Kemenkop dan UKM serta OPD yang membidangi koperasi dan UKM di daerah, KUBE yang telah berkembang ditingkatkan kelembagaannya menjadi koperasi simpan pinjam. Jajaran Kemensos dan Dinas Sosial sangat perlu dari awal menyadari tugas mereka mengantarkan KUBE hingga bermetamorfosis menjadi koperasi. Perubahan KUBE menjadi koperasi dijadikan sebagai ukuran keberhasilan pembinaan KUBE oleh Kemensos dan Dinas Sosial daerah.

5.3 Kepada pemerintah daerah.

Pemerintah daerah melalui berbagai dinas yang membidangi urusan pemberdayaan keluarga/masyarakat atau penanganan kemiskinan atau koperasi sangat dianjurkan untuk mendorong tumbuhnya lembaga-lembaga yang mampu melayani / menyediakan pinjaman uang kepada masyarakat. Pemerintah daerah sedapat mungkin memberi perhatian memadai atas kebutuhan masyarakat akan pinjaman tersebut untuk melindungi mereka dari proses pemiskinan. Pemerintah daerah juga dapat mendorong dan membimbing Pemerintah Desa untuk membangun kelembagaan BUMDes yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat atas pinjaman murah dan cepat.

5.4 Penggiat Swadaya Masyarakat.

Penggiat swadaya masyarakat dapat menggunakan celah pemenuhan kebutuhan masyarakat atas pinjaman untuk membangun keswadayaan masyarakat setempat. Masyarakat dapat diorganisasikan untuk menyelenggarakan pinjaman mudah dan murah.

Ucapan terimakasih: Ucapan terimakasih disampaikan kepada semua informan yang telah dengan sukarela dan terbuka memberi informasi, pengetahuan dan keterlibatan mereka, dalam praktek rente. Dari informasi tersebut dapat diungkap fenomena praktek rente di tengah masyarakat di Kabupaten Bekasi dan sekitarnya.

Daftar Pustaka

- Adhitya & Tanjung, E. (2017). Presiden Jokowi Sebut Bunga Rentenir Bisa 12 Kali Lipat Bank, <https://www.suara.com/bisnis/2017/11/07/173659/presiden-jokowi-sebut-bunga-rentenir-bisa12-kali-lipat-bank>, diakses 31 Mei 2019.

- Amirin, T. M. (2009) . Penelitian Eksploratori. <https://tatangmanguny.wordpress.com/2009/05/04/penelitian-eksploratori/>, diakses 1 April 2019.
- Andriawan, F. (2019). Cerita Pinjaman Online, Memudahkan Atau Menyulitkan Pengusaha? <http://www.paper.id/blog/ finansial-umkm/ pinjaman-online- menyulitkan-pengusaha/>, diakses 2 April 2019.
- Arifin, C. (2019). Polisi Dalami Pelanggaran Pidana oleh Perusahaan Fintech Pinjaman Online, <http://www.tribunnews.com/ bisnis/2019/03/25/ polisi- dalami- dugaan- pelanggaran- pidana-oleh-perusahaan-fintech-pinjaman-online>, diakses 15 April 2019.
- Aulia, R. (2019). Menangkal Jebakan "Rentenir Digital". <https://news.detik.com/kolom/d-4496464/ menangkal-jebakan-rentenir-digital>, diakses 25 April 2019.
- Berita Cikarang, (2017). Waspada! Rentenir Bekedok Koperasi Menggurita di Kabupaten Bekasi. <https://beritacikarang.com/waspada-rentenir-bekedok-koperasi-menggurita-di-kabupaten-bekasi/>. diakses 25 April 2019.
- Dendi, R. (2019). Banyak Aduan Pinjaman Online, Ridwan Kamil Minta Kemendag dan OJK Cari Solusi, <https://regional.kompas.com/ read/2019/03/20/ 16344431/banyak- aduan-pinjaman-online-ridwan- kamil-minta-kemendag- dan-ojk- cari-solusi>, diakses 27 April 2019.
- Fakhrizal, F. (2019). Jokowi: Jangan Pinjam ke Rentenir, Bunganya Bisa 12 Kali Lipat!. <https://economy.okezone.com/read/2017/11/07/320/ 1810052/jokowi- jangan-pinjam-ke-rentenir -bunganya-bisa-12-kali-lipat>, diakses 31 Mei 2019.
- Farhan, F. (2018). Bupati Karawang Ancam Cabut Izin Koperasi yang Berpraktik ala Rentenir. <https://regional.kompas.com/read/2018/01/26/17303171/ bupati -karawang- ancam -cabut-izin -koperasi-yang-berpraktik-ala-rentenir>, diakses kembali 22 Mei 2019.
- Fauzia, M. (2019). Ketua OJK: Utang ke Fintech Ilegal Sama dengan Utang ke Rentenir, <https://ekonomi.kompas.com/read/2019/02/19/144026426/ ketua -ojk -utang-ke- fintech-illegal-sama-dengan-utang-ke-rentenirHimawan>, diakses 22 Mei 2019.
- Fazzam, (2017). Fenomena Bank Keliling di Indonesia. October 30, 2017 by [fazzams](#), <https://muamalatku.com/fenomena- bank -keliling -rentenir/>, diakses 21 Maret 2019
- Gunadha, R. (2018). Bocah Pinjam Uang ke Rentenir Demi Ultah Pacar, Sang Ibu Ngamuk, <https://www.suara.com/news/2018/02/13/151858/bocah-pinjam-uang- ke-rentenir-demi-ultah-pacar-sang-ibu-ngamuk>, diakses 31 Mei 2019.
- Gunadha, R. (2017). Terjerat Rentenir, Esa Bakar Diri dan Keluarganya. <https://www.suara.com/news/2017/10/26/085959/terjerat-rentenir-esabakardiri-dankeluarganya>, diakses 31 Mei 2019.
- Hasibuan, H. (2019). OJK Minta 'Rentenir Online' Kerja Sama dengan Asuransi, <http://www.medanbisnisdaily.com /news/online/ read/2019/02/27/ 67522/ ojk minta rentenir online kerja sama dengan asuransi/>, diakses 27 Februari 2019.
- Himawan, A. & Tanjung, E., (2017). Presiden Jokowi Sebut Bunga Rentenir Bisa 12 Kali Lipat Bank, <https://www.suara.com/bisnis/2017/11/07/173659/ presiden-jokowi-sebut-bunga-rentenir-bisa12-kali-lipat-bank>, diakses 27 Februari 2019.
- Ispranoto, T. (2019). Mau Bebas Jeratan Utang? Ini Syarat Dari Satgas Anti Rentenir, <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/ d-4374162/ mau-beba s-jeratan -utang -ini-syarat-dari-satgas-anti-rentenir>, diakses 21 Maret 2019.
- Kompas TV, (2018). Bank Keliling Bikin Pusing! <https://www.kompasiana.com/ scoundrellis/5ab7fb73dcad5b623b2519c2/bank -keliling -bikin- pusing ? page=all>, diakses 20 April 2019.
- Kontan, Redaksi. (2019). Bank Indonesia menahan suku bunga acuan di level 6%. <https://nasional.kontan.co.id/news/bank-indonesia-menahan-suku-bunga-acuan-di-level-6>, diakses 20 April 2019.
- Kumparan, Redaksi, (2018). Selama 3 Pekan, LBH Jakarta Terima 1.330 Aduan soal Pinjaman Online, <https://kumparan.com/@ kumparannews/ selama- 3-pekan-lbh -jakarta-terima-1-330- aduan-soal-pinjaman-online- 1544330783 540875139? ref=rel>, diakses 21 Mei 2019.
- Kumparan, Redaksi (2019). Pesan Pilu Sopir Gantung Diri di Mampang: Berantas Pinjaman Online. <https://kumparan.com/@ kumparannews/ pesan-pilu-sopir- gantung-diri-di- mampang-berantas- pinjaman-online-154988 4370401161741>. diakses 27 Maret 2019.
- Lingga, M, A. (2019) "Fintech Lending Sangat Dibutuhkan Masyarakat "Unbanked"" , <https://ekonomi.kompas.com/read/2019/02/20/205600626/fintech-lending-sangat-dibutuhkan-masyarakat-t-unbanked->, diakses 26 Mei 2019.
- Lumbantobing, A. (2016). Nyeleneh, Rentenir Pinjamkan Uang dengan Jaminan Foto Telanjang . <https://www.liptungan6global/read/ 2532666/nyeleneh-rentenir-pinjamkan-uang-dengan-jaminan -foto-telanjang>. Diakses

- 31 Mei 2019. <https://internati-onal.sindonews.com/berita/1319703/40/rentenir-hong-kong-diduga-sandera-ratusan-paspor-tki>, diakses 31 Mei 2019.
- Manggala, P. Y. (2017) Sebagian Koperasi Bekasi Diduga Disusupi Rentenir. <https://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/17/08/07/oubp9n284-sebagian-koperasi-bekasi-diduga-disusupi-rentenir>, diakses 31 Mei 2019.
- Metro TV. Redaksi. (2019). Empat Fakta Kasus Bunuh Diri Karena Rentenir Online. <http://video.metrotvnews.com/metro-news/8Ky421xk-empat-fakta-kasus-bunuh-diri-karena-rentenir-online>, 27 Maret 2019.
- Muhaimin, (2018). Rentenir Hong Kong Diduga Sandera Ratusan Paspor TKI. <https://monitoriau.com/news/detail/8602/rentenir-hong-kong-diduga-sandera-ratusan-paspor-tki>, diakses 9 April 2019.
- Nindya A. (2019). Kunjungan Investree: Investree Yakini Fintech Tidak Akan Saingi Perbankan. <https://finansialbisnis.com/read/20190514/89/922421/kunjungan-investree-investree-yakini-fintech-idakakan-saingiperbankan>, diakses 27 Maret 2019.
- Nurjaya, B. (2019). Rugikan Masyarakat, Pemkab Karawang Lawan "Bank Emok" Dengan LKM. <http://www.rmoljabar.co/read/2019/04/30/98869/rugikan-masyarakat,-pemkab-karawang-lawan--bank-emok-dengan-lkm>, diakses 18 Mei 2019).
- Nurdiansya, R., (2019). Ridwan Kamil Minta Pusat Carikan Solusi Soal Rentenir Online, <https://www.inilahkoran.com/berita/8754/ridwan-kamil-minta-pusat-carikan-solusi-soal-rentenir-online>, diakses, 23 Maret 2019.
- Pandiangan, E. (2019). Rentenir Fintech, Cara Cari Untung dari Orang Susah yang Menyebalkan, <https://mojok.co/esp/esai/rentenir-fintech-cara-cari-untung-dari-orang-susah-yang-menyebalkan/>, 21 Maret 2019.
- Priyono, E. (2019). OJK Blokir 803 Fintech.<http://wartakota.tribunnews.com/2019/04/16/ojk-blokir-803-fintech-illegal>, diakses 29 Mei 2019.
- Rahim, A. (2019). Menangkal Jebakan "Rentenir Digital" <https://news.detik.com/kolom/d-4496464/menangkal-jebakan-rentenir-digital>, diakses 4 April 2020.
- Republik Indonesia. (2011). Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- Sanusi. (2019). OJK: Sekarang Rentenir Sudah Online, <http://www.tribunnews.com/bisnis/2019/03/01/ojk-sekarang-rentenir-sudah-online>, diakses 31 Maret 2019.
- Sirait, J . (2018). Korban Rayuan "Rentenir" Online Se-Indonesia Mengadu ke LBH, <https://www.youtube.com/watch>, diakses 31 Maret 2019.
- Sitepu, A, dkk. (2010). Pemberdayaan Masyarakat melalui Pembentukan Lembaga Kesejahteraan Sosial. Jakarta: P3KS Press.
- Syafrini, D, (2014). Rentenir vs Nelayan: Studi Ketergantungan Nelayan terhadap Rentenir pada Masyarakat Pesisir. Jurnal Ilmu Sosial, Mamangan Vol. I No. 2, 2014. Padang: Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI. <http://ejournal.stkip-pgri-sumbar.ac.id/index.php/jurnal-mamangan/article/view/99/>, diakses 28 Maret 2019.
- Tribun. (2019). Gadis 17 Tahun Pinjam Rp 41 Juta ke 7 Rentenir demi Belikan Motor Pacar hingga Tak Bisa Bayar, <https://video.tribunnews.com/view/78451/gadis-17-tahun-pinjam-rp41-juta-ke-7-rentenir-demi-belikan-motor-pacar-hingga-tak-bisa-bayar>, diakses 31 Mei 2019.
- Viva, Tim. (2019). Kisah Korban Pinjaman Online dan Cara Bijak Manfaatkan Fintech, <https://www.viva.co.id/digital/digilife/1120669-kisah-korban-pinjaman-online-dan-cara-bijak-manfaatkan-fintech>, diakses 27 Mei 2019.
- Wijayanto, N. (2019). Sopir Taksi Bunuh Diri Akibat Terjerat Utang *Online*, Ini Surat Wasiatnya. <https://news.okezone.com/read/2019/02/12/338/2016940/sopir-taksi-bunuh-diri-akibat-terjerat-utang-online-ini-surat-wasiatnya>, diakses 27 Mei 2019.
- Yosep. (2018). Bank Keliling Bikin Ulah, Emak-emak Warga Kemang Resah Dikejar-kejar Rentenir, <http://www.radarbogor.id/2018/10/23/bank-keliling-bikin-uhla-uhla-emak-emak-warga-kemang-resah-dikejar-k>, diakses 29 Maret 2019.
- Yusuf, A. M. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian. Gabungan. Jakarta: KENCANA, https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=RnA-DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA2&dq=metode+penelitian+deskriptif+eksploratif&ots=JwctFpUD9h&sig=vXhPCC5FrQJthFUP38AwJ_VC, diakses 24 April 2019.
- Wikipedia. (2019). Rentenir, <https://id.wikipedia.org/wiki/Rentenir>. Diakses 21 Maret 2019 dan 9 April 2019.
- (2019). Kamus Besar Bahasa Indonesia versi on line, <https://kbbi.kata.web.id/lintah-darat/>, diakses 20 April 2019.
- (2019). Kamus Bisnis, http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/lintah_darat.aspx, diakses 20 April 2019.

..... Rentenir Ini Pinjamkan Uang Pada Mahasiswi Dengan Jaminan Foto Telanjang. <https://www.kaskus.co.id/thread/59db5e7fde2cf2c25a8b4570/rentenir-ini-pinjamkan-uang-pada-mahasiswi-dengan-jaminan-foto-telanjang/>, diakses 31 Mei 2019.



© 2020 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).



Komunikasi Dalam Keluarga dan Asertifitas Remaja Penyalahguna Narkoba

Uswatun Hasanah^{1*}, Irfani Arista¹ dan Mirdat Silitonga¹

¹ Program Studi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Universitas Negeri Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia

* Korespondensi: uswatun-hasanah@unj.ac.id ; Tel : +62812-81520037

Diterima: 3 Mei 2020; Disetujui: 9 Nopember 2020; Diterbitkan: 28 Desember 2020

Abstrak: Penyalahgunaan narkoba merupakan permasalahan yang cukup serius dan dalam penanganannya melibatkan berbagai pihak, khususnya keluarga. Komunikasi dalam keluarga memiliki peranan penting dalam pembentukan asertivitas remaja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengaruh komunikasi dalam keluarga terhadap asertivitas remaja penyalahguna narkoba. Penelitian ini menggunakan desain cross sectional study dan dilakukan di BNNK Jakarta Timur dan Lembaga Swadaya Masyarakat di bawah binaan BNNK Jakarta Timur, yaitu: Yayasan Balarenik dan Yayasan Swara Peduli Indonesia. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara snowball sampling. Populasi dari penelitian ini adalah remaja penyalahguna narkoba di Jakarta Timur, DKI Jakarta. Responden penelitian ini adalah remaja penyalahguna narkoba di BNNK Jakarta Timur, Yayasan Balarenik, dan Yayasan Swara Peduli Indonesia terdapat 68 orang. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan non probability sampling dengan purposive sampling. Temuan dalam penelitian ini adalah terdapat pengaruh positif signifikan komunikasi dalam keluarga terhadap asertivitas remaja. Koefisien determinan pada penelitian ini sebesar 62%, yang berarti asertivitas remaja penyalahguna narkoba ditentukan oleh komunikasi dalam keluarga sebesar 62% dan 38% di tentukan oleh faktor lain. Berdasarkan temuan pada penelitian ini orangtua harus menjaga relasi dan komunikasi yang baik dengan anggota keluarga, khususnya anak, dengan cara memiliki waktu yang berkualitas bersama anak, menyediakan waktu mendengarkan cerita dan atau keluhan anak, khususnya remaja penyalahguna narkoba.

Kata kunci: Remaja Penyalahguna Narkoba, Asertivitas, Komunikasi Keluarga

Abstract: Drug abuse is a serious problem and its handling involves various parties, especially families. Communication in the family has an important role in the formation of adolescent assertiveness. This study used a cross-sectional study design and was carried out at National Narcotics Agency, Jakarta Timur City (BNNK), Jakarta Timur and Non-Governmental Organizations under the guidance of the BNNK, Jakarta Timur namely: Balarenik Foundation and Swara Peduli Indonesia Foundation. The selection of research locations is done by snowball sampling. The population of this study is adolescent drug abusers in Jakarta Timur, Jakarta. The respondents of this study were 68 adolescent drug abusers in BNNK, Jakarta Timur, Balarenik Foundation, and Indonesian Swara Care Foundation. The sampling technique in this study uses non-probability sampling with purposive sampling. The findings in this study are that there is a significant positive effect of family communication on adolescent assertiveness. The determinant coefficient in this study was 62%, which means that the assertiveness of adolescent abusers of narcotics is determined by the communication of the family of 62% and 38% is determined by other factors. Based on the findings in this study, parents must maintain good relations and communication with family members, especially children, by having quality time with children, providing time to listen to stories / complaints of children, especially adolescent drug abusers.

Keywords: Adolescent Drug Abuse, Assertiveness, Family Communication

1. Pendahuluan

Masalah penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja dan pelajar sulit diatasi, karena penyelesaiannya melibatkan banyak faktor dan kerjasama dari semua pihak yang bersangkutan seperti pemerintah, aparat, masyarakat, media massa, keluarga, dan remaja itu sendiri. Kejahatan narkoba merupakan kejahatan lintas negara (*transnational crime*), terorganisir (*organized crime*), dan serius (*serious crime*) yang dapat menimpa berbagai lapisan masyarakat (Andayanti, 2020).

Penyalahguna narkoba cenderung meningkat setiap tahunnya, khususnya pada kalangan remaja. Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN) pada tahun 2018 terdapat peningkatan penyalahguna narkoba dari 20 persen menjadi 28 persen. Angka penyalahguna narkoba di kalangan remaja mencapai 2,29 juta orang (BNN, 2018). Khusus di Jakarta Timur, penyalahguna narkoba banyak ditemui, yakni pada tahun 2018 terdapat 600 orang terdata sebagai penyalahguna narkoba (BNNK, 2018). Kalangan remaja yang terpapar narkoba lebih rentan sebagai pengguna; sebab remaja masih cukup mudah terpengaruh, khususnya karena kurangnya pengawasan dan komunikasi yang baik dengan orang tua dan atau keluarga.

Banyak faktor remaja menjadi korban penyalahguna narkoba, salah satunya adalah pola komunikasi orang tua yang kurang baik. Penelitian terhadap remaja yang memiliki self-esteem yang rendah menjelaskan bagaimana orang tua sering menyampaikan komunikasi negatif terhadap anaknya, seperti terlalu sering menyalahkan anak atas masalah yang dihadapi anak, meremehkan anak bahkan sampai membandingkan anak. Dampaknya anak kurang percaya diri dan bermasalah dalam pergaulan sosialnya. Kenyataan sosial menunjukkan bahwa tanpa disadari, orang tua terkadang menyampaikan pesan yang justru membuat kepercayaan diri dan kemampuan sosial anak bermasalah, sehingga remaja terjerumuh dalam pergaulan yang tidak baik. Orangtua cenderung menyampaikan pesan-pesan negatif kepada anaknya. Akibatnya, anak menginternalisasikan pesan-pesan negatif tersebut menjadi bagian dirinya. Anak kemudian mencitrakan dirinya dengan label negatif tersebut. Dampak negatifnya, hal itu mendorong berkembangnya konsep diri negatif dan perilaku asertif yang rendah pada anak.

Asertivitas adalah kemampuan menyampaikan pikiran, perasaan, kebutuhan secara jujur dan benar kepada orang lain dengan menjaga dan menghargai hak-hak serta perasaan pribadi dan pihak lain (Pratiwi, 2014)). Asertivitas perlu dikembangkan agar remaja mempunyai kontrol diri dan mempunyai kemampuan untuk berkata “tidak”, tanpa merasa bersalah ketika menolak ajakan teman untuk melakukan hal-hal yang negatif. Remaja harus berani menolak dan dapat menilai secara kritis hal-hal yang dapat merugikan dan membahayakannya. Menolak pengaruh atau ajakan teman tidak harus dengan kasar atau marah, tetapi dapat dilakukan dengan perkataan halus, sopan, tegas, dan dengan alasan yang masuk akal tanpa menyakiti perasaan orang lain (Alberti & Emmons, 2002). Asertivitas adalah kemampuan untuk mengkomunikasikan apa yang diinginkan, dirasakan, dan dipikirkan kepada orang lain namun tetap menjaga dan menghargai hak-hak serta perasaan pribadi dan pihak lain (Alberti & Emmons, 2002). Di dalam asertivitas terkandung sifat-sifat rasa kepercayaan diri, kebebasan berekspresi secara jujur, tegas, dan terbuka tanpa mengecikilan atau mengesampingkan arti orang lain serta berani bertanggung jawab (Syukri & Zulkarnain 2005).

Asertivitas dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu lingkungan yang kurang kondusif dan tidak mengajarkan perilaku asertif, jenis kelamin, pola asuh orang tua, usia, tingkat pendidikan, konsep diri yang lemah, kondisi sosial budaya, dan tingkat sosial ekonomi (Setyawan, 2009). Hal ini ditegaskan oleh William (2008) perilaku asertif dipengaruhi oleh latar belakang budaya, keluarga tempat anak remaja tinggal, urutan anak tersebut dalam keluarga, pola asuh orang tua, jenis kelamin, status sosial ekonomi orang tua dan sistem kekuasaan orang tua. Pola asuh orang tua dalam konteks ini dapat berupa pola komunikasi orang tua terhadap anaknya (Ardianto, 2017).

Asertivitas seseorang dapat ditunjukkan dengan mengkomunikasikan kebutuhan, keinginan, perasaan atau opini kepada orang lain dengan cara langsung dan jujur tanpa bermaksud menyakiti perasaan siapapun. Beddel & Lennox (1996) menyebutkan perilaku asertif adalah mempertahankan apa yang dipercayai, tetapi dilakukan dengan cara-cara komunikasi yang efektif. Perilaku asertif adalah tingkah laku dengan ketetapan yang muncul dari kebebasan berekspresi pikiran, perasaannya

guna memenuhi kebutuhan dirinya secara langsung secara jujur, terbuka tanpa menyakiti perasaan kedua belah pihak.

Definisi lain dinyatakan oleh Lloyd dan Budiyanto (1991) bahwa asertivitas seseorang secara tak langsung akan membuat orang lain merasa dituntut untuk tidak meremehkan atau menghargai keberadaannya. Hal itu disebabkan dengan bersikap asertif, seseorang akan memandang keinginan, kebutuhan dan hak-haknya sama dengan keinginan, kebutuhan dan hak-hak orang lain. Asertivitas berarti memberi pernyataan tanpa berbelit-belit dan dapat terfokus dengan benar.

Tujuan asertivitas adalah meningkatkan kemampuan interpersonal yaitu mampu berkata tidak, membuat permintaan, mengekspresikan perasaan baik positif maupun negatif serta membuka dan mengakhiri percakapan. Pernyataan ini diperkuat oleh Alberti & Emmons, (2002), bahwa asertivitas adalah kemampuan untuk mengkomunikasikan apa yang diinginkan, dirasakan, dan dipikirkan kepada orang lain namun tetap menjaga dan menghargai hak-hak serta perasaan pribadi dan pihak lain.

Asertivitas sangat membantu untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan, keterampilan, performance, kemampuan menjalin hubungan kerjasama dan kemampuan memahami orang lain yang sangat dibutuhkan dalam berinteraksi dengan lingkungan sosial sehari-hari. Hal ini sejalan dengan aspek-aspek asertivitas menurut Alberti & Emmons (2002) antara lain:

- (1) Kemandirian - meliputi kemampuan untuk membuat keputusan, mengambil inisiatif, percaya pada yang dikemukakan sendiri, dapat menentukan suatu tujuan dan berusaha mencapainya, dan mampu berpartisipasi dalam pergaulan;
- (2) Ekspresi - meliputi kemampuan untuk menyatakan rasa tidak setuju, rasa marah, menunjukkan afeksi dan persahabatan terhadap orang lain serta mengakui perasaan takut atau cemas, mengekspresikan persetujuan, menunjukkan dukungan, dan bersikap spontan; Pertahanan Diri - meliputi kemampuan untuk berkata "tidak" apabila diperlukan, mampu menanggapi kritik, celaan, dan kemarahan dari orang lain, secara terbuka serta mampu mengekspresikan dan mempertahankan pendapat; Inisiatif - meliputi kemampuan menyatakan pendapat atau gagasan, mengadakan suatu perubahan, dan menanggapi pelanggaran terhadap dirinya dan orang lain; dan
- (3) Perhatian Terhadap Hak-hak Orang Lain - meliputi kemampuan untuk menyatakan kritik secara adil tanpa mengancam, memanipulasi, mengintimidasi, mengendalikan, dan melukai orang lain.

Perkembangan komunikasi dalam keluarga yang harmonis dan menghargai pendapat remaja, dapat menciptakan konsep diri yang baik terhadap dirinya. Hal tersebut dapat juga mempengaruhi cara mereka dalam bertingkah laku dan mengembangkan hubungan yang baik dengan lingkungannya. Sedangkan keluarga yang tidak harmonis dan kurang bisa menghargai pendapat remaja merupakan bahaya psikologis dan cenderung remaja tersebut berisiko melakukan tindakan penyimpangan perilaku, karena anak tersebut mempunyai konsep diri yang negatif (Maria dan Nuryoto, 2007).

Tujuan pokok dari komunikasi ini adalah memprakarsai dan memlihara interaksi antara satu anggota dengan anggota lainnya sehingga tercipta komunikasi yang efektif (Sabarua & Mornene, 2020). Memahami komunikasi dalam keluarga merupakan hal mendasar dalam memahami setiap anggota keluarga dan bagaimana hubungan dalam anggota keluarga (Vangelisti, 2012).

Berdasarkan pengertian menurut ahli dapat disimpulkan bahwa komunikasi dalam keluarga dapat diartikan sebagai kegiatan yang menggunakan kata-kata, sikap tubuh (gesture), intonasi suara, di mana di dalamnya terdapat unsur pendidikan, pembentukan sikap dan perilaku anak, dengan kesabaran dan kejujuran serta keterbukaan. Komunikasi dalam keluarga dinyatakan sehat apabila beberapa indikator dimensi komunikasi berikut terpenuhi. Dimensi dalam komunikasi dalam keluarga adalah keterbukaan dalam mengungkapkan pikiran, empati dalam menghargai sesama, dukungan dalam hal memberikan kesempatan anggota keluarga yang lain berbicara perasaan positif tentang diri sendiri maupun orang lain dan kesamaan pemahaman (Liliwesi, 1997).

Sebuah komunikasi akan dikatakan sukses kalau komunikasi tersebut menghasilkan sesuatu yang diharapkan yakni kesamaan pemahaman. Perselisihan dan perbedaan paham akan menjadi sumber persoalan bila tidak ditangani dengan bijaksana, sehingga memerlukan usaha-usaha komunikatif

antara anggota keluarga. Dalam usaha untuk menyelesaikan persoalan maka pemikiran harus dipusatkan dan ditujukan ke arah pemecahan persoalan, supaya tidak menyimpang dan mencari kekurangan-kekurangan dan kesalahan-kesalahan masing-masing. Oleh karena itu sebuah komunikasi harus dilakukan secara konstruktif dan dengan dasar kasih sayang. Keakraban dan kedekatan antara orang tua dengan anak-anaknya membuat komunikasi dapat berjalan secara efektif dalam meletakkan dasar-dasar untuk berhubungan secara akrab dan dekat. Kemampuan orang tua dalam melakukan komunikasi akan efektif karena orang tua dapat membaca dunia anaknya (selera, keinginan, hasrat, pikiran, dan kebutuhan) (Indrawati, 2015). Perkembangan perilaku asertif dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang sangat berpengaruh dalam pembentukan perilaku asertif pada seseorang didasarkan pada pengaruh pola asuh orang tua dan pengaruh lingkungan yang ada di sekitar orang tersebut (Ningsih, 2017). Wiliam (2008) berpendapat perilaku asertif dipengaruhi oleh latar belakang budaya, keluarga tempat anak remaja tinggal, urutan anak tersebut dalam keluarga, pola asuh orang tua, jenis kelamin, status sosial ekonomi orang tua dan sistem kekuasaan orang tua. Pola asuh orang tua dalam konteks ini dapat berupa pola komunikasi orang tua terhadap anaknya (Ardianto, 2017). Beberapa faktor yang menyebabkan penyalahgunaan narkoba lebih banyak dilakukan oleh kalangan remaja antara lain lemahnya kepribadian, perkembangan emosi yang tidak stabil, tidak mampu menyesuaikan diri, menderita kelainan tingkah laku sejak kecil, ketidak harmonisan hubungan antar anggota keluarga, orang tua terlalu menekan anak, pengaruh pergaulan yang buruk, ekses negatif dari keadaan sekolah, dan pengaruh negatif lingkungan terhadap perkembangan kepribadian (Hartati et al, 2014).

Peran orangtua sangat dibutuhkan saat anak berada pada posisi harus memilih suatu pilihan diantara banyak pilihan, mulai dari yang terbaik sampai terburuk. Sehingga anak mampu berkata tidak untuk hal yang tidak baik. Oleh karena itu peneliti tertarik melakukan penelitian terkait bagaimana pengaruh komunikasi orangtua terhadap asertivitas remaja penyalahguna narkoba.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan desain cross sectional study dan dilakukan di Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Jakarta Timur dan Lembaga Swadaya Masyarakat di bawah binaan BNNK Jakarta Timur, yaitu: Yayasan Balarenik dan Yayasan Swara Peduli Indonesia. Waktu pengumpulan data dilakukan pada bulan Januari 2020.

Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara snowball sampling. Populasi dari penelitian ini adalah remaja penyalahguna narkoba. Responden penelitian ini adalah remaja penyalahguna narkoba di BNNK Jakarta Timur, Yayasan Balarenik, dan Yayasan Swara Peduli Indonesia terdapat 68 orang. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan non probability sampling dengan purposive sampling.

Dimensi asertivitas adalah kemandirian, ekspresi, pertahanan diri, inisiatif, dan perhatian terhadap hak-hak orang lain. Jumlah pernyataan yang digunakan pada kuesioner sebanyak 34 butir pernyataan dan di jawab dengan skala likert yang dimulai dari selalu, sering, jarang dan tidak pernah.

Dimensi komunikasi dalam keluarga adalah keterbukaan, empati, dukungan (sikap mendukung), perasaan positif. Jumlah pernyataan yang digunakan pada kuesioner yang digunakan pada kuesioner sebanyak 36 butir pernyataan dan dijawab dengan skala likert yang dimulai dari selalu, sering, jarang, dan tidak pernah

Data primer yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah karakteristik responden, komunikasi dalam keluarga dan asertivitas. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan menggunakan kuesioner yang telah diuji reliabilitasnya.

Data yang telah dikumpulkan diolah melalui proses editing, coding, scoring, entry data, cleaning data, kemudian dianalisis secara deskriptif dan statistik inferensia selanjutnya data di interpretasi. Pengolahan dan analisis data menggunakan Microsoft Excel dan Statistical Package for Social Science (SPSS). Setelah entry dan cleaning data, dilakukan pengkategorian data terlebih dahulu. Pengkategorian dilakukan untuk mempermudah proses analisis. Pada saat melakukan pengolahan data pada variabel komunikasi dalam keluarga dan asertivitas penyalahguna narkoba dibuat scoring

data, kemudian hasil scoring tersebut dijumlahkan pada masing-masing variabel. Skor total kemudian ditransformasikan kedalam indeks.

Hasil penelitian pada penelitian ini dikategorikan dengan menggunakan *cut off* pengkategorian yaitu 00,0-50,0 dikategorikan rendah, 50,01 – 75,0 dikategorikan sedang dan 75,01-100,0. Analisis deskriptif digunakan untuk menghitung nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata, dan standar deviasi. Statistika inferensia yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji korelasi untuk mengetahui hubungan komunikasi dalam keluarga dengan asertivitas remaja penyelahguna narkoba dan regresi linier untuk mengetahui pengaruh komunikasi dalam keluarga terhadap asertivitas remaja penyelahguna narkoba.

3. Hasil

3.1. Karakteristik Responden

Rataan usia responden pada penelitian adalah 17,36 dengan usia minimal 13 tahun dan usia maksimal 20 tahun. Sebagian besar responden berjenis kelamin laki-laki (95,56%).

3.2. Asertivitas

Variabel asertivitas terdapat empat dimensi, yakni: (1) kemandirian; (2) ekspresi; (3) pertahanan diri; (4) inisiatif; (5) perhatian terhadap hak-hak orang lain. Dimensi dengan rataan terendah adalah pertahanan diri (51,6) dan dimensi tertinggi adalah ekspresi (58,25). Dimensi Kemandirian meliputi kemampuan untuk membuat keputusan, mengambil inisiatif, percaya pada yang dikemukakan sendiri, dapat menentukan suatu tujuan dan berusaha mencapainya, dan mampu berpartisipasi dalam pergaulan. Dimensi ekspresi meliputi kemampuan untuk menyatakan rasa tidak setuju, rasa marah, menunjukkan afeksi dan persahabatan terhadap orang lain serta mengakui perasaan takut atau cemas, mengekspresikan persetujuan, menunjukkan dukungan, dan bersikap spontan.

Variabel asertivitas terdapat empat dimensi, yakni: (1) kemandirian; (2) ekspresi; (3) pertahanan diri; (4) inisiatif; (5) perhatian terhadap hak-hak orang lain. Dimensi dengan rataan terendah adalah pertahanan diri (51,6) dan dimensi tertinggi adalah ekspresi (58,25). Dimensi Kemandirian meliputi kemampuan untuk membuat keputusan, mengambil inisiatif, percaya pada yang dikemukakan sendiri, dapat menentukan suatu tujuan dan berusaha mencapainya, dan mampu berpartisipasi dalam pergaulan. Dimensi ekspresi meliputi kemampuan untuk menyatakan rasa tidak setuju, rasa marah, menunjukkan afeksi dan persahabatan terhadap orang lain serta mengakui perasaan takut atau cemas, mengekspresikan persetujuan, menunjukkan dukungan, dan bersikap spontan.

Tabel 1. Sebaran Responden Berdasarkan Dimensi Asertivitas Penyalahguna Narkoba

Kategori	Dimensi Asertivitas									
	Kemandirian		Ekspresi		Pertahanan Diri		Inisiatif		Perhatian	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Rendah	27	39,70	20	29,40	31	45,60	29	42,60	32	47,10
Sedang	24	35,30	30	44,10	25	36,80	26	38,20	24	35,30
Tinggi	17	25,00	18	26,50	12	17,60	13	19,10	12	17,60
Total	68	100,0	68	100,0	68	100,0	68	100,0	68	100,0
Min-Maks	0,00-100,0		7,40-100,0		0,00-93,33		16,66-100,0		0,00-100,0	
Rata-rata ±	$54,16 \pm 25,77$		$59,09 \pm 20,76$		$51,66 \pm 22,64$		$58,25 \pm 18,67$		$52,81 \pm 29,42$	
Std										

Tabel 2. Sebaran Responden Berdasarkan Variabel Asertivitas Penyalahguna Narkoba

Kategori	Asertivitas	
	n	%
Rendah	34	50,00
Sedang	23	33,80
Tinggi	11	16,20
Total	30	100,0
Min-Maks	4,90-96,07	
Rata-rata ± Std	55,66±2,30	

3.3. Komunikasi dalam Keluarga

Variabel komunikasi dalam keluarga terdapat lima dimensi, yakni: (1) keterbukaan; (2) empati; (3) dukungan; (4) perasaan positif; (5) kesamaan. Dimensi dengan rataan terendah adalah keterbukaan (47,42) dan empati (47,65), sementara untuk dimensi dengan rataan tertinggi adalah kesamaan (61,43).

Dalam dimensi keterbukaan meliputi sikap terbuka, jujur tanpa adanya rasa takut dan khawatir. Keterbukaan sangat diperlukan dalam berkomunikasi, terutama komunikasi di dalam keluarga. Keterbukaan yang terjadi dalam komunikasi dalam keluarga memungkinkan anggotanya dapat memberikan tanggapan secara jelas terhadap segala pikiran dan perasaan yang diungkapkannya. Keterbukaan disini adalah bersikap terbuka dan jujur mengenai perasaan/pemikiran masing-masing, tanpa adanya rasa takut dan khawatir untuk mengungkapkannya (Liliweri, 1997). Dimensi empati meliputi rasa dihargai, bebas menyampaikan keinginan, tidak ada perasaan tertekan. Komunikasi yang baik antara orang tua dengan anak akan menjadikan anak merasa dihargai sehingga anak akan merasa bebas mengungkapkan perasaan serta keinginannya. Hal ini dapat dijalankan dengan membuat komunikasi dalam keluarga sportif dan saling berempati satu sama lain. Empati adalah suatu perasaan individu yang merasakan sama seperti yang dirasakan orang lain, tanpa harus secara nyata terlibat dalam perasaan ataupun tanggapan orang tersebut.

Dimensi dukungan meliputi memberi kesempatan kepada anggota keluarga untuk berbicara, mendengarkan secara aktif, menyelesaikan konflik secara dini. Untuk membangun dan melestarikan hubungan dengan sesama anggota keluarga, kita harus menerima diri dan menerima orang lain. Sikap saling mendukung sangat diperlukan saat berkomunikasi dengan keluarga. Semakin besar penerimaan diri kita dan semakin besar penerimaan kita terhadap orang lain, maka semakin mudah pula kita melestarikan dan memperdalam hubungan kita dengan orang lain tersebut.

Dimensi perasaan positif meliputi sikap tidak mudah menghakimi, menghargai perasaan anggota keluarga. Bila kita berpikir positif tentang diri kita, maka kita pun akan berpikir positif tentang orang lain, sebaliknya bila kita menolak diri kita, maka kitapun akan menolak orang lain. Hal-hal yang kita sembunyikan tentang diri kita, seringkali adalah juga hal-hal yang tidak kita sukai pada orang lain. Bila kita memahami dan menerima perasaan-perasaan kita, maka biasanya kitapun akan lebih mudah menerima perasaan-perasaan sama yang ditunjukkan orang lain. Dimensi kesamaan meliputi menempatkan diri setara dalam keluarga dan komunikasi dua arah. Kesamaan di sini dimaksudkan individu mempunyai kesamaan dengan orang lain dalam hal berbicara dan mendengarkan. Sebuah komunikasi akan dikatakan sukses kalau komunikasi tersebut menghasilkan sesuatu yang diharapkan yakni kesamaan pemahaman.

Tabel 3. Sebaran responden berdasarkan dimensi komunikasi dalam keluarga penyalahguna narkoba.

Kategori	Komunikasi dalam Keluarga									
	Keterbukaan		Empati		Dukungan		Perasaan Positif		Kesamaan	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Rendah	36	52,90	37	54,40	26	38,20	31	45,60	25	36,80
Sedang	21	30,90	20	29,40	29	42,60	22	32,40	21	30,90
Tinggi	11	16,20	11	16,20	13	19,10	15	22,10	22	32,40
Total	68	100,0	68	100,0	68	100,0	68	100,0	68	100,0
Min-Maks	7,40-92,59		000-100,0		8,33-100,0		0,00-100,0		11,11-100,0	
Rata-rata ± Std	47,65±23,70		47,42±25,06		56,25±23,60		57,10±27,55		61,43±22,89	

Tabel 4. Sebaran responden berdasarkan variabel komunikasi keluarga remaja penyalahguna narkoba.

Kategori	Komunikasi dalam Keluarga	
	n	%
Rendah	26	38,20
Sedang	31	45,60
Tinggi	11	16,20
Total	68	100,0
Min-Maks	5,55-94,44	
Rata-rata ± Std	51,19±2,70	

3.4. Korelasi Komunikasi Dalam Keluarga Dengan Asertivitas Remaja Penyalahguna Narkoba

Hasil analisis hubungan antara komunikasi dalam keluarga dengan asertivitas remaja penyalahguna narkoba (Tabel 5) menunjukkan bahwa komunikasi dalam keluarga berhubungan positif signifikan dengan asertivitas remaja penyalahguna narkoba. Hasil ini mengindikasikan bahwa semakin baik komunikasi dalam keluarga maka semakin baik pula asertivitas remaja penyalahguna narkoba.

Table 5. Koefisien korelasi antara komunikasi dalam keluarga dengan assertivitas remaja penyalahguna narkoba

	Variabel	1	2
		1	0,78***
1. Assertivitas		1	
2. Komunikasi dalam Keluarga		0,78***	1

Keterangan: * Signifikan pada $p<0,10$, ** Signifikan pada $p<0,05$, *** Signifikan pada $p<0,01$

Table 6. Koefisien uji regresi komunikasi keluarga terhadap assertivitas penyalahguna narkoba

Variabel	Asertivitas		
	B	β	Sig
Konstanta	21,66	-	0,00
Komunikasi dalam Keluarga	0,66	0,78	0,00
F			103,53
Sig.			0,000
R2			0,62
Adjusted R Square			0,60
Keterangan:			
B= Tidak terstandarisasi			
β= Terstandarisasi			
*Signifikan pada $p<0,10$, **Signifikan pada $p<0,05$, ***Signifikan pada $p<0,01$			

3.5. Pengaruh Komunikasi Dalam Keluarga Terhadap Asertivitas Remaja Penyalahguna Narkoba

Hasil uji analisis regresi menunjukkan nilai Adjusted R Square model sebesar 0,60. Hasil ini berarti bahwa model regresi dalam penelitian ini mampu menjelaskan pengaruh komunikasi dalam keluarga terhadap asertivitas remaja penyalahguna narkoba sebesar 60,00 persen (Tabel 6).

Sementara, 40,00 persen dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam model ini. Hasil analisis regresi juga menunjukkan bahwa komunikasi dalam keluarga berpengaruh positif signifikan terhadap asertivitas remaja penyalahguna narkoba. ($\beta = 0,780$, $p = 0,000$).

4. Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara komunikasi dalam keluarga terhadap asertivitas, hal ini menunjukkan setiap kenaikan satu skor komunikasi dalam keluarga akan menaikkan asertivitas remaja penyalahguna narkoba sebanyak 0,780 poin. Oleh karena itu orangtua harus menjaga komunikasi yang baik dengan anak, khususnya pada remaja penyalahguna narkoba, sehingga asertivitas anak semakin meningkat. Koefisien korelasi sebesar 0,781 yang berarti memiliki hubungan dalam kategori kuat. Komunikasi pada umumnya diartikan sebagai hubungan atau kegiatan yang ada kaitannya dengan masalah hubungan atau diartikan pula saling tukar-menukar pendapat.

Temuan pada penelitian ini didukung oleh temuan Unal (2012) yang menemukan bahwa komunikasi berpengaruh terhadap asertivitas. Komunikasi adalah penyampaian gagasan, informasi, instruksi dan perasaan dari seseorang kepada orang lain atau dari sekelompok orang kepada kelompok orang yang lain (Mangkuprawira dan Hubeis, 2007). Komunikasi dalam keluarga dapat diartikan sebagai kegiatan yang menggunakan kata-kata, sikap tubuh (gesture), intonasi suara, di mana di dalamnya terdapat unsur pendidikan, pembentukan sikap dan perilaku anak, dengan kesabaran dan kejujuran serta keterbukaan.

Dari 68 responden remaja penyalahguna narkoba di Jakarta Timur pada variabel komunikasi sebanyak 26 responden berada pada kategori rendah (38,20%) dan sebanyak 31 responden berada pada kategori sedang (35,60%). Hal ini karena rendahnya waktu berbincang dengan keluarganya kurang dari 3 jam.

Dalam penelitian yang telah dilakukan oleh Samakul (2015), dikemukakan bahwa anak/remaja yang dibesarkan dalam lingkungan sosial keluarga yang tidak baik/disharmonis keluarga, maka resiko anak untuk mengalami gangguan kepribadian menjadi berkepribadian antisosial dan berperilaku menyimpang lebih besar dibandingkan dengan anak/remaja yang dibesarkan dalam keluarga harmonis (sakinah). Penelitian yang dilakukan Murni (2020) Pentingnya keberfungsi sosial kepada korban penyalahgunaan Napza dengan memberikan motivasi dan dukungan moril, serta memberikan penyuluhan kepada keluarga dan masyarakat, agar keluarga dan masyarakat memahami pentingnya keberfungsi sosial bagi korban penyalahgunaan Napza setelah di rehabilitasi. Oleh karena itu kerberfungsi sosial khususnya dalam keluarga dengan komunikasi orangtua dan anak sangat diperlukan. Namun, tidak hanya kuantitas komunikasi, tetapi kualitas komunikasi juga harus diperhatikan orangtua dalam melakukan komunikasi dengan anak. Dampak komunikasi dalam keluarga yang kurang baik pasti akan membuat asertivitas anak rendah, sehingga anak mencari pelarian diluar dan tidak menutup kemungkinan terjerumus dalam pergaulan bebas dan menyalahgunakan narkoba. Oleh karena itu keharmonisan dalam keluarga mutlak diperlukan untuk mencapai kesejahteraan keluarga dan kesejahteraan sosial, sebaliknya apabila keharmonisan dan komunikasi keluarga terganggu maka kesejahteraan keluarga dan kesejahteraan sosial tidak akan terwujud.

Dari 68 responden remaja penyalahguna narkoba di Jakarta Timur pada variabel asertivitas terdapat 34 responden pada kategori rendah (50%) dan 23 responden berada pada kategori sedang (33,80%).

Dengan memiliki sikap atau perilaku yang asertif hubungan antara individu satu dengan yang lainnya dapat terjalin dengan baik dan efektif. Hal itu dikarenakan adanya sikap saling menghargai

dan menghormati satu sama lain dengan menjunjung tinggi nilai kejujuran yaitu dengan mengungkapkan perasaan secara tegas, lugas, tidak melanggar hak-hak asasi manusia, dan tanpa menyakiti perasaan orang lain. Sebaliknya, apabila individu tidak dapat menerapkan perilaku assertif dalam kehidupan sosialnya maka dapat mengakibatkan hubungan yang tidak sehat, tidak harmonis, kurang adanya rasa kekeluargaan, dan dapat pula terjadi pertikaian atau tingkat agresivitas yang tinggi (Hasanah dan Atul, 2015). Pola asuh orangtua juga dapat mengakibatkan remaja memiliki tingkat agresivitas yang tinggi (Silitonga et al., 2014). Oleh karena itu relasi orangtua dan anak harus terjalin dengan baik supaya anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, dan dapat melaksanakan peran sosial sebagai mana mestinya.

Berdasarkan perhitungan hasil uji analisis regresi menunjukkan nilai *Adjusted R Square* model sebesar 0,60., sedangkan sisanya 34% dipengaruhi faktor lain yang tidak diteliti. Wilam (2008) berpendapat perilaku assertif dipengaruhi oleh latar belakang budaya, keluarga tempat anak remaja tinggal, urutan anak tersebut dalam keluarga, pola asuh orang tua, jenis kelamin, status sosial ekonomi orang tua dan sistem kekuasaan orang tua. Pola asuh orang tua dalam konteks ini dapat berupa pola komunikasi orang tua terhadap anaknya (Ardianto, 2017).

5. Kesimpulan

Sebagian besar assertivitas penyalahguna narkoba dan komunikasi keluarga berada pada kategori rendah (50%) dan sedang (33,80%). Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya pengaruh yang signifikan dan positif antara komunikasi dalam keluarga dengan assertivitas remaja penyalahguna narkoba, sebesar 60 persen.

Dengan demikian, peningkatan komunikasi dalam keluarga dapat meningkatkan assertivitas remaja penyalahguna narkoba. Bersosialisasi dengan komunikasi yang baik diantara orangtua dan anak sangat diperlukan. Kualitas komunikasi juga harus diperhatikan orangtua dalam melakukan komunikasi dengan anak. Dampak komunikasi dalam keluarga yang kurang baik pasti akan membuat assertivitas anak rendah, sehingga anak mencari pelarian diluar dan tidak menutup kemungkinan terjerumus dalam pergaulan bebas dan menyalahgunakan narkoba. Oleh karena itu keharmonisan dalam keluarga mutlak diperlukan untuk mencapai kesejahteraan keluarga dan kesejahteraan sosial, sebaliknya apabila keharmonisan dan komunikasi keluarga terganggu maka kesejahteraan keluarga dan kesejahteraan sosial tidak akan terwujud.

6. Saran

Berdasarkan temuan pada penelitian, komunikasi dalam keluarga sangat berperan dalam pembentukan assertivitas anak. Oleh karena itu orangtua harus menjaga relasi dan komunikasi yang baik dengan anggota keluarga, khususnya anak. Orangtua harus terbuka dan empati kepada anak, memberi dukungan dan perasaan positif kepada anak supaya anak nyaman untuk menceritakan masalah kepada orangtua. Namun yang terpenting adalah orangtua harus memiliki waktu yang berkualitas bersama anak, menyediakan waktu mendengarkan cerita dan atau keluhan anak, khususnya remaja penyalahguna narkoba.

Ucapan terimakasih: Peneliti mengucapkan terima kasih kepada BNNK Jakarta Timur, Yayasan Balarenik, dan Yayasan Swara Peduli Indonesia yang telah memberikan izin serta membantu dalam proses pengambilan data penelitian. Ucapan terima kasih juga disampaikan untuk semua remaja yang terlibat sebagai responden penelitian.

Daftar Pustaka

- Alberti, R., & Emmons, M. (2002). Your Perfect Right Panduan Praktis Hidup Lebih Ekspresif dan Jujur pada Diri Sendiri. In Elex Media Komputindo. Hampstead Psychological Associates. <https://doi.org/10.37200/IJPR/V24I3/PR200923>.
- Andayanti, N. (2020). Penanggulangan Peredaraan Narkotika Dikalangan Pelajar Kutai Timur. Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum), 1(1), 754-768.

- Ardianto. (2017). Pengaruh Komunikasi Positif dalam Keluarga dan Komunikasi Interpersonal Guru terhadap Perilaku Asertif Siswa. *Journal of Islamic Education Policy*, 1(2). <https://doi.org/10.30984/j.v1i2.427>.
- Bedell, J. R., & Lennox, S. S. (1996). *Handbook for communication and problem-solving skills training: A cognitive-behavioral approach* (Vol. 2). John Wiley & Sons.
- BNN. (2018). Penggunaan Narkotika di Kalangan Remaja Meningkat. <https://bnn.go.id/penggunaan-narkotika-kalangan-remaja-meningkat/>. Di Akses pada tanggal 20 Oktober 2020
- Hartati, H., Dimyati, M., & Herdi, H. (2015). Pengaruh Pelatihan Asertif Untuk Meningkatkan Asertivitas Terhadap Penyalahgunaan Narkoba (Single Subject Research Anak didik di Lapas Anak Pria Tangerang). *INSIGHT: Jurnal Bimbingan Konseling*, 4(1), 39-43.
- Hasanah, A. M. A., Suharso, S., & Saraswati, S. (2015). Pengaruh Perilaku Teman Sebaya terhadap Asertivitas Siswa. *Indonesian Journal of Guidance and Counseling Theory and Application*, 4(1), 22-29.
- Indrawati, E. S. (2015). Status Sosial Ekonomi Dan Intensitas Komunikasi Keluarga Pada Ibu Rumah Tangga Di Panggung Kidul Semarang Utara. *Jurnal Psikologi*, 14(1), 52-57.
- Liliweri, A. (1997). *Komunikasi Antar Pribadi*. Bandung : Cipta Aditya Bakti.
- Lloyd, S. R., & Budiyanto, F. X. (1991). Mengembangkan perilaku asertif yang positif. Binarupa Aksara, Jakarta.
- Mangkuprawira, T. S., & Hubeis, A. V. (2007). *Manajemen Mutu Sumber Daya Manusia*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Maria, U., & Nuryoto, S. (2007). Peran persepsi keharmonisan keluarga dan konsep diri terhadap kecenderungan kenakalan remaja (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Murni, R. (2020). Keberfungsi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza Pasca Rehabilitasi Sosial Di Balai Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza Galih Pakuan Di Bogor. *Sosio Konsepsia*, 9(1), 17-36.
- Ningsih, S. (2017). *Pengaruh teman sebaya dan persepsi pola asuh orang tua terhadap agresivitas siswa di sekolah dasar gugus sugarda* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Purwokerto).
- Pratiwi, W. E. (2014). Pengaruh Budaya Jawa dan Harga Diri terhadap Asertivitas pada Remaja Siswa Kelas X di SMA Negeri 3 Ponorogo. *Psikoborneo*, 2(3).
- Sabarua, J. O., & Mornene, I. (2020). Komunikasi Keluarga dalam Membentuk Karakter Anak. *International Journal of Elementary Education*, 4(1), 84-90.
- Setyawan. (2009). *Assertive Training*. E-Journal. doi:https://doi.org/http://setyafi.multiply.com/journal/item/11/Assertive_Trainingshow_interstitial.journalitem
- Silitonga, M., Yulastri, L., & Artanti, G. D. (2014). Hubungan Pola Asuh Orangtua dengan Agresivitas Anak di SMPN 194 Jakarta Timur'. *Jurnal Kesejahteraan Keluarga dan Pendidikan*,(Online), 2(1), 6-9.
- Syukri, M. R., & Zulkarnain. (2005). Asertivitas dan Kreativitas Pada Karyawan yang Bekerja di Multi Level Marketing. *Jurnal Psikolog*, 1(2).
- Unal, S. (2012). Evaluating the effect of self-awareness and communication techniques on nurses' assertiveness and self-esteem. *Contemporary nurse*, 43(1), 90-98.
- Vangelisti, A. (2012). *The Routledge handbook of family communication*. In Lawrence Erlbaum Associates, Inc. <https://doi.org/10.4324/9780203848166>.
- William, C. (2008). Cognitive Behavior Therapy Within Assertive Outreach Team: Barriers to Implementation: a qualitative peer audit. *Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing*, 850-856



© 2020 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).



Konformitas Pada Pelaku Agresi Geng Motor Dalam Perspektif Psikologi Kelompok : Studi Kasus Di Kota Cirebon

Togiaratua Nainggolan^{1*}

¹ Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial; Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial; Kementerian Sosial Republik Indonesia, Jakarta

* Korespondensi: togiaratua@gmail.com ; Tel: +62 81382808511

Diterima : 17 April 2020; Disetujui: 3 Desember 2020; Diterbitkan : 28 Desember 2020

Abstrak: Perilaku geng motor sangat meresahkan masyarakat. Sebagai sebuah kelompok, individu dan kelompok geng motor saling mempengaruhi hingga *conform* melakukan tindakan agresif. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perilaku konformitas pada pelaku agresi geng motor di Kota Cirebon. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan *Focus Group Discussion* (FGD). Informan utama ditentukan secara purposif, terdiri dari lima orang pelaku agresi geng motor yang menjadi terpidana dan sedang ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Satu Cirebon. Informan penunjang diambil dari instansi terkait dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan konformitas pada pelaku agresi geng motor di Cirebon terjadi dalam bentuk *compliance* dan *obedience*. Konformitas bentuk *compliance* dilakukan secara terbuka sehingga terlihat oleh umum di internal geng (*accept*) walaupun hatinya tidak setuju, agar ia diterima dalam geng. Sedangkan konformitas dalam bentuk *obedience* dilakukan terhadap perintah pimpinan geng sebagai figur otoritas. Dinamika konformitas diawali dengan munculnya tekanan sosial menjadi variabel input yang memicu munculnya agresi yang berinteraksi dengan variabel input lainnya. Untuk itu, anggota geng motor harus disadarkan atas pengaruh tekanan sosial (*social pressure*) sehingga mampu menolak untuk *conform*. Sejalan dengan kesimpulan ini, pemerintah, terutama Dinas Sosial diharapkan mengambil inisiatif melakukan pembinaan secara umum atas geng motor dengan memperjelas status keorganisasian geng motor. Jika hal ini dilakukan, geng motor diharapkan tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang terkait, termasuk mempertimbangkan untuk memasukkan geng motor sebagai salah satu Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial sambil melakukan intervensi sosial yang bergerak ke hulu, dengan membina pola asuh keluarga anggota geng motor.

Kata kunci: Konformitas; Agresi; Geng Motor

Abstract: The behavior of motorcycle gangs is very horribly for surround them. As a group, individuals and motorbike gangs influence each other to conform to aggressive actions. This study aims to describe the conformity behavior of the motorcycle gang aggressors in Cirebon City. The research was conducted with a qualitative approach with case studies. Data collection was carried out by in-depth interviews and Focus Group Discussion (FGD). The main informant was determined purposively, consisting of five perpetrators of motorcycle gang aggression who were convicted and are being detained at the Cirebon First Class Correctional Institution. Other significant informants are chosen from related agencies and the community. The results showed that conformity to the biker gang aggression in Cirebon occurred in the form of compliance and obedience. Conformity in the form of compliance is carried out openly so that it is seen by the public in the internal gang (*accept*) even though honestly does not agree that he is accepted into the gang. Meanwhile, conformity in the form of obedience is carried out against orders from the gang leader as an authority figure. The conformity dynamic begins with the emergence of social pressure to become an input variable that triggers aggression that interacts with other input variables. For this reason, motorcycle gang members must be made aware of the influence of social pressure so that they are able to refuse to conform. In line with this conclusion, the government, especially the Social Agencies is expected to take the initiative to provide general guidance for motorcycle gangs by clarifying the organizational status of motorcycle gangs. If so, motorcycle gangs are expected to comply with the relevant laws and regulations. More than that, this case considered to be Persons with Social Welfare Problems. Then conducting social interventions in to root cause, by fostering family care patterns of motorcycle gang members.

Keywords: Conformity; Aggression; Motorcycle Gang.

1. Pendahuluan

Secara umum, aksi geng motor di Indonesia sangat meresahkan. Untuk Kota Cirebon, hal itu terlihat dari ungkapan tukang becak yang sering menyaksikan aktivitas geng di jalan-jalan yang menyatakan "... Wah itu *mah* ... kalau *udah* ketemu di jalan, kita *ngalah* aja pak. *Udah* orangnya banyak, jalan *asal-asalan*, bawa senjata lagi. Biar kita *gak* salah di jalan, kalau mereka merasa terganggu, ya tetap *aja* kita korban (Irmayani dkk, 2017).

Korban sering dibiarkan tergeletak di jalan-jalan oleh pelaku. Pertolongan bagi korban sangat ditentukan respon warga sekitar. Sementara ketika pihak kepolisian datang, pelaku sudah tidak ada di tempat. Pelaku sudah bubar dan polisi hanya menemukan korban dan jejak pelaku (Aryani, 2020).

Keberingasan geng motor ini terlihat dengan banyaknya anggota yang menjadi terpidana hingga menjadi penghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas Satu Cirebon. Saat penelitian ini dilakukan, tercatat 19 orang anggota geng motor menjadi penghuni Lapas Cirebon, dengan masa hukuman mulai dari 1 tahun 6 bulan hingga penjara seumur hidup.

Kejahatan yang dilakukan adalah (1) pembunuhan dan kekerasan di muka umum yang dilakukan secara bersama-sama; (2) pengeroyokan yang mengakibatkan meninggalnya korban; dan (3) penganiayaan dengan disertai perkosaan (Irmayani dkk, 2017).

Ini menggambarkan peningkatan aktivitas kejahatan geng motor di Kota Cirebon, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Dari 19 orang yang menjadi penghuni Lapas Kelas Satu Cirebon, 7 (tujuh) di antaranya dipenjara seumur hidup. Pada saat yang sama masih terdapat 16 orang anggota geng motor yang ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Negara Kelas I Cirebon, sedang dan atau akan menjalani proses peradilan. Selain tindak pidana, masih terdapat sejumlah kasus ringan seperti pelanggaran lalu lintas dan perusakan fasilitas umum.

Penjelasan di atas berarti bahwa geng motor antara lain hadir sebagai bentuk ekspresi diri anggotanya dalam kelompok. Selanjutnya interaksi sosial di dalam kelompok akan saling mempengaruhi. Sebagaimana dijelaskan oleh Sarwono (2001) perilaku individu dipengaruhi kelompok geng motor, dan begitu pula sebaliknya, termasuk munculnya perilaku agresi.

Baron & Byrne (2005) menjelaskan agresi adalah siksaan yang diarahkan secara sengaja dalam berbagai bentuk kekerasan kepada orang lain. Berdasarkan teori modern yang dikenal dengan model umum afektif agresi (*General Affective Aggression Model/GAAM*), agresi disebabkan oleh sejumlah variabel input melalui pengaruh masing-masing terhadap tiga proses dasar, yaitu (1) keterangsangan (*arousal*); (b) keadaan afektif (*affective states*); dan (c) kognisi (*cognitions*). Tiga proses dasar ini berlangsung dengan memperhitungkan proses belajar individu dalam arti luas.

Sebagai sebuah kelompok, geng motor mempunyai ruang lingkup perilaku kelompok yang sangat luas. Salah satu di antaranya adalah konformitas. Kiesler & Kiesler (dalam Sarwono, 2001) menjelaskan konformitas sebagai perubahan perilaku atau keyakinan karena adanya tekanan dari kelompok, baik yang sungguh-sungguh ada maupun yang dibayangkan saja. Lebih jauh Baron dan Byrne (2005) menjelaskan bahwa tekanan untuk melakukan konformitas berakar dari kenyataan bahwa dalam berbagai konteks ada aturan eksplisit ataupun tak terucap yang mengindikasikan bagaimana seharusnya anggota berperilaku. Aturan-aturan ini dikenal sebagai norma sosial. Pendapat yang senada dikemukakan oleh Fadilla (2013) yang menjelaskan bahwa semua tindakan kelompok akan dikuti individu agar dianggap sebagai bagian dari kelompok.

Sebaliknya, Hurlock (2011) menjelaskan konformitas terhadap kelompok terjadi karena adanya keinginan untuk diterima kelompok. Semakin tinggi keinginan individu untuk diterima secara sosial, semakin tinggi pula tingkat konformitasnya. Ada dua jenis konformitas; (1) Perilaku menurut (*compliance*) yang dilakukan secara terbuka sehingga terlihat oleh umum, walaupun hatinya tidak setuju. Kalau perilaku menurut ini dilakukan terhadap suatu perintah, namanya adalah ketaatan (*obedience*); dan (2) penerimaan (*accept*), yaitu konformitas yang disertai perilaku dan kepercayaan yang sesuai dengan tatanan sosial.

2. Metode

Berdasarkan penjelasan di atas, masalah dalam penelitian ini adalah “bagaimana gambaran perilaku konformitas pada—pelaku agresi geng motor di Kota Cirebon?”. Sejalan dengan permasalahan ini, maka tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan perilaku konformitas pada pelaku agresi geng motor di Kota Cirebon.

Untuk mencapai tujuan, penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif pada tahun 2017 berupa studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan *Focus Group Discussion* (FGD). Informan utama yang diwawancarai adalah pelaku agresi yang sekarang sudah menjadi terpidana hingga menjadi penghuni Lapas Kelas Satu Cirebon sebagai akibat dari aksi agresinya, yang terdiri dari 5 (lima) orang, yang dipilih berdasarkan kesediaan mereka, sekaligus sebagai perwakilan geng motor yang ada di Kota Cirebon saat penelitian ini dilakukan. Pemilihan informan utama ini sengaja dilakukan untuk memastikan bahwa yang bersangkutan benar anggota geng motor dan pelaku agresi, sesuai dengan keputusan pengadilan.

Selanjutnya hasil wawancara mendalam didukung dengan data hasil wawancara dengan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cirebon, pekerja sosial, tokoh agama dari Yayasan Assunah yang berpengalaman dalam penanganan anggota geng motor, Polres Cirebon, dan Badan Pemasyarakatan (Bapas) Cirebon.

Pada kesempatan lain diadakan FGD sebanyak dua kali. FGD pertama dilakukan di lingkungan Lapas Kelas Satu Cirebon melibatkan peserta dari pelaku agresi geng motor setelah terlebih dahulu meminta ijin dari pimpinan Lapas. FGD kedua dilakukan dengan melibatkan perwakilan instansi terkait dan masyarakat, khususnya masyarakat yang menjadi korban.

Untuk memperkuat validitas data, diadakan triangulasi metode dan traingulasi sumber data sebagaimana dimaksud oleh Moleong (2013). Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif berdasarkan rumusan permasalahan dan sesuai dengan rumusan tujuan penelitian.

3. Hasil

3.1. Deskripsi Umum

Kota Cirebon merupakan salah satu kota yang terletak di daerah pantai utara sekaligus menjadi bagian dari Provinsi Jawa Barat. Wilayah ini sangat strategis dan merupakan jalur utama transportasi darat dari Jakarta menuju Jawa Barat dan Jawa Tengah melalui daerah utara atau pantai utara (pantura).

Penduduknya mencapai 307.494 jiwa. Lebih dari separuh (50,85%) merupakan generasi muda. Pada waktu siang hari saat terjadi puncak aktivitas, jumlah penduduk bertambah hingga mencapai 1,5 hingga 2 juta jiwa, melonjak hingga lima kali lipat. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, menjelaskan situasi ini terjadi karena banyak warga dari luar yang mengadu nasib ke Kota Cirebon untuk urusan bisnis, pendidikan, hingga keperluan wirausaha. Angka pengangguran di Kota Cirebon masih tinggi. Data Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi mencatat jumlah pengangguran terbuka mencapai 9,06 persen.

3.2. Informan dan Peserta FGD

Informan utama dalam penelitian ini adalah anggota geng motor yang sedang menjalani hukuman di Lapas Kelas Satu Cirebon. Gambaran terhadap hal ini dapat dilihat dalam tabel 1.

Tabel 1. Daftar informan utama dan nama geng motor

No.	Initial	Jenis Kelamin	Usia (tahun)	Status Keluarga	Pnddkn	Pekerjaan	Nama Geng	Jabatan
1.	Mhdr	Laki-laki	38	Suami	SLTA	Wiraswasta	Moonraker (M2R)	Pemimpin
2.	Sgn	Laki-laki	25	Suami	SLTA	Serabutan	Exalt To Coitus	Anggota

Togiaratua Nainggolan

Konformitas Pada Pelaku Agresi Geng Motor Dalam Perspektif Psikologi Kelompok : Studi Kasus di Kota Cirebon

3.	Dn Ir	Laki-laki	23	Anak	SLTA	Serabutan	(XTC) Berigadir Seven (Brigez)	Anggota
4.	Jmg	Laki-laki	22	Anak	SMP	Pengangguran	Grab on Road (GBR)	Anggota
5.	Vf L	Laki-laki	21	Anak	SMP	Pengangguran	Konack	Anggota

Tabel di atas menunjukkan hanya satu informan yang berasal dari unsur pimpinan geng motor dengan pekerjaan wiraswasta. Selebihnya (empat orang lainnya) merupakan anggota biasa, dua di antaranya bekerja serabutan, dan dua orang lainnya masih pengangguran.

Dilihat dari status atau kedudukan di keluarga, dua di antaranya adalah suami yang mempunyai istri dengan dua orang anak. Sementara tiga lainnya adalah pemuda yang mempunyai orang tua lengkap, yang pada saat bergabung menjadi anggota geng masih remaja atau anak putus sekolah.

Tabel ini sekaligus menggambarkan bahwa di Cirebon terdapat lima geng motor, dengan perkiraan jumlah anggota berkisar antara 100 hingga 400 orang yang didominasi laki-laki, mulai dari remaja hingga dewasa dengan status keluarga sebagai anak hingga orang tua. Anggota ini masuk geng atas inisiatif sendiri dan atau diajak teman dan atau pengurus yang sudah terlebih dahulu bergabung dalam geng. Keanggotannya bersifat tidak tetap, kecuali untuk orang tertentu dilarang keluar dari keanggotaan geng karena dikhawatirkan akan menjadi ancaman bagi geng. Oleh sebab itu aturan main yang utama adalah semua anggota wajib menjaga "harga diri dan kehormatan geng".

Selain informan utama, terdapat informan penunjang. Gambaran terhadap hal ini dapat dilihat dalam tabel 2.

Tabel 2. Daftar informan penunjang dan asalnya

No.	Initial	Asal kelompok/lembaga	Keterangan
1.	Ahd	Tukang becak di pusat kota	Korban geng motor
2.	Anz	Karyawan Hotel	Korban geng motor
3.	Nas	Pedagang kali lima	Korban geng motor
4.	Ddh	Kabid Sosial Dinas Sosial, Pmberdaya Peremp. dan Perlindungan Anak	Instansi terkait
5.	Asp	Rutan Kelas I Cirebon	Instansi terkait
6.	G Snt	Polsus Lapas Kelas I Cirebon	Instansi terkait
7.	Imm Ah	Pembimbing Kemasyarakatan Bapas	Instansi terkait
8.	Gl W	Kasat Reskrim Polresta	Instansi terkait
9.	Asp Rh	Kasat Intel Polresta	Instansi terkait
10.	Asp	Yayasan/Pesantren Assunah	Instansi terkait
11.	ZPH	Masyarakat	Orang tua anggota geng
12.	ZIP	Masyarakat	Orang tua anggota geng

Tabel 2 di atas menunjukkan bahwa informan penunjang berasal dari orang atau lembaga yang terkait dengan fenomena geng motor, baik sebagai individu yang dikaitkan dengan keluarga maupun sebagai kelompok yang dikaitkan dengan aktivitasnya seperti instansi yang menangani dan orang lain sebagai korban. Informan tersebut juga dilibatkan sebagai peserta FGD berdasarkan kesediaan yang bersangkutan.

4. Pembahasan

4.1. Geng Motor Cirebon Sebagai Kelompok

Berdasarkan pengakuan lima informan utama dalam penelitian ini, geng motor yang diikuti dimaknai sebagai sebuah kelompok. Sesama anggota merasa saling terikat dan mempunyai tujuan

Togiaratua Nainggolan

Konformitas Pada Pelaku Agresi Geng Motor Dalam Perspektif Psikologi Kelompok : Studi Kasus di Kota Cirebon

bersama walau hal itu tidak tertulis. Pengakuan ini sejalan dengan penjelasan Lickel (dalam Baron dan Byrne, 2005) bahwa kelompok adalah sekumpulan orang yang dipersepsi terikat satu sama lain dalam sebuah unit yang koheren pada derajat tertentu. Derajat keterikatan itu dinamakan *entativity*.

Dalam hal ini kata kunci bagi geng sebagai kelompok adalah derajat keterikatan atau sejauh mana masing-masing anggota terikat dengan gengnya dan apa penyebabnya. Dalam hal ini, kelima informan utama mengaku bahwa derajat keterikatan anggota sangat bervariasi. Namun kelima informan utama ini mengaku sangat terikat hingga merasa sangat terganggu ketika tidak hadir dalam sebuah pertemuan atau kegiatan.

Sebagai sebuah kelompok, geng motor tidak bersifat formal sehingga tidak ditemukan anggaran dasar dan atau anggaran rumah tangga, struktur organisasi dan masa kepengurusan yang jelas. Personal kepengurusan lebih didasarkan pada kekuatan pengaruh figur otoritas dalam geng, kekuasaan, baik secara fisik, sosial politis, dan psikologis. Terkait aspek fisik, informan menjelaskan "di mata kami, bos kami *mah jagoan*, siap tempur *atuh*. Namanya juga panglima". Sedangkan secara sosial psikologis personal pengurus ini dikenal sebagai "tokoh yang ditakuti" di kota Cirebon.

Ia sangat disegani orang pak, termasuk oleh aparat. Walau kadang-kadang bentrok dengan anak buahnya di lapangan, *tapi ya ...* melalui bos, ada *aja* jalan keluarnya. Artinya bos kami tetap tanggung jawab. Kayak kita-kita *nih*, walau *udah* di penjara *tapi tetap diperhatiin*" kata Sgn yang dibenarkan oleh peserta lainnya dalam FGD pertama.

Secara eksternal, derajat keterikatan sesama anggota, geng motor di Cirebon terlihat sangat kohesif, terutama ketika berhadapan dengan musuh. Menanggapi hal ini, informan menjelaskan "kalau udah menyangkut nama dan kehormatan geng, nyawa pun dipertaruhkan pak. Semua turun membela. Soal ada korban, itu urusan nanti. Pokoknya begitu ada komando bos, maju terus". Penjelasan ini menunjukkan besarnya peran pimpinan geng motor sebagai figur otoritas yang menggerakkan konformitas anggota saat berhadapan dengan pihak eksternal yang dipersepsi dengan musuh bersama.

Sebaliknya secara internal, derajat keterikatan sesama anggota dalam geng yang sama sangat variatif. Ada yang merasa derajat keterikatannya rendah dan ada juga yang sangat tinggi. Mhdr merasa keterikatannya tinggi karena ia merupakan salah satu unsur pimpinan dalam gengnya. Informan Sgn dan Dn Ir merasa lebih terikat karena sudah lama menjadi anggota. Sedangkan Jmg dan Vf L merasa kurang terikat karena hanya anggota biasa dan masa keanggotaan masih relatif baru. Namun setelah informan menjadi penghuni Lapas, semua informan justru semakin terikat karena geng memberi perhatian pada mereka dan keluarganya. Lebih jauh tentang hal ini, informan Dn Ir menjelaskan:

Ya, kami berterimakasih sama teman kami di geng karena kami diperhatikan. Bukan hanya untuk kami yang di dalam (*maksudnya di penjara*), *tapi* keluarga juga. Teman geng sering *ngasih* duit dan bantu-bantu kalau ada urusan keluarga. Yah... kepentingan kita dan keluarga dibantu pak, walaupun tidak rutin.

Penjelasan ini mengindikasikan bahwa salah satu faktor kunci yang menjadi bagian dari *entativity* geng yang menyebabkan anggota terikat adalah manfaat yang dirasakan yang dikaitkan dengan status atau kedudukannya di kelompok, lama keanggotaan, dan jaminan atas kepentingan anggota geng. Persepsi tentang manfaat itu muncul di awal ketika seorang anggota geng atau lebih merekomendasikan gengnya dengan menceritakan beberapa keuntungan yang akan diperoleh jika bergabung dalam geng motor. Terdorong rasa penasaran atas cerita ini, seseorang mulai ikut-ikutan sebagai peninjau hingga akhirnya menyatakan diri bergabung.

Beberapa manfaat yang diperoleh tercermin dari pengakuan informan. Selaku unsur pimpinan Mhdr mengaku semakin memperoleh akses ekonomi hingga mempunyai usaha kecil-kecilan.

Mulanya hanya jual pulsa pak, *trus* jual Hp bekas. Jalan *aja gitu* pak, *gak* ada kiosnya. Dari mulut ke mulut *aja*. *Trus* punya kios kecil. Sedikit demi sedikit berkembang. Jual pulsa, asesoris, hp bekas dan Hp baru. Hp barunya titipan dari toko Hp lain. Pelanggannya ya itu, teman-teman kita di geng. Hasilnya ya... lumayan *atuh*. Berhubung saya lagi *kost* di sini, sekarang *diterusin* sama istri.

Sign dan Dn Ir yang bekerja serabutan merasa memperoleh tambahan informasi pekerjaan dari teman-temannya sesama anggota geng. Sign menjelaskan "saya sering dapat informasi *orderan* dari teman geng ini pak. Jadi biar *serabutan tapi nyambung* terus pak. Jadi jarang *ngganggur*. Kalo pun *ngganggur* ya *gak* lama-lama amat pak". Hal yang senada ditegaskan oleh Dn Ir.

Jmg dan VfL yang masih mengganggur mengaku memperoleh tambahan jajan ketika mengikuti kegiatan geng. Jmg menjelaskan "*kalo* kami ikut acara, biasanya ada duitnya pak. Lumayan buat rokok pak". Sementara VfL mengaku bahwa di dalam geng kebutuhan mereka terpenuhi berkat solidaritas sesama anggota, termasuk kebutuhan makan dan rokok. Dengan pertimbangan ini mereka sangat loyal kepada gengnya.

Loyalitas tersebut sejalan dengan penjelasan Forsyth (dalam Klara Innata Arishanti, 2005) tentang alasan seseorang masuk kelompok, seperti (a) pemuasan kebutuhan-kebutuhan psikologis (mis: rasa aman, cinta); (b) meningkatkan ketahanan yang adaptif; dan (c) kebutuhan akan informasi. Dalam hal ini, informan merasa memperoleh pemenuhan kebutuhan ekonomi dan rasa aman berupa perlindungan dari geng, ketahanan yang adaptif sehubungan citra geng yang disegani bahkan ditakuti masyarakat, dan informasi tentang berbagai hal.

Namun loyalitas tersebut tercoreng karena geng motor memperoleh citra negatif di mata masyarakat. Citra negatif ini dikaitkan dengan aktivitas geng yang sering meresahkan, bahkan melukai kenyamanan masyarakat dengan tindakan yang mengarah pada kekerasan hingga menimbulkan korban. Dalam ilmu psikologi, kekerasan dimaksud disebut dengan agresi, yaitu tingkah laku yang diarahkan untuk menyakiti makhluk hidup lain yang ingin menghindari perlakuan semacam itu (Baron & Byrne, 2005)

4.2. Agresi Geng Motor Cirebon

Sebagaimana halnya dengan situasi di daerah lain, aksi geng motor di Cirebon dan sekitarnya sangat meresahkan. Bahkan bagi kalangan tertentu, geng motor sangat menakutkan hingga mengalami trauma setelah melihat anggota keluarganya yang pernah menjadi korban.

Secara umum aktivitas geng motor dapat dibedakan atas tiga kategori, yaitu (a) *ngumpul-ngumpul* (kegiatan berkumpul); (b) konvoi jalanan (sambil naik motor ramai-ramai); dan (c) bakti sosial. Acara *ngumpul-ngumpul* paling sering dilakukan. Dalam sebulan dilakukan minimal satu atau dua kali. Konvoi jalanan dilakukan sesuai kebutuhan, dan biasanya dilakukan dengan persetujuan pimpinan. Sedangkan bakti sosial biasanya dilakukan pada Bulan Ramadhan menjelang lebaran sesuai dengan kegiatan ibadah keagamaan. Gambaran tentang lokasi *ngumpul-ngumpul* ini dapat dilihat dalam table 3 berikut.

Tabel 3. Lokasi Nonkrong Geng Motor di Kota Cirebon

No.	Nama Geng Motor	Lokasi Nongkrong	Keterangan
1	XTC	<ul style="list-style-type: none"> ○ Depan gedung BAT ○ Lapangan Bima ○ Pintu masuk Perum GSP Majasem ○ Warung depan SMPN 4 Jl Perjuangan ○ Warung di Perum Pembangunan 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Lokaasi dipilih berdasarkan salah satu atau lebih lebih pertimbangan berikut : <ul style="list-style-type: none"> • Tidak menjadi tempat nongkrong geng lain. • Ada warung yang bisa menerima kehadiran geng.
2	GBR	<ul style="list-style-type: none"> ○ Kawasan Keraton Kanoman ○ Taman Krucuk depan Bank BTN ○ Astana Garib Selatan ○ Lapangan voli Taman Kalijaga Permai 	

3	Brigaz	○ Berpindah-pindah	• Biasanya tempat dipilih yang agak gelap
4	Monreker	○ Depan Hotel Bentani Jl Siliwangi	• Masyarakat seputar dinilai permisif atau takut sama geng
		○ Monumen Kereta St Kejaksan	
		○ Alfamart depan SMK Kedawung	
5	Konack	○ Sepanjang Jl Drajat	
		○ Taman Banjar Wangunan	
		○ Warung makan Gg Sukasari V	
		○ Parkir Bus PT ARIDA	

Dari tiga jenis aktivitas ini, yang paling sering menjadi pemicu agresi adalah kegiatan *ngumpul-ngumpul* sambil ngobrol dan konvoi jalanan. Kegiatan *ngumpul-ngumpul* sambil ngobrol berlangsung tanpa agenda yang resmi. Sejumlah anggota *ngumpul* membicarakan berbagai hal dalam konteks *ngobrol*, *ngeluh* dan atau *curhat* dari satu materi ke materi yang lain dalam ruang lingkup kepentingan, permasalahan, dan kebutuhan anggota geng secara individu dan atau kelompok. Inilah proses awal terjadinya agresi yang mengikuti beberapa pola atau mekanisme, seperti :

- a. Pimpinan geng mengambil inisiatif membicarakan masalah atau kepentingan geng sebagai kelompok, hingga anggotanya menunjukkan solidaritasnya untuk bergerak menindak target sasaran. Ketika *ngumpul-ngumpul* ada urusan individu anggota yang menjadi perhatian banyak anggota geng. Urusan ini dapat menjadi urusan geng terutama jika dikaitkan dengan nama baik dan kehormatan geng. Dalam situasi ini, urusan yang semula murni bersifat individu, akan berubah menjadi urusan bersama dalam geng, terutama jika urusan ini ada kaitannya dengan geng lain yang dianggap sebagai musuh.

“Nah... kalau udah gitu *tuh...* geng akan turun pak. Bos ambil alih *tuh* urusan, semua anggota yang ada siap bertindak. Kalau bos suruh turun semua, semua akan turun. *Tapi* bisa juga dibatasi, misalnya cukup sepuluh atau dua puluh. Kita akan cari itu siapa yang menjadi target kita. Kalau orangnya *gak* ketemu, bisa jadi keluarga dan harta bendanya jadi sasaran, begitu pak”, demikian pengakuan Jmg.

- b. Acara *ngumpul-ngumpul* tidak menghasilkan kesepakatan untuk menindak seseorang atau kelompok. Namun dalam perjalanan pulang yang dilakukan dalam bentuk konvoi di jalan raya, muncul agresi ketika geng merasa terganggu oleh orang lain, atau ada kebutuhan mereka yang tidak terpenuhi.

“Yang paling sering sih, ada yang menghalangi perjalanan di jalan raya. Udah dikekson, tidak cepat-cepat *minggir*. Bisa juga kita lihat reaksinya nggak enak. Pernah juga beli rokok pinggir jalan, *tapi* uang nggak cukup. Karena penjual *ngomel*, ya udah warungnya kami rusak. Ya begitu pak, namanya juga massa” kata informan Sgn.

- c. Diluar kegiatan *ngumpul-ngumpul*, anggota geng selaku individu membawa nama geng dalam urusannya dengan cara melibatkan beberapa anggota lain tanpa sepengetahuan atau persetujuan pimpinan. Pada akhirnya, sebagian besar kegiatan ini ketahuan juga ke pimpinan. Namun dalam banyak kasus, pimpinan memakluminya sepanjang dinilai tidak mengorbankan nama dan kehormatan geng.

4.3. Perilaku Konformitas Pelaku Agresi Geng Motor Cirebon

Sebagaimana dijelaskan oleh Baron & Byrne (2005) konformitas merupakan fakta dasar dalam kehidupan sosial. Sebagian besar manusia melakukannya agar ia diterima dalam kelompoknya. Demikian halnya dengan anggota geng. Anggotanya *conform* dengan kemauan kelompok sesuai dengan norma yang berlaku di dalam geng itu. Hal ini sejalan dengan pengakuan informan yang menjelaskan “ya... kita-kita ini *ngikut* geng pak, ya...ikut aturanlah. Aturannya ya menjaga nama baik dan kehormatan geng kita. Termasuk ikut apa kata bos lah. Yak *kan* pak?”.

Walau aturan main di geng tidak tertulis, namun hal itu sejalan dengan penegasan Anwar (2013) yang menjelaskan bahwa :

Togiaratua Nainggolan

Konformitas Pada Pelaku Agresi Geng Motor Dalam Perspektif Psikologi Kelompok : Studi Kasus di Kota Cirebon

...tekanan untuk melakukan konformitas terkait dengan solidaritas kelompok, dan berakar dari kenyataan bahwa di berbagai konteks ada aturan eksplisit ataupun tak terucap yang mengindikasikan bagaimana kita seharusnya atau sebaiknya bertingkah laku. Aturan-aturan ini dikenal sebagai norma sosial (*social norms*) dan aturan-aturan ini seringkali menimbulkan efek yang kuat pada tingkah laku kita.

Berdasarkan pengakuan informan dalam wawancara dan FGD pertama dan kedua, aturan main di geng hanya menjelaskan agar anggota menjaga nama baik dan kehormatan geng. Namun secara implisit, aturan itu lebih menekankan loyalitas atau solidaritas anggota kepada pimpinan. Sementara otoritas untuk menentukan definisi operasional dan ukuran loyalitas itu sendiri mutlak dipegang pimpinan sebagai figur otoritas. "Nah... itu dia pak, loyal atau tidak, itu hanya bos yang tahu pak, jadi kita juga harus bisa memahami apa maunya bos kita" demikian pengakuan informan dan peserta FGD.

Ketika nama baik dan kehormatan geng dinilai tercemar atau terancam, saat itu juga pimpinan memerintahkan anggota untuk maju membelaanya. Dalam hal ini cara yang ditempuh untuk menegakkan nama baik dan kehormatan itu adalah melakukan agresi, berupa tindak kekerasan terhadap target sasaran.

Pertanyaannya adalah, kenapa anggota serta merta ikut (*conform*) melakukan agresi?. Seluruh informan utama mengakui hal itu sebagai konsekuensi dari keanggotaan di geng. "Kami sudah tahu itu sejak awal pak. Pas mau gabung, kami diopspek (*maksudnya semacam uji nyali*) dulu pak. Waktu itu kami sudah dikasih tahu itu. Jadi harus siap terjun pak". Penjelasan senada ditambahkan informan lain dengan mengatakan:

Bagi anggota yang tidak mau turun, ya diopspek lagi pak, dan saat itu juga anggota lain akan mengolok-olok dia dengan sebutan yang macam-macam. Ada yang bilang pengecutlah, penakut, pengkhianat, dan lain-lain. Belum lagi hukuman dari bos pak. Jadi karena sudah diberitahu sejak awal, kita sudah *kebayang* pak, apa yang harus kita alami *kalo nolak* turun.

Penjelasan ini sekaligus memperjelas ulasan Kiesler & Kiesler (dalam Sarwono, 2001) yang mengemukakan bahwa "konformitas adalah perubahan perilaku atau keyakinan karena adanya tekanan dari kelompok, baik yang sungguh-sungguh ada maupun yang dibayangkan saja". Walaupun secara individu, anggota geng tidak berkenan melakukan agresi karena bertentangan dengan keyakinan dan nuraninya, namun karena pengaruh tekanan kelompok di geng, individu tersebut berubah hingga ikut serta (*conform*) melakukan agresi. Tekanan yang sungguh-sungguh itu terkait dengan adanya aturan eksplisit untuk menjaga nama baik dan kehormatan geng. Sementara tekanan yang dibayangkan terkait dengan pemahaman anggota atas konsekwensi melawan aturan, perintah, selera dan gaya kepemimpinan bos dalam persepsi masing-masing anggota geng.

Penjelasan ini sekaligus mengakui dua poin penting yang menjadi motif utama dalam konformitas, yaitu (a) keinginan anggota untuk diterima dalam kelompoknya; dan (b) keinginan untuk merasa benar (Baron & Byrne, 2005). Dua motif ini terlihat dalam agresi geng di Cirebon, walaupun sulit dipisahkan satu sama lain. Keinginan anggota untuk diterima dalam geng muncul sebagai akibat pengaruh norma (pengarus sosial normatif) yang berlaku dalam kelompok (geng) itu, sekaligus sebagai bagian dari proses penyesuaian diri anggota atas kelompoknya. Semua informan menekankan bahwa mereka ingin diterima di geng sekaligus menghindari penolakan. Untuk itu mereka berusaha merespon dengan baik apa yang menjadi keinginan bersama anggota geng, terutama pimpinan. Keinginan itu kadang tidak terbuka secara eksplisit, tetapi diketahui berdasarkan informasi yang beredar di dalam geng dari satu anggota ke anggota lain (pengaruh sosial informasional).

Penjelasan ini, senada dengan pendapat Sarwono (2001) yang mengemukakan ada dua jenis konformitas; (a) perilaku menurut (*compliance*) yang dilakukan secara terbuka sehingga terlihat oleh umum, walaupun hatinya tidak setuju. Kalau perilaku menurut ini dilakukan terhadap suatu perintah, namanya adalah ketataan (*obedience*); dan (b) penerimaan (*accept*), yaitu konformitas yang

disertai perilaku dan kepercayaan yang sesuai dengan tatanan sosial. Dalam hal ini tatanan sosial yang dimaksud adalah tatanan sosial yang berlaku di dalam geng.

Ketika informan utama dikumpulkan di lapas dalam FGD, secara tidak langsung mereka mengakui bahwa sesungguhnya yang dilakukan selama ini lebih mengarah kepada komformitas dalam bentuk *compliance* dan *obedience*. Ini tercermin dari pernyataan informan yang menyatakan :

"Maaf pak, sejurnya, kami bertindak menurut aturan dan kemauan kelompok *aja* pak. Jadi kami *ngikut* aturan *aja*. Kalo hati nurani *mah sering nolak atuh*. Cuma gimana lagi yah... kita senang *aja* bertindak *rame-rame* dilihat orang banyak, dan yang terpenting taat sama bos kita pak. Ada kepuasan terendiri juga. Senang melihat orang ketakutan melihat kehadiran kita. Rasanya diri kami jadi punya arti, dan dipercaya bos gitu pak".

Berdasarkan teori modern yang dikenal dengan model umum afektif agresi (*general affective aggression model*), agresi disebabkan oleh sejumlah variabel input melalui pengaruh masing-masing terhadap tiga proses dasar, yaitu (1) keterangsangan (*arousal*); (b) keadaan afektif (*affective states*); dan (c) kognisi (*cognitions*). Tiga proses dasar ini berlangsung dengan memperhitungkan proses belajar individu dalam arti luas. Tiga proses dasar ini terjadi dalam agresi geng motor ini dalam konteks konformitas. Secara deskriptif, proses dasar itu diawali dengan terjadinya keterangsangan (*arousal*) dalam bentuk amarah dalam diri anggota dan didukung oleh kognisi atau pengetahuan yang bersumber dari informasi tentang pihak yang melecehkan geng atau individu geng hingga muncul afeksi negatif yang bermuara pada perilaku mengejar target sasaran agresi.

4.4. Implikasi Kesejahteraan Sosial

Gangguan atas kesejahteraan sosial berupa keresahan mayarakat atas keberadaan geng motor di Cirebon terlihat dari pernyataan peserta FGD kedua yang mengatakan :

"...puncak dari kebrutalan geng motor di Cirebon terlihat dari jatuhnya korban dari anak polisi dan tentara. *Kebayang gak pak?*, *kalo* bapak nggak percaya silahkan cek beritanya di internet, banyak beritanya pak. Pokoknya keterlaluan pak, biadab".

Demikian penegasan dari peserta FGD dari kelompok korban yang dibenarkan oleh peserta lainnya. Ternyata beritanya muncul dengan judul "Ngeri! Geng Motor di Cirebon Bunuh Anak Polisi dan Perkosa Pacar Korban" (Masnurdiansyah, 2016) dan "TNI Jadi Korban Geng Motor di Cirebon (Sanusi, 2014). Bahkan ada berita "Kapolda Jawa Barat : 50 Persen Pelaku Kejahatan Geng Motor Berstatus Pelajar (Handayani dan Hermawan, 2016).

Serasa belum puas dengan pernyataan temannya, seorang peserta FGD dari unsur masyarakat menyatakan bahwa "...perbuatan geng motor di Cirebon sudah melewati batas kemanusiaan. Terus terang Cirebon sudah tidak aman pak". Menanggapi pernyataan tersebut, beberapa peserta FGD yang mewakili lembaganya memberikan pendapat sebagai berikut.

4.4.1 Keluarga

Keluarga anggota geng mengaku awalnya tidak tahu anaknya masuk geng motor. Setelah mengetahuinya, keluarga tidak mampu berbuat untuk mencegahnya. Bahkan sebagian di antaranya mengaku tidak mengetahui kasus yang sesungguhnya terjadi hingga anaknya masuk penjara.

"Pengakuannya tidak begitu pak. Kalau mau keluar katanya mau ketemu teman, mana tahu ada pekerjaan. Gitu pak. Jadi kita percaya *aja*. Memang begitu pulang sering juga bawa uang *dikit-dikit*. Kita pikir, paling tidak lepas buat dirinya sendiri pak. Dari pada dia di rumah terus nggak karu-karuan".

Ketika ditanyakan soal pola asuh dalam keluarga, dengan polos mereka mengatakan "Mereka *kan* sudah besar pak, sudah bisa urus diri sendiri". Penjelasan ini mengisyaratkan bahwa keluarga

cenderung permisif terhadap anaknya hingga fungsi kontrol keluarga dalam pola asuh tidak berjalan efektif.

4.4.2 *Kepolisian, Rutan, Bapas dan Lapas*

Kepolisian, Rutan, Bapas dan Lapas mengaku secara terbuka bahwa mereka hanya terlibat secara terbatas dalam penanganan geng motor, terutama ketika geng motor terlibat dalam kasus hukum seperti terindikasi pidana atau kriminalitas. "Namun secara normatif, sebagai bagian dari masyarakat kami tetap berusaha membuat yang terbaik demi kepentingan masyarakat banyak", demikian pengakuan peserta diskusi dan informan yang dikemukakan saat diskusi dan wawancara. Masing-masing pihak memanfaatkan peluang yang ada untuk pembinaan geng motor. Kepolisian mengadakan sosialisasi dalam konteks pelayanan dan bimbingan masyarakat. Pihak Balai Pemasyarakatan (Bapas) membina dalam fungsinya sebagai pembimbing kemasyarakatan. Sementara Lapas membimbing mereka ketika mereka menjadi bagian dari warga binaan pemasyarakatan (penghuni Lapas ketika menjalani masa hukuman).

Sejalan dengan keterbatasan ini, Polresta Cirebon berharap ada regulasi yang jelas, pasti dan operasional atas penanganan kasus ini. Dalam hal ini, mereka mengungkapkan keluhannya dengan mengatakan bahwa sejauh ini kami hanya sebatas bekoordinasi dengan pekerja sosial dari Dinas Sosial. Sementara Dinas Sosial pun masih mengalami keterbatasan. Hal yang sama terjadi dengan pihak Bapas", demikian penjelasan salah satu staf intel.

4.4.3 *Yayasan/Pesantren Assunah*

Yayasan atau pesantren Assunah menjalankan tiga kegiatan utama, yaitu dakwah, pendidikan dan sosial. Kegiatan sosial meliputi penyembelihan hewan kurban, khitanan massal, donor darah, bakti sosial, penyaluran bantuan bencana alam dan pembagian buku-buku keislaman untuk perpustakaan.

Dari sejumlah kegiatan ini, pihak pengelola yayasan berusaha melibatkan anggota geng motor, dalam beberapa kegiatan sesuai minat mereka. Namun tingkat partisipasinya masih sangat rendah. Berdasarkan pengamatan pihak pesantren, sesungguhnya persoalan utama mereka ada di keluarga. "Mereka seperti kehilangan figur teladan, gak bisa *curhat*, dan tanpa kelekatan (*attachment*). Kalau gak ketemu orang tuanya, gak dicari pak, kecuali kalau minta duit pak", demikian penjelasan salah seorang pengurus Yayasan Assunah. Ketiadaan figur utama dalam keluarga, menyebabkan mereka dengan mudah terseret (*conform*) dengan arus sosial yang kebetulan bersinggungan dengan mereka, yaitu geng motor.

4.4.4 *Dinas Sosial*

Pihak Dinas Sosial yang diwawancara mengaku dengan jujur keterbatasan mereka secara kelembagaan dengan mengatakan :

"Kami agak susah terlibat langsung dalam penanganan geng motor pak. Soalnya itu tidak masuk manjadi tugas pokok kami di Dinas ini. Kalaupun kami terlibat dalam penanganan, itu hanya sebatas menangani anak yang kebetulan terlibat dalam geng motor melalui anak berhadapan dengan hukum. Ya itu ABH pak".

Lebih jauh, Dinas Sosial mengharapkan adanya regulasi yang jelas sebagai payung hukum, baik pada tingkat pusat di tingkat Kementerian Sosial RI maupun di daerah melalui Dinas Sosial Provinsi dan Kota. Mereka berharap agar geng motor dimasukkan menjadi bagian dari Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) baru.

Ini berarti bahwa secara kelembagaan, belum ada instansi yang secara resmi bertanggung jawab menangani geng motor di Cirebon walau sudah meresahkan masyarakat. Dalam sesi diskusi muncul saran agar Dinas Sosial mengambil inisiatif menjadikannya bagian dari PMKS dengan memprakarsai perumusan regulasi terkait sehingga mempunyai legalitas yang memadai sebagai dasar hukum.

Jika legalitas instansi yang akan menangani sudah jelas, persoalan utama yang harus dijawab adalah bagaimana agar anggota geng motor tidak *conform* melakukan agresi. Untuk itu, anggota geng motor harus disadarkan atas pengaruh tekanan sosial di dalam geng motor sebagaimana dijelaskan oleh Harususilo (2018) yang mengatakan bahwa manusia dalam kelompok sosial, termasuk di media sosial sering mengalami tekanan (*social pressure*). Tekanan sosial ini senjata paling ampuh membuat individu mengikuti atau menjadi *conform*, meski awalnya tidak setuju.

Mengacu pada teori GAAM, tekanan sosial dimaksud akan menjadi variabel input yang memicu munculnya agresi. Variabel input ini akan berinteraksi dengan variabel input lainnya seperti rasa frustasi anggota geng motor yang kehilangan figur teladan di keluarga, pemaparan terhadap tingkah laku agresif yang sering dialami, munculnya tanda-tanda yang berhubungan dengan agresi (seperti senjata) dan situasi sosial yang menyebabkan individu mengalami ketidaknyamanan. Variabel lainnya adalah sikap individual yang mendorong individu untuk melakukan agresi (sifat mudah marah), *belief* anggota geng motor bahwa membela kehormatan dan nama baik geng merupakan kebanggaan tersendiri.

Rasa frustrasi terjadi atas kondisi keluarga yang dipersepsikan tidak mampu memenuhi kebutuhan anak hingga mencari dan menemukan pemenuhannya dalam geng motor. Pemaparan atas tingkah laku agresi terjadi dengan seringnya melihat perilaku sesama anggota geng motor melakukan agresi hingga hal itu dianggap hal yang biasa bagi mereka. Sedangkan situasi yang tidak nyaman terjadi ketika anggota geng motor merasa diganggu pihak lain ketika konvoi atau menemukan pihak merintangi kegiatan geng. Dalam konteks ini anggota lain menjadi *conform* (seakan-akan otomatis) mengikuti inisiatör untuk bertindak agresif.

Keadaan afektif, terutama dikaitkan dengan afek negatif anggota geng di satu sisi, berhadapan dengan pihak yang dinilai sebagai lawan di sisi lain, yang kemudian menimbulkan keterangsangan (*arousal*) mengingat dalam kognisinya sudah tersimpan pengetahuan untuk bertindak agresif berdasarkan pemaparan yang diperoleh sebelumnya.

Pada tingkat yang lebih makro, pemerintah sebaiknya mengambil inisiatif pembinaan terhadap geng motor dengan terlebih dahulu menjadikannya sebagai organisasi sosial dan atau organisasi kepemudaan sehingga mengikat perilaku mereka karena harus tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan status organisasinya.

5. Kesimpulan

Konformitas pada pelaku agresi geng motor di Cirebon terjadi dalam bentuk *compliance* dan *obedience*. Konformitas bentuk *compliance* dilakukan secara terbuka sehingga terlihat oleh umum di internal geng (*accept*) walaupun hatinya tidak setuju agar ia diterima dalam geng. Sedangkan konformitas bentuk *obedience* dilakukan terhadap perintah pimpinan geng sebagai figur otoritas.

Anggota melakukan agresi karena tekanan sosial dari geng sebagai kelompok, baik tekanan sosial yang sungguh-sungguh maupun yang dibayangkan saja. Tekanan yang sungguh-sungguh adalah tuntutan loyalitas membela nama baik dan kehormatan geng, walaupun ukuran nama baik dan kehormatan itu terserah pimpinan geng. Sementara tekanan sosial yang dibayangkan adalah bayangan hukuman yang kelak akan dijalani jika anggota tidak *conform* dengan kemauan geng untuk bertindak agresi.

Dinamika konformitas diawali dengan munculnya tekanan sosial menjadi variabel input yang memicu munculnya agresi yang berinteraksi dengan variabel input lainnya seperti rasa frustasi anggota geng motor yang kehilangan figur teladan di keluarga, pemaparan terhadap tingkah laku agresi yang sering dialami, munculnya tanda-tanda yang berhubungan dengan agresi (seperti senjata) dan situasi sosial yang menyebabkan individu mengalami ketidaknyamanan. Hal ini didukung oleh variabel sifat individu untuk gresi (sifat mudah marah), dan *belief* bahwa membela kehormatan dan nama baik geng merupakan kebanggaan tersendiri.

6. Saran

Anggota geng motor harus disadarkan atas besarnya pengaruh tekanan sosial (*social pressure*) kelompoknya sehingga mampu menolak *conform* untuk melakukan agresi. Upaya penyadaran ini harus dilakukan secara sinergis antara semua pihak, terutama keluarga, pemerintah dan unsur terkait lainnya.

Pemerintah daerah diharapkan segera mengambil inisiatif membangun koordinasi semua pihak sehingga tercipta keterpaduan dalam penanganan geng motor. Keterpaduan langkah penanganan ini hendaknya diarahkan agar anggota geng motor berani mengambil sikap non-conform atau menolak tekanan sosial untuk bertindak agresif.

Pada saat yang bersamaan Pemerintah Daerah juga harus melakukan pembinaan secara umum atas geng motor dengan memperjelas status keorganisasian geng motor (misalnya masuk menjadi organisasi social atau kepemudaan) sehingga tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Khusus kepada Dinas Sosial Kota Cirebon perlu mempertimbangkan untuk memasukkan geng motor sebagai salah satu PMKS dengan membuat inisiatif Peraturan Daerah, sambil tetap bergerak ke hulu membina pola asuh keluarganya memanfaatkan program keluarga lainnya.

Ucapan terimakasih: Penulis menyampaikan penghargaan dan terimakasih kepada Pak Sugiyanto dan semua pihak yang terlibat dalam proses penelitian, pengelola Jurnal Sosio Konsepsia, hingga tulisan ini terbit.

Daftar Pustaka

- Anwar, H. (2013) Konformitas Dalam Kelompok Teman Sebaya (Studi Kasus Dua Kelompok Punk Di Kota Makassar). Makassar : Jurusan Antropolog Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Hasanuddin
- Aryani, A, N. (2020) Dua Geng Motor 'Tempur' di Jalanan Cirebon, Korban Tewas dan Kritis Dibarkan Bergeletakan. https://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/pr-01330204/_dua-_geng-motor-tempur-di-jalanan-cirebon-korban-tewas-dan-kritis-dibarkan-bergeletakan (Diakses 9 Nopember 2020)
- Fadila, R. (2013). Hubungan Identitas Sosial Dengan Perilaku Agresif Pada Geng Motor. Psikologia, Vol. 8, No. 2, hal. 73-78. Medan : Fakultas Psikologi Universitas Sumatera Utara.
- Irmayani, N, R., Susantyo, B., Mujiyadi, B., Sitepu, A., Nainggolan, T., Sugiyanto, Sabarisman, M. (2017). Fenomena Geng Motor: Studi di Beberapa Kota di Jawa Barat. Jakarta : Puslitbangkesos-Kementerian Sosial RI.
- Arishanti, K. I. (2005). Handout Psikologi Kelompok. Jakarta : Fakultas Psikologi Universitas Gunadarma. Hal .
- Asep (2017). Siang Hari Jumlah Penduduk Kota Cirebon Melonjak 5 Kali Lipat, Ini Alasannya. <http://www.Cirebontrust.com/siang-hari-jumlah-penduduk-kota-cirebon-melonjak-5-kali-lipat-ini-alasannya.html>, diakses tgl 30 Agustus 2017.
- Baron, R, A. & Byrne, D. (2005). Psikologi Sosial (Jilid 2). Jakarta: Erlangga
- Dinsosnakertrans. (2016) Jumlah Pengangguran di Kota Cirebon Cukup Memprihatinkan. <http://www.Radar.cirebon.com/jumlah-pengangguran-di-kota-cirebon-cukup -memprihatin kan .html>, diakses tgl 30 Agustus 2017.
- Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (2017) (2019).*Pengangguran di Kota Cirebon Turun Jadi 9,06 Persen*. Cirebon :<https://www.Radar.cirebon.com/ angka-pengangguran-di-kota-cirebon-turun-jadi-906-persen.html>, diakses tgl 31 Juli 2019.
- Handayani, L & Hermawan, B. (2016). Polda Jabar: 50 Persen Pelaku Kejahatan Geng Motor Berstatus Pelajar. <https://www.republika.co.id/> berita/nasional /daerah/ 16/09/ 20/ odszy0354-polda-jabar-50-persen-pelaku-kejahatan-geng-motor-berstatus-pelajar,diakses tanggal 27 Agustus 2019.
- Harususilo, Y, E. (2018). Tekanan Sosial Hampir Selalu Mempengaruhi Setiap Keputusan Kita. <https://edukasi.kompas.com/read/2018/08/20/15553111/tekanan-sosial-hampir-selalu-mempengaruhi-setiap-keputusan-kita?page=all>, diakses tgl 2 April 2020.
- Hurlock, B, E. (2011). Psikologi Perkembangan . Jakarta: Erlanga
- Masnurdiansyah. (2016) Ngeri! Geng Motor di Cirebon Bunuh Anak Polisi dan Perkosa Pacar Korban. https://news.detik.com/berita/d-3289267/ngeri-geng-motor-di-cirebon-bunuh-anak-polisi-dan-perkosa-pacar-korban?_ga=2.64810282.486702735.1494580609-1949263078.147444774z , diakses tanggal 27 Agustus 2019.
- Moleong, L, J. (2013). Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Togiaratua Nainggolan
Konformitas Pada Pelaku Agresi Geng Motor Dalam Perspektif Psikologi Kelompok : Studi Kasus di Kota Cirebon

Sanusi. (2014). TNI Jadi Korban Geng Motor di Cirebon. <https://www.tribunnews.com/regional/2014/02/03/tni-jadi-korban-geng-motor-di-cirebon>. TNI Jadi Korban Geng Motor di Cirebon. <https://www.tribunnews.com/regional/2014/02/03/tni-jadi-korban-geng-motor-di-cirebon>, diakses tanggal 27 Agustus 2019.

Sarwono, S, W. (2001). Psikologi Sosial :Psikologi Kelompok dan Terapan. Jakarta : Balai Pustaka



© 2020 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).